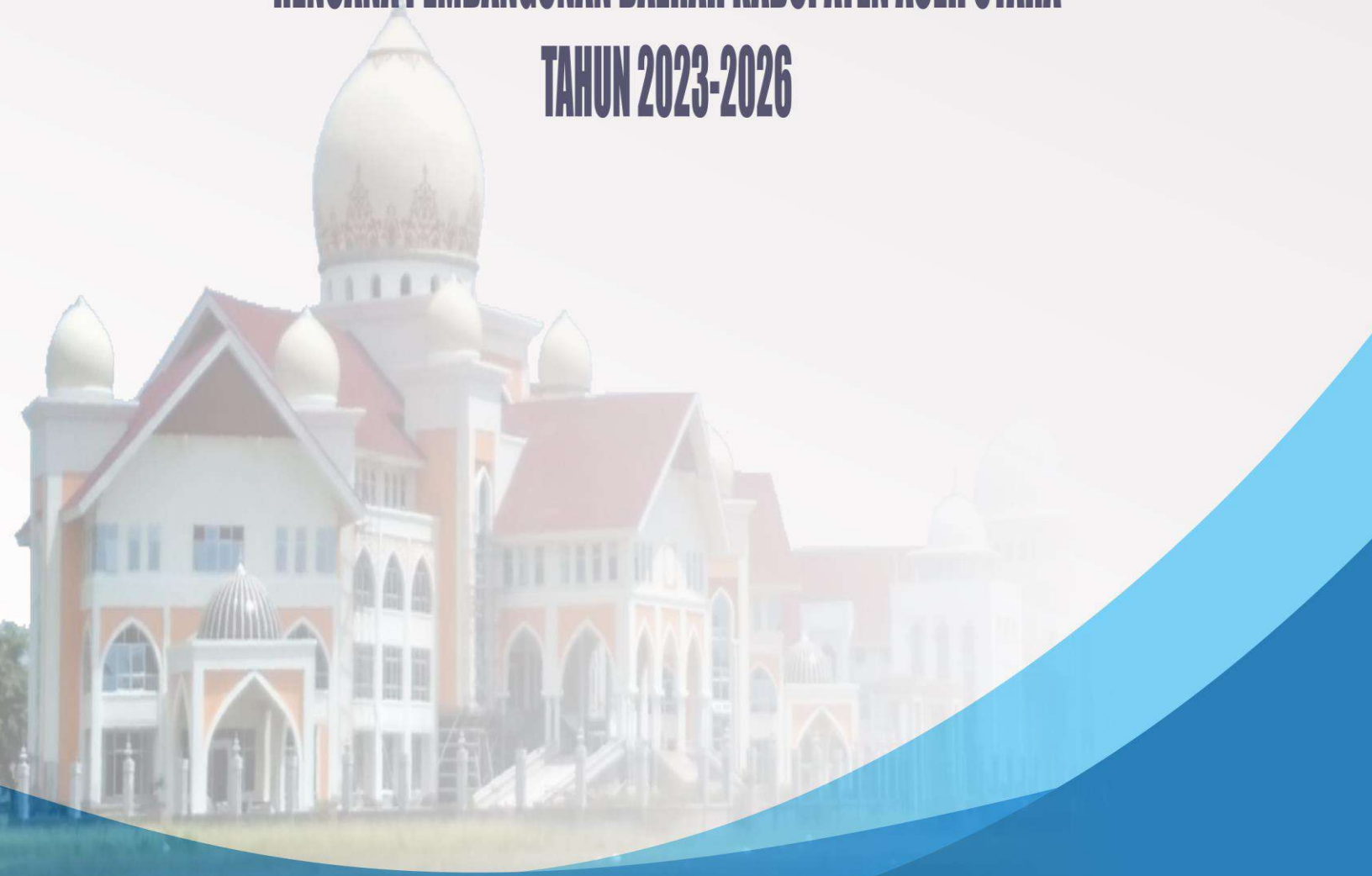




PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2023-2026



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2022



**BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2023-2026**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2021 akan berakhir pada tahun 2022 sejalan dengan berakhirnya masa Jabatan Bupati Aceh Utara;
 - b. bahwa untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 perlu menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);
26. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
27. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh nomor 62);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
30. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 199);

31. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9);
32. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara untuk periode 4 (empat) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun.

Pasal 2

RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program prioritas, keuangan daerah dan program perangkat daerah.

Pasal 3

Sistematika RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Gambaran Umum
- BAB III Gambaran Keuangan Daerah
- BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis
- BAB V Tujuan dan Sasaran
- BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
- BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB IX Penutup

Pasal 4

RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi :

- a. Pejabat Bupati Aceh Utara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2023-2026;
- b. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026;
- c. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
- d. Seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Utara dalam menyelenggarakan pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

Pasal 6

- (1) Pejabat Bupati Aceh Utara melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Perubahan RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan mendasar; dan/atau
 - d. terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan.
- (3) Perubahan RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah dan pedoman RKPD.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 28 Maret 2022 M
25 Sya'ban 1443 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 28 Maret 2022 M
25 Sya'ban 1443 H



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I.2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I.5
1.4 Maksud dan Tujuan	I.9
1.5 Sistematika Penulisan	I.10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
2.1 Kondisi Umum Daerah	II.1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II.1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II.1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II.12
2.1.1.3 Demografi	II.25
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II.30
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi... ..	II.30
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat	II.40
2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga	II.44
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II.48
2.1.3.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II.48
2.1.3.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II.90
2.1.3.3 Urusan Pilihan	II.120
2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II.132
2.1.3.5 Penunjang Urusan Pemerintahan	II.133
2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II.138
2.1.3.7 Unsur Kewilayahan	II.138
2.1.3.8 Unsur Kekhususan	II.139
2.1.3.9 Unsur Pemerintahan Umum	II.145
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II.146
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II.146
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II.148
2.1.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II.150
2.1.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II.168
2.2 Capaian Kinerja RPJMK Tahun 2017-2022	II.178
2.2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran RPJMD 2017-2022 Sampai Dengan Tahun 2020.....	II.179
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III.1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK	III.2
3.1.2 Neraca Daerah	III.21
3.1.1.1 Aset	III.22
3.1.1.2 Kewajiban	III.22
3.1.1.3 Ekuitas Dana	III.22
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III.29
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III.29
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III.31

BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV.1
	4.1 Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara	IV.1
	4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	IV.2
	4.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IV.2
	4.1.3 Aspek Pelayanan Umum	IV.5
	4.2 Isu strategis	IV.14
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN	V.1
	5.1 Tujuan Pembangunan	V.1
	5.2 Sasaran Pembangunan	V.1
	5.3 Penyelarasan RPD, RPA dan RPJMN	V.7
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS	VI.1
	6.1 Strategi Pembangunan	VI.1
	6.2 Arah Kebijakan Pembangunan	VI.9
	6.3 Program Prioritas	VI.10
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII.1
	7.1 Kerangka Pendanaan	VII.1
	7.1.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	VII.1
	7.1.1.1 Pendapatan	VII.1
	7.1.1.2 Belanja	VII.4
	7.1.1.3 Pembiayaan	VII.7
	7.1.1.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan	VII.9
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII.1
	8.1 Indikator Makro Pembangunan	VIII.1
	8.2 Indikator Kinerja	VIII.1
BAB IX	PENUTUP	IX.1
	9.1 Kaidah Pelaksanaan	IX.1
	9.2 Pedomana Transisi	IX.1

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 1.1	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional..... I.6
Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Gampong di Kabupaten Aceh Utara Menurut kecamatan..... II.3
Tabel 2.2	Rekomendasi Hasil Analisis untuk Kabupaten Aceh Utara II.14
Tabel 2.3	Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara, Luas wilayah dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2020 II.26
Tabel 2.4	Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan Tahun 2017-2021..... II.27
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 dan 2020 II.28
Tabel 2.6	Perkembangan Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021 II.29
Tabel 2.7	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Aceh Utara Menurut Lapangan Usaha (Milliar Rupiah) Tahun 2017-2021 II.30
Tabel 2.8	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Utara (Milyar rupiah), Tahun 2017-2021 II.31
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021..... II.33
Tabel 2.10	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2017-2021 II.34
Tabel 2.11	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Aceh Utara (Milyar Rupiah) Tahun 2017-2021 II.35
Tabel 2.12	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Aceh Utara (Milyar Rupiah), Tahun 2017-2021 II.35
Tabel 2.13	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017-2021 II.36
Tabel 2.14	PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021 II.37
Tabel 2.15	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Tahun 2017-2021 II.38
Tabel 2.16	Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021..... II.39
Tabel 2.17	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh Tahun 2017-2021 II.40
Tabel 2.18	Perkembangan Relatif IPM Kabupaten Aceh Utara dengan Provinsi Aceh Tahun 2017-2021..... II.41
Tabel 2.19	Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020 II.41
Tabel 2.20	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021 II.42
Tabel 2.21	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021..... II.42
Tabel 2.22	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021 II.43

Tabel 2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017–2021	II.44
Tabel 2.24	Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.45
Tabel 2.25	Penggiat Seni dan Budaya Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021.....	II.45
Tabel 2.26	Objek Wisata Kabupaten Aceh Utara yang dapat Dikembangkan	II.46
Tabel 2.27	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021.....	II.49
Tabel 2.28	Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.50
Tabel 2.29	Persentase Penduduk Kabupaten Aceh Utara Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2017-2021.....	II.51
Tabel 2.30	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.51
Tabel 2.31	Perkembangan APS Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.52
Tabel 2.32	Angka Putus Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021 (persen).....	II.53
Tabel 2.33	Angka Kelulusan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021 (Persen)	II.53
Tabel 2.34	Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017– 2021 (persen)	II.54
Tabel 2.35	Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021.....	II.54
Tabel 2.36	Jumlah Sekolah yang Terakreditasi Tahun 2021	II.55
Tabel 2.37	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2021	II.56
Tabel 2.38	Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.56
Tabel 2.39	Rasio Guru dan Murid Perkelas Rata – rata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.57
Tabel 2.40	Guru dengan Kualifikasi S1/DIV Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021.....	II.58
Tabel 2.41	Angka Kematian Bayi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.59
Tabel 2.42	Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.60
Tabel 2.43	Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017–2021	II.61
Tabel 2.44	Jumlah dan Rasio Prasarana Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.61
Tabel 2.45	Kelengkapan Alat Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Aceh Utara.....	II.62
Tabel 2.46	Rasio Jumlah Dokter terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.63
Tabel 2.47	Jumlah Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Penanganan Definitif terhadap Cakupan Komplikasi Kebidanan Tahun 2017–2021	II.64

Tabel 2.48	Jumlah Sasaran Ibu Bersalin dan Ibu Bersalin yang Ditolong Tenaga Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017–2021...	II.65
Tabel 2.49	Cakupan Desa UCI Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017–2021	II.66
Tabel 2.50	Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021.....	II.67
Tabel 2.51	Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.68
Tabel 2.52	Perkiraan Penderita TBC dan Penderita yang Diobati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021	II.68
Tabel 2.53	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.69
Tabel 2.54	Jumlah Penderita HIV/AIDS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021.....	II.70
Tabel 2.55	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021	II.71
Tabel 2.56	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021	II.72
Tabel 2.57	Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021.....	II.73
Tabel 2.58	Luasan Daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Utara Berdasarkan Kewenangan	II.75
Tabel 2.59	Rasio Perkembangan Jaringan Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2021.....	II.76
Tabel 2.60	Kondisi Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.76
Tabel 2.61	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2017– 2021	II.77
Tabel 2.62	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2017 – 2021	II.77
Tabel 2.63	Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Tahun 2017 – 2021	II.78
Tabel 2.64	Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Kawasan Budidaya Kabupaten Aceh Utara.....	II.81
Tabel 2.65	Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2017 – 2021	II.82
Tabel 2.66	Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2017-2021	II.82
Tabel 2.67	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per10.000 Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.83
Tabel 2.68	Penegakan Qanun di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.84
Tabel 2.69	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021.....	II.85
Tabel 2.70	Jumlah Wilayah Terkena Dampak Banjir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021.....	II.87
Tabel 2.71	Kejadian Kebakaran di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017– 2021	II.89
Tabel 2.72	Penanganan PMKS di Kabupaten Aceh UtaraTahun 2017-2021	II.89
Tabel 2.73	Pencari Kerja yang Terdaftar per Tahun Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2021.....	II.91

Tabel 2.74	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.91
Tabel 2.75	Jumlah Kasus yang terjadi pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.92
Tabel 2.76	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2017-2021	II.95
Tabel 2.77	Jumlah Desa Rawan Pangan	II.96
Tabel 2.78	Kinerja Pelayanan Bidang Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021.....	II.96
Tabel 2.79	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.99
Tabel 2.80	Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2021.....	II.100
Tabel 2.81	Jumlah Kasus Lingkungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017- 2021.....	II.100
Tabel 2.82	Luas Sempadan Sungai di Kabupaten Aceh Utara.....	II.103
Tabel 2.83	Lembaga-Lembaga Pendukung Pengelolaan DAS Kab. Aceh Utara	II.104
Tabel 2.84	Persentase Sampah yang dikelola Tahun 2017–2021	II.105
Tabel 2.85	Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021	II.105
Tabel 2.86	Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.106
Tabel 2.87	Kondisi BUMG di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021.....	II.108
Tabel 2.88	Jumlah PKK Aktif, Posyandu Aktif dan Jumlah Keseluruhan LPM di Kab. Aceh Utara Tahun 2017-2021.....	II.108
Tabel 2.89	Cakupan peserta KB Aktif dan Akseptor KB di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.109
Tabel 2.90	Indikator Keluarga Berencana Tahun 2017-2021	II.110
Tabel 2.91	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 -2021.....	II.111
Tabel 2.92	Persentase Koperasi Aktif di Kab. Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.112
Tabel 2.93	Jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021	II.114
Tabel 2.94	Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017– 2021	II.114
Tabel 2.95	Perkembangan Jumlah Investor Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2021.....	II.115
Tabel 2.96	Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2021.....	II.115
Tabel 2.97	Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan Tahun 2017 - 2021.....	II.116
Tabel 2.98	Cabang Olahraga, Atlet dan Infrastruktur Olahraga di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021	II.117
Tabel 2.99	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017– 2021	II.118
Tabel 2.100	Penyelenggaraan Festival dan Jumlah Sarana Seni serta Budaya Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2021.....	II.119
Tabel 2.101	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021	II.119

Tabel 2.102	Koleksi Buku yang tersedia pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.120
Tabel 2.103	Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.122
Tabel 2.104	Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021.....	II.123
Tabel 2.105	Jumlah Wisatawan Tahun 2017-2021	II.124
Tabel 2.106	Data Jumlah dan Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021	II.124
Tabel 2.107	Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.125
Tabel 2.108	Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021.....	II.125
Tabel 2.109	Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021.....	II.126
Tabel 2.110	Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021	II.127
Tabel 2.111	Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017–2021	II.128
Tabel 2.112	Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017–2021	II.129
Tabel 2.113	Perkembangan Nilai Ekspor Impor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.130
Tabel 2.114	Jumlah Transmigrasi di Kabupaten Aceh Utara	II.131
Tabel 2.115	Jumlah ASN menurut Golongan Kepangkatan	II.136
Tabel 2.117	Perkembangan Dayah dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020.....	II.140
Tabel 2.118	Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan (Masjid dan Meunasah) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017– 2021.....	II.142
Tabel 2.119	Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.142
Tabel 2.120	Rekapitulasi Penerimaan ZIS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021.....	II.144
Tabel 2.121	Rekapitulasi Penyaluran ZIS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021.....	II.144
Tabel 2.122	Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas.....	II.148
Tabel 2.123	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Minum, Tahun 2021	II.149
Tabel 2.124	Tanpa Kemiskinan.....	II.151
Tabel 2.125	Tanpa Kelaparan	II.154
Tabel 2.126	Kehidupan Sehat Dan Sejahtera.....	II.155
Tabel 2.127	Pendidikan Berkualitas	II.156
Tabel 2.128	Kesetaraan Gender	II.157
Tabel 2.129	Air Bersih Dan Sanitasi Layak.....	II.158
Tabel 2.130	Energi Bersih Dan Terjangkau.....	II.159
Tabel 2.131	Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi	II.159
Tabel 2.132	Industri, Inovasi Dan Infrastruktur	II.161

Tabel 2.133	Berkurangnya Kesenjangan.....	II.161
Tabel 2.134	Kota Dan Permukiman Yang Berkelanjutan	II.162
Tabel 2.135	Konsumsi Dan Produksi Yang Berkelanjutan	II.163
Tabel 2.136	Penanganan Perubahan Iklim.....	II.164
Tabel 2.137	Ekosistem Kelautan.....	II.164
Tabel 2.138	Ekosistem Daratan.....	II.166
Tabel 2.139	Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tanggu	II.166
Tabel 2.140	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Aceh Utara	II.169
Tabel 2.141	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Aceh Utara	II.170
Tabel 2.142	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara.....	II.173
Tabel 2.143	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.....	II.174
Tabel 2.144	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara	II.175
Tabel 2.145	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Sosial Kabupaten Aceh Utara	II.177
Tabel 2.146	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran RPJM Kabupaten Aceh Utara 2017-2022 Tahun I, II dan Tahun III (2018, 2019 dan 2020).....	II.180
Tabel 2.147	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 s/d 2020	II.184
Tabel 2.148	Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	II.197
Tabel 3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 s/d 2021	III.3
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 s/d Tahun 2020	III.6
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021	III.12
Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 s/d Tahun 2020	III.14
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021..	III.17
Tabel 3.6	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 s/d Tahun 2020	III.19
Tabel 3.7	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021	III.21
Tabel 3.8	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 s/d Tahun 2020	III.24
Tabel 3.9	Balance Sheet Ratio Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 s/d 2020.....	III.27
Tabel 3.10	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 s/d 2020	III.31
Tabel 3.11	Surplus dan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020.....	III.32
Tabel 3.12	Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 s/d 2020	III.33
Tabel 3.13	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 s/d 2020.....	III.35

Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.....	V.2
Tabel 5.2	Penyelarasan RPD, RPA dan RPJMN.....	V.9
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.....	VI.2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023- 2026.....	VI.9
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif....	VI.11
Tabel 7.1	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026	VII.3
Tabel 7.2	Proyeksi Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.....	VII.6
Tabel 7.3	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026	VII.8
Tabel 7.4	Proyeksi Kapasitas Riil Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026	VII.10
Tabel 7.5	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	VII.11
Tabel 8.1	Penetapan dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Aceh Utara 2023-2026	VIII.1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Utara 2023-2026.....	VIII.2
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	VIII.3

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara.....	II.2
Gambar 2.2	Profil Morfologi Wilayah Kabupaten Aceh Utara.....	II.5
Gambar 2.3	Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Aceh Utara.....	II.6
Gambar 2.4	Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Utara	II.7
Gambar 2.5	Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara	II.8
Gambar 2.6	Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara	II.9
Gambar 2.7	Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara	II.10
Gambar 2.8	Peta Wilayah Sungai Kabupaten Aceh Utara	II.10
Gambar 2.9	Peta DAS Kabupaten Aceh Utara	II.11
Gambar 2.10	Persentase Luas DAS di Kabupaten Aceh Utara.....	II.11
Gambar 2.11	Peta Areal NKT DAS Krueng Peusangan	II.15
Gambar 2.12	Peta Rekomendasi Peruntukan Kawasan Penting Kabupaten Aceh Utara.....	II.16
Gambar 2.13	Peta Pola Ruang Kabupaten Aceh Utara.....	II.24
Gambar 2.14	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021	II.32
Gambar 2.15	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021	II.38
Gambar 2.16	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.93
Gambar 2.17	Indeks Pemberdayaan Gender Kab. Aceh Utara Tahun 2017- 2021.....	II.94
Gambar 2.18	Status Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2021	II.107
Gambar 2.19	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017-2021.....	II.133
Gambar 2.20	Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB (Juta Rupiah).....	II.146
Gambar 2.21	Distribusi Persentase Sub Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB, 2016 dan 2020.....	II.147
Gambar 2.22	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021	II.149
Gambar 3.1	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020	III.9
Gambar 3.2	Proporsi Realisasi Komponen Pembentuk PAD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020	III.10
Gambar 3.3	Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020	III.11
Gambar 3.4	Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Total Belanja Tahun 2016-2020.....	III.16
Gambar 3.5	Proporsi Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal terhadap Total Belanja Langsung Tahun 2016- 2020.....	III.16
Gambar 3.6	Besaran Realisasi Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Netto, dan SILPA Tahun 2016- 2020.....	III.20
Gambar 3.7	Pertumbuhan Realisasi Neraca Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2020.....	III.26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tersebut, suatu perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi. Sehingga saat ini tetap dipandang perlu adanya tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan nasional dan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan satu tahapan rencana pembangunan yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 akan berakhir pada tahun 2022, dan untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut maka sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara wajib menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

RPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif. Selain itu RPD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

- 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 25. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
 26. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
 27. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
 28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
 29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
 30. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2032;
 31. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 – 2025.
 32. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antara RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. RPD Kabupaten Aceh Utara dengan RPJMN 2020-2024.

Visi Presiden 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Untuk mencapai visi, telah ditetapkan 9 (Sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita kedua. Misi tersebut adalah : 1)Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia, ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi. Kelima arahan tersebut mencakup : 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Penyederhanaan Regulasi; 4) Penyederhanaan Birokrasi; dan 5) Transformasi Ekonomi.

Visi misi RPJMN 2020-2024 selanjutnya diterjemahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu ; 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan MenjaminPemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan BerdayaSaing; 4) Revolusi Mental Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Target Indikator makro nasional tahun 2020-2024 menjadi acuan untuk menentukan target indikator makro daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- (1) Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4-6,0 persen per tahun dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 3,0-5,0 persen.
- (2) Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas, dengan target 2,0-4,0 persen.
- (3) Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun diharapkan turun menjadi 6,5-7,0 persen dan 4,0-4,6 persen pada tahun 2024.
- (4) Indeks pembangunan manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia.
- (5) Indeks ketimpangan pendapatan (indeks gini) diharapkan meningkat mencapai 0,370-0,374.

Program Prioritas Nasional (PN) penting menjadi acuan untuk penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan di dalam RPD Tahun 2023-2026. Ada enam Prioritas Nasional yang berkaitan dengan ekonomi, sumber daya manusia (SDM), Revolusi Mental dan Kebudayaan, Infrastruktur, Lingkungan Hidup (LH) dan Kebencanaan, Stabilitas Keamanan dan Pelayanan Publik. Arah dan agenda pembangunan ini menjadi acuan dalam penyusunan RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026. Masing-masing Prioritas Nasional ini memiliki Program Prioritas (PP) Nasional yang penting untuk disinergikan oleh seluruh daerah (Tabel 1.1).

Tabel 1.1.
Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
I	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	PN-1
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	PN-1, PP1
2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	PN-1, PP2

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	PN-1, PP3
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	PN-1, PP4
5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	PN-1, PP5
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	PN-1, PP6
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	PN-1, PP7
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	PN-1, PP8
II	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PN-2
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	PN-2 PP-1
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	PN-2 PP-2
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	PN-2 PP-3
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	PN-2 PP-4
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	PN-2 PP-5
6	Pengentasan kemiskinan	PN-2 PP-6
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	PN-2 PP-7
III	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PN-3
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	PN-3, PP1
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	PN-3, PP2
3	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	PN-3, PP3
4	Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	PN-3, PP4
IV	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN-4
1	Infrastruktur pelayanan dasar	PN-4, PP1
2	Infrastruktur ekonomi	PN-4, PP2
3	Infrastruktur perkotaan	PN-4, PP3
4	Energi dan ketenagalistrikan	PN-4, PP4
5	Transformasi digital	PN-4, PP5

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
V	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PN-5
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PN-5, PP1
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	PN-5, PP2
3	Pembangunan rendah karbon	PN-5, PP3
VI	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PN-6
1	Konsolidasi demokrasi	PN-6, PP1
2	Optimalisasi kebijakan luar negeri	PN-6, PP2
3	Penegakan hukum nasional	PN-6, PP3
4	Reformasi birokrasi dan tata kelola	PN-6, PP4
5	Menjaga stabilitas keamanan nasional	PN-6, PP5

2. RPD Kabupaten Aceh Utara dengan RPA

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 diarahkan untuk tujuan dan sasaran pembangunan dalam upaya pencapaian visi RPJP Aceh yaitu “ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”. Dalam RPA Tahun 2023-2026 telah dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Demokrasi
2. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional
3. Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan
5. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19
6. Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana
7. Meningkatkan Penguatan Perdamaian

Tujuan pembangunan Aceh yang kemudian dijabarkan dalam sasaran pembangunan pada dokumen RPA Tahun 2023-2026 juga menjadi acuan dalam penyusunan RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

3. RPD Kabupaten Aceh Utara dengan RPJP Kabupaten Aceh Utara

RPD Kabupaten Aceh Utara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara 2005-2025 yang saat ini tahap ke-4 (2020-2025) yang mempunyai arah kebijakan yaitu : 1) Memantapkan struktur ekonomi daerah dengan

dukungan sektor sekunder dan sektor primer serta sektor perdagangan; 2) Memantapkan laju pertumbuhan ekonomi daerah; 3) Memantapkan daya saing komoditi-komoditi unggulan tanaman bahan makanan, perikanan, perkebunan, dan peternakan; 4) Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, khususnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah; 5) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat; 6) Memelihara kualitas infrastruktur pelayanan publik (infrastruktur dasar); 7) Memelihara pemerintahan yang bersih dan berwibawa; 8) Mengembangkan syiar Islam yang semarak dan berkualitas ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan arah kebijakan lainnya baik di bidang ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana, hukum politik dan pemerintahan serta agama.

4. RPD Aceh Utara dengan RTRW Aceh Utara.

RPD Kabupaten Aceh Utara disusun dengan memperhatikan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2032 yang saat ini sedang dalam proses revisi. RPD menyelaraskan pencapaian, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah tahun 2023-2026 dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Aceh Utara sesuai RTRW Kabupaten Aceh Utara. RPD Kabupaten Aceh Utara akan disesuaikan dengan struktur ruang dan pola ruang setelah RTRW perubahan Kabupaten Aceh Utara disahkan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 adalah :

1. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2023-2026;
2. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Tujuan penyusunan RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 adalah :

1. Menentukan arah kebijakan umum, kebijakan keuangan daerah dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
2. Menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
3. Menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Utara;
4. Menjadi alat ukur dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan RPD yang memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini menyajikan dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, capaian standar pelayanan minimal dan evaluasi pelaksanaan RPJMK Tahun 2017-2022.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu terkait Kinerja Keuangan Masa Lalu dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat informasi Permasalahan Pembangunan, Isu strategis daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPD ini karena menjadi dasar utama kebijakan pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan mendatang.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Penyajian dalam bab ini menguraikan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang menggambarkan keterkaitan antar elemen perencanaan dalam satu matrik.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Dalam bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih dan kemudian menjelaskan hubungannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan dan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara baik yang bersifat program prioritas disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan dan kerangka pendanaan yang mencakup pengeluaran urusan wajib dan mengikat dan prioritas utama.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini dilakukan Penetapan indikator kinerja daerah untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IX PENUTUP

Bagian penutup ini memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Umum Daerah

Gambaran umum kondisi Kabupaten Aceh Utara diuraikan dalam beberapa aspek yang meliputi: aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan Demografi mengkaji segala fenomena yang ada di geosfer yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Dalam aspek ini membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan karakteristik lokasi dan wilayah, demografi dan potensi pengembangan wilayah. Karakteristik lokasi dan wilayah menyajikan letak geografis, tofografi dan morfologi wilayah, jenis tanah dan kedalaman efektif tanah, geologi serta serta kondisi iklim dari suatu wilayah.

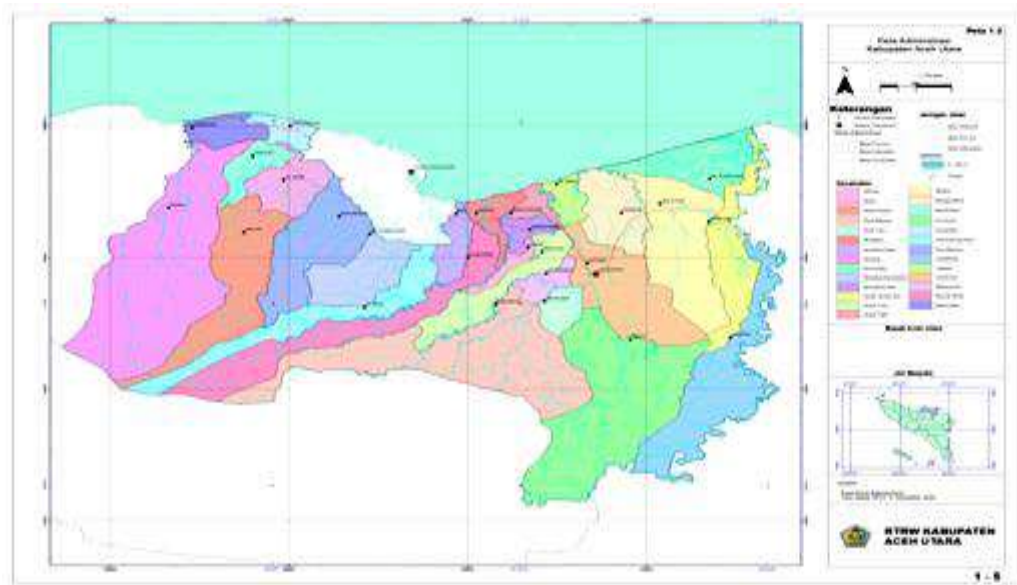
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Letak Geografis

Berdasarkan Peta Bakosurtanal, Kabupaten Aceh Utaraterletak pada bagian utara Provinsi Aceh. Secara geografis, batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya mengalami perubahan seiring adanya beberapa pemekaran wilayah antara lain berdasarkan Undang –Undang RI Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Implikasi perubahan mempengaruhi batas wilayah kabupaten Aceh Utara dengan kabupaten yang melingkupinya. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini bersebelahan :

- Sebelah utara : SelatMalaka dan Kota Lhokseumawe
- Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur.
- Sebelah selatan : Kabupaten Bener Meriah.
- Sebelah barat : Kabupaten Bireuen

Gambaran tematik batas wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana Gambar 2.1 berikut :



Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 disebutkan bahwa luas wilayah berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dikurangi dengan luas wilayah pembentukan Kabupaten Bireun berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Simeulue dan luas wilayah pembentukan Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, maka luas Kabupaten Aceh Utara sebesar 3.296,86 km² atau 329.686 Ha.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan 76 kemukiman 852 gampong. Sejak tahun 2009, secara administrasi perdesaan Kabupaten Aceh Utara hanya memiliki wilayah gampong sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Paya Bakong merupakan kecamatan terluas dengan luas 418,32 km² atau 12,69

persen dari luas Kabupaten Aceh Utara. Masing-masing kecamatan dibagi dalam 1 sampai 4 kemukiman. Pemerintahan Mukim diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim, disebutkan kedudukan mukim sebagai unit pemerintah yang membawahi beberapa gampong yang dipimpin oleh seorang Imum Mukim yang bertanggung jawab kepada camat. Luas wilayah, jumlah kemukiman dan jumlah gampong di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Gampong
di Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1.	Sawang	384,65	11,67	2	39
2.	Nisam	114,74	3,48	3	29
3.	Nisam Antara	84,38	2,56	2	6
4.	Banda Baro	42,35	1,28	2	9
5.	Kuta Makmur	151,32	4,59	3	39
6.	Simpang Keuramat	79,78	2,42	2	16
7.	Syamtalira Bayu	77,53	2,35	4	38
8.	Geureudong Pase	269,28	8,17	2	11
9.	Meurah Mulia	202,57	6,15	3	50
10.	Matangkuli	56,94	1,73	4	49
11.	Paya Bakong	418,32	12,69	4	39
12.	Pirak Timu	67,70	2,05	2	23
13.	Cot Girek	189,00	5,73	3	24
14.	Tanah Jambo Aye	162,98	4,94	4	47
15.	Langkahan	150,52	4,57	3	23
16.	Seunuddon	100,63	3,05	3	33
17.	Baktiya	158,67	4,81	3	57
18.	Baktiya Barat	83,08	2,52	3	26
19.	Lhoksukon	243,00	7,37	4	75
20.	Tanah Luas	30,64	0,93	3	57
21.	Nibong	44,91	1,36	2	20
22.	Samudera	43,28	1,31	3	40
23.	Syamtalira Aron	28,13	0,85	4	34
24.	Tanah Pasir	20,38	0,62	2	18
25.	Lapang	19,27	0,59	2	11
26.	Muara Batu	33,34	1,01	2	24
27.	Dewantara	39,47	1,20	2	15
	TOTAL	3.296,86	100,00	76	852

Sumber: Bagian Pemerintahan Mukim Setdakab Aceh Utara Tahun 2022 (Data diolah)

Dilihat berdasarkan kemukiman, Kecamatan Syamtalira Bayu, Matangkuli, Paya Bakong, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan Syamtalira Aron masing-masing memiliki 4 kemukiman. Sedangkan jumlah gampong terbanyak di Kecamatan Lhoksukon yaitu sebanyak 75 gampong, sementara itu jumlah gampong paling sedikit yakni sebanyak 6 gampong berada di Kecamatan Nisam Antara yang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Nisam.

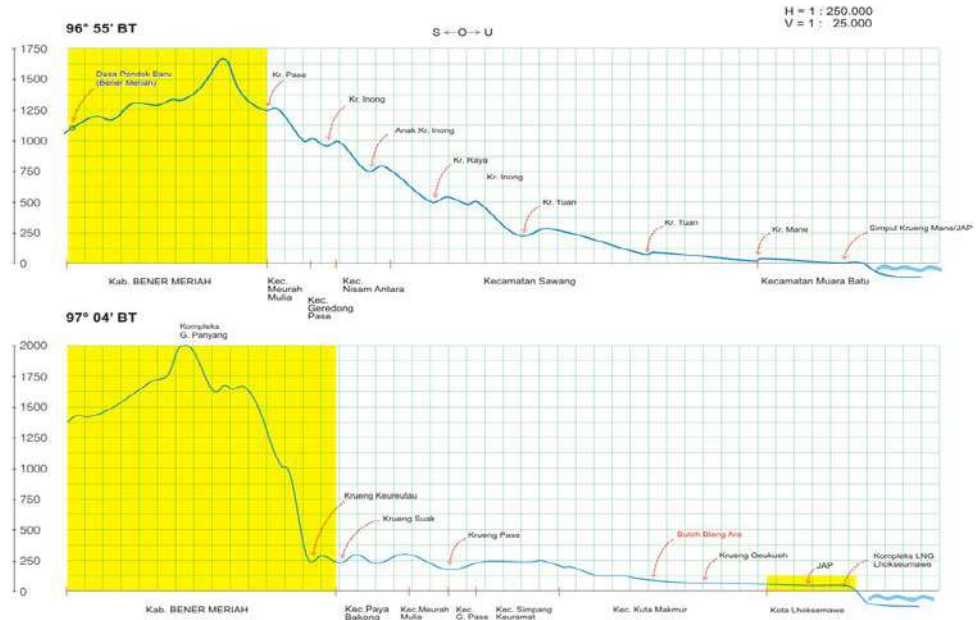
2. Topografi dan Morfologi Wilayah

Sebelah utara berbatasan dengan laut, yaitu Selat Malaka dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng pegunungan, maka secara umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pegunungan adalah :

- Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.
- Dataran aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran pantai.
- Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial.
- Zona volkanik, yang merupakan kaki/lereng sampai punggung pegunungan.

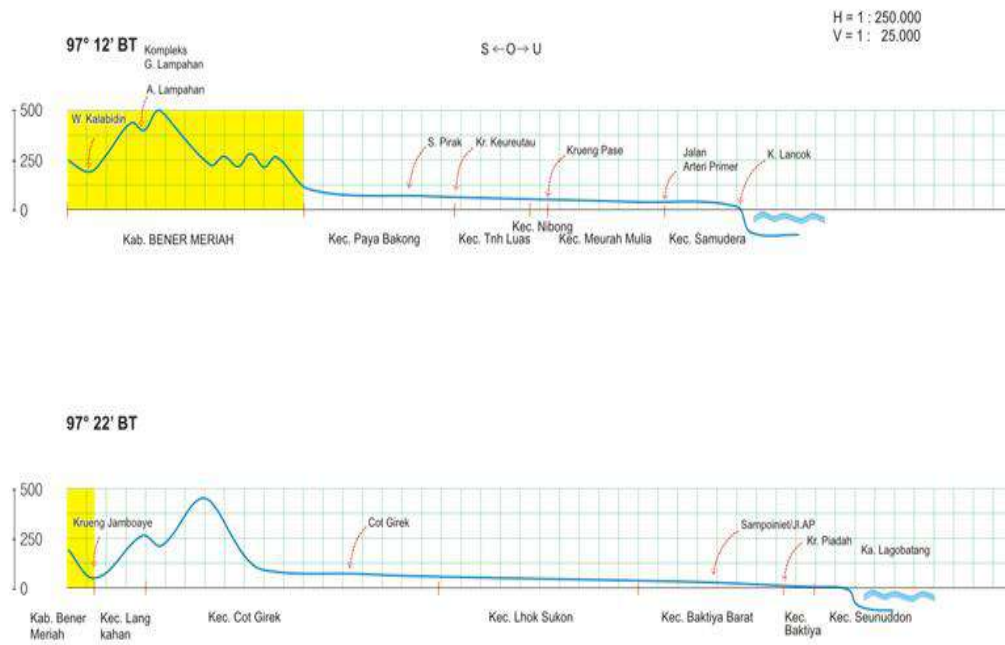
Selaras dengan geomorfologi tersebut pada Gambar 2.2 diperlihatkan profil wilayah menurut arah utara-selatan, masing-masing pada garis $96^{\circ} 55'$, $97^{\circ} 04'$, $97^{\circ} 12'$, dan $97^{\circ} 22'$ BT. Berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000 (BAKOSURTANAL), yang menggambarkan topografi menurut garis ketinggian (kontur) Aceh Utara sebaran utamanya menurut selang ketinggian yaitu:

- 0 – 25 m dpl : 146.096 Ha, atau 44,31 %;
- 25 – 100 m dpl : 63.781 Ha, atau 19,35 %;
- 100 – 500 m dpl : 88.526 Ha, atau 26,85 %;
- 500 – 1000 m dpl : 20.932 Ha, atau 6,35 %;
- Di atas 1000 m dpl : 10.351 Ha, atau 3,14%



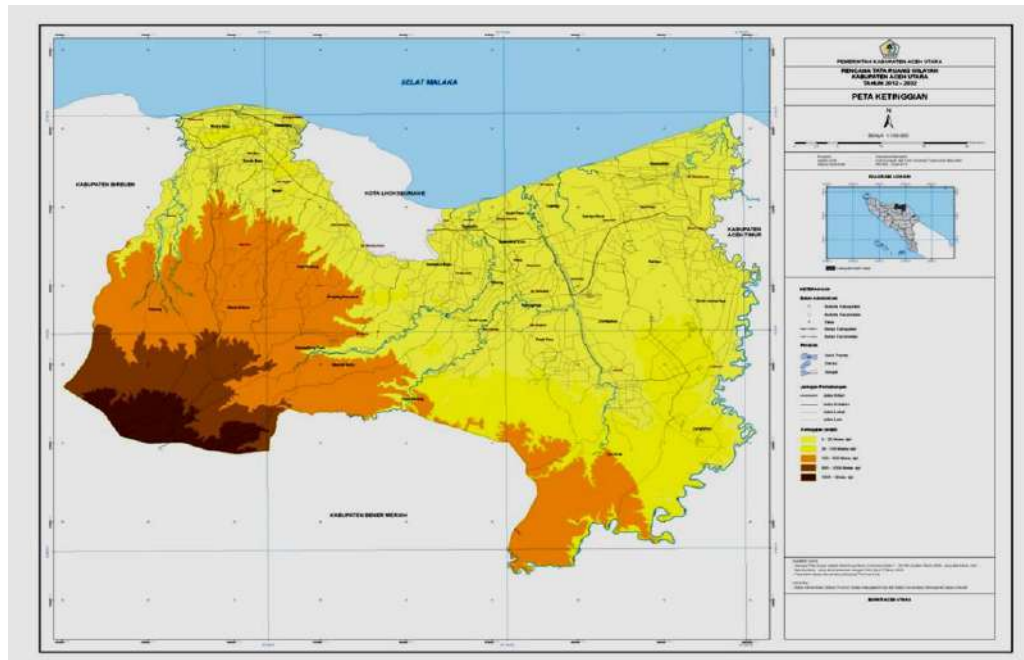
GAMBAR LANJUTAN

PROFIL WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA



Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

Gambar 2.2
Profil Morfologi Wilayah Kabupaten Aceh Utara

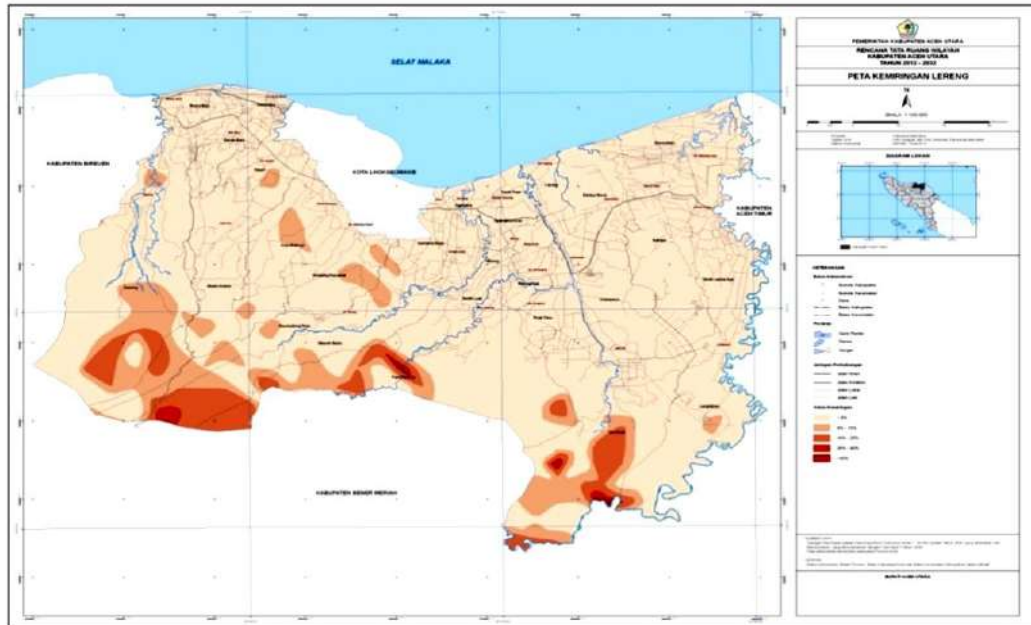


Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

Gambar 2.3
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara dari Yayasan Leuser Internasional (YLI), dapat dikemukakan sebaran kemiringan lahan di Aceh Utara yaitu :

- 0 – 2 % : 50,38 %, atau sekitar 166.063 Ha;
- 2 – 8 % : 18,85 %, atau sekitar 62.146 Ha;
- 8 – 15 % : 10,54 %, atau sekitar 34.749 Ha;
- 15 – 25 % : 9,59 %, atau sekitar 31.617 Ha;
- 25 – 40 % : 7,26 %, atau sekitar 23.935 Ha;
- >40 % : 3,39 %, atau sekitar 11.176 Ha.



Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

Gambar 2.4
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Utara

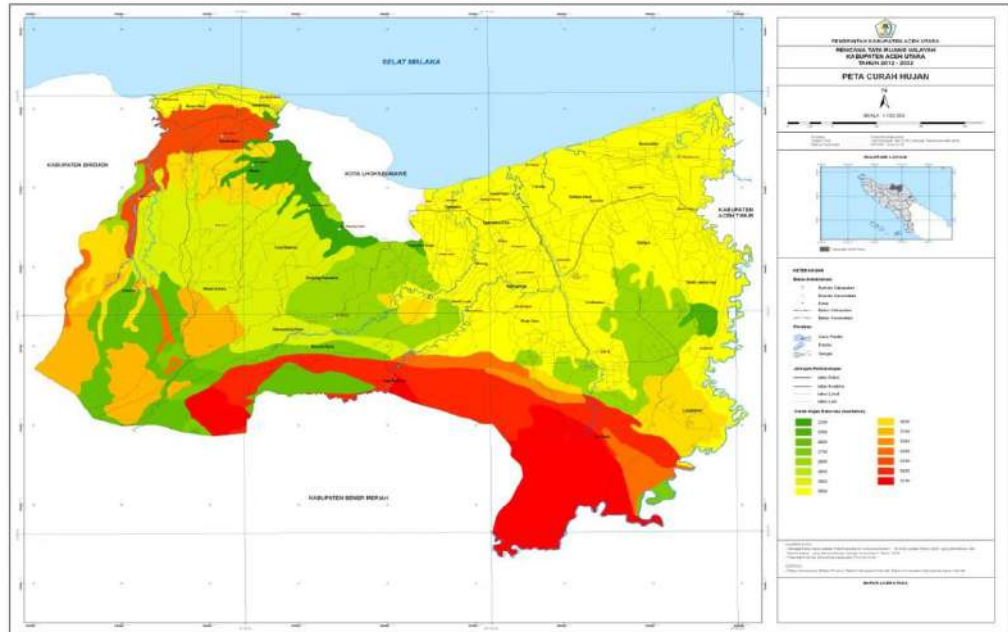
3. Iklim

Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh, termasuk tipe iklim muson dan klasifikasi menurut Mohr, Schmid dan Ferguson termasuk iklim tipe C. Wilayah Kabupaten Aceh Utara relatif lebih kering dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Aceh karena pengaruh pegunungan Bukit Barisan, di mana wilayah sebelah utara dan timur pegunungan Bukit Barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah sebelah barat dan selatannya.

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1000 – 2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah (cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli dan yang cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April.

Rata-rata suhu udara adalah 30⁰ C dengan kisaran antara 26⁰C sampai 36⁰ C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah

28^o C dan pada musim kemarau suhu rata-rata adalah 32,8^o C. Kelembaban udara berkisar antara 84–89% dengan rata-rata 86,6 %. Lebih jelasnya sebagaimana tercantum pada gambar berikut :



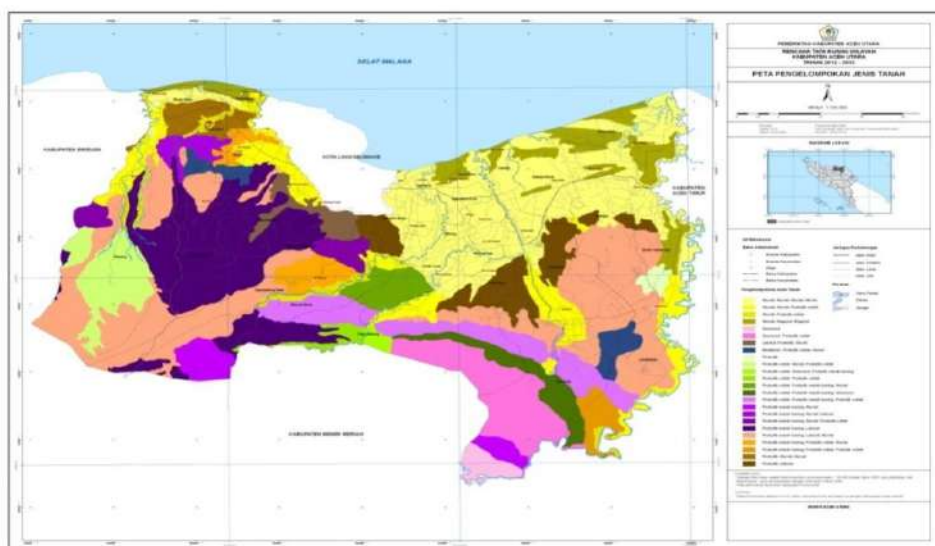
Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

Gambar 2.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara

4. Jenis Tanah dan Kedalaman Efektif Tanah

Jenis tanah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian maupun non-pertanian yang akan dikembangkan. Pengenalan terhadap karakteristik dan sebaran jenis tanah sangat penting terkait dengan upaya pemanfaatan sumber daya tanah/lahan di Kabupaten Aceh Utara.

Secara umum sebaran jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas 2 kelompok besar yaitu dominan kelompok hidromorf di pesisir, sementara kelompok podsolik dominan di pedalaman. Karakter ini selaras pula dengan kedalaman efektif tanah, di mana sejak dari yang terdalam (>90 cm) sampai yang ter dangkal (<30 cm) adalah mengikuti pola dari pesisir ke pedalaman. Jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara

5. Geologi

Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara garis besar terdiri atas batuan Quarter yang cenderung di bagian pesisir (bagian utara), dan batuan Tersier yang cenderung di bagian pedalaman (bagian selatan). Sebaran ini selaras dengan topografi yang menaik dari utara ke selatan dan selaras pula dengan pola hilir ke hulu dalam DAS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, karakteristik DAS merupakan gambaran spesifik mengenai DAS yang dicirikan oleh parameter yang berkaitan dengan keadaan morfometri, topografi, tanah geologi, vegetasi, penggunaan lahan, hidrologi dan manusia. Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Wilayah Kabupaten Aceh Utara masuk kedalam klasifikasi WS Jambo Aye (01.05.A3) dan WS Pase-Peusangan (0.1.03.B). WS Jambo Aye mencakup DAS Jambo Aye, Krueng Keureutou, dan Krueng Lueng. WS Pase-Peusangan mencakup DAS Krueng Geukeuh,

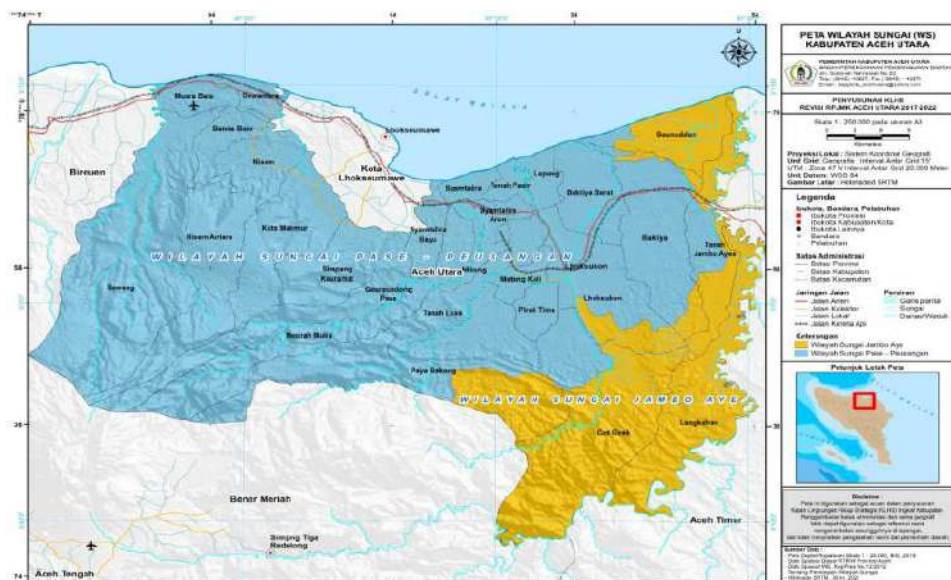
Krueng Mane, Krueng Pase, dan Peusangan (Berdasarkan Lampiran V.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tanggal 18 Maret 2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai).



Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

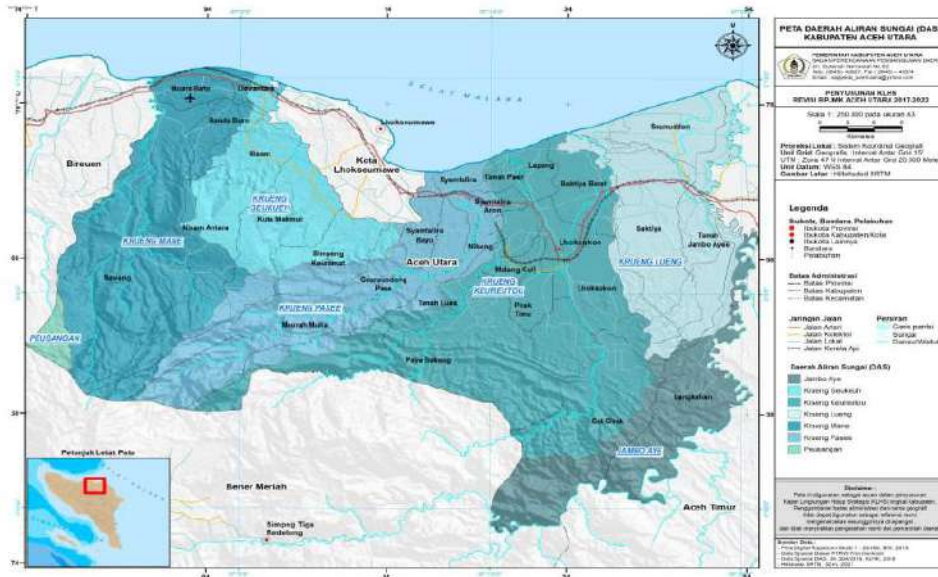
Gambar 2.7
Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara

WS Jambo-Aye merupakan wewenang pemerintah Pusat yang langsung di bawah pengelolaan Balai Wilayah Sungai Sumatera-I dan dikelompokkan menjadi satu Wilayah Sungai berdasarkan wilayah strategis nasional dan lintas kabupaten. WS Peusangan merupakan lintas kabupaten yang menjadi wewenang Provinsi Aceh.



Sumber: KLHS Perubahan RPJMK Aceh Utara Tahun 2017-2022

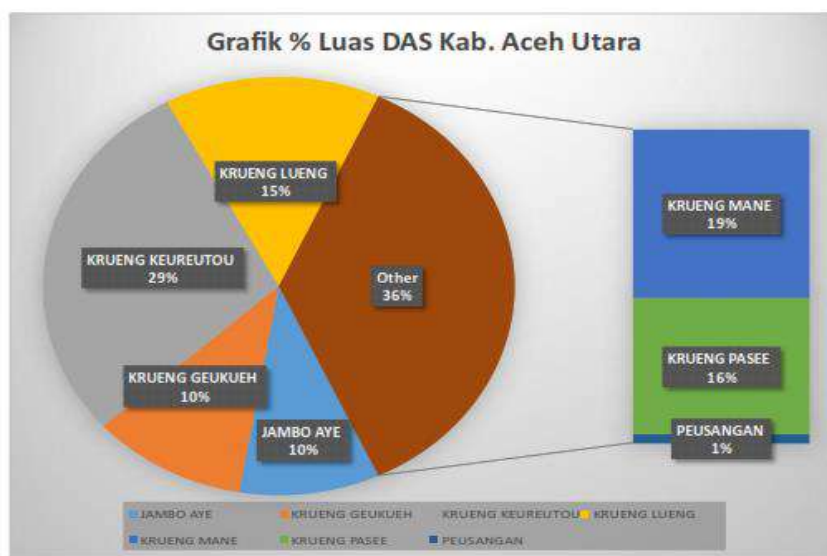
Gambar 2.8
Peta Wilayah Sungai Kabupaten Aceh Utara



Sumber: KLHS Perubahan RPJMK Aceh Utara Tahun 2017-2022

Gambar 2.9
Peta DAS Kabupaten Aceh Utara

Sementara itu, Peta WS dan DAS menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang penetapan peta daerah aliran sungai di perhatikan pada Gambar 2.8 dan 2.9. Secara keseluruhan persentase luas DAS yang berada di dalam batas administrasi Kabupaten Aceh Utara disajikan dalam Gambar 2.10 berikut:



Sumber: KLHS Perubahan RPJMK Aceh Utara Tahun 2017-2022

Gambar 2.10
Persentase Luas DAS di Kabupaten Aceh Utara

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai arahan RPJP Kabupaten Aceh Utara yang berkaitan dengan pengembangan wilayah, pembangunan Kabupaten Aceh Utara diprioritaskan untuk meningkatkan pertumbuhan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh, termasuk pengembangan industri-industri modern. Berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Utara 2012 – 2032 dan sesuai karakteristik wilayah maka pengembangan kawasan dalam rencana pola ruang Kabupaten Aceh Utara yaitu pada kawasan peruntukan hutan produksi, Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Industri, Pariwisata, dan Wilayah Rawan Bencana.

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi ini relatif terletak antara kawasan hutan lindung dan batas dengan Kabupaten Bener Meriah dengan kawasan perkebunan dan kawasan budidaya lainnya. Selain pemantapan kawasan hutan produksi yang telah ada sebelumnya, juga direncanakan pemanfaatan belukar di bagian lebih hulu lagi dari yang direncanakan untuk kawasan perkebunan. Total luas kawasan hutan produksi ini adalah 30.687 Ha.

Sebaran kawasan hutan produksi di Kabupaten Aceh Utara meliputi : Kecamatan Langkahan 1.341 hektar; Kecamatan Cot Girek 9.502 hektar ; Kecamatan Meurah Mulia 4.278 hektar; Kecamatan Geureudong Pase 2.710 hektar; Kecamatan Nisam Antara 2.930 hektar; Kecamatan Sawang 4.952 hektar; dan Kecamatan Paya Bakong 5.000 hektar.

Pemanfaatan kawasan hutan produksi yaitu berupa :

- Eksploitasi hutan, dalam bentuk pengambilan kayu dengan pola tebang pilih dan tanam kembali.
- Pengambilan hasil hutan non-kayu seperti : rotan, getah, madu lebah, buah-buahan, dan lain-lainnya

2. Penetapan Peruntukan Kawasan Penting

Terkait dengan apa yang diuraikan pada poin 1 tentang kawasan Peruntukan Hutan Produksi, dan berdasarkan sumber data yang dikeluarkan oleh *World Wildlife Fund* (WWF) Indonesia Tahun 2021 bekerjasama dengan Forum terkait lainnya dalam kajian terhadap Peruntukan Kawasan Penting untuk Kabupaten Aceh Utara

menyatakan bahwa Lanskap kawasan Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu Lanskap yang mempunyai potensi alam yang cukup melimpah. Potensi alam tersebut menjadi tempat yang mempunyai fungsi penting dalam keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, maupun sosial budaya. Potensi alam ini juga menjadi daya tarik bagi pihak-pihak untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak serta merta hanya sebatas pada aktivitas eksploitatif saja, tetapi juga dapat dengan memanfaatkan jasa lingkungan maupun hasil lain yang sifatnya tidak ekstraktif. Pada pengelolaan yang sifatnya eksploitatif dan merubah kondisi tutupan lahan, perlu adanya suatu instrumen untuk mengendalikannya agar masih tetap pada pengelolaan yang lestari. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah menggunakan kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Selanjutnya, dalam penentuan akhir pada peruntukan kawasan penting dilakukan dengan menggabungkan hasil deliniasi kawasan berdasarkan NKT, Analisis Multi Kriteria, dan Hasil analisis AHP. Hasil kajian NKT yang digunakan sebagai dasar penetapan keputusan akhir go no go area Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Bireuen adalah hal yang paling penting dan mendasar karena mempertimbangkan keberadaan dari NKT 1, NKT 2, NKT 3, NKT 4, NKT 5, dan NKT 6. Dalam memberikan rekomendasi pengambilan keputusan akhir juga harus mempertimbangkan kondisi eksisting dan proses penentuan kebijakan antar stakeholder. Maka untuk bisa mengakomodir semua kepentingan yang telah ada di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Bireuen dan mengambil jalan keluar terbaik dilakukan analisis yang bertingkat dari berbagai kriteria. Dari hasil analisis dan kajian yang dilakukan secara bertahap dan menggunakan berbagai macam kriteria pada kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

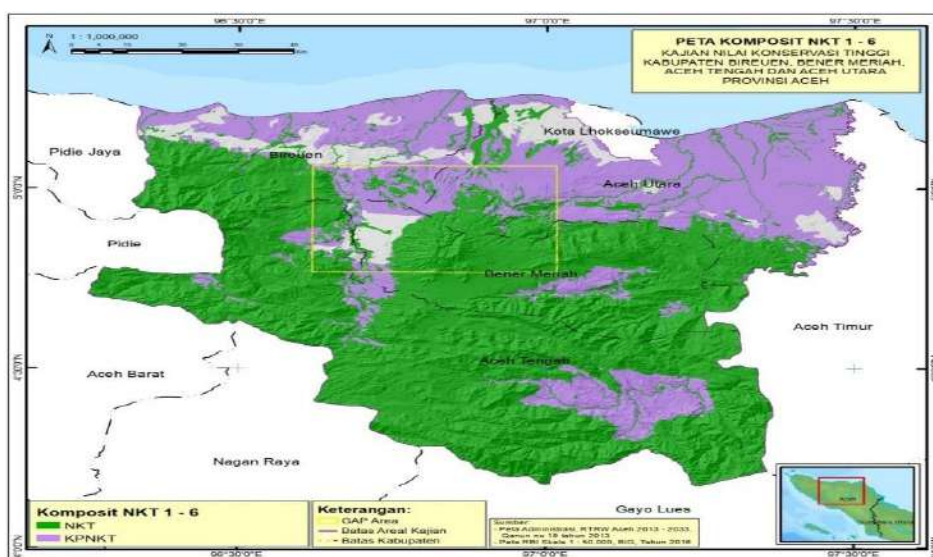
Tabel 2.2
Rekomendasi Hasil Analisis untuk Kabupaten Aceh Utara

Tipe Kawasan	Luas (Ha)	Bobot Analisis Multi kriteria	AHP Preferensi Parapihak	Rekomendasi Keputusan Akhir
NKT	69.434			
Hutan Lindung	7.715			
Tutupan lahan hutan	7.191	90%	Kawasan dilindungi	Kawasan dilindungi
Tutupan Lahan Non Hutan	524	90%	Kawasan dilindungi	Kawasan dilindungi
Hutan Produksi (HP)	21.509			
Tutupan lahan hutan	17.567	90%	Kawasan dilindungi	Kawasan dilindungi
Tutupan Lahan Non Hutan	3.943	90%	Kawasan dilindungi	Kawasan dilindungi
Areal Penggunaan Lain (APL)	38.335			
Tutupan lahan hutan	15.379	90%	Kawasan budidaya Penuh	Kawasan budidaya Penuh
Tutupan Lahan Non Hutan	22.956	90%	Kawasan budidaya penuh	Kawasan Budidaya Terbatas
Sempadan sungai atau tepian badan air	1.875			
Tutupan lahan hutan	95	90%	Kawasan dilindungi	Kawasan dilindungi
Tutupan Lahan Non Hutan	1.780	90%	Kawasan dilindungi	Kawasan dilindungi
KPNKT	175.047			
Hutan Produksi (HP)	6.248			
Tutupan lahan hutan	2	57%	Kawasan Budidaya Terbatas	Kawasan Budidaya Terbatas
Tutupan Lahan Non Hutan	6.246	57%	Kawasan Budidaya Penuh	Kawasan Budidaya Penuh
Areal Penggunaan Lain (APL)	168.723			
Tutupan Lahan Non hutan	168.723	57%	Kawasan Budidaya Penuh	Kawasan Budidaya Penuh
Sempadan sungai atau tepian badan air	76			
Tutupan Lahan Non Hutan	76	57%	Kawasan Budidaya Terbatas	Kawasan Budidaya Terbatas

Kabupaten Aceh Utara untuk kawasan terindikasi NKT direkomendasikan untuk dijadikan kawasan lindung. Pada kawasan ini terdapat habitat dan wilayah jelajah species *Capricornis sumatraensis*, harimau sumatera, orang hutan sumatera, Gajah

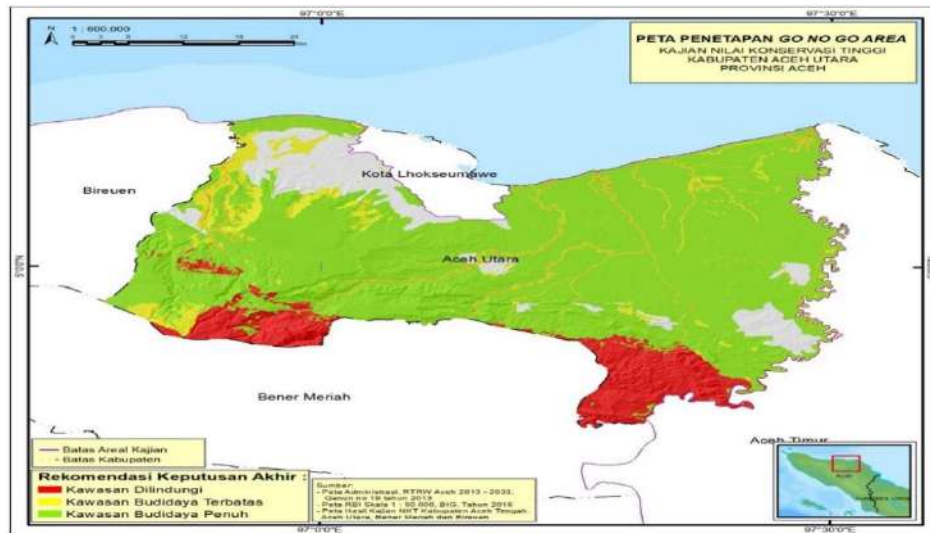
(*Elephas maximus*), *Helarctos malayanus* dan masuk dalam lingkup peta EBA. Pada wilayah Kabupaten Aceh Tengah juga terdapat ekosistem khas berupa hutan *dipterocarpa* campuran diatas batuan vulkanik, hutan *dipterocarpa* campuran di atas batuan, hutan *dipterocarpa* campuran hutan sedimen dan hutan karst. Rekomendasi keputusan ini diperkuat dengan preferensi masyarakat untuk menjadikan kawasan yang terindikasi NKT sebagai kawasan lindung. Namun pada kawasan dengan fungsi APL dapat digunakan untuk budidaya terbatas karena preferensi masyarakat adalah menjadikan kawasan ini sebagai kawasan budidaya penuh.

Pada kawasan KPNKT walaupun tidak luas namun keberadaannya memberi pengaruh pada keberadaan spesies RTE. Atas kondisi ini dan preferensi yang diberikan oleh para pihak maka rekomendasi yang bisa diberikan adalah peruntukan kawasan dengan budidaya terbatas pada areal sempadan sungai dan fungsi HP yang masih berpenutupan hutan. Budidaya yang dilakukan dengan tetap mempertahankan kawasan agar tetap berpenutupan hutan atau ditumbuhi oleh tanaman multispesies adalah untuk mendukung keberadaan kawasan terindikasi NKT. Pada areal fungsi HP berpenutupan non hutan dan APL dijadikan sebagai kawasan budidaya penuh yang bisa ditanami tanaman perkebunan monokultur. Peta areal yang dilindungi dan yang bisa dibudidayakan dapat dilihat pada Gambar 2.11 dan 2.12 berikut ini :



Sumber Data : WWF Indonesia 2021

Gambar 2.11
Peta Areal NKT DAS Krueng Peusangan



Sumber Data : WWF Indonesia 2021

Gambar 2.12
Peta Rekomendasi Peruntukan Kawasan Penting
Kabupaten Aceh Utara

3. Kawasan Peruntukan Pertanian
 - a. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kawasan sawah (pertanian lahan basah) merupakan pemantapan dari kawasan sawah yang ada dewasa ini dan direkomendasikan penambahan/perluasannya pada lahan-lahan yang potensial di sekitarnya dan berpotensi untuk dapat dilayani oleh jaringan irigasi/pengairan. Kendati dengan luas yang bervariasi, kawasan sawah terdapat di semua kecamatan. Total luas kawasan sawah ini adalah 46.901 Ha.

Kegiatan-kegiatan budaya atau ekonomi produksi lainnya yang potensial tergabung sebagai kegiatan sampingan/diversifikasi antara lain adalah :

- Perikanan air tawar, dengan pola mina-padi, kolam/tebat, kerambah pada saluran irigasi, dan penangkapan pada perairan tersebut;
- Peternakan, yang dapat terdiri atas ternak besar, ternak kecil, dan unggas (terutama itik atau bebek);
- Pertanian palawija/hortikultura, terutama sebagai tanaman selingan dalam kalender tanam, ataupun sebagai tanaman sela.

- b. Kawasan Pertanian Lahan Kering (Kebun Campuran)
Kawasan kebun campuran tersebar di semua kecamatan dengan luas mencapai 44.493 Ha Fungsi kawasan ini adalah sebagai kebun campuran, yang dicirikan oleh variasi tanaman yang beragam dan kegiatan budidaya lainnya meliputi : perumahan perdesaan yang terselip, industri kecil, peternakan, dan lain-lain.
- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Dengan prinsip bahwa hasil kegiatan sawah yaitu padi merupakan bahan pokok strategis bagi kebutuhan masyarakat, maka keberadaan kawasan sawah ini menjadi sangat penting dan sejauh mungkin dipertahankan luasnya. Apabila masih memungkinkan bagi pencetakan sawah baru pada daerah yang ada dukungan prasarana irigasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keberlanjutan lahan pangan di Kabupaten Aceh Utara. Luasan lahan pangan berkelanjutan mencapai 39.777 ha dari total luas kawasan untuk sawah.
- d. Kawasan Perkebunan
Kawasan perkebunan sebarannya terletak di bagian pedalaman wilayah dengan luasan mencapai 162.672 Ha. Pemanfaatan utama kawasan perkebunan adalah kegiatan budidaya perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.
- e. Kawasan Peternakan
Kawasan peternakan letaknya tersebar di Kabupaten Aceh Utara khususnya di bagian pedalaman wilayah dan tidak terdelineasi serta tersebar di seluruh kecamatan. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan lahan pengembalaan untuk sumber pakan ternak. Kawasan peternakan ini terselip pada kawasan pertanian, kawasan perkebunan dan sebagian kawasan permukiman yang memiliki lahan terbuka hijau. Jenis ternak yang potensial untuk dikembangkan terdiri atas ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Ternak besar yang dapat dibudidayakan seperti lembu dan kerbau akan terpusat di Bukit Sentang Kecamatan Lhoksukon, sedangkan ternak kecil adalah kambing dan kelinci.

Ternak unggas yang potensial dibudidayakan adalah itik atau bebek.

4. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan tambak merupakan pemantapan dari kawasan tambak yang ada dewasa ini sebarannya adalah di bagian wilayah pesisir, dengan kecenderungan sebaran yang lebih besar di bagian timur. Total luas kawasan tambak adalah 12.174 Ha sedangkan Perikanan tangkap kurang lebih seluas 37.744 Ha. Rencana pengelolaan kawasan tambak adalah pemanfaatan utama untuk kegiatan tambak yang didukung oleh sistem saluran untuk kebutuhan airnya. Pengembangan potensi serta kawasan peruntukan perikanan didukung dengan pengembangan prasarana perikanan berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuala Cangkoy.

5. Kawasan Peruntukkan Pertambangan

Potensi tambang yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas :

a. Potensi pertambangan mineral logam terdiri dari:

- Emas, meliputi : Kecamatan Murah Mulia;
- Kromium/Emas Putih, meliputi : Kecamatan Geureudong Pase, Meurah Mulia, Paya Bakong, Pirak Timu, Cot Girek; dan
- Besi, meliputi Kecamatan Paya Bakong.

b. Potensi pertambangan mineral non logam terdiri dari :

- Andesit meliputi : Kecamatan Sawang
- Bentonit, meliputi : Kecamatan Sawang
- Stronsium, meliputi : Kecamatan Sawang dan Tanah Luas

c. Potensi pertambangan batuan terdiri dari :

- Batu gunung meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Nisam, Sawang, Simpang Keuramat, Geureudong Pase.
- Pasir meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Sawang, Geureudong Pase, Paya Bakong, Langkahan.
- Pasir urug meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Sawang, Geureudong Pase, Paya Bakong, Langkahan.
- Batu Kapur meliputi : Kecamatan Muara Batu.
- Tanah liat meliputi : Kecamatan Cot Girek, dan Muara Batu

- d. Potensi pertambangan batubara, meliputi : Kecamatan Sawang, Nisam Antara, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Geureudong Pase, Syamtalira Bayu, Meurah Mulia, Nibong, Tanah Luas, Paya Bakong, Pirak Timu, Lhoksukon, Baktiya, Cot Girek, Langkahan, Tanah Jambo Aye; dan
- e. Potensi panas bumi potensi energi panas bumi berada di Kecamatan Nisam Antara.
- f. Bahan tambang dari dalam perut bumi, yang dalam hal ini berupa gas alam, seperti yang telah dieksploitasi oleh Perusahaan EMOI (Exxon Mobil Oil Indonesia) yang dikenal dengan LNG Arun, instalasi tambang gas melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah dengan luas area kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektar; meliputi :
 - Kecamatan Syamtalira Aron,
 - Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Nibong,
 - Kecamatan Matangkuli,
 - Kecamatan Paya Bakong,
 - Kecamatan Cot Girek; dan
 - Kecamatan Langkahan.

Bahan tambang dari dalam perut bumi berupa gas alam ini potensi depositnya bersifat antar wilayah, yaitu Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur. Bahan tambang Galian C dieksploitasi baik di daratan (berupa tanah urug, tanahliat, dan batu kapur), maupun di perairan sungai, dan terutama di tepi sungai (pasir, sirtu, batu, kerikil).

6. Kawasan Peruntukan Industri

a. Kawasan Industri Sedang

Kawasan peruntukan industri sedang berada di Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Geureudong Pase, Kecamatan Simpang Keuramat. Kawasan peruntukan industri sedang yang ada di Kabupaten Aceh Utara merupakan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.

b. Kawasan Industri Kecil

Kawasan industri kecil tersebar pada beberapa kecamatan, dan banyak terselip kawasan permukiman. Kawasan industri kecil

terdiri dari sentra-sentra industri rumahan (home industry). Kegiatan industri kecil ini merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat kecil khususnya yang berada di pedesaan. Terdapat variasi hasil industri kecil yang potensial untuk dikembangkan. Hasil industri kecil di Kecamatan Tanah Jambo Aye yang dapat dikembangkan adalah industri produk pisang sale, di Kecamatan Dewantara (Ulee Pulo dan Ulee Reuleung) adalah industri pembuatan batu bata, di Kecamatan Muara Batu (Bungkah) dan Kecamatan Baktiya adalah industri produk kerajinan souvenir khas Aceh.

7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Aceh Utara diklasifikasikan menurut lokasi dan bentuk objeknya, yaitu :

a. Pariwisata Budaya

Pariwisata budaya yang dikembangkan adalah objek wisata budaya,

yaitu :

- Makam Malikussaleh dan Malikul Dhahir, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk 44, di Kec. Samudera;
- Makam Naina Husam Al-Din, di Kec. Samudera;
- Makam Sidi Abdullah Tajul Nilah, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk Syarif, di Kec. Samudera;
- Makam Sultanah Nahrisyah, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk Batee Bale A, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk Batee Bale B, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk Saleh Salihin, di Kec. Samudera;
- Makam Maulana Abdurrahman Al-Fasi, di Kec. Samudera;
- Makam Said Syarif, di Kec. Samudera;
- Makam Perdana Menteri M.Yacob, di Kec. Samudera;
- Makam Raja Muhammad Mns Nibong di Kec. Syamtalira Bayu;
- Makam Putra Raja Syuhada Cot Plieng, Kec. Syamtalira Bayu;
- Makam Ratu Al'Ala Binti Malikul Dahir, di Kec. Pirak Timu;
- Makam Tgk Mursalah Ibnu Talabuddin, Kec. Syamtalira Aron;
- Makam Tgk Meunasah Reulob, di Kec. Syamtalira Aron;

- Makam Raja Purupi, di Kec. Syamtalira Aron;
- Makam Tgk Jrat Manyang, di Kec. Baktiya Barat;
- Makam Tgk Di Glumpang, di Kec. Baktiya Barat;
- Makam Tgk Di Padang, di Kec. Baktiya;
- Makam Tgk Batee Badan, di Kec. Tanah Jambo Aye;
- Makam Glewang Anval, di Kec. Tanah Jambo Aye;
- Makam Tgk Pantee Keurajen, di Kec. Sawang;
- Rumah Adat Cut Meutia, di Kec. Matangkuli;
- Makam Cut Meutia, di Kec. Cot Girek.

b. Pariwisata Alam

- Objek wisata di pesisir pantai, berupa : Pantai Bantayan di Gampong Bantayan, Pantai Ulee Rubek di Gampong Ulee Rubek Timu dan Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon, Pantai Sawang di Gampong Sawang Kec. Samudera, Pantai Lancok di Gampong Lancok Kec. Syamtalira Bayu, Pantai Pusong di Gampong Bangka Jaya Kec. Dewantara; Pantai Dakuta Bungkah di Gampong Bungkah Kec. Muara Batu.
- Objek wisata di pedalaman, berupa : Air Terjun Blang Kulam dan Rayap di Gampong Panton Rayeuk I, Lhok Seulayang di Gampong Lhok Jok, Krueng Saweuk di Gampong Saweuk Kec. Kuta Makmur, Air Terjun Seumirah di Kd. Seumirah, Wisata Gunung Salak di Gampong Alue Dua Kec. Nisam Antara, Air terjun tujuh bidadari di Kec. Geureudong Pase, Pemandian Krueng Sawang di Gampong Sawang Kec. Sawang, dan Pusat Konservasi Gajah (PKG) di Kec. Cot Girek.

8. Kawasan Budidaya Lainnya

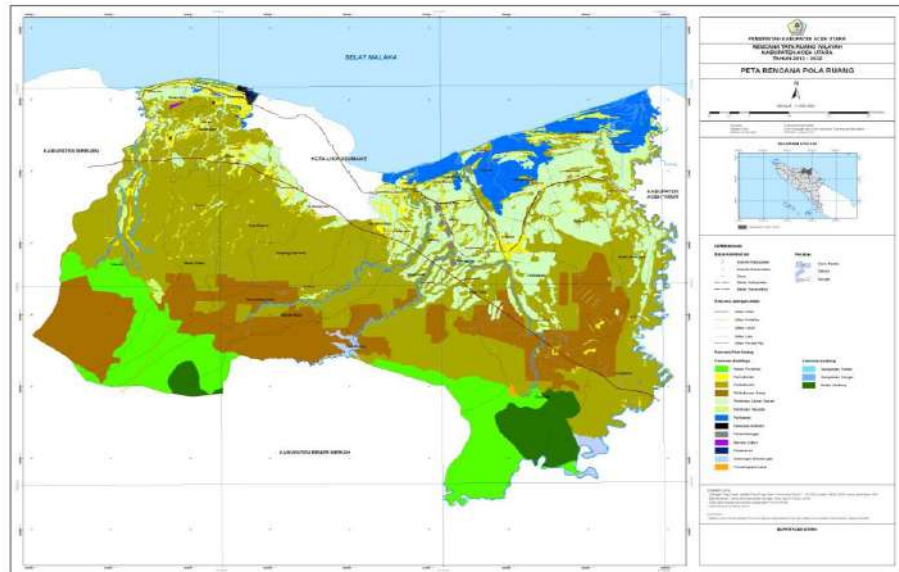
a. Kawasan Pelabuhan dan Bandar Udara

Kawasan pelabuhan adalah Pelabuhan Lhokseumawe di Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, dengan luas 166 Ha. Pelabuhan ini dapat melayani kegiatan bongkar muat umum (pelabuhan umum) maupun bongkar muat khusus industri besar (pelabuhan khusus) untuk tujuan luar negeri dan dalam negeri (antar provinsi). Melayani angkutan penyeberangan luar negeri antara Lhokseumawe - Penang/Langkawi (Malaysia). Pelabuhan ini ditetapkan sebagai Pelabuhan Laut Internasional,

terkait dengan dukungannya terhadap fungsi PKN Lhokseumawe.

- b. Kawasan Bandar Udara adalah kompleks Bandar Udara Malikussaleh di Kecamatan Muara Batu, dengan luas 83 Ha. Bandara udara ini merupakan bagian dari dukungannya terhadap fungsi PKN Lhokseumawe sehingga diusulkan sebagai bandar udara pengumpan. Bandara ini sebelumnya dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dan saat ini sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pertimbangan keterbatasan anggaran maka Bandar Udara Malikussaleh telah dilakukan pengalihan asset dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Kementerian Perhubungan pada tahun 2019. Rute penerbangan yang dilayani saat ini yaitu Muara Batu-Medan.
- c. Kawasan Pertanian Terpadu
Kawasan pengembangan pertanian terpadu terletak di tengah kawasan hutan produksi di Kecamatan Sawang dengan luasan 430 Ha. Berdasarkan karakter lokasinya, maka kegiatan pertanian yang dikembangkan adalah merupakan pertanian pada lahan kering, baik berupa perkebunan atau pertanian lahan kering maupun pertanian ikutan lainnya seperti peternakan, industri pengolahan hasil pertanian, dan lainnya.
- d. Wilayah Laut Kewenangan
Panjang garis pantai mencapai 51 km sehingga berdasarkan kewenangan kabupaten sampai dengan 4 mil laut, maka luas wilayah laut kewenangan mencapai 37.744 Ha. Pemanfaatan wilayah laut kewenangan saat ini masih terbatas pada bentuk pemanfaatan penangkapan ikan oleh para nelayan di pesisir, dan sebagai alur pelayaran menuju dan dari pelabuhan laut Lhokseumawe di Krueng Geukueh. Peluang pengembangan pemanfaatan selain untuk perikanan tangkap dapat juga untuk kegiatan wisata bahari, potensi tambang di bawah laut, jalur pelayaran tepi pantai, dan lainnya.

- e. Kawasan Waduk Krueng Jambo Aye dan Krueng Keureuto
Kawasan Waduk Krueng Jambo Aye terletak di Kecamatan Langkahan yang memanfaatkan aliran Sungai Krueng Jambo Aye. Waduk yang dibangun dengan kapasitas 1,5 milyar m³ direncanakan digunakan selain sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk memenuhi kebutuhan listrik wilayah I Aceh dengan kapasitas 235 MW, juga dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi untuk mengairi 55.700 Ha lahan persawahan, sebagai sumber air baku dengan debit 11,6 m³/det dan pengendalian banjir (daerah Langkahan, Tanah Jambo Aye, Baktiya dan Seunuddon), serta tempat rekreasi dan olah raga. Luas daerah genangan waduk ini direncanakan kurang lebih 2.745 Ha yang meliputi wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur.
- f. Kawasan Waduk Krueng Keureuto terletak di Kecamatan Paya Bakong dan Kecamatan Tanah Luas yang memanfaatkan aliran Sungai Krueng Keureuto. Fungsi waduk ini adalah selain sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 3,27 MW juga dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi untuk mengairi 4.568 Ha lahan persawahan, untuk pengendalian banjir dengan besar kendali 29,94 juta m² (banjir Paya Bakong, Pirak Timu, Matangkuli, Lhoksukon, Tanah Luas, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, Lapang) serta tempat rekreasi dan olah raga. Luas daerah genangan waduk ini direncanakan kurang lebih 710 Ha.



Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

Gambar 2.13
Peta Pola Ruang Kabupaten Aceh Utara

9. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan berdasarkan jenis bencana yang terjadi, yaitu :

- a. Bencana longsor, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Gunci dan Gampong Riseh Teungoh (Kecamatan Sawang), Gampong Pase Sentosa (Kecamatan Geureudong Pase), Meunasah Leubok Kliet (Kecamatan Meurah Mulia), Gampong Meuria Matangkuli (Kecamatan Matangkuli), Gampong Alue Semambu (Kecamatan Cot Girek);
- b. Bencana gelombang pasang, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye);
- c. Bencana banjir, Kawasan rawan banjir berada di tepi aliran sungai dan anak sungai mencakup: a) Krueng Jambo Aye di Kecamatan Langkahan; b) Krueng Pase di Kecamatan Syamtalira

- Aron, Kecamatan Tanah Luas, dan Kecamatan Samudera; c) Krueng Mane di Kecamatan Muara Batu; d) Krueng Sawang di Kecamatan Sawang dan Kecamatan Muara Batu; e) Krueng Keureuto di Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Lhoksukon, dan Kecamatan Lapang; f) Krueng Peuto; g) Krueng Geukeuh di Kecamatan Dewantara; dan h) Krueng Buloh di Kecamatan Kuta Makmur);
- d. Bencana gempa bumi dan Bencana tsunami, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Pante Gurah dan pinto Makmur (Kecamatan Muara Batu), Gampong Uteun Geulinggang, Gampong Kd. Krueng Geukeuh, Gampong Paloh Igeuh, dan Gampong Tambon Baroh (Kecamatan Dewantara), Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye).

2.1.1.3 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020 sebanyak 602.793 jiwa. Luas wilayah 3.296,86 km² maka kepadatan penduduk mencapai 183 jiwa/km² dengan sebaran di 27 kecamatan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Lhoksukon sebanyak 49.733 jiwa, sedangkan kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Dewantara mencapai 1.162 jiwa/Km². Sebaliknya jumlah dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Geureudong Pase 5.534 jiwa dengan kepadatan 21 jiwa/Km², sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara, Luas wilayah dan
Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk(Jiwa/Km ²)
1.	Sawang	39.063	384,65	102
2.	Nisam	19.663	114,74	171
3.	Nisam Antara	13.465	84,38	160
4.	Banda Baro	7.926	42,35	187
5.	Kuta Makmur	26.379	151,32	174
6.	Simpang Kramat	9.957	79,78	125
7.	Syamtalira Bayu	22.393	77,53	289
8.	Geureudong Pase	5.534	269,28	21
9.	Meurah Mulia	21.024	202,57	104
10.	Matangkuli	18.756	56,94	329
11.	Paya Bakong	15.555	418,32	37
12.	Pirak Timu	8.799	67,70	130
13.	Cot Girek	20.305	189,00	107
14.	Tanah Jambo Aye	44.222	162,98	271
15.	Langkahan	22.518	150,52	150
16.	Seunuddon	25.982	100,63	258
17.	Baktiya	37.657	158,67	237
18.	Baktiya Barat	18.980	83,08	228
19.	Lhoksukon	49.733	243,00	205
20.	Tanah Luas	25.193	30,64	822
21.	Nibong	10.778	44,91	240
22.	Samudera	27.147	43,28	627
23.	Syamtalira Aron	19.345	28,13	688
24.	Tanah Pasir	9.978	20,38	490
25.	Lapang	8.806	19,27	457
26.	Muara Batu	27.753	33,34	832
27.	Dewantara	45.882	39,47	1.162
TOTAL		602.793	3.296,86	183

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

Bila dilihat dari letaknya, maka dapat diindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar jalan nasional cenderung mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk lebih besar.

1. Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi penduduk Kabupaten Aceh Utara periode tahun 2017-2020 tersebar di 27 Kecamatan ditunjukkan dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara
menurut Kecamatan Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sawang	39.175	38.769	39.470	39.063	39.470
2	Nisam	19.404	19.350	19.700	19.663	19.853
3	Nisam Antara	13.740	13.786	14.035	13.465	13.554
4	Banda Baro	8.185	8.330	8.481	7.926	7.951
5	Kuta Makmur	25.244	25.085	25.539	26.379	26.742
6	Simpang Keuramat	9.788	9.904	10.083	9.957	10.049
7	Syamtalira Bayu	21.471	21.380	21.767	22.393	22.671
8	Geureudong Pase	4.907	5.109	5.202	5.534	5.631
9	Meurah Mulia	20.153	20.085	20.448	21.024	21.306
10	Matangkuli	18.913	18.866	19.208	18.756	18.927
11	Paya Bakong	14.422	14.455	14.717	15.555	15.804
12	Pirak Timu	8.302	8.444	8.597	8.799	8.912
13	Cot Girek	21.147	21.061	21.442	20.305	20.428
14	Tanah Jambo Aye	45.968	45.442	46.264	44.222	44.578
15	Langkahan	23.951	23.816	24.247	22.518	22.591
16	Seunuddon	26.536	26.354	26.831	25.982	26.162
17	Baktiya	38.018	37.632	38.313	37.657	38.057
18	Baktiya Barat	19.518	19.461	19.813	18.980	19.117
19	Lhoksukon	51.679	51.050	51.974	49.733	50.134
20	Tanah Luas	25.538	25.374	25.833	25.193	25.425
21	Nibong	10.277	10.385	10.573	10.778	10.921
22	Samudera	28.393	28.178	27.147	27.147	27.326
23	Syamtalira Aron	18.949	18.902	19.345	19.345	19.576
24	Tanah Pasir	9.345	9.469	9.978	9.978	10.110
25	Lapang	8.936	9.067	9.231	8.806	8.864
26	Muara Batu	28.486	28.270	28.782	27.753	27.996
27	Dewantara	50.990	50.373	51.285	45.882	45.951
	Jumlah	602.554	608.397	619.407	602.793	608.106

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

2. Pertumbuhan Penduduk

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Secara umum Angka Pertumbuhan Penduduk menggambarkan perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi penduduk. Tabel 2.5 berikut menampilkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2010 dan 2020.

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 dan 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
		2010	2020	2010	2020
1.	Sawang	34.024	39.063	2,06	1,39
2.	Nisam	17.255	19.663	1,08	1,31
3.	Nisam Antara	12.195	13.465	0,60	1,00
4.	Banda Baro	7.437	7.926	0,24	0,64
5.	Kuta Makmur	22.208	26.379	0,86	1,74
6.	Simpang Keuramat	8.781	9.957	3,58	1,26
7.	Syamtalira Bayu	19.110	22.393	2,31	1,60
8.	Geureudong Pase	4.484	5.534	1,94	2,13
9.	Meurah Mulia	17.756	21.024	0,89	1,70
10.	Matangkuli	16.558	18.756	1,12	1,25
11.	Paya Bakong	12.794	15.555	1,70	1,97
12.	Pirak Timu	7.474	8.799	1,66	1,65
13.	Cot Girek	18.492	20.305	-0,48	0,94
14.	Tanah Jambo Aye	39.461	44.222	1,95	1,15
15.	Langkahan	21.090	22.518	3,91	0,66
16.	Seunuddon	23.457	25.982	3,81	1,03
17.	Baktiya	32.731	37.657	1,41	1,41
18.	Baktiya Barat	17.082	18.980	1,11	1,06
19.	Lhoksukon	44.358	49.733	1,87	1,15
20.	Tanah Luas	22.217	25.193	1,40	1,27

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
		2010	2020	2010	2020
21.	Nibong	9.121	10.778	0,45	1,68
22.	Samudera	24.589	27.147	2,31	0,99
23.	Syamtalira Aron	16.591	19.345	2,15	1,55
24.	Tanah Pasir	8.445	9.978	2,61	1,68
25.	Lapang	7.974	8.806	1,14	1,00
26.	Muara Batu	24.585	27.753	3,08	1,22
27.	Dewantara	43.797	45.882	1,15	0,47
TOTAL		534.085	602.793	1,69	1,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

b. Perkembangan Pertumbuhan Penduduk

Gambaran perkembangan pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Perkembangan Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan	Angka Pertumbuhan Penduduk (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sawang	1,55	2,12	1,78	1,39	1,04
2	Nisam	1,53	1,89	1,57	1,31	0,97
3	Nisam Antara	1,53	2,00	1,68	1,00	0,66
4	Banda Baro	1,58	1,87	1,56	0,64	0,32
5	Kuta Makmur	1,54	1,99	1,67	1,74	1,38
6	Simpang Kramat	1,50	1,97	1,65	1,26	0,92
7	Syamtalira Bayu	1,51	1,85	1,54	1,60	1,24
8	Geureudong Pase	1,50	2,12	1,78	2,13	1,75
9	Meurah Mulia	1,56	2,01	1,68	1,70	1,34
10	Matangkuli	1,53	2,12	1,78	1,25	0,91
11	Paya Bakong	1,52	2,00	1,67	1,97	1,60
12	Pirak Timu	1,53	2,00	1,67	1,65	1,28
13	Cot Girek	1,51	2,11	1,77	0,94	0,61
14	Tanah Jambo Aye	1,53	2,27	1,92	1,15	0,81
15	Langkahan	1,48	1,98	1,65	0,66	0,32
16	Seunuddon	1,52	1,91	1,60	1,03	0,69
17	Baktiya	1,54	2,25	1,89	1,41	1,06
18	Baktiya Barat	1,52	2,12	1,78	1,06	0,72
19	Lhoksukon	1,52	2,27	1,91	1,15	0,81
20	Tanah Luas	1,52	2,15	1,81	1,27	0,92
21	Nibong	1,55	2,11	1,77	1,68	1,33
22	Samudera	1,52	2,20	1,85	0,99	0,66

No.	Kecamatan	Angka Pertumbuhan Penduduk (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
23	Syamtalira Aron	1,54	2,12	1,78	1,55	1,19
24	Tanah Pasir	1,56	189	1,57	1,68	1,32
25	Lapang	1,54	2,10	1,75	1,00	0,66
26	Muara Batu	1,53	2,25	1,90	1,22	0,88
27	Dewantara	1,53	2,26	1,90	0,47	0,15
Jumlah		1,53	2,12	1,78	1,22	0,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara periode 2017–2020 merupakan perkembangan perekonomian Kabupaten Aceh Utara selama 5 (lima) tahun terakhir. Perlu diinformasikan bahwa data yang telah direvisi yaitu tahun 2019 dan akan menjadi angka tetap, tahun 2020 masih bersifat sementara dan tahun 2021 masih sangat sementara.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut harga berlaku karena seluruh agregat nilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam hal ini digunakan harga tahun 2010.

Tabel 2.7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Aceh Utara Menurut Lapangan Usaha (Milliar Rupiah) Tahun 2017-2021

No.	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2017	2018	2019r	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.987,64	6.381,92	6.714,77	7.164,37	7.492,14
B	Pertambangan dan Penggalian	2.883,48	3.352,04	3.476,58	3.103,02	5.370,81
C	Industri Pengolahan	1.703,13	1.823,60	1.714,52	1.663,78	1.878,07
D	Listrik dan Gas	15,53	16,83	18,15	18,79	18,78
E	Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,03	4,38	5,48	5,49	5,79
F	Konstruksi	979,09	1.033,89	1.113,90	1.207,58	1.219,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.229,64	2.352,47	2.428,47	2.325,64	2.564,11
H	Transportasi dan Pergudangan	979,11	953,19	982,37	799,84	996,02

No.	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2017	2018	2019r	2020*	2021**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	91,49	104,22	116,22	118,31	118,51
J	Informasi dan Komunikasi	295,60	293,12	309,22	333,61	367,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	279,70	291,19	337,26	337,41	338,61
L	Real Estate	501,22	533,01	580,01	596,51	628,95
M,N	Jasa Perusahaan	53,63	56,59	59,99	61,29	62,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	598,00	645,26	701,86	722,28	788,93
P	Jasa Pendidikan	302,95	337,87	396,37	443,69	475,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	400,63	426,38	489,38	553,33	613,86
R,S, T,U	Jasa Lainnya	197,52	209,39	230,39	247,73	252,79
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17.502,34	18.815,38	19.674,95	19.702,65	23.192,24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		14.843,04	15.674,82	16.425,39	16.840,67	n/a

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Utara
(Milyar rupiah), Tahun 2017-2021

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019r	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.522,90	4.702,79	4.894,40	5.046,48	5.054,11
B	Pertambangan dan Penggalian	3.754,80	3.965,26	4.155,54	4.494,14	3.971,66
C	Industri Pengolahan	1.683,88	1.883,77	1.702,24	1.586,65	1.594,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,23	16,25	17,44	18,29	18,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,55	2,70	3,38	3,35	3,53
F	Konstruksi	769,88	792,47	832,24	876,14	872,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.818,17	1.887,50	1.947,79	1.850,18	1.965,14
H	Transportasi dan Pergudangan	840,84	858,16	899,38	703,05	871,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	64,18	70,04	75,01	74,11	73,96
J	Informasi dan Komunikasi	259,51	264,89	278,32	302,93	332,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	193,94	194,83	220,58	221,76	210,49
L	Real Estate	398,28	414,87	440,29	435,49	458,65
M,N	Jasa Perusahaan	45,15	47,14	49,09	48,12	48,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	446,99	469,55	492,60	476,53	506,33
P	Jasa Pendidikan	233,34	252,41	274,62	283,11	301,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	339,47	357,62	392,86	413,07	453,87
R,S, T,U	Jasa lainnya	155,83	163,47	176,89	184,06	185,57
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		15.544,94	16.286,46	16.852,70	17.017,45	16.924,10
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		11.981,81	12.508,88	12.885,77	12.712,88	n/a

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

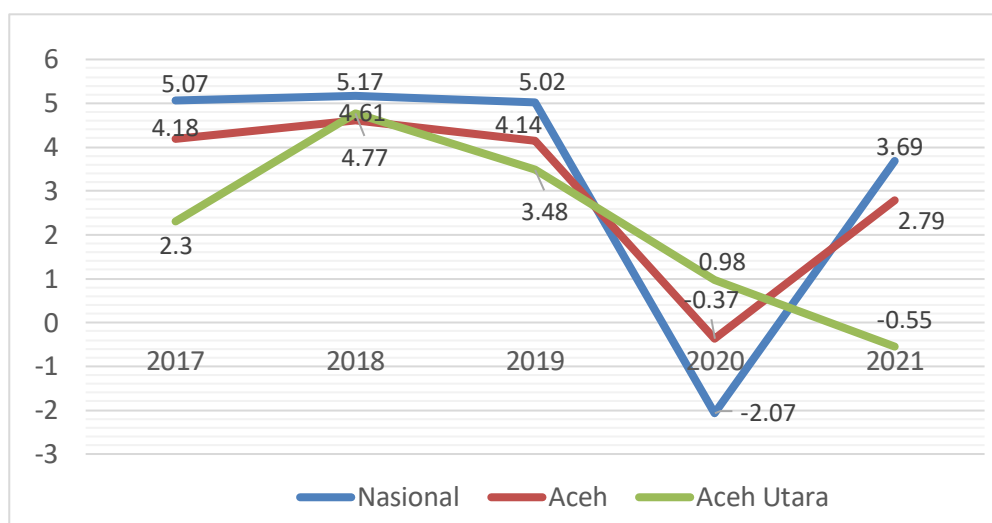
r Angka revisi

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2017–2021 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8. Nilai PDRB ADHB Aceh Utara selama periode 2017-2021 cenderung meningkat yaitu dari 17,5 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 23,19 triliun rupiah di tahun 2021. Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha selama periode 2017-2020 cenderung meningkat yaitu dari 15,54 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 17,02 triliun rupiah di tahun 2020, namun pada tahun 2021 menurun menjadi 16,92 triliun rupiah yang disebabkan oleh menurunnya PDRB pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian dari 4,49 triliun rupiah menjadi 3,97 triliun rupiah.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara menurut ADHK 2010 selama tahun 2017-2021 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan berada di bawah Aceh dan nasional sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.14 berikut ini. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan dari 3,48 menjadi 0,98 akibat dampak dari pandemi Covid-19, tetapi masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Aceh dan nasional. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar -0,55 akibat penurunan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Gambar 2.14
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2021 menurut lapangan dapat dilihat pada Tabel 2.9, yang menggambarkan beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi antara lain industri pengolahan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar -22,62 persen, -7,21 persen pada tahun 2019 dan -6,79 persen pada tahun 2020. Lapangan usaha industri pengolahan ini sangat dipengaruhi oleh produksi PT. Pupuk Iskandar Muda (PT.PIM) yang tidak dapat beroperasi normal karena pasokan bahan baku yang tidak stabil. Pada tahun 2020, beberapa lapangan usaha mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 diantaranya industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan transportasi dan perdagangan.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019r	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,24	3,98	4,07	3,11	0,15
B	Pertambangan dan Penggalian	5,99	5,40	5,00	8,15	-11,63
C	Industri Pengolahan	-22,62	8,94	-7,21	-6,79	0,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,94	6,69	7,29	4,88	0,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,82	6,17	25,06	-0,95	5,37
F	Konstruksi	8,11	2,93	5,02	5,27	-0,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,87	3,81	3,19	-5,01	6,21
H	Transportasi dan Pergudangan	4,33	2,03	4,83	-21,83	23,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,60	9,12	7,11	-1,20	-0,21
J	Informasi dan Komunikasi	2,20	2,07	5,07	8,84	9,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,93	0,46	13,22	0,53	-5,08
L	Real Estate	9,61	4,17	6,13	-1,09	5,32
M,N	Jasa Perusahaan	3,91	4,41	4,15	-1,99	1,66
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,46	5,05	4,91	-3,26	6,25
P	Jasa Pendidikan	11,67	8,18	8,80	3,09	6,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,65	5,35	9,85	5,14	9,88
R,S, T,U	Jasa lainnya	9,89	4,90	8,21	4,05	0,82
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2,30	4,77	3,48	0,98	-0,55
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS	1,09	4,40	3,01	-1,36	n/a

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

r Angka revisi

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Ditinjau dari distribusi persentase PDRB ADHB, struktur perekonomian Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2021 masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan) dengan kontribusi terendah sebesar 32,30 persen pada tahun 2021 dan tertinggi 36,36 persen pada tahun 2020. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi sektor terbesar kedua dengan kontribusi terendah sebesar 15,75 persen pada tahun 2020 dan tertinggi sebesar 23,16 persen pada tahun 2021. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor terbesar ketiga, kontribusinya cenderung menurun dari 12,74 persen pada tahun 2017 menjadi 11,06 persen pada tahun 2021. Sektor industri pengolahan menjadi sektor terbesar keempat, kontribusinya cenderung menurun dari 9,73 persen pada tahun 2017 menjadi 8,10 persen pada tahun 2021. Perkembangan distribusi PDRB Kabupaten Aceh Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2017-2021

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019r	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,21	33,92	34,13	36,36	32,30
B	Pertambangan dan Penggalian	16,47	17,82	17,67	15,75	23,16
C	Industri Pengolahan	9,73	9,69	8,71	8,44	8,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,10	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
F	Konstruksi	5,59	5,49	5,66	6,13	5,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,74	12,50	12,34	11,80	11,06
H	Transportasi dan Pergudangan	5,59	5,07	4,99	4,06	4,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,52	0,55	0,59	0,60	0,51
J	Informasi dan Komunikasi	1,69	1,56	1,57	1,69	1,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,60	1,55	1,71	1,71	1,46
L	Real Estate	2,86	2,83	2,95	3,03	2,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,31	0,30	0,30	0,31	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,42	3,43	3,57	3,67	3,40
P	Jasa Pendidikan	1,73	1,80	2,01	2,25	2,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,29	2,27	2,49	2,81	2,65
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,13	1,11	1,17	1,26	1,09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

r Angka revisi
* Angka sementara
** Angka sangat sementara

PDRB pengeluaran ADHB dari tahun 2017-2021 cenderung meningkat dari 7,5 Triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 23,19 triliun rupiah pada tahun 2021. Kontribusi terbesar pada sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga yang meningkat dari 10,02 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 12,18 triliun rupiah pada tahun 2021. Perkembangan PDRB pengeluaran ADHK Tahun 2010 di Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2020 cenderung meningkat dari 15,54 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 17,02 triliun rupiah pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 turun menjadi 16,92 triliun rupiah. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut jenis pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.11 dan Tabel 2.12

Tabel 2.11
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
 Jenis Pengeluaran di Kabupaten Aceh Utara (Milyar Rupiah)
 Tahun 2017-2021**

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019r	2020*	2021**
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10.018,04	10.546,86	11.190,66	11.252,34	12.175,34
B	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	342,29	379,62	418,28	429,83	434,31
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.726,20	2.742,12	2.848,28	2.650,74	2.899,02
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.288,98	5.759,57	6.236,21	6.588,65	7.244,57
E	Perubahan Inventori	183,10	259,61	218,10	94,51	53,53
F	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.056,26	-872,39	-1.236,58	-1.313,43	385,47
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17.502,34	18.815,38	19.674,95	19.702,65	23.192,24

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

r Angka revisi
 * Angka sementara
 ** Angka sangat sementara

Tabel 2.12
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut
 Jenis Pengeluaran di Kabupaten Aceh Utara (Milyar Rupiah),
 Tahun 2017-2021**

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019r	2020*	2021**
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.639,32	7.907,84	8.172,49	8.081,07	8.025,71
B	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	240,10	258,12	283,11	280,68	281,13
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.102,05	2.144,59	2.221,18	2.039,63	2.040,61

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019r	2020*	2021**
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.352,80	4.550,20	4.802,87	5.048,65	5.049,63
E	Perubahan Inventori	37,07	82,84	109,66	90,39	25,76
F	Net Ekspor Barang dan Jasa	1.173,61	1.342,86	1.263,39	1.477,04	1.501,25
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	15.544,94	16.286,46	16.852,70	17.017,45	16.924,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

r Angka revisi

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

2. Laju Inflasi

Laju Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Laju inflasi Kabupaten Aceh Utara disetarakan dengan Kota Lhokseumawe. Perkembangan inflasi Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe selama 5 tahun terakhir mengalami kondisi fluktuatif, dimana pada tahun 2018 realisasi inflasi sebesar 2,05 persen turun menjadi 1,2 persen pada tahun 2019, dan pada 2020 inflasi tersebut cenderung naik kembali menjadi 3,55 persen dan pada tahun 2021 turun menjadi 1,87 persen. Untuk inflasi Aceh juga fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebesar 1,84 persen turun menjadi 1,69 persen pada tahun 2019 meningkat kembali sebesar 3,59 persen dan tahun 2021 turun menjadi 2,24. Sedangkan inflasi secara nasional terus mengalami ke arah yang lebih baik dan menurun selama 5 tahun terakhir dari 3,13 persen tahun 2018 menjadi 1,68 persen tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 1,87 persen pada tahun 2021.

Tabel 2.13
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017 -2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lhokseumawe/ Aceh Utara	2,87	2,05	1,2	3,55	1,97
Aceh	4,25	1,84	1,69	3,59	2,24
Nasional	3,61	3,13	2,37	1,68	1,87

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh 2022 dan Bank Indonesia KPW Lhokseumawe

3. Pendapatan Regional Perkapita

Angka PDRB mencerminkan produktivitas secara umum, tanpa mempertimbangkan pembagiannya ke masing-masing penduduk. Dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk, akan diketahui tingkat produktivitas per kapita (PDRB per kapita). PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk sesuatu daerah. Untuk membandingkan kesejahteraan antar daerah yang sering dipakai adalah PDRB per kapita ADHB sedangkan untuk membandingkan antar waktu, PDRB perkapita ADHK lebih tepat. Perkembangan PDRB per kapita ADHK Aceh Utara dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat dari Rp 25,80 juta pada tahun 2017 menjadi Rp.28,29 juta pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 turun sebesar -1,63 persen menjadi Rp. 27,83 juta. Untuk perkembangan ADHB pada tahun 2017 mencapai 29,05 Juta terus meningkat sampai dengan tahun 2021 sebesar 38,14 Juta.

Tabel 2.14
PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

Nilai PDRB (milliar rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021
ADHB	17.502,34	18.815,38	19.674,95	19.702,65	23.192,24
ADHK	15.544,94	16.286.46	16.852,70	17.017,45	16.924,10
PDRB Perkapita (juta rupiah)					
ADHB	29,05	30,77	31,96	32,76	38,14
ADHK	25,80	26,64	27,37	28,29	27,83
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB	3,25	5,94	3,85	2,50	16,43
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010	0,76	3,25	2,77	3,35	-1,63
Jumlah Penduduk (ribu orang)	603	611	616	602	608
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1.53	1,47	0,69	-2,30	1,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2022

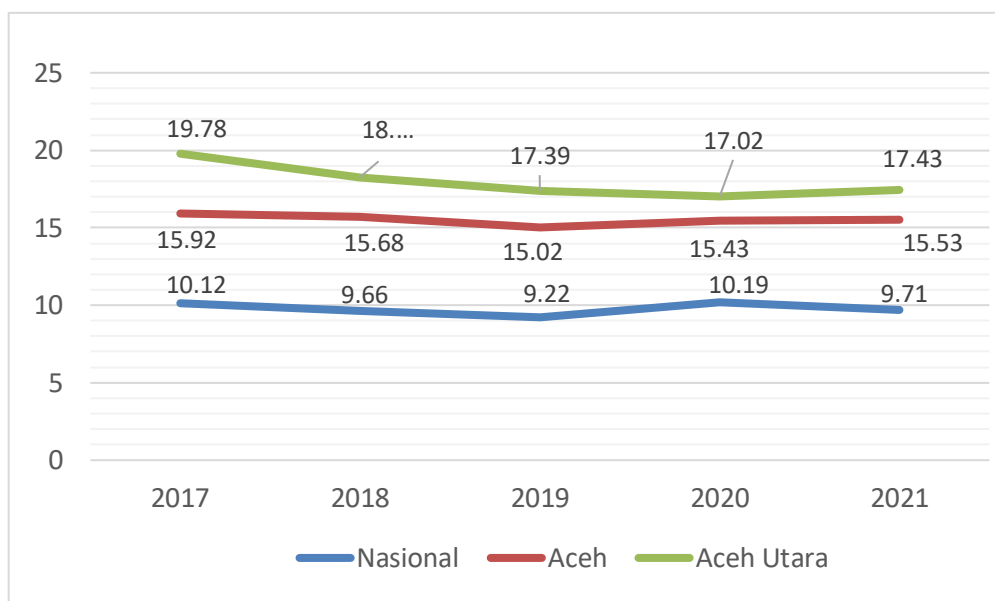
4. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan makro yang harus diatasi secara berkelanjutan. Kemiskinan juga dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2017-2020 cenderung menurun dari 19,78 persen pada tahun 2017 turun menjadi 17,02 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 17,43 persen. Persentase kemiskinan Aceh Utara masih berada di atas Aceh dan Nasional sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.15 di bawah ini.

Tabel 2.15
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kemiskinan (%)	19,78	18,27	17,39	17,02	17,43
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan	80,22	81,73	82,61	82,98	82, 57

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Gambar 2.15
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021

Untuk memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, perlu diketahui indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Kedalaman (*Poverty Gap Index-P1*) dan Keparahannya Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.16. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara cenderung menurun. Pada tahun 2017 (P1) Kabupaten Aceh Utara sebesar 3.22, lebih tinggi dari Aceh dan Nasional dan terus menurun pada tahun 2021 menjadi 2.17 lebih rendah dari Aceh dan lebih tinggi dari nasional. Sedangkan nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Utara menurun dari 0,83 pada tahun 2017 menjadi 0,43 pada tahun 2021.

Tabel 2.16
Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan, Aceh dan Nasional
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					
Aceh Utara	3,22	3,20	2,44	2,60	2,17
Aceh	2,92	2,80	2,58	2,85	2,95
Nasional	1,79	1,63	1,50	1,75	1,67
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)					
Aceh Utara	0,83	0,87	0,55	0,63	0,43
Aceh	0,87	0,78	0,67	0,83	0,81
Nasional	0,44	0,46	0,36	0,47	0,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

5. Indeks Gini Ratio

Indeks Gini merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah. Nilai Gini

Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan noldansatu. Perkembangan gini rasio Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir berfluktuasi diantara 0,20-0,35 atau berada dalam kategori pemerataan relatif tinggi (merata). Gini rasio Kabupaten Aceh Utara masih lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Aceh. Perkembangan gini rasio Kabupaten Aceh Utara dan perbandingannya dengan gini rasio Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.17
Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Aceh Utara dan
Provinsi Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Aceh Utara	0,266	0,292	0,308	0,261	0,283
Provinsi Aceh	0,329	0,318	0,321	0,319	0,323

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tahun 2022

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator kesejahteraan sosial masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indexs (HDI). Angka IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesehatan (angka usia harapan hidup), aspek pendidikan (angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah), dan aspek ekonomi (rata-rata pengeluaran ril per kapita dalam paritas daya beli masyarakat). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara merupakan indikator tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran keadaan penduduk menurut usia hidup, pengetahuan,

dan hidup layak. Nilai IPM Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2017 IPM Kabupaten Aceh Utara sebesar 67,67 meningkat mencapai 69,46 pada tahun 2021, namun IPM Aceh Utara masih jauh di bawah IPM Aceh dan Nasional. Perbandingan IPM antara Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional terlihat pada Tabel 2.18 berikut :

Tabel. 2.18
Perkembangan Relatif IPM Kabupaten Aceh Utara dengan
Provinsi Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Aceh Utara	67,67	68,36	69,22	69,33	69,46
Provinsi Aceh	70,60	71,19	71,90	71,99	72,18
Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tahun 2022

2. Angka Melek Huruf

Salah satu aspek pendidikan pendidikan yang mempengaruhi IPM adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Pada periode 2017-2020, persentase angka melek huruf Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dari 97,63 persen menjadi 99,18 persen pada tahun 2020, data tahun 2021 sampai saat ini belum tersedia. Kondisi capaian ini dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun Ke Atas
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf (AMH)	98,05	97,63	98,44	98,21	99,18

Sumber : BPSKabupaten Aceh Utara Tahun 2021

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata

lama sekolah menunjukkan bahwa lamanya penduduk di Kabupaten Aceh Utara rata-rata dalam menempuh pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dari 8,10 tahun pada tahun 2017 meningkat menjadi 8,64 tahun pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut ini :

Tabel 2.20
Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021

Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Aceh Utara	8,10	8,11	8,46	8,63	8,64
Provinsi Aceh	8,98	9,09	9,18	9,33	9,37
Nasional	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2022

4. Angka Harapan Lama Sekolah

Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Aceh Utara meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 angka harapan lama sekolah Kabupaten Aceh Utara 14,42 tahun dan meningkat menjadi 14,71 tahun pada tahun 2021. Rata-rata angka harapan lama sekolah Aceh Utara sudah berada di atas provinsi.

Tabel 2.21
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Aceh Utara	14,42	14,68	14,69	14,70	14,71
Provinsi Aceh	14,13	14,27	14,30	14,31	14,36
Nasional	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

5. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) atau yang dikenal juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Usia Harapan Hidup biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan derajat sosial secara menyeluruh. Keberhasilan program pembangunan ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut ini :

Tabel 2.22
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

Angka Usia Harapan Hidup	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Aceh Utara	68.54	68,61	68.79	68.80	68,81
Provinsi Aceh	69.52	69,64	69,87	69,93	69,96
Nasional	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2022

Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Utara selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat dari 68,54 tahun pada 2017 dan meningkat menjadi 68,81 tahun pada 2021, kondisi Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Utara masih di bawah Provinsi Aceh dan nasional.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka atau sering disebut TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan kata lain, pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran ini terjadi akibat belum mendapatkan pekerjaan namun telah berusaha maksimal atau dikarenakan faktor malas

mencari pekerjaan/malas bekerja. Seperti yang terlihat pada Tabel 2.23 persentase TPT penduduk Kabupaten Aceh Utara mengalami fluktuasi.

Tabel 2.23
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017–2021

TPT (persen)	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Aceh Utara	11,02	10,18	8,63	8,56	8,31
Provinsi Aceh	6,57	6,36	6,20	6,59	6,30
Nasional	5,5	5,3	5,23	7,07	6,49

Sumber :Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2022

7. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Sampai dengan bulan Desember 2021, Indonesia telah melaporkan 4.262.720 kasus positif, 144.094 kasus meninggal. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara 4.114.347 dinyatakan sembuh. Sedangkan di Aceh, kasus perdana muncul pada 23 Maret 2020. Penularan itu masih terus terjadi secara masif di tengah masyarakat hingga saat ini. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mencatat sejak pertengahan tahun 2020 penambahan kasus positif baru mencapai puluhan bahkan ratusan orang per hari, sehingga mengantarkan posisi Aceh masuk dalam deretan daerah zona merah penyebaran virus corona di Indonesia.

Khusus Kabupaten Aceh Utara, hingga akhir Desember 2021 tercatat 776 kasus positif, 17 kasus meninggal dan 759 sembuh. Sejak memasuki fase kenormalan baru, aktivitas masyarakat sudah berjalan seperti biasanya, namun tetap mengikuti protokol kesehatan sekaligus mengantongi izin dari Satgas COVID-19.

2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan masyarakat adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni

budaya dan olahraga, ini sangat sesuai dengan Kabupaten Aceh Utara yang ber juluk sebagai “Bumi Samudera Pase” memiliki beragam budaya yang khas dan unik serta sejarah Kerajaan Samudera Pase yang pernah muncul pada abad ke-13 Masehi.

Tabel. 2.24
Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah sanggar kesenian	82	121	121	121	121
Jumlah museum	1	1	1	1	1
Jumlah pusat Kebudayaan	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022

Tabel 2.25
Pegiat Seni dan Budaya
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pegiat Seni dan Budaya					
Seni Rupa					
Jumlah Kelompok Seni Lukis	2	2	2	2	2
Jumlah Kelompok Seni Kriya	21	21	21	21	21
Jumlah Kelompok Seni Dekorasi	12	14	14	14	14
Jumlah Kelompok Seni Reklame	6	6	6	6	6
Seni Tari/gerak					
a. Tari Klasik					
Jumlah Kelompok	3	3	3	3	3
Jumlah Anggota	78	78	78	78	78
b. Tari Kreasi Baru					
Jumlah Kelompok	51	90	90	90	90
Jumlah Anggota	1.007	1.592	1.592	1.592	1.592
c. Tari Tradisional					
Jumlah Kelompok	60	100	100	100	100
Jumlah Anggota	1.070	1.568	1.568	1.568	1.568
Seni Suara					
Jumlah Kelompok	12	14	14	14	14
Jumlah Anggota	370	420	420	420	420

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Seni Musik Tradisional					
Jumlah Kelompok	9	10	10	10	10
Jumlah Anggota	139	148	148	148	148
Seni Sastra					
Jumlah Kelompok	2	3	3	3	3
Jumlah Anggota	35	45	45	45	45
Seni Teater/Drama					
Jumlah Kelompok	4	4	4	4	4
Jumlah Anggota	160	160	160	160	160
Pagelaran/ Pameran Seni Budaya					
a. Pagelaran Seni Budaya					
Jumlah Pagelaran	0	1	1	1	1
Jumlah Pengunjung	0	300	300	300	300
b. Pameran Seni Budaya					
Jumlah Pameran	0	0	0	0	
Jumlah Pengunjung	0	0	0	0	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022

Dari Tabel 2.25 diatas dapat dilihat perkembangan penggiat seni dan budaya di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat. Banyaknya potensi Seni Budaya dan Pariwisata di kabupaten Aceh Utara mestinya menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya, tetapi potensi ini belum terkelola dengan baik sehingga belum banyak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya di kabupaten Aceh Utara, pada tahun 2022 ditargetkan semua potensi dari sektor seni budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi, dan pagelaran seni budaya serta ekonomi kreatif.

Tabel 2.26
Objek Wisata Kabupaten Aceh Utara yang dapat Dikembangkan

No	Objek Wisata /Wisata Budaya	Kecamatan
1	Pantai Dakuta Bungkah	Muara Batu
2	Pemandian Krueng Sawang	Sawang
3	Air Terjun Blang Kolam	Kuta Makmur
4	Air Terjun Seumirah/Lindek	Nisam
5	Makam Raja Muhammad	Syamtalira Bayu
6	Makam Para Raja Syuhada Cot Plieng	Syamtalira Bayu

No	Objek Wisata /Wisata Budaya	Kecamatan
7	Tugu Cot Plieng	Syamtalira Bayu
8	Makam Sultan Malikussaleh dan Malikul Dhahir	Samudera
9	Makam Tgk Peut Ploh Peut	Samudera
10	Makam Naina Husam Al-Din	Samudera
11	Makam Said Syarif	Samudera
12	Makam Sulthanah Nahrisyah	Samudera
13	Makam Sidi Abdullah Tajulnillah	Samudera
14	Makam Tgk Saleh Salihin	Samudera
15	Makam Tgk Batee Balee	Samudera
16	Makam Tgk Syaref	Samudera
17	Makam Maulana Abdurrahman Al-fasi	Samudera
18	Pantai Sawang	Samudera
19	Makam Ratu Al-'Aqla Binti Malikuldhahir	Matangkuli
20	Rumah Adat Cut Meutia	Matangkuli
21	Makam Cut Meutia	Matangkuli
22	Pantai Bantayan dan Pantai Ulee Rubek	Seunuddon
23	Pantai Lapang (Kuala Cangkoi)	Lapang
24	Pantai Lancok	Syamtalira Bayu
25	Makam Cut Asiah	Tanah Pasir
26	Makam Pang Lateh/Pang Nanggroe	Lhoksukon
27	Makam Peutua Dollah	Baktiya Barat
28	Makam Putroe Beutong	Meurah Mulia
29	Makam Tgk. Di Geulanggang	Samudera

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Aspek keolahragaan juga tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet melalui program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini terlihat dari cabang-cabang pembinaan yang telah dilakukan selama ini seperti Sepak bola, futsal, volly ball, badminton, tenis meja, tenis lapangan, renang, dayung, tinju, panjat tebing, atletik, sepeda, anggar dan lainnya yang dibina dibawah pembinaan KONI Kabupaten Aceh Utara.

Sementara itu aspek keolahragaan juga tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet melalui program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini terlihat dari cabang-cabang pembinaan yang telah dilakukan selama ini seperti Sepak bola,

futsal, volly ball, badminton, tenis meja, tenis, renang, dayung, tinju, panjat tebing, atletik, sepeda, anggar dan lainnya yang dibina dibawah pembinaan KONI Kabupaten Aceh Utara. Selain itu juga peningkatan prasarana olahraga juga merupakan dilakukan melalui program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga seperti sarana prasarana di Kecamatan Lhoksukon terdiri dari fasilitas olahraga indoor dan out door, lapangan sepak bola (stadion) di Kecamatan Baktya serta kecamatan-kecamatan lainnya.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat, begitu pentingnya masalah pendidikan sebagai media untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi secara baik dalam berbangsa dan bernegara, maka diperlukan 4 pilar yang kokoh yang bersinergi untuk menunjang hal dimaksud yaitu perluasan dan pemerataan akses; peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; tata kelola dan akuntabilitas publik; dan pendidikan yang bernuansa islami. Indikator kinerja pelayanan

pendidikan dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pengajar serta tingkat kelulusan.

a. Pendidikan Anak Usia Dini, NonFormal dan Informal (PAUDNI)

Pendidikan Anak Usia Dini, NonFormal dan Informal yang diarahkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia sebagai insan pembelajar sepanjang hayat yang mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam berbagai keadaan dan tantangan masa depan. Misi PAUDNI adalah memfasilitasi layanan pendidikan kepada peserta didik secara merata, bermutu, relevan, dan menjangkau sasaran yang tak terlayani oleh pendidikan formal melalui penyelenggaraan pelayanan pendidikan anak usia dini, penyediaan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan kursus dan pelatihan, penyediaan pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik nonformal, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik. Perkembangan jumlah pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 - 2021 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.27 berikut :

Tabel 2.27
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan/Siswa				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Siswa TK/RA/PAUD Sejenis	30.158	31.806	15.714	18.346	18.866
2	Jumlah penduduk usia 3-6 tahun	42.028	48.189	48.428	48.568	48.632
	APK (%)	62,79	66,00	32,45	37,77	38,79

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

b. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase, APK untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu

makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak diluar usia sekolah.

Tabel 2.28
Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Murid SD/MI	71.294	72.945	72.810	74.393	73.877
Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	67.007	68.317	68.820	70.747	72.682
APKSD/MI (%)	106,4	106,77	105,80	105,15	101,64
Jumlah Siswa SMP/MTs	34.616	34.473	33.708	36.800	37.365
Jumlah Penduduk kelompok Usia 13-15 tahun	33.768	33.143	32.393	36.348	37.589
APK SMP/MTs (%)	102,51	104,01	104,06	101,24	99,40

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

c. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang Ditamatkan adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah disekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran terhadap kualitas sumber daya manusia. Semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik.

Tabel 2.29 menunjukkan *trend* angka penduduk yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP ke atas menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Meningkatnya jumlah penduduk yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan dan kesadaran penduduk terhadap pendidikan terus meningkat.

Tabel 2.29
Persentase Penduduk Kabupaten Aceh Utara Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2017-2021

Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
Tidak mempunyai ijazah	12,21	13,28	9,76	7,40	10,42
SD/MI	34,59	30,47	28,25	26,95	22,88
SMP/MTs	24,99	24,13	24,89	25,37	27,07
SMA/SMK/MA	21,93	25,15	30,14	32,42	31,29
DI/DII/DIII	2,08	1,77	1,67	1,85	2,1
DIV/S1/S2/S3	4,20	5,20	5,29	6,01	6,25
Total	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022, Data diolah

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia yang tepat di jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 2.30 berikut :

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Murid SD/MI usia 7-12 tahun	62.556	63.735	64.119	68.057	64.876
Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	67.007	68.317	68.820	70.747	72.682
APM SD/MI (%)	93,36	93,29	93,17	96,20	89,26
Jumlah Siswa SMP/MTs Usia 13-15 tahun	25.714	25.773	24.744	27.671	26.327
Jumlah Penduduk kelompok Usia 13-15 tahun	33.768	33.143	32.393	36.348	37.589
APM SMP/MTs (%)	76,15	77,76	76,39	76,13	70,04

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

APM Kabupaten Aceh Utara untuk jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 2017 sampai 2021 fluktuatif namun cenderung menurun, hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat masyarakat yang menyekolahkan anak tidak tepat waktu untuk jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

e. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Persentase penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat diketahui dengan menggunakan indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Kenaikan persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar, SD (7-15 tahun) dan SMP (15-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan APS kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut :

Tabel 2.31
Perkembangan APS Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI	100%	99,64%	99,24%	99,99%	98,75%
SMP/MTs	96,79%	97,60%	97,99%	98,38%	98,49%

Sumber :Badan Pusat Statistik Tahun 2022

f. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah perbandingan antara jumlah capaian kinerja APS tingkat jenjang pendidikan tertentu sekabupaten dengan jumlah seluruh APS jenjang pendidikan tertentu sekabupaten dikalikan dengan Seratus persen. Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti

sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen sebagaimana terlihat pada Tabel 2.32 berikut :

Tabel 2.32
Angka Putus Sekolah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021 (persen)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	0,14	0,13	0,17	0,16	0,35
2	SMP/MTs	0,47	0,33	0,66	0,56	1,76

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

g. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu tahun sebelumnya. Tingkat kelulusan bisa menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan proses pendidikan. Tabel 2.33 menunjukkan tingkat kelulusan dari tahun ke tahun dalam periode 2017- 2021.

Tabel 2.33
Angka Kelulusan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021 (Persen)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	97,80	99,79	99,56	99,56	99,99
2	SMP/MTs	98,00	99,80	92,97	99,49	99,99

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

h. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah merupakan perbandingan jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu tahun tertentu dengan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan dibawahnya tahun ajaran sebelumnya dikalikan seratus persen. Angka melanjutkan sekolah mulai SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMU/SMK/MA pada periode tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.34 berikut:

Tabel 2.34
Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017 – 2021 (persen)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Dari SD/MI ke SMP/MTs	84,23	84,80	85,76	90,56	86,56
2	Dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	89,21	86,29	85,75	84,97	86,68
	Rata-rata	86,72	85,55	85,76	87,77	86,62

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

i. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang akan mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Kebijakan peningkatan fasilitas pendidikan yaitu dengan menyediakan Ruang Kegiatan Belajar-mengajar (RKB), Laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya akan membantu tindakan guru dalam mengajar. Ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 2.35 berikut:

Tabel 2.35
Jumlah Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	412	412	412	413	366
2	SMP/MTs	175	188	188	198	145
	Jumlah	587	600	600	611	511

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Teknologi pendidikan bukan dipandang secara fasilitas seperti laptop dan infokus. Akan tetapi teknologi merupakan ide untuk merancang program tersebut dan sarana prasaran tersebut hanya merupakan alat bantu pendidikan. Teknologi pendidikan yang terpenting adalah ide guru, rancangan guru, dan cara guru dalam mengajar. Teknologi pendidikan adalah tindakan guru untuk mengarahkan siswa pada tujuan pendidikan. Alat bantu yang merupakan fasilitas tersebut yaitu gedung RKB (Ruang Kegiatan

Belajar-mengajar) yang merupakan sarana pembantu dari tindakan guru dalam mengajar.

Kondisi fasilitas sekolah dapat juga dilihat dari akreditasi sekolah. Pada tahun 2021, PAUD yang telah terakreditasi berjumlah 105 dari 514 sekolah atau hanya sebesar 20,43 persen. Untuk jenjang Pendidikan SD, 363 sekolah atau 99,18 persen telah terakreditasi dengan status akreditasi A sebesar 18,85 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP, 129 sekolah atau 88,97 persen telah terakreditasi dengan status akreditasi A sebesar 26,21 persen. Sekolah yang telah memperoleh akreditasi A untuk semua jenjang Pendidikan berjumlah 112 dari 1.025 sekolah atau 10,92 persen. Jumlah sekolah yang telah terakreditasi untuk setiap jenjang pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.36 berikut :

Tabel 2.36
Jumlah Sekolah yang Terakreditasi Tahun 2021

No	Jenjang	Jumlah Sekolah	Status Akreditasi	Jumlah Terakreditasi	Persentase
1	PAUD (TK, Paud, SBB, SPS)	514	Akreditasi A	5	0,97
			Akreditasi B	63	12,26
			Akreditasi C	37	7,20
			Belum Terakreditasi	409	79,57
2	SD	366	Akreditasi A	69	18,85
			Akreditasi B	255	69,67
			Akreditasi C	39	10,66
			Belum Terakreditasi	3	0,82
3	SMP	145	Akreditasi A	38	26,21
			Akreditasi B	64	44,14
			Akreditasi C	27	18,62
			Belum Terakreditasi	16	11,03

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

j. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah merupakan indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah. Rasio ini adalah perbandingan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah

penduduk usia pendidikan, yang dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.37
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2021

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI					
Jumlah Gedung Sekolah	409	409	412	366	366
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Thn	74.813	75,566	76.297	77,034	77,779
Rasio/10.000	54,67	54,12	54,00	47,51	47,06
SMP/MTs					
Jumlah Gedung Sekolah	179	179	188	141	145
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Thn	36.771	37,127	37.485	37.848	38,213
Rasio/10.000	34,53	48,21	50,15	37,25	37,94

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Rasio ketersediaan fasilitas pendidikan untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah tertentu menunjukkan tingkat penyebaran layanan pendidikan juga meningkat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan gedung sekolah untuk menjangkau akses layanan pendidikan di daerah-daerah yang terpencil dan terjauh.

k. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid merupakan indikator untuk mengukur efektifitas dan efisiensi selama proses pembelajaran. Rasio ini adalah perbandingan jumlah guru dan murid berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 murid.

Tabel 2.38
Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
I	SD/MI					
	1. Jumlah Guru	7.035	5.632	5.482	5,270	5.590
	2. Jumlah Murid	71.983	59.912	60.012	60,482	59.468
	3. Rasio Guru/Murid	0,0977	0,094	0,0913	0,0871	0,0940

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	4. Rasio guru/murid per 10.000	977	940	913	871	940
	5. Rasio	1 : 10	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 11
II	SMP/MTS					
	1. Jumlah Guru	3.968	2.953	2.923	2,761	2.943
	2. Jumlah Murid	33.928	25.184	24.307	24,973	24.970
	3. Rasio Guru/Murid	0,1169	0,1172	0,1202	0,1105	0,1178
	4. Rasio guru/murid per 10.000	116,9	117,2	120	110,5	117,8
	5. Rasio	1 : 9	1 : 9	1 : 8	1 : 9	1 : 8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2021 adalah 940 artinya ada 940 guru yang melayani 10.000 murid atau 1 : 11. Sedangkan rasio guru terhadap murid jenjang Pendidikan SMP/MTs adalah 1 : 9. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa rasio guru terhadap murid di Kabupaten Aceh Utara berada di atas standar yaitu 1 : 20.

1. Rasio Guru/Murid Perkelas Rata-rata

Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu harus dijamin ketersediaan ruang kelas yang layak untuk masing-masing jenjang pendidikan. Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.39 berikut :

Tabel 2.39
Rasio Guru dan Murid Perkelas Rata – rata
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
I	SD/MI					
	1. Jumlah Guru	7.035	5.632	5.482	5,270	5.590
	2. Jumlah Murid	71.983	59.912	60.012	60,482	59.468
	3. Jumlah Ruang Kelas	3.045	2.759	2.796	2.975	3.133
	4. Rasio guru per kelas	2,31	2,04	1,96	1,77	1.78

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	5. Rasio Murid per kelas	23,64	21,72	21,46	20,33	18,98
II	SMP/MTs					
	1. Jumlah Guru	3.986	2.953	2.923	2,761	2.943
	2. Jumlah Murid	33.928	25.184	24.307	24,973	24.970
	3. Jumlah Ruang Kelas	1.209	1.011	1.027	1,179	1.232
	4. Rasio guru per kelas	3,28	2,92	2,85	2,34	2,39
	5. Rasio Murid per kelas	28,06	24,90	23,67	21,18	20,27

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Dari Tabel 2.39 dapat dilihat di tahun 2021 rasio guru per kelas rata-rata pada jenjang Pendidikan SD/MI adalah 1 : 1,78 : 18,98 dan pada jenjang Pendidikan SMP/MTs adalah 1 : 2,39 : 20,27 yang dapat diinterpretasikan bahwa satu kelas ditempati oleh sekitar 20 murid.

m. Guru yang Memenuhi Kualifikasi

Kualifikasi guru merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendongkrak peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan jumlah guru yang berkualifikasi S1/D.IV selama periode 2017-2021 sangat dipengaruhi oleh faktor tuntutan peraturan yang mensyaratkan kualifikasi S1/D.IV untuk mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi. Persentase guru yang berpendidikan S1/D.IV selama tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40
Guru dengan Kualifikasi S1/DIV
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Guru SD/MI ≥ S1/D4	4.955	4.122	4.771	5.047	4.779
	Jumlah Guru	7.007	4.734	5.482	5,270	5.590
	Persentase SD/MI	70,71	87,07	87,03	95,77	85,49
2	Jumlah Guru SMP/MTs ≥ S1/D4	4.046	2.513	2.747	2.666	2,780
	Jumlah Guru	4.512	2.691	2.923	2.761	2.943
	Persentase SMP/MTs	88,67	93.39	93,98	96,56	94,46

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara 2022

n. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar meliputi: Kompetensi pedagogik; Kompetensi kepribadian; Kompetensi profesional; dan Kompetensi sosial. Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs. Kompetensi guru dapat dilihat dari hasil uji kompetensi guru. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan pada tahun 2019, hanya 67 persen guru yang lulus UKG.

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dimana dapat menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Trend AKB di Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2021 berada pada 3-5 per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.41
Angka Kematian Bayi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian Bayi (AKB)	5/ 1000	3/ 1000	4/ 1000	5/ 1000	5/ 1000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator lainnya untuk menilai derajat Kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI). AKI merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti

kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. AKI di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.42
Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian Ibu (AKI)	149/ 100.000	111/ 100.000	207/ 100.000	138/ 100.000	228/ 100.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Aceh Utara masih berfluktuasi, pada tahun 2017 sejumlah 149 dan terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 111 dan pada tahun 2021 kembali naik mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya penurunan AKI harus dilakukan sedini mungkin dengan melakukan *screening* bagi ibu-ibu hamil yang resiko tinggi, riwayat penyakit kronis dan gangguan kesehatan lainnya, adanya upaya pencegahan dan perhatian khusus bagi ibu-ibu yang mengalami kondisi seperti tersebut diatas sehingga dapat diambil tindakan yang tepat dan cepat dalam mengatasi terjadinya kasus-kasus penyebab kematian pada ibu melahirkan.

c. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna

memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah Posyandu dan jumlah balita yang dilayani di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.43 berikut :

Tabel 2.43
Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021

URAIAN	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Posyandu	952	952	962	969	969
Jumlah Balita	64.763	42.160	53.563	54,494	51.909
Rasio Posyandu/Satuan Balita	14,70	22,58	18,09	17,78	18,66

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Rasio posyandu pada tahun 2017-2021 berada antara 14-22 posyandu per 1.000 balita, rasio ini telah memenuhi standar yaitu 12-50 posyandu per 1.000 balita.

d. Rasio Puskesmas, Pustu per Satuan Penduduk

Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui salah satu sarana penunjang kesehatan yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Jumlah dan rasio prasarana kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.44 berikut :

Tabel 2.44
Jumlah dan Rasio Prasarana Kesehatan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

Jumlah Prasarana dan Penduduk	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Puskesmas	31	32	32	32	32
Jumlah Poliklinik	-	-	-	-	-
Jumlah Pustu	86	86	86	86	86
Jumlah Prasarana Kesehatan	117	117	118	224	224
Jumlah Penduduk	593.492	602.554	615.378	602,793	629.735
Rasio Prasarana Kesehatan Per satuan penduduk	0,19714	0,19417	0,19175	0,35710	0.35570

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk idealnya adalah 1:30.000 Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, 1 (satu) puskesmas melayani 35.710 penduduk sedangkan pada tahun 2021 satu puskesmas melayani 35.570 penduduk, dapat disimpulkan bahwa rasio puskesmas persatuan penduduk di Kabupaten Aceh Utara masih kurang.

Selain jumlah fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Pustu dan Poliklinik) yang memadai untuk melayani seluruh masyarakat, juga perlu diperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana yang harus disediakan. Angka rata-rata kelengkapan sarana dan prasarana puskesmas di Kabupaten Aceh Utara adalah 63,42 persen. Kelengkapan sarana dan prasarana untuk masing-masing puskesmas dapat dilihat pada Tabel 2.45 berikut :

Tabel 2.45
Kelengkapan Alat Kesehatan di Puskesmas
Kabupaten Aceh Utara

No	Puskesmas	Kelengkapan			Kumulasi (50S + 10P +40A)
		Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
1	Sawang	77,5	65,45	26,81	56,02
2	Nisam	100	38,89	30,42	66,06
3	Banda Baro	100	25,45	11,4	57,11
4	Kuta Makmur	100	54,55	35,37	69,60
5	Simpang Keuramat	89,74	30,91	39,25	63,66
6	Syamtalira Bayu	95	40	11	55,90
7	Nisam Antara	61,54	33,96	73,62	63,61
8	Geureudong Pase	92,31	43,64	25,84	60,86
9	Meurah Mulia	97,5	36,36	29,23	64,08
10	Matangkuli	100	45,45	29,77	66,45
11	Paya Bakong	74,36	47,27	39,69	57,78
12	Pirak Timu	100	25,45	23,19	61,82
13	Cot Girek	100	24,53	11,23	56,95
14	Tanah Jambo Aye	100	47,27	38,73	70,22
15	Lhok Beuringen	84,62	30,91	29,95	57,38
16	Langkahan	76,92	57,41	21,43	52,77
17	Simpang Tiga	100	31,48	54,36	74,89
18	Seunuddon	100	86,79	46,5	77,28
19	Blang Geulumpang	80,95	50,94	40,51	61,77
20	Baktiya	76,74	35,85	12,72	47,04
21	Sampoinit	56,41	29,09	38,29	46,43
22	Lhoksukon	87,5	47,27	67,59	75,51
23	Buket Hagu	66,67	38,18	47,74	56,25

No	Puskesmas	Kelengkapan			Kumulasi (50S + 10P +40A)
		Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
24	Tanah Luas	100	37,04	83,13	86,96
25	Nibong	69,05	35,85	10,77	42,42
26	Samudera	100	43,64	30	66,36
27	Syamtalira Aron	92,31	30,91	53,17	70,51
28	Tanah Pasir	87,5	36,36	27,31	58,31
29	Lapang	94,87	27,27	12,76	55,27
30	Muara Batu	100	58,18	73,76	85,32
31	Dewantara	100	49,09	65,05	80,93
32	Babah Buloh	100	62,26	19,43	64,00
	Rata-rata	89,42	42,12	36,25	63,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

e. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dimensi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh jumlah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada terdiri dari berbagai spesialisasi diantaranya dokter. Dokter merupakan tenaga kesehatan yang sangat menentukan dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Jumlah dokter pada Puskesmas-Puskesmas dan rasionya terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2017 – 2021, dapat dilihat pada Tabel 2.46 berikut:

Tabel 2.46
Rasio Jumlah Dokter terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

Jumlah Dokter dan Penduduk	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Dokter	53	54	94	96	93
Jumlah Penduduk	602.554	615.378	619.407	602,793	629.735
Rasio Dokter / Satuan Penduduk	0,088	0,087	0,015	0,016	0,016
Rasio (WHO)	1:2500	1:2500	1:2500	1:2500	1:2500

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah dokter selama periode 2017 – 2021 mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan adanya dokter yang menduduki jabatan struktural dan dokter yang pindah ke daerah lain, pada tahun 2021 jumlah dokter mengalami penurunan kembali dari sebelumnya yaitu 93 orang dengan demikian secara umum Kabupaten Aceh Utara masih kekurangan dokter.

Rasio dokter persatuan penduduk menurut WHO adalah 40/100.000 penduduk, artinya 1 dokter melayani 2.500 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2021 Kabupaten Aceh Utara kekurangan jumlah tenaga dokter, oleh karena jumlah penduduk yang dilayani melebihi dari target ideal yang ditetapkan WHO.

f. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan idealnya terjadi pada 20 persen dari total sasaran ibu hamil, sehingga semakin banyak sasaran ibu hamil maka semakin tinggi pula komplikasi kebidanan. Selain itu dari total estimasi ibu yang beresiko komplikasi yang telah dilaporkan tersebut tidak semuanya kasus berakhir dengan komplikasi kebidanan. Target penanganan definitif komplikasi kebidanan adalah 80 persen dari total komplikasi yang ditangani di Kabupaten Aceh Utara dan dapat dilihat pada Tabel 2.47 berikut:

Tabel 2.47
Jumlah Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Penanganan Definitif terhadap Cakupan Komplikasi Kebidanan Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Komplikasi Kebidanan	2.919	2.768	2.827	2,650	2.822
Penanganan Definitif Komplikasi Kebidanan	2.518	2.110	2.261	2,588	2.822
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)	86,25	76,00	79,97	90,00	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Dari data tersebut penanganan Komplikasi kebidanan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dari 90 persen pada tahun 2021 naik menjadi 100 persen, hal ini disebabkan karena ada beberapa komplikasi kebidanan yang ditangani di Rumah Sakit ataupun di Klinik Swasta.

g. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Berdasarkan target SDG's yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan ibu adalah menurunkan angka kematian ibu, dan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap angka kematian ibu adalah periode persalinan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan saat ini adalah 90% dari total sasaran ibu hamil. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.48 berikut:

Tabel 2.48
Jumlah Sasaran Ibu Bersalin dan Ibu Bersalin yang Ditolong
Tenaga Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan	12.339	11.680	11.945	12,270	12.230
2.	Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	14.597	13.838	14.134	13,656	13.656
3.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	84,53 %	84,40%	84,51%	89,85%	89,56%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Upaya peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui upaya pelaksanaan program unggulan kesehatan ibu, diantaranya adalah kemitraan bidan dan dukun, peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui Jampersal (Jaminan Persalinan) serta Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA). Persalinan yang dilakukan di sarana

pelayanan kesehatan dapat menurunkan angka kematian ibu saat persalinan karena di tempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi.

Berdasarkan data diatas ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan yang dapat diartikan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat, tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan yaitu 12.230 atau sekitar 89%, penyebabnya sasaran ibu hamil pada trimester III akan melakukan persalinan pada tahun yang akan datang yaitu tahun 2022.

h. Cakupan Desa *Universal Child Immunization*

Pemerintah menargetkan program imunisasi dasar lengkap terhadap bayi yang menjadi sasaran harus mendapat imunisasi seluruhnya, sehingga target nasional *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 100 persen dapat tercapai. Dalam rangka mencapai hal tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupaya melaksanakan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 852 desa. Cakupan desa UCI di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.49 :

Tabel 2.49
Cakupan Desa UCI Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Desa UCI	70,2	45,8	46,1	35,3	38.1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa cakupan imunisasi di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017-2021 cenderung menurun dan pada tahun 2021 cakupan desa UCI masih rendah sebesar 38,1 persen. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor internal seperti hubungan dengan lintas sektor terkait dan pelibatan tokoh masyarakat dalam program imunisasi belum maksimal dilakukan. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain adanya isu

vaksin haram juga masih menjadi faktor penyebab masyarakat tidak mau membawa bayi mereka untuk imunisasi, penolakan masyarakat terhadap vaksin suntikan khususnya oleh orang tua bayi, adanya efek Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti terjadinya efek demam dan bengkak pada bagian yang diimunisasi.

i. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Pada dasarnya gizi balita dipengaruhi langsung oleh tingkat asupan dan kondisi kesehatan. Asupan balita berkaitan dengan pola asuh dan ketersediaan pangan dalam keluarga. Sedangkan status kesehatan balita dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan akses pelayanan kesehatan.

Rendahnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi sejak lahir sampai berumur 6 (enam) bulan atau ASI Eksklusif merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gizi buruk, disamping faktor budaya dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman ibu tentang tahapan pemberian makanan pada bayi. Pemberian makan yang tidak sesuai dengan umur bayi, seperti pemberian pisang terlalu dini yang berpotensi terhadap gagalnya pemberian ASI eksklusif yang seharusnya diberikan sejak lahir sampai dengan usia 6 bulan tanpa adanya pemberian makanan tambahan lain.

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2017–2021 bergerak fluktuatif seperti terdapat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50
Cakupan Balita Gizi Buruk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Gizi buruk yang mendapat perawatan	18	492	362	955	741
2.	Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas balita gizi buruk tahun 2020 terdapat 955 kasus, pada Tahun 2021 sudah mulai mengalami penurunan 741 kasus tahun 2021 dan semuanya mendapat perawatan atau cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan

adalah 100 persen. Sedangkan prevalensi balita stunting di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.51
Prevalensi Balita Stunting
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Prevalensi Balita Stunting (persen)	N/A	32,5	42,64	N/A	38,8

Sumber : Riskesdas (2018) dan SSGI (2021)

j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA

Jumlah penderita TBC di Kabupaten Aceh Utara cukup tinggi, dimana pada tahun 2020 sebanyak 2956 kasus dan pada tahun 2021 turun menjadi 2151 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA dalam kurun waktu 5 tahun ini bisa dilihat pada Tabel 2.52 berikut ini :

Tabel 2.52
Perkiraan Penderita TBC dan Penderita yang Diobati
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Perkiraan Penderita TBC	1807	2718	2177	2956	2151
2.	Penderita TBC diobati	1259	1247	813	857	672
3.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA	69,67	45,88	37,34	28,99	31,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

k. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penderita DBD pada tahun 2019 merupakan kasus yang tertinggi selama periode 2017-2021. Angka cakupan penanganan mencapai 100 persen setiap tahunnya, terlihat sebagaimana Tabel 2.53. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada

Tahun 2021 sebanyak 25 kasus yang terjadi diakhir tahun 2021 disebabkan tingginya curah hujan sehingga jentik-jentik nyamuk mulai bersarang disekitaran rumah yang terdapat banyak wadah genangan air.

Tabel 2.53
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	60	43	61	19	25
Jumlah penderita DBD yang ditemukan	60	43	61	19	25
Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Setiap kasus DBD perlu dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE), *Larvasiding* (pembunuhan larva nyamuk), dan Pengasapan (fogging). Semua kasus yang terjadi ditangani dengan baik. Masih dijumpainya kasus yang terjadi, diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap gerakan PSN DBD (pemberantasan sarang nyamuk DBD) yaitu dengan kegiatan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur).

Untuk keberhasilan program penanggulangan DBD perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap DBD (khususnya 3M). Selain itu ketercukupan ketersediaan anggaran khususnya untuk kegiatan sosialisai dan fogging sangat mendukung keberhasilan kegiatan penanggulangan DBD.

1. Penemuan Kasus HIV/AIDS

Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di Kabupaten Aceh Utara, terutama pada kelompok risiko tinggi. Penyebab terbanyak tertular adalah pengguna narkoba suntik yang proses penggunaannya dilakukan diluar Aceh dan penyebab kedua terbanyak adalah seks bebas.

Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini diarahkan pada pelaksanaan program pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan bersama dengan Komisi Penanggulangan AIDS dan tim VCT (*Voluntery Conseling Testing*) terus mencari dan melakukan penjangkauan kasus HIV/AIDS. Pada tahun 2019 cakupan HIV makin meluas dimana setiap orang beresiko HIV seperti ibu hamil, pasien TBC, pengguna narkoba suntik, IMS, Waria/transgender, LSL, pengguna Napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar atau ada 8 populasi kunci yang harus diperiksa/scrining HIV.

Tabel 2.54
Jumlah Penderita HIV/AIDS Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penderita HIV	6	2	5	12	10
Jumlah penderita AIDS	10	16	6	1	3
Kematian akibat AIDS	7	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Berdasarkan data pada Tabel 2.54 pada tahun 2021 Jumlah kasus HIV mengalami penurunan yaitu dari tahun 2020 dari 12 orang menjadi 10 orang. Masyarakat mulai sadar makin cepat penderita penderita HIV terdeteksi akan semakin cepat proses pemulihannya.

m. Cakupan Kunjungan Bayi

Dengan adanya pandemi Covid-19 selama kurun waktu 2 tahun ini berdampak pula terhadap jumlah kunjungan bayi yang mendapat pelayanan kesehatan dasar sesuai standar, dari data diatas cakupannya mencapai 95 %, walaupun terjadi penurunan dari Tahun 2019 ke tahun 2020 namun ditahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kunjungan. Data 2021 menunjukkan peningkatan melebihi 100% oleh karena jumlah kunjungan tersebut tidak hanya berasal

dari wilayah Aceh Utara tetapi juga bersal dari wilayah Aceh Timur, Bireun, Aceh Tengah dan daerah lainnya.

Tabel 2.55
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	12.046	10.688	12.434	11.304	13.130
Jumlah seluruh bayi lahir hidup	13.270	11.220	12.076	12.290	12.276
Cakupan	90,8	95,23	98,40	91,97	106

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

n. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat.

Edukasi melalui pendekatan pemuka atau pimpinan masyarakat, pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar, perlu terus menerus digalakkan terutama pada tingkatan rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat. Selama lima tahun terakhir persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS cenderung meningkat namun masih rendah yaitu sekitar 12,8 persen. Perkembangan jumlah dan persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.56 berikut :

Tabel 2.56
 Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih
 dan Sehat (PHBS) di Kabupaten Aceh Utara
 Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah RT yang menerapkan PHBS	20.855	21.340	21.950	22.112	22.202
Jumlah Rumah Tangga	171.112	171.250	171.919	172.450	172.480
Persentase	12,1%	12,4%	12,7%	12,8%	12,8%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1 Pekerjaan Umum

a. Jalan

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan.

Bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan. Dan agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan keterlibatan masyarakat. Penyelenggaraan jalan itu sendiri meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Penyelenggaraan jalan dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-

jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran. Penyelenggaraan jalan diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil. Arah dari penyelenggaraan jalan adalah untuk mewujudkan:

- perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang
- daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.
- Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik

Panjang jalan Kabupaten Aceh Utara secara keseluruhan hingga tahun 2021 adalah sepanjang 2.032,80 Km, dengan kondisi sebagai berikut: Kondisi jalan mantap sekitar 42 persen; kondisi jalan tidak mantap sebesar 58 persen dari total panjang jalan Kabupaten Aceh Utara. Untuk kondisi Jalan Tahun 2017-2021 dan persentase perkembangan kondisi jalan dapat dilihat pada Tabel 2.57 berikut :

Tabel 2.57
Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kondisi Jalan Mantap (Baik+Sedang)	72%	29%	31%	26,17%	42%
Kondisi Jalan Tidak Mantap (rusak ringan+Rusak berat)	28%	71%	69%	73,83%	58%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara 2022

Pada tahun 2018, terjadi penurunan yang signifikan kondisi jalan mantap. Penurunan kondisi jalan umumnya disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya : umur konstruksi, cuaca, bencana alam, pemanfaatan melebihi kapasitas jalan, dan sebagainya. Namun, penyebab paling utama penurunan kondisi jalan pada tahun 2018 adalah perubahan metode penilaian.

Jika sejak tahun 2013, penilaian kondisi jalan dibagi menjadi 2 kelompok jenis lapis permukaan, masing – masing untuk lapis permukaan aspal dan untuk lapis permukaan perkerasan berbutir,

maka sejak tahun 2018, Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara mulai mengadakan penilaian dengan metode yang berbeda. Penilaian kondisi jalan tidak lagi membagi jenis lapis permukaan aspal dengan lapis permukaan perkerasan berbutir. Penilaian dengan cara tersebut memiliki konsekuensi semua jalan dengan jenis lapis permukaan perkerasan berbutir secara otomatis masuk kedalam kategori rusak.

b. Rasio Jaringan Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pemanfaatan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Air irigasi merupakan air baku yang berasal dari sumbernya dan disalurkan melalui jaringan primer, sekunder atau tersier yang dialokasikan untuk menunjang pertanian, sedangkan air yang berasal dari jaringan tersier yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian.

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersifat partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Kabupaten Aceh Utara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk Daerah irigasi (DI) dengan luas < 1.000 hektar yang berada dalam wilayah aceh utara. Sedangkan selebihnya, Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi, dan Daerah Irigasi (DI) dengan luas > 3.000 hektar menjadi tanggung kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015. Luas daerah irigasi di Kabupaten Aceh Utara adalah 56.136 Ha yang terdiri dari 125 Daerah Irigasi (DI) merupakan kewenangan Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten sebagaimana disajikan pada Tabel 2.58 berikut :

Tabel 2.58
Luasan Daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Utara
Berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Jumlah DI	Luas (Ha)
1	Pemerintah	3	29.059
	a. Lintas Kabupaten/Kota	1	15.993
	b. Utuh Kabupaten	2	13.066
2	Pemerintah Provinsi	4	6.434
	a. Lintas Kabupaten/Kota	-	-
	b. Utuh Kabupaten	4	6.434
3	Pemerintah Kabupaten	118	20.643
	Total	125	56.136

Sumber : Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015

Luas baku irigasi kewenangan kabupaten 20.643 hektar dengan luas potensial 4.993 hektar.

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian Nasional dan daerah, dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari irigasi, oleh sebab itu irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian yang mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi kelestarian ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan, perbaikan gizi keluarga dan perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Nilai SPM andalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio ketersediaan air di petek-petak sawah dalam jumlah, waktu, dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Rasio perkembangan jaringan irigasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.59
Rasio Perkembangan Jaringan Irigasi
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Saluran (m)	564.366	564.366	567.188	567.188	567.188
Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha)	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481
Rasio Andalan	1:11	1:11	1:11	1:11	1:11

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Upaya pencapaian target SPM dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi sesuai kewenangan pemerintah termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang seperti perencanaan, pengawasan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat petani.

Tabel 2.60
Kondisi Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 -2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kondisi Baik (%)	35,27	35,59	35.91	36.23	40.00
Kondisi Rusak (%)	64,73	64,41	64.09	63.77	60.00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Utara Tahun 2021

c. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Peingkatan pelayanan dasar bidang air bersih terus diupayakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui berbagai kolaborasi program dan pendanaan. Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi.

Kebutuhan air untuk suatu daerah ditentukan oleh 2 (dua) parameter yaitu jumlah penduduk dan tingkat konsumsi air. Sumber air yang dapat digunakan sebagai air baku meliputi air sungai, air hujan, air tanah, air permukaan dari air mata air. Kualitas umum air

dapat diukur dengan parameter seperti bau, rasa, tingkat kekeruhan dan warna. Perkembangan pengguna air bersih ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.61 berikut:

Tabel 2.61
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	88.920	93.845	99.743	103.217	104.820
2	Jumlah seluruh rumah tinggal	139.846	140.035	142.587	142.821	142.846
	Persentase	63.58	67.02	69,95	72,27	73,38

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2022

d. Rumah Tangga Bersanitasi

Peningkatan pelayanan dasar sanitasi merupakan kewajiban pemerintah dalam menjamin tersedianya akses sanitasi layak bagi lingkungan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya keras untuk memenuhi akses pelayanan sanitasi terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan sarana prasarana sanitasi yang berkesinambungan. Hal ini terlihat dari capaian akses sanitasi yang layak.

Tabel 2.62
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	80.895	85.952	91.610	95.657	96.292
Jumlah seluruh rumah tinggal	139.846	140.035	142.587	142.821	142.846
Persentase	57.85	61.38	64,25	66,98	67,41

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2022

Capaian pembangunan rumah tangga bersanitasi pada tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung meningkat, dari tahun sebelumnya peningkatan rumah tinggal bersanitasi difokuskan terutama pada rumah tangga berpenghasilan rendah/miskin.

e. Infrastruktur Drainase

Fungsi komponen drainase adalah upaya pembuangan air hujan keluar dari lokasi permukiman perumahan, pasar dan fasilitas umum lainnya untuk mengurangi atau menghindari terjadinya genangan air, mengendalikan volume air yang dapat berpotensi menggenangi di lokasi tanpa sumur resapan. Drainase mempunyai beberapa sistem yang terdiri dari drainase Primer, drainase sekunder, dan drainase tersier.

Tabel 2.63
Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran
Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Jalan Bertrotoar dan Drainase (Km)	253,52	262.19	265,49	268,54	269,37
Panjang Jalan Lingkungan	2.120,43	2152.43	2155,06	2157,02	2.182,23
Persentase	11,96	12.18	12,32	12,45	12,34

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Kab Aceh Utara Tahun 2022

Pembangunan drainase lingkungan perdesaan, perkotaan dan kawasan pasar dilaksanakan melalui peningkatan program pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong. Peningkatan kualitas saluran drainase yang baik (lancar) harus diupayakan pemerintah untuk menjaga kondisi lingkungan dan pusat-pusat aktifitas masyarakat dalam kondisi bersih, sehat dan tertata dengan baik. Gerakan gotong royong untuk menjaga kualitas saluran dalam kondisi lancar perlu di tingkatkan, selain untuk menjaga kondisi lingkungan juga terjalin hubungan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah.

f. Infrastruktur Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum

Gedung yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi

cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika. Pembangunan Infrastruktur dan fasilitas publik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara saat ini berada di Lhoksukon, sehingga perlu pemindahan kegiatan perkantoran yang selama ini ada di Lhokseumawe. Pembangunan beberapa kantor pemerintahan telah dilakukan yang sebagian besar berlokasi di Gampong Alue Drien Kecamatan Lhoksukon yang lebih dikenal dengan sebutan Landing. Saat ini, baru 16 dari 33 SKPK yang telah berkantor di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

3.2 Penataan Ruang

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK).

Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Hal tersebut di atas telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penataan ruang di Kabupaten Aceh Utara telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabuapten Aceh Utara Tahun 2012-2032, yang saat ini sedang dalam proses revisi. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tata ruang kabupaten yang berbasis pada pengembangan perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan dan industri melalui peningkatan peran dan fungsi infrastruktur

wilayah sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan fungsi dan kedudukan sebagai:

- Arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah.
- Penyelarasan kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten
- Pedoman dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosioekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Fungsi - fungsi ini menjadi dasar dalam penentuan peruntukan Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Aceh Utara sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No. 170/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Data Luas Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berada dalam 2 (dua) hamparan lokasi yaitu : a). bagian barat terletak di Kecamatan Meurah Mulia dan Paya Bakong, dan b). bagian timur terletak di Kecamatan Langkahan dan Kecamatan Cot Girek dengan total luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Aceh Utara adalah 8.540 ha, atau sekitar 2,59 % dari luas wilayah, keduanya terletak dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Persentase luas ini memang relatif kecil ini, namun cukup logis bila dihubungkan dengan karakter fisik wilayah Kabupaten Aceh Utara (topografi /kemiringan dan ketinggian, curah hujan dan jenis tanah).

Kawasan lindung lainnya seluas lebih kurang 793 ha berupa kawasan sesuai suaka margasatwa sebagai pusat konservasi gajah di Kecamatan Cot Girek. Lokasi ini berada pada daerah sekitar Krueng Peuto dengan Alue Beudari dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung.

Rencana pola ruang Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2032, untuk kawasan budidaya diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan. Dinamika pembangunan nasional dan

daerah serta laju pertumbuhan penduduk berkontribusi terhadap perubahan peruntukan lahan. Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.64 berikut :

Tabel 2.64
Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten Aceh Utara

Kawasan Lindung	Luas (Ha)	%
Hutan Lindung	8.540	2,59
Pusat Kegiatan Gajah	793	0,24
Kawasan Budi Daya	Luas (Ha)	%
Perumahan Kota	5.620	1.70
Perumahan Desa	8.290	2.51
Kebun Campuran	47.994	14.56
Sawah	46.901	14.23
Tambak	16.712	5.07
Perkebunan	162.423	49.27
Hutan Produksi	27.461	8.33
Industri Besar	263	0.08
Instalasi Tambang	498	0.15
Pelabuhan/Bandara	249	0.08
Pertanian Terpadu	430	0.13
Waduk	3.512	1,07

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Utara 2012-2032

Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara memerlukan sistem *Online single submission* (OSS) *Risk Base analysis* (RBA) untuk mendukung tersedianya data *based* potensi investasi yang bersinergi dengan RTRW Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan arahan struktur ruang dan pola ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Penyediaan rumah layak huni juga merupakan layanan dasar publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi dan melindungi masyarakatnya terutama masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. Persentase tahun ke tahun semakin meningkat dibandingkan persentase rumah

layak huni tahun sebelumnya. Perkembangan persentase rumah layak huni dilihat pada Tabel 2.65 berikut:

Tabel 2.65
Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2017 – 2021

Prasarana	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rumah Layak Huni	119.497	121.399	123.152	124.497	124.610
Jumlah Rumah Tinggal	139.846	140.035	142.687	142.821	142.846
Persentase	85,45	86,69	86,37	87,17	87,23

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2022

Upaya pembangunan rumah layak huni terus dikembangkan dengan pemanfaatan dari berbagai sumber pendanaan seperti pemanfaatan dana DOKA, TDBH Migas, ZIS serta dana desa.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Tahun 2017-2021 jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 2.66. Selain PNS dan tenaga kontrak, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara mempunyai koordinator lapangan yaitu 3 orang terdiri dari TNI, Polri dan Sipil. Untuk Tahun Anggaran 2017-2021 Korlap yang bertugas berasal dari TNI, Polres Aceh Utara dan Polres Lhokseumawe.

Tabel 2.66
Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2017-2021

Personil	2017	2018	2019	2020	2021
PNS	103	101	96	93	85
Tenaga Kontrak	418	406	402	393	384
Jumlah	521	507	498	486	469

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara pada tahun periode tahun 2017 s/d 2021 yang terdiri dari PNS, Tenaga kontrak dilapangan dan tenaga kontrak administrasi. Dengan jumlah penduduk dalam Kabupaten Aceh Utara sebanyak 608.106 jiwa, maka rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk yaitu sebesar dapat dilihat pada Tabel 2.67 berikut.

Tabel.2.67
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per10.000 Penduduk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Polisi Pamong Praja (Orang)	521	507	498	486	469
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja (%) Per10.000 Penduduk	8.50	8,29	8,04	8,06	7,90

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Mengingat banyaknya jumlah penduduk, agar lebih meningkatkan peran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara kebutuhan personil juga harus ditingkatkan baik dari sisi jumlah, sumber daya manusia maupun sarana prasarananya, ini dibutuhkan dikarenakan lonjakan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya juga signifikan meningkat. Namun demikian pemerintah Aceh Utara harus menurunkan jumlah personel pada komposisi tenaga Satpol kontrak dikarenakan ketersediaan anggaran harus mempertimbangkan refocusing pada Pandemi Covid-19, demikian juga tenaga PNS juga terjadi pengurangan secara jumlah dikarenakan mutasi jabatan dan pensiun.

b. Penegakan Perda/Qanun

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017-2021 telah melaksanakan penegakkan Perda/Qanun sebanyak 9 jenis yaitu :

- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri

- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Tempat Usaha
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bahan Galian C
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perizinan HO
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam
- Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya
- Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian)
- Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (perbuatan Mesum) Tahun 2015 ada penambahan pelaksanaan 2 (dua) Perda/Qanun yaitu :
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, dimana Satpol PP dan WH bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam telah mensosialisasikannya ke kecamatan-kecamatan.

Penanganan terhadap pelanggaran Qanun dan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) sudah selayaknya ditegakkan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban umum yang aman dan kondusif. Penanganan terhadap pelanggaran Qanun dan K3 di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 2.68 berikut :

Tabel.2.68
Penegakan Qanun di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pelanggaran Qanun	265	143	184	140	55
Jumlah penyelesaian pelanggaran Qanun	265	96	182	140	39
Persentase penegakan Qanun	100	67.13	98.91	100	70.91

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Tabel.2.69
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
diKabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pelanggaran terhadap K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP dan WH	271	143	184	143	59
Pelanggaran K3 yang terselesaikan	271	96	182	143	43
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100	67.14	98.92	100	72.89

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Peraturan perundang-undangan terbaru mengenai standar pelayanan minimal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dilanjutkan dengan peraturan untuk penerapannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tentang 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dimana sesuai Pasal 3 ayat (2) jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota bidang pelayanan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) yaitu :

- Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- Pelayanan informasi rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Untuk peraturan standar teknis pelayanan dasar tersebut telah diatur dalam 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara dalam mewujudkan penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :

1. Pengamanan Kantor Pemerintah
2. Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima
3. Operasi Penegakan Qanun/Perda
4. Pemantapan dan Penegakan Qanun Syariat Islam
5. Pengawasan, Pembinaan dan Advokasi Terhadap Pelanggaran Qanun

Dalam penyelesaian penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Aceh Utara pada pada periode 2017- 2021 penyelesaian penyelenggaraan K3 rata – rata terealisasi hanya 87,79 persen.

c. Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam serta manusia itu sendiri sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Secara kondisi sosial dan geografis wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah daerah rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial disebabkan oleh adanya jalur tiga lempeng dunia yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Fasifik yang berpotensi terjadinya gempa bumi dan memicu timbulnya tsunami seperti yang pernah dialami pada tahun 2004, disamping itu wilayah Kabupaten Aceh Utara memiliki geografi dengan tanah yang labil serta terdapatnya beberapa daerah aliran sungai besar yang menyebabkan terjadinya banjir luapan setiap tahunnya serta daerah yang merupakan wilayah rentan dengan konflik sosial lainnya. Ada beberapa bencana yang pernah menimpa Kabupaten Aceh Utara seperti gempa bumi dan tsunami, banjir, angin topan/kencang/puting beliung, erosi dan abrasi, kekeringan, longsor, kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan korban tenggelam. Akibat dari bencana tersebut telah berdampak kepada kerugian materil dan imateril antara lain korban jiwa dan harta benda serta kerusakan infrastruktur lainnya.

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh Utara saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang penanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap darurat kearah pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan.

Untuk mengurangi terhadap resiko banjir yang terjadi hampir setiap tahun di Kabupten Aceh Utara, melalui bantuan anggaran yang dibiayai oleh APBN sejak tahun 2016 melakukan Pembangunan Waduk Krueng Keureuto yang diharapkan mampu mereduksi atau setidaknya mampu mengendalikan meluasnya banjir di wilayah timur dan tengah Kabupaten Aceh Utara. Namun upaya tersebut, tidaklah mudah karena dengan kondisi goegrafis Kabupaten Aceh Utara di kelilingi atau dilintasi oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga diperlukan berbagai langkah atau upaya peningkatan dan kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara dengan Pemerintah Daerah terkait lainnya serta dengan berbagai organisasi-organisasi pendukung lainnya yang membidangi masalah pengendalian banjir tentunya.

Berikut disampaikan kondisi luas wilayah banjir dari tahun 2017 – 2021 seperti yang tercantum dalam Tabel 2.70 di bawah ini :

Tabel 2.70
Jumlah Wilayah Terkena Dampak Banjir Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017 - 2021

No	Dampak Banjir	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Gampong	397	238	50	396	74
2	Jumlah Kecamatan	26	13	13	24	17

Sumber : BPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Pada tahun 2021, persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap adalah sebesar 65 persen.

Tingkat resiko bencana dapat dinilai berdasarkan indeks risiko bencana. Dalam indeks risiko ini, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Berdasarkan penilaian indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional, indeks risiko bencana Kabupaten Aceh Utara adalah 175,20 atau termasuk dalam kategori tinggi.

d. Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan *respons time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman.

Secara Nasional Norma Waktu Tanggap yang harus dipenuhi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah 15 Menit sejak menerima pengaduan sampai gelar selang siap semprot di lokasi kebakaran. Standar Pelayanan ini harus benar-benar dikuasai dan dipedomani oleh semua personil atau petugas Damkar. Standar ini juga menjadi salah satu alat ukur keberhasilan petugas pemadam dalam memberikan layanan pemadam kebakaran. Capaian tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran adalah sebesar 70 persen.

Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Aceh Utara selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.71
Kejadian Kebakaran di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kejadian Kebakaran	163	171	165	131	88

Sumber : BPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

6. Sosial

Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Aceh Utara cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, serta perubahan lingkungan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial. Oleh sebab itu pemerintah daerah berupaya melaksanakan penanganan PMKS melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial. Penanganan PMKS yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017-2021 sekitar 0,1 s/d 2,26 persen.

Tabel 2.72
Penanganan PMKS di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Populasi PMKS	147.357	147.357	147.357	167.253	165.980
Jumlah PMKS yang dibantu	290	140	445	3780	453
Persentase PMKS yang dibantu (%)	0,20	0,10	0,30	2,26	0,27

Sumber : DinsosP3A Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

2.1.3.2 Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

1. Tenaga Kerja

Perkembangan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja bekerja. Apabila Perkembangan ekonomi mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja, maka akan dapat menekan angka pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Utara tidak terlepas dari masih rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan belum maksimalnya fungsi Badan Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang putus sekolah, hal tersebut masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada pada Balai Latihan Kerja (BLK), seperti peralatan-peralatan mesin dan sampai saat ini belum tersedianya asrama tempat penginapan para peserta pelatihan dan terbatasnya jumlah pelatih atau instruktur bidang keahlian pada Balai Latihan Kerja. Jumlah pelatih berstatus ASN yang ada saat ini di BLK 3 orang, dengan bidang keahlian TIK, Garmen Apparel dan Bangunan. Sedangkan untuk bidang lainnya seperti elektronika, listrik, las, sepeda motor, kendaraan ringan, tata boga dan tata rias masih menggunakan jasa instruktur dari tenaga kontrak.

Tabel 2.73
Pencari Kerja yang Terdaftar per Tahun Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pencari Kerja (orang)	912	403	367	1.409	400

Sumber : Dinas Penanaman Modal Tranmigrasi dan Tenaga Kerja, Tahun 2022

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017 yang terdaftar sebanyak 912 orang dan cenderung menurun di tahun 2018 dan 2019 menjadi 367 orang. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 1.409 orang dan Kembali menurun menjadi 400 orang pada tahun 2021.

Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2018 meningkat dari 57,21 menjadi 63,56 namun selanjutnya menunjukkan *trend* menurun menjadi 58,46 pada tahun 2021.

Tabel 2.74
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Angkatan Kerja	235.420	265.708	260.721	267.235	263.205
Jumlah Penduduk Usia Kerja	411.472	418.034	424.713	443.103	450.160
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	57,21	63,56	61,39	60,31	58,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, Tahun 2017-2021

Perbandingan antara TPAK perempuan dan laki-laki pada tahun 2021 menunjukkan perbedaan yang cukup besar, TPAK perempuan yaitu sebesar 41,95 persen lebih rendah bila

dibandingkan dengan TPAK laki-laki yaitu sebesar 75,68 persen. Data tersebut menggambarkan bahwa partisipasi perempuan di Kabupaten Aceh Utara dalam bekerja lebih rendah dibandingkan laki-laki.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah kasus yang ditangani oleh unit layanan yang berada langsung dibawah koordinator Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2017 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab :

- Sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat yang sudah menampakkan hasil yang memadai dengan banyak pengaduan yang dibuat masyarakat yang melihat atau mengalami langsung kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang terjadi diranah publik maupun domestik
- Koordinasi dengan unit layanan perempuan dan anak (UUPA) Polres sudah terbangun dengan baik yaitu dengan rujukan kasus dan penanganan kasus bersama-sama
- Pendamping kasus yang dilatih ditingkat kecamatan sudah bekerja walaupun belum maksimal
- Unit layanan seperti P2TP2A sudah melakukan kerjasama dengan pekerja sosial di tingkat kecamatan sehingga masyarakat yang mengalami kekerasan lebih mudah mendapat informasi yang dibutuhkan.
- Masyarakat khususnya perempuan sudah mengalami kemajuan dengan berani melapor langsung kejadian yang dialami baik ditingkat polres maupun ke P2TP2A.

Tabel 2.75
Jumlah Kasus yang terjadi pada Perempuan dan Anak
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

Kasus	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pemeriksaan Anak	39	24	14	22	22
pelecehan	33	11	9	18	5
KDRT	48	58	75	65	52
Pemeriksaan	6	4	6	7	5
Penganiayaan	4	5	2	14	6

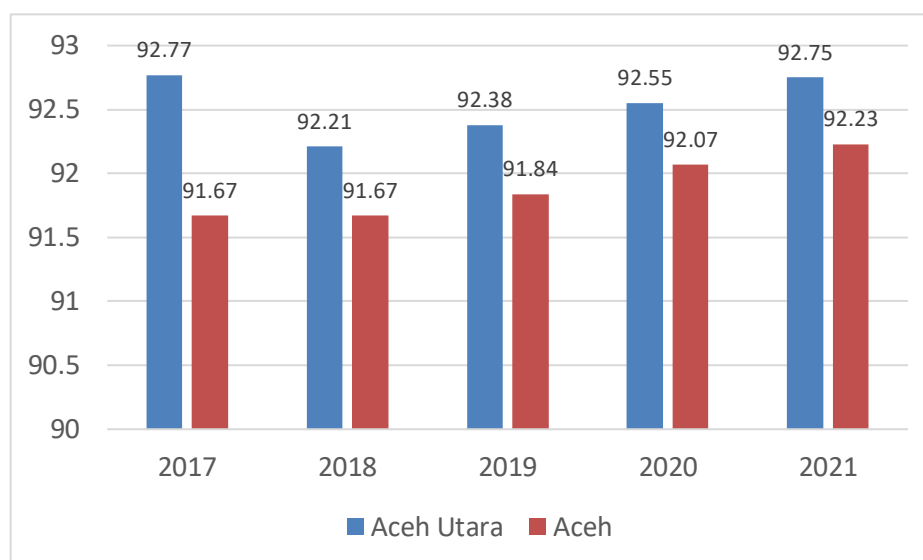
Traumatis	12	0	1	0	0
Sodomi	0	1	0	0	0
Pembunuhan	2	n/a	0	0	1
Incest	0	0	2	1	0
Jumlah Kasus	144	103	109	127	91

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Tabel 2.75 memperlihatkan jumlah kasus yang ditangani oleh unit layanan yang berada langsung di bawah koordinasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2017 ke tahun 2021. Jumlah kasus berfluktuasi, pada tahun 2018 jumlah kasus turun, tahun 2019 dan 2020 jumlah kasus meningkat dan Kembali turun pada tahun 2021.

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

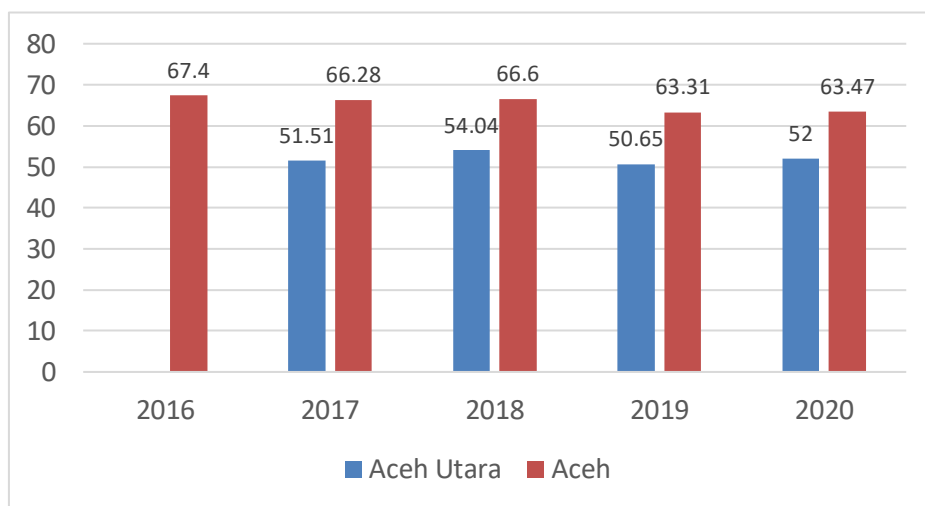
Gambar 2.16
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

Perkembangan IPG Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2017-2021 berfluktuasi, pada tahun 2017 IPG sebesar 92,77 namun pada tahun 2018 turun ke 92,21, selanjutnya kembali meningkat hingga mencapai 92,75 pada tahun 2021. Nilai IPG Kabupaten Aceh Utara berada di atas Provinsi.

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Perkembangan IDG Kabupaten Aceh Utara selama empat tahun terakhir berfluktuasi, pada tahun 2017 IDG sebesar 51,51 kemudian naik menjadi 54,04 pada tahun 2018 dan kembali turun ke 52 pada tahun 2020. Nilai IDG Kabupaten Aceh Utara lebih rendah dibandingkan dengan IDG Aceh.

Ditinjau dari proporsi perempuan di parlemen Kabupaten Aceh Utara sangat rendah yaitu hanya 1 orang perempuan dari 45 anggota parlemen (2,22 persen). Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

Gambar 2.17
Indeks Pemberdayaan Gender Kab. Aceh Utara Tahun 2017-2021

3. Pangan

Pendukung kedaulatan pangan menempatkan individu dalam memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi pangan di tengah pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pangan. Ketersediaan pangan adalah ketersediaan pangan secara fisik disuatu

wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan.

Tabel dibawah memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017 adalah 504,73 kg/jiwa/tahun, namun pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 379,58 kg/jiwa/tahun. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan ketersediaan pangan utama 475,08 kg/jiwa/tahun dan tahun 2021 turun menjadi 418,78 kg/jiwa/tahun.

Tabel 2.76
Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2017-2021

No	KOMODITI	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan Utama per tahun (kg)	504,73	379,58	475,08	469,7	418,78
2	Jumlah Penduduk	602.554	608.397	619.407	602.793	608.106

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan beberapa indikator ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi, tersebar di dalam tiga kelompok tersebut. Daerah Rentan Rawan Pangan, artinya daerah yang apabila tidak disupervisi dapat menjadi daerah rawan pangan.

Kondisi desa rawan pangan di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan peta Ketahanan dan Kerentangan Pangan atau yang lebih dikenal dengan peta FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) dari tahun 2019 – 2021 pada Tabel 2.77 berikut :

Tabel 2.77
Jumlah Desa Rawan Pangan

No	Tahun	Jumlah Gampong Rawan Pangan		
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3
1	2019	17	57	171
2	2020	17	48	154
3	2021	13	37	110

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

4. Pertanahan

Pertanahan adalah suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Untuk lebih jelasnya kinerja pelayanan terhadap pengelolaan Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2017 – 2021 seperti yang diuraikan pada Tabel 2.78. Sampai dengan tahun 2021 jumlah tanah Pemda yang telah bersertifikat sejumlah 797 persil dari total 2.418 persil atau sekitar 32,96 persen.

Tabel 2.78
Kinerja Pelayanan Bidang Pertanahan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Indikator	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Tanah Pemda Yang Bersertifikat	Sertifikat	-	26	57	13	10
2	Jumlah sengketa tanah (Kasus) yang ditangani Per Tahun	kasus	-	-	9	2	1
3	Jumlah Ketersediaan data dan informasi pertanahan	Peta	-	-	-	12	2
4	Jumlah Fasilitas Pengadaan (Tanah Pemda)	Sertifikat	-	-	3	-	4

5	Jumlah Fasilitas (Tanah Umum) yang bersertifikat	Sertifikat	-	-	17	-	-
---	--	------------	---	---	----	---	---

Sumber : Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

5. Lingkungan Hidup.

a. Tersusunnya RPPLH Kabupaten Aceh Utara

Untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang terarah dan berkelanjutan, diperlukan berbagai dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan antara lain dokumen RPPLH (*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*) seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai pendukung utama Sasaran Kegiatan dan sekaligus Dokumen acuan untuk membuat RPJP, RPJM serta RTRW/Revisi RTRW Kabupaten Aceh Utara. Untuk capaian kinerja terhadap hal yang dimaksud, sampai dengan Tahun 2021 dokumen RPPLH belum tersedia (proses penetapan qanun).

b. Tersusunnya KLHS Kabupaten Aceh Utara

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. seperti yang termuat dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU PPLH Pasal 15 Ayat 1 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau Kebijakan Rencana Program (KRP).

Adapun tujuan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan melalui penyusunan dokumen KLHS;
2. Memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP;
3. Mengarahkan, mempertajam fokus, dan membatasi lingkup penyusunan dokumen lingkungan yang dilakukan pada tingkat rencana dan pelaksanaan usaha/kegiatan.

Sampai saat ini dokumen KLHS yang sudah tersedia adalah KLHS Perubahan RPJMD dan RTRW Kabupaten Aceh Utara.

c. Terselenggaranya KLHS untuk KRP Kabupaten Aceh Utara

Menelaah terhadap tujuan KLHS seperti yang di uraian pada di atas, bahwa untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana dan atau Program. KLHS menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan atau pembangunan dalam suatu wilayah.

Penyelenggaraan KLHS sangat penting untuk menjamin kebijakan dan rencana program yang diimplementasikan telah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. KLHS RPJMD memberikan pilihan scenario pembangunan di Kabupaten Aceh Utara perlu disertai dengan intervensi kebijakan dan rencana aksi baik yang bersifat mitigasi maupun adaptasi antara lain: (a) lebih focus pada upaya-upaya intensifikasi, (b) menekan upaya ekstensifikasi, utamanya yang akan menyebabkan alih fungsi lahan hutan, dan (c) menyiapkan sejumlah input teknologi kreatif sebagai upaya meningkatkan daya dukung lingkungan hidup sumber daya alam.

d. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang bersifat terbuka,tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Adapun ketersediaan RTH publik di Kabupaten

Aceh Utara seluas 1.736 hektar atau sekitar 7,14 persen dari luas wilayah kota (24.300 hektar).

e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Nilai IKA, IKU, dan IKL.

IKLH Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2021 bernilai 68,39 dengan predikat “Sedang”. Nilai IKLH ini berasal dari kontribusi IKA, IKU, dan IKL masing-masing sebesar 65,00; 88,51; dan 37,02. Kontribusi kualitas udara menduduki tingkat yang paling besar untuk IKLH Aceh Utara. Hal ini menunjukkan kualitas udara ambien masih sangat baik di kabupaten ini. Sebaliknya, indeks kualitas lahan menunjukkan kontribusi paling rendah di dalam kontribusi perhitungan IKLH Kabupaten Aceh Utara, dapat di lihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	IKLH	30.75	32.84	68.84	73,88	68,39
	Kategori	Buruk	Buruk	Sedang	Baik	Sedang
2.	IKA	68.00	68.00	82,14	80,56	65,00
	Kategori	Sedang	Sedang	Cukup Baik	Cukup Baik	Sedang
3.	IKU	n/a	n/a	86,83	90,75	88,51
	Kategori			Baik	Sangat Baik	Baik
4.	IKL	25,87	31,09	45,39	31,21	37,02
	Kategori	Waspada	Waspada	Sangat Kurang Baik	Waspada	Waspada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2022

- f. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU

Pengawasan aktifitas pembangunan yang berdampak langsung dengan kondisi sekitarnya diperlukan untuk mendeteksi sejak dini informasi dan situasi aktifitas yang dilakukan oleh industri atau perusahaan. Sejak tahun 2017 hingga 2021 perkembangan perusahaan wajib amdal sebagai berikut :

Tabel 2.80
Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi	4	4	4	4	4
Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL	4	4	4	4	4
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2022

- g. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah

Tindak lanjut dalam pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu belum dilaksanakan secara maksimal, Maka diperlukan proses lanjutan. Oleh karena itu, dengan kepedulian kita semua menjadi komitmen penting terhadap lingkungan hidup dimana kita berada, sehingga kelestarian bumi terus terjaga (*one place, one earth*). Berbagai kasus pencemaran lingkungan yang tertangani selama ini sebagai berikut:

Tabel 2.81
Jumlah Kasus Lingkungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017- 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	6	7	7	5	2
Jumlah kasus lingkungan yang ada	6	7	7	5	2
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2022

h. Pengelolaan DAS

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Hal ini seperti yang di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS yang mengatur tentang kriteria terhadap DAS itu sendiri, antara lain adalah tentang DAS dipulihkan, meningkatkan Daya Dukung DAS serta DAS yang dipertahankan, sedangkan untuk aturan Pengelolaan DAS ada aturan yang mengikat diantaranya Keputusan Presiden dan 9 (Sembilan) Peraturan Menteri. Adapun tujuan dari Pengelolaan DAS antara lain mencapai masyarakat yang sejahtera (adil, makmur, merdeka dan berdaulat; Mewujudkan kepedulian, kemampuan dan partisipasi aktif para pihak yang menghasilkan harmoni dan sinergi dalam pengelolaan DAS agar pembangunan dapat berkelanjutan; Daya dukung dan daya tampung lingkungan dan ekosistem DAS meningkat, termasuk terjaganya produktifitas Hutan dan lahan; dan Tata air DAS optimal (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dalam distribusi ruang dan waktu).

Untuk ruang lingkup kegiatan Pengelolaan DAS di Kabupaten Aceh Utara adalah searah dengan rencana lingkup Potensi Pengembangan Wilayah yang berkaitan seperti yang diuraikan diatas, yang mengacu pada rencana pola ruang yang terdapat dalam RTRW Kabupaten Aceh Utara 2012–2032 dengan menyesuaikan karakteristik wilayah yang ada. Selanjutnya, dengan berbagai indikasi Program kegiatan yang lahir dari rencana pengembangan wilayah yang di maksud, banyak yang berdampak langsung terhadap pengendalian banjir di Kabupaten Aceh Utara, maka secara tidak langsung sangat mendukung dalam rencana Kegiatan Pengelolaan DAS Krueng Jambo Aye dan DAS Krueng Peusangan secara terpadu dan berarah seperti yang diamanatkan dalam aturan yang dimaksudkan di atas.

Adapun lingkup kegiatan pengelolaan DAS, seperti yang diuraikan di bawah ini antara lain adalah penataan ruang (kawasan lindung, budidaya, kawasan khusus, dll); pengelolaan sumber daya air (kualitas, kuantitas, distribusi dan kontinuitas); pengelolaan vegetasi (kawasan hutan dan luar kawasan hutan); pengembangan sumberdaya buatan (sarana dan prasarana pengairan, dll); Pembinaan/pemberdayaan sumberdaya manusia (penyuluhan, pelatihan, permodalan, dll); pengembangan kelembagaan (Forum DAS, Kelompok Tani, LSM, Tim Koordinasi, Jejaring Kerja, dll).

Menelaah terhadap permasalahan utama terhadap DAS adalah terjadinya banjir yang sering melanda lebih dari tujuh kabupaten/kota di wilayah pantai barat-selatan, pantai timur dan wilayah tengah Aceh, diyakini terjadi karena tingkat kerusakan wilayah hulu berbagai daerah aliran sungai di Provinsi Aceh semakin tinggi. Tanpa aksi nyata dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah setempat, diyakini berbagai bencana alam karena kerusakan lingkungan akan semakin sering terjadi di Aceh. Data Wahana Lingkungan Hidup Aceh tahun 2006, kerusakan DAS mencapai 46,40 persen atau 714.724 hektar (ha) dari 1.524.624 ha total luas DAS. Kawasan DAS yang kritis terjadi di pantai timur Aceh, seperti DAS Peusangan, yang merupakan wilayah sumber air lima kabupaten/kota, diantaranya Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah. Diperkirakan kerusakan rata-rata di atas 70 persen. Data dari Balai Pengelola DAS Krueng Aceh Departemen Kehutanan, antara tahun 1999-2008, banyak terjadi pengurangan luasan DAS, termasuk didalamnya luasan daerah resapan air karena pemalakan liar.

Kerusakan DAS Krueng Peusangan yang semula luasnya mencapai 297.080 hektar, tahun 2008 ini luasannya hanya mencapai 235.975 hektar saja. Begitu juga dengan DAS Krueng Jambo Aye, semula luasan lahannya mencapai 533.816 hektar, sekarang hanya mencapai 485.955 hektar saja. Tabel 2.82 menunjukkan luas sempadan sungai di Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, terdapat permasalahan DAS yang mendasar seperti yang tersebut di bawah ini antara lain :

1. Terjadinya banjir pada saat bulan hujan Oktober – Desember – Februari.
2. Terjadinya kekeringan pada bulan kemarau.
3. Penurunan suhu temperatur kawasan.
4. Pergeseran musim tanam dan frekuensi tanam berkurang.
5. Konflik satwa dan manusia.
6. Estetika alam, berkurang/hilangnya keragaman hayati.

Tabel 2.82
Luas Sempadan Sungai di Kabupaten Aceh Utara

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	Luas Sempadan Sungai (Ha)	Luas Vegetasi di Sempadan (Ha)	Persentase Vegetasi(%)
1	Sawang	42,8	856	856	99,97
2	Pasee	47,5	950	895	94,17
3	Keureuto	77,8	1.556	1213	77,93
4	Jambo Aye	131	2.620	2612	99,69
5	Peutoe	21,8	436	218	49,95
Jumlah		320,9	6.418	5793	90,26

Sumber: Dinas PUPR Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Adapun faktor penyebab secara dampak pada DAS adalah seperti yang diuraikan di bawah ini antara lain pengalihan fungsi hutan, ilegal logging, kebakaran hutan, terlambatnya penindakan kegiatan ilegal, sebagian regulasi terkait di pusat, relatif lemah penegakan hukum, pergeseran pemukiman, tensitas hujan tinggi. Untuk faktor penyebab secara alami pada DAS, di antaranya adalah Tingginya curah hujan, banjir, Terjadinya kemarau/panca roba dan kebakaran hutan atau lahan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam Pengelolaan DAS di Kabupaten Aceh Utara adalah perlunya dukungan dari berbagai pihak terkait, baik dari Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya melalui indikasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku. Lembaga-lembaga terkait dalam mendukung Pengelolaan DAS Kabupaten Aceh Utara seperti yang tercantum pada Tabel 2.83 berikut :

Tabel 2.83
Lembaga-Lembaga Pendukung Pengelolaan DAS Kab. Aceh Utara

No	Lembaga/Institusi	Tahap Perencanaan	Tahap Pelaksanaan	Monitoring Dan Evaluasi
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	√		√
2	Dinas Lingkungan Hidup (DLHK)	√	√	√
3	Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan	√	√	√
4	Dinas kehutanan Dan Perkebunan	√	√	√
5	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	√	√	√
6	Badan Pemberdayaan Masyarakat		√	
7	Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral	√	√	√
8	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	√	√	√
9	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	√	√	√
10	Balai Wilayah Sungai	√	√	√
11	KPH	√	√	√
12	PDAM		√	
13	Perusahaan Listrik Negara		√	
14	Lembaga Swadaya Masyarakat		√	

i. Pengelolaan Persampahan

Pembangunan kualitas lingkungan hidup dalam pengelolaan persampahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan telah merubah paradigma pengelolaan persampahan yang bertumpu pada pembuangan akhir dengan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.

Cakupan pelayanan persampahan meliputi kawasan pasar dan kota kecamatan dengan kuantitas 100m³/hari. Kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara masih sangat rendah yaitu hanya 17,09 persen. Persentase sampah yang dikelola sebagaimana Tabel 2.84 berikut :

Tabel 2.84
 Persentase Sampah yang dikelola Tahun 2017–2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Volume Produksi Sampah (Ton)	296.74	301.27	301.27	301.27	301.27
Jumlah Sampah Yang ditangani(Ton)	49.5	49.5	49.5	51,49	51,49
Persentase	16,68	16,43	16,43	17,09	17,09

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Pengelolaan persampahan masih dilakukan secara konvensional yaitu sampah yang telah terkumpul didalam bak penampung sementara (*container*) diangkut oleh armada truk sampah dan dibuang ketempat pembuangan akhir (TPA) Teupin Keubeu diKecamatan Lhoksukon yang beroperasi secara terbuka (*open dumping*). Master Plan Persampahan TPA Teupin Keubeu dengan luas 32 ha telah disusun, diharapkan tidak saja menjadi tempat proses akhir, tetapi juga berperan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu. Dalam proses terpadu ini dipilah, dipisahkan dan dilakukan pengelolaan sehingga siap untuk dikembalikan ke lingkungan dalam bentuk yang aman bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karenanya TPA Teupin Keube masih membutuhkan banyak sarana dan prasarana pendukung lainnya. Kondisi sarana dan prasarana persampahan sebagaimana terlihat oleh Tabel 2.85 berikut :

Tabel 2.85
 Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan
 Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

Kendaraan	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Truk Compactor	1	-	-	1
ArmrollTruck	11	8	-	3
DumpTruck	23	18	-	5
Bulldoser	2	1	-	1
Excavator	2	1	-	1
Container	77	28	12	37
MobilTinja	3	3	-	-
Mobil sky lift	1	1	-	-
Excavator Mini	1	-	1	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2022

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah kawin atau sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Sejak tahun 2010 KTP manual diganti secara bertahap dengan KTP elektronik yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Tabel berikut menyajikan jumlah kepemilikan KTP Elektronik. Perkembangan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.86
Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

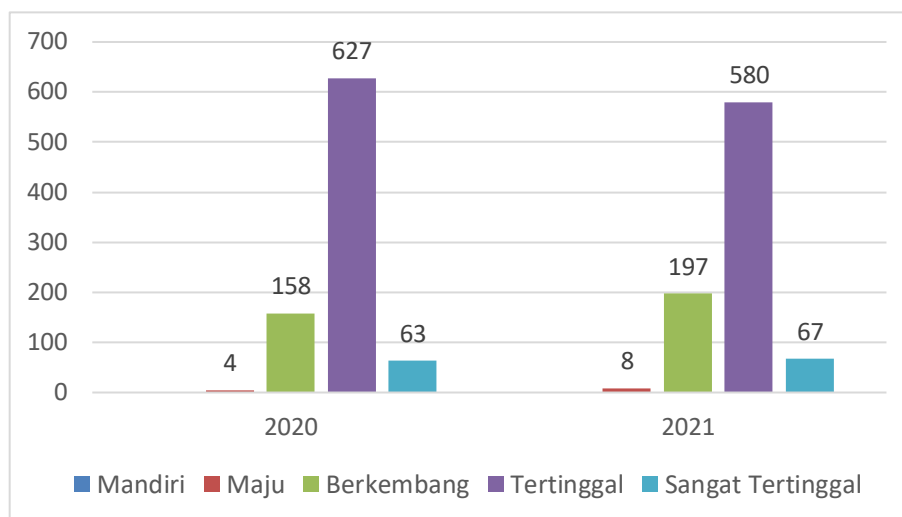
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Kepemilikan KTP	91	91	95	96	97
Persentase Anak usia 0-17 kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	-	-	-	13,28	22,61
Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-17 tahun	-	80	82	85	81

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Utara Tahun 2022

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM dalam rangka

mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri. Perkembangan status desa di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Gambar 2.18 berikut.



Sumber : DPMPPKB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Gambar 2.18
Status Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2021

Dari Gambar 2.18 dapat dilihat bahwa belum ada satupun gampong di Kabupaten Aceh Utara yang berstatus mandiri, sedangkan gampong dengan status maju, pada tahun 2021 meningkat dari 4 gampong menjadi 8 gampong. Gampong dengan status berkembang juga meningkat dari 158 menjadi 197. Gampong dengan status tertinggal menurun dari 627 menjadi 580, namun gampong dengan status sangat tertinggal meningkat dari 63 menjadi 67 gampong. Persentase gampong maju dan berkembang meningkat dari 19,01 persen pada tahun 2020 menjadi 24,06 persen pada tahun 2021.

Dilihat dari pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), sampai dengan tahun 2021 jumlah BUMG yang aktif berjumlah 707 BUMG berdasarkan penyertaan modal dari Dana Desa. Kondisi BUMG secara rinci dapat dilihat dari Tabel 2.87.

Tabel 2.87
Kondisi BUMG di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	BUMG Aktif	707 unit
2	Jumlah Penyertaan Modal	Rp.133.031.171.211
3	Laba Usaha	Rp. 2.657.594.104
4	Jumlah BUMG yang membuat laporan keuangan	193 unit
5	Jumlah BUMG yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Gampong	89 unit

Sumber : DPMPPKB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Tujuan utama tersebut diwujudkan salah satunya melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan dan kedamaian.

Tabel 2.88
Jumlah PKK Aktif, Posyandu Aktif dan Jumlah Keseluruhan LPM di Kab. Aceh Utara Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
PKK aktif	516	526	852	852	852
Posyandu Aktif	894	953	952	952	952
Jumlah LPM	2185	2185	2185	2185	2185

Sumber : DPMPPKB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

PKK merupakan suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga maupun ibu yang mempunyai karier di bidang lain, yang jelas bertujuan untuk mensejahterakan keluarga, kegiatan PKK setiap tahun dilakukan pembinaan untuk adanya peningkatan mutu dan kualitas dalam mengayomi keluarga namun ada sebagian kecil yang tidak bergabung. Tim penggerak PKK Kabupaten setiap tahun melakukan pembinaan di kecamatan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan penduduk menjadi hal yang penting dalam perencanaan pembangunan dimana jumlah penduduk yang besar yang tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan SDM akan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Program Keluarga Berencana (KB) masih menjadi andalan utama dalam menekan jumlah anak dalam keluarga, hal ini tercermin dari peningkatan peserta KB aktif dan cakupan peserta KB aktif yang stabil sehingga angka kelahiran dapat dikendalikan.

Tabel 2.89
Cakupan peserta KB Aktif dan Akseptor KB di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan peserta KB aktif	70,42	70,52	57,04	66,11	67,27
Rasio Akseptor KB	68,75	68,82	58,28	66,11	67,27

Sumber : DPMPPKB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Data menunjukkan perkembangan jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Aceh Utara berfluktuasi, tahun 2018 cakupan peserta KB aktif meningkat menjadi 70,52 persen dari 70,42 persen pada tahun 2017, tahun 2019 mengalami penurunan hingga menjadi 57,04 persen, tahun 2021 kembali meningkat mencapai 67,27 persen. Besaran persentase cakupan peserta KB diukur dari banyaknya jumlah permintaan alat kontrasepsi di lapangan dan di klinik yang ada di Aceh Utara.

Rasio Akseptor KB adalah perbandingan antara peserta (akseptor) KB dengan jumlah pasangan usia subur yang ada di Aceh

Utara dari data 2017 hingga 2021 mengalami penurunan dari 68,75 persen menjadi 67,27 persen.

Total Fertility Rate (TFR) merupakan parameter fertilitas untuk mengetahui angka kelahiran total per wanita subur (15-49) tahun. Nilai TFR yang semakin rendah menunjukkan makin terkendalinya jumlah kelahiran penduduk. Pada tahun 2021, TFR Aceh Utara 2,61 lebih rendah dari TFR Aceh (2,68) dan lebih tinggi dari nasional (2,24). Perkembangan TFR Aceh Utara tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.90
Indikator Keluarga Berencana Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
TFR	n/a	n/a	n/a	2,77	2,61
mCPR	70,63	70,63	57,03	66,11	67,28
Unmet Need	16,70	16,93	25,26	17,90	14,77

Sumber : DPMPPKB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

9. Perhubungan

Hubungan transportasi dan pengembangan wilayah bersifat interaktif dua arah dan saling menunjang. Pengembangan wilayah yang diorganisasikan dalam sistem perwilayahan, yang terdiri dari Satuan-satuan Wilayah Pembangunan (SWP), yang masing-masing memiliki pusat-pusatnya yang tersusun secara hirarkis. Masing-masing pusat tersebut memiliki wilayah pengaruh dan antar pusat dihubungkan oleh jaringan transportasi.

Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi ke seluruh bagian wilayah akan mendorong pengembangan dan peningkatan berbagai sektor, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan per kapita serta kesejahteraan masyarakat.

Fasilitas transportasi merupakan leading sektor atau sektor pendahulu yang berfungsi strategis, mendorong pengembangan produksi komoditas unggulan dan sektor unggulan berbasis pendekatan keunggulan komparatif.

Jasa pelayanan angkutan dalam memobilisasi arus penumpang umum dan barang perlu dilakukan pengujian setiap waktu untuk

menjaga kelayakan kendaraan bermotor dalam melakukan aktifitas dengan tujuan kenyamanan dan lancarnya arus lalu lintas serta keselamatan di jalan raya. Berbagai upaya terus ditingkatkan dalam pelayanan bidang perhubungan darat ini dengan melakukan peningkatan baik sarana maupun prasarana. Gambaran perkembangan uji kir angkutan umum sebagai berikut :

Tabel 2.91
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017 -2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	4.690	4.813	4.676	2.997	3.251

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Layanan transportasi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara saat ini adalah layanan Bus Sekolah yang memudahkan akses siswa/i dalam Pendidikan dan ASN yang berkantor di Lhoksukon. Cakupan layanan bus sekolah sebesar 77,27 persen atau melayani 22 rute, dengan jumlah bus sekolah sebanyak 17 Unit.

10. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain Keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur. Kondisi demikian tentu menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh

informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Koperasi

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi aktif, maka diharapkan semakin menurunnya angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Aceh Utara sampai dengan tahun 2021 sebanyak 486 unit yang terdiri dari 163 koperasi aktif dan 323 koperasi tidak aktif. Persentase koperasi aktif dari tahun 2017 s.d 2021 terus menunjukkan peningkatan, sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2.92 berikut ini :

Tabel 2.92
Persentase Koperasi Aktif di Kab. Aceh Utara Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi	462	466	468	471	486
2	Jumlah Koperasi Aktif	138	141	148	153	163
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	324	325	320	318	323
4	Persentase Koperasi Aktif	29,87	30,26	30,77	32,48	33,54
5	Persentase Koperasi Tidak Aktif	70,13	69,74	68,38	67,52	66,46

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Dengan meningkatnya jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Aceh Utara diharapkan Koperasi yang ada di kabupaten Aceh Utara dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada semua anggota koperasi, sehingga koperasi dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan salah satunya dapat menurunkan angka kemiskinan. Persoalan yang dihadapi saat ini oleh koperasi dan usaha mikro kecil, menengah adalah menyangkut

dengan terbatasnya jaringan usaha dan informasi pasar. Untuk ke depan langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah melakukan perubahan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus koperasi melalui pelatihan pendampingan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja koperasi dan pelatihan pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada manajemen dan pengurus koperasi.

Selain itu juga supaya koperasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya petugas konsultasi koperasi lapangan (PKPL) untuk dapat memberikan bimbingan dan konsultasi kepada manajemen dan pengurus koperasi di dalam Kabupaten Aceh Utara.

b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga sangat berperan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 16.791 UMKM atau mengalami peningkatan sebesar 64,91 persen sedangkan pada Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 0.95 persen atau menurun 564 UMKM dari tahun 2018. Bertambahnya UMKM disebabkan jumlah pengusaha (wira usaha baru) di kabupaten Aceh Utara bertambah. Namun demikian UMKM di Kabupaten Aceh Utara masih menghadapikendala, yaitu terbatas akses permodalan, bahan baku, informasi pasar serta jaringan kerja dan kemitraan, sehingga masih sulit berdaya saing dengan daerah lain. Pada Tabel 2.93 berikut ini dapat dilihat jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.93
Jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021

No.	Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)
1	Usaha Mikro	6.352	58,28	5.635	50,69	5.710	50,24	10.607	64,97	10.576	62,99
2	Usaha Kecil	4.190	38,44	4.915	44,21	5.026	44,36	5.131	31,43	5.621	33,48
3	Usaha Menengah	357	3,28	567	5,10	592	5,40	587	3,6	594	3,54
	Jumlah UMKM	10.899	100	11.117	100	10.653	100	16.325	100	16.791	100

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari 7 sektor ekonomi, seperti ditunjukkan pada Tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari 7 sektor ekonomi yang bergerak untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), masih sedikit UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Selanjutnya akses modal untuk mendukung pengembangan UMKM masih terbatas.

Tabel 2.94
Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017– 2021

No	Sektor Ekonomi	2017		2018		2019		2020		2021	
		Unit UMKM	(%)	Unit UMKM	(%)	Unit UMKM	(%)	Unit UMKM	(%)	Unit UMKM	(%)
1	Perdagangan/ jasa	10,191	93,50	10,409	93,63	10.563	93,25	14.073	86,21	14.478	86,62
2	Pertanian	167	1,53	167	1,50	189	1,67	189	1,16	202	1,20
3	Pertambangan	12	0,11	12	0,11	13	0,11	13	0,08	14	0,08
4	Industri	441	4,06	441	3,97	472	4,17	1.384	8,48	1.404	8,36
5	Perikanan/ kelautan	28	0,28	28	0,25	28	0,25	28	0,17	52	0,31
6	Peternakan	23	0,21	23	0,21	26	0,23	607	3,72	610	3,63
7	Transportasi	37	0,34	37	0,33	37	0,33	31	0,19	31	0,16
	T o t a l	10,899	100	11,117	100	11.328	100	16.325	100	16.791	100

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

12. Penanaman Modal

Investasi menjadi hal penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu didukung oleh kehadiran pihak swasta untuk membuka investasi di Kabupaten Aceh Utara.

Perkembangan investasi setiap tahunnya mengalami peningkatan, sebagaimana pada Tabel 2.95 berikut :

Tabel 2.95
Perkembangan Jumlah Investor Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun (Jumlah Perusahaan)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Investor PMDN Dalam Daerah	52	751	411	994	1.267
Investor PMA	2	0	0	0	0
Jumlah	54	751	411	994	1.267

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2022

Sedangkan untuk perkembangan Nilai Investasi tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.96 berikut:

Tabel 2.96
Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017 - 2021

Uraian	Nilai Investasi (Rp.)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Investasi PMDN dalam Daerah	5.712.451.374.869	550.239.815.078	268.940.000.000	2.105.842.849.950	474.609.756.808
Investasi PMA	2.918.832.000.000	0	0	0	0
Jumlah	8.631.83.374.869	550.239.815.078	268.940.000.000	2.107.842.849.950	474.609.756.808

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2022

13. Kepemudaan dan Olahraga

a. Kepemudaan

Pemuda merupakan salah satu pilar pembangun kehidupan bangsa. Keberadaan pemuda sebagai aset dan penerus cita-cita bangsa di masa depan harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Bangsa yang kuat tidak hanya ditopang oleh kehadiran pertahanan yang kuat tapi juga adanya pemuda-pemuda yang kuat dalam berbagai sektor baik dalam sektor ekonomi, maupun pendidikan.

Tabel 2.97
Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan
Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pemuda (orang)	15.000	15.152	15.348	15.510	15.612
Jumlah Pemuda Berprestasi (orang)	18	22	25	27	30
Jumlah Organisasi Kepemudaan (OKP)	34	32	34	34	34

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Aceh Utara Tahun 2022

b. Keolahragaan

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Aspek keolahragaan juga tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet melalui program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini terlihat dari cabang-cabang pembinaan yang telah dilakukan selama ini seperti Sepak bola, futsal, volly ball, badminton, tenis meja, tenis lapangan, renang, dayung, tinju, panjat tebing, atletik, sepeda, anggar dan lainnya yang dibina dibawah pembinaan KONI Kabupaten Aceh Utara. Selain itu juga peningkatan prasarana olahraga juga dilakukan melalui program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga seperti lapangan sepak bola (stadion), lapangan Futsal, lapangan Volly dan lain-lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di kabupaten Aceh Utara dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung

sepanjang hayat. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan. Pembinaan dan pengembangan olahraga terbagi menjadi 4 kegiatan yaitu:

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

Tabel 2.98
Cabang Olahraga, Atlit dan Infrastruktur Olahraga
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cabang Olahraga binaan (cabor)	3	4	5	7	8
Atlit olahraga binaan (orang)	20	30	80	105	107
Atlit berprestasi (orang)	6	10	14	22	26
Pelatih berprestasi (orang)	2	3	4	4	5
Prestasi olahraga (cabor)	2	2	3	4	5
Lapangan olahraga (unit)	44	50	51	62	85

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tahun 2022

14. Kebudayaan

Dalam bidang seni dan budaya Kabupaten Aceh Utara memiliki 121 sanggar (group) kesenian pada tahun 2021 yang tersebar di 27 kecamatan. Group ini merupakan kelompok pelestari khasanah budaya dengan berbagai jenis kesenian. Untuk tarian, misalnya, seperti debus, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, rapai geleng, didong, prang sabilillah, dalael khairat, nadham, meurukon, dhike lingiek, Nasyid, drama bahasa aceh, nariet, poh kipah, pantoen, drumband, seni pahat, ukir, dan melukis.

Disamping itu, terdapat pula sastra (pantun, syair, hikayat) dan seni lukis (kaligrafi). Jumlah situs dan kawasan cagar budaya dapat dilihat pada Tabel 2.99 berikut :

Tabel.2.99
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017– 2021

Uraian	Tahun (unit)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Benda Cagar Budaya	433	433	433	433	433
- Milik Pemerintahan Daerah	302	302	302	302	302
- Milik swasta	131	131	131	131	131
Jumlah situs cagar budaya	100	100	103	103	103
- Milik Pemerintahan Daerah	95	97	97	97	97
- Milik Swasta	5	6	6	6	6
Jumlah Bangunan Cagar Budaya	99	102	102	102	102
- Milik Pemerintahan Daerah	94	96	96	96	96
- Milik swasta	5	6	6	6	6

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Beragam situs peninggalan/makam dan seni budaya tersebut merupakan aset sejarah dan kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang bernilai sangat tinggi dalam mendukung dan mendorong ketahanan budaya daerah. Banyaknya potensi Seni Budaya dan Pariwisata di kabupaten Aceh Utara mestinya menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya, tetapi potensi ini belum terkelola dengan baik sehingga belum banyak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya di Kabupaten Aceh Utara. Budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan minimal sebesar 40% untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi, dan pargelaran seni budaya serta ekonomi kreatif.

Tabel 2.100
Penyelenggaraan Festival dan Jumlah Sarana Seni serta Budaya
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah sanggar kesenian	82	121	121	121	121
2.	Jumlah museum	1	1	1	1	1
3.	Jumlah pusat kebudayaan	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara Tahun 2022

15. Perpustakaan dan Kearsipan

Bila dilihat dari perkembangan yang ada pada saat sekarang ini, perkembangan ataupun pembangunan Perpustakaan di Aceh Utara masih jauh dari yang diharapkan. hal ini dapat dilihat dari rasio antara perpustakaan Kabupaten Uceh Utara yang ada dengan masyarakat Aceh Utara. Pelayanan yang diberikan pun kurang maksimal karena hanya didukung oleh dua perpustakaan yaitu satu perpustakaan induk yang sampai saat ini masih berpusat di kota Lhoksukon dan satu perpustakaan cabang yang berpusat di kota Lhokseumawe.

Tabel 2.101
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun (Orang)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	3.626	3.900	2.979	3.625	3.796
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	n/a	n/a	430.839	593.492	593.511

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Selain dari segi perpustakaan keliling, kita juga dapat melihat kegiatan kearsipan. kegiatan dibidang ini terutama sekali melakukan pendataan dan penataan dibidang kearsipan pada setiap OPD baik itu dinas, badan, kantor maupun kecamatan yang tersebar di seluruh Aceh Utara.

Tabel 2.102
Koleksi Buku yang tersedia pada Perpustakaan Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia (Judul)	15.882	16.563	18.103	18.451	19.408
Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia (Eks)	50.563	50.563	48.800	63.105	66.342

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Aceh Utara tahun 2022

2.1.3.3. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengelolaan antara kedua sumber daya ini berbeda satu sama lain dan tergantung pada kondisi eksternal. Pembangunan sektor perikanan juga merupakan salah satu andalan di Kabupaten Aceh Utara mengingat hampir sebagian wilayah berada di kawasan pesisir.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara terbagi ke dalam 27 kecamatan yang mempunyai karakteristik wilayah masing-masing dengan panjang garis pantai mencapai 55,34 Km. Karakteristik wilayah Kabupaten Aceh Utara yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu : 1) Wilayah Pengembangan Perikanan Tangkap (wilayah pantai), 2) Wilayah Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (wilayah pesisir), 3) Wilayah Pengembangan Budidaya air Tawar (wilayah pedalaman), dan 4) Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan.

a. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap

Pengembangan perikanan tangkap harus memperhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Pengembangan perikanan tangkap juga mesti diikuti dengan keberadaan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan. Peningkatan pembangunan pelabuhan perikanan

dilakukan dengan memperhatikan keberadaan nelayan dan ketersediaan pengolahan yang memadai.

Garis pantai Kabupaten Aceh Utara sepanjang 55,34 km merupakan salah satu potensi untuk pengembangan dan peningkatan produksi hasil perikanan tangkap. Pengembangan perikanan tangkap diarahkan di wilayah yang mempunyai pantai/laut sebagai daerah penangkapan ikan. Daerah pengembangan perikanan tangkap meliputi 9 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, Baktiya Barat dan Tanah Jambo Aye.

b. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

Perikanan budidaya dipengaruhi oleh perlakuan terhadap ekosistem yang ada di hulu, seperti hutan dan daerah aliran sungai. Apabila terdapat perilaku yang merusak sumber daya di hulu secara berlebihan akan mengganggu daerah aliran sungai sehingga menyebabkan sedimentasi dan kurangnya pasokan air dan pakan alami. Wilayah pesisir Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu potensi untuk pengembangan perikanan budidaya air payau karena mempunyai luasan tambak 12.174 ha. Pengembangan perikanan budidaya air payau di arahkan pada daerah pesisir yang masih mempunyai pengaruh pasang surut, yang mempunyai sumber air tawar dari sungai maupun air asin dari laut sehingga akan mempermudah dalam pengelolaan pengairan dalam kegiatan budidaya. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan budidaya air payau mencakup 13 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Nisam, Syamtalira Bayu, Syamtalira Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Syamtalira Aron, Lhoksukon, Baktiya Barat, Baktiya, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye.

c. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Dalam rangka pengembangan perikanan budidaya air tawar diarahkan di wilayah pedalaman Aceh Utara terutama yang didukung

oleh sumberdaya air tawar seperti sungai, danau dan waduk. Namun untuk komoditas ikan air tawar dapat juga di kembangkan sampai ke daerah pesisir. Daerah prioritas untuk pengembangan perikanan air tawar di Kabupaten Aceh Utara mencakup 14 Kecamatan yaitu Kecamatan : Sawang, Cot Girek, Langkahan, Geureudong Pase, Nisam, Lhoksukon, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Meurah Mulia, Paya Bakong, Tanah Luas, Matangkuli, Banda Baro, dan Nisam Antara.

d. Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengembangan pengolahan hasil perikanan diarahkan di wilayah yang menjadi sentra produksi perikanan tangkap, hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai produk terutama pada saat produksi perikanan tangkap yang melimpah. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan pengolahan hasil perikanan meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye.

Tabel 2.103
Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Produksi Ikan (ton)	28.861,20	28.861,00	31.958,47	27.597,31	27.878,95
Target Daerah	33.149,79	35.978,57	28.668,63	29.195,05	29.718,37
Rasio	87,06	86,43	111,48	94,52	93,81

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Tabel 2.102 menunjukkan bahwa produksi ikan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 281,64 ton bila dibandingkan pada tahun 2020. Bila dilihat dari tren selama 5 tahun produksi ikan mengalami peningkatan maksimal sebesar 31.958,47 ton dan ini terjadi pada tahun 2019. Walaupun terjadi peningkatan produksi namun belum mencapai sesuai dengan target daerah.

Tabel 2.104
Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	40,64	41,23	43,52	43,82	47,05
Target daerah	38,00	42,19	44,02	45,85	47,68
Rasio	106,95	97,72	98,86	95,57	98,68

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Tabel 2.103 menunjukkan bahwa target konsumsi ikan daerah pada tahun 2021 sebesar 47,68 kg/kapita/tahun sedangkan jumlah konsumsi perkapita pada tahun 2021 sebesar 47,68 kg/tahun. Ini menunjukkan bahwa jumlah konsumsi ikan pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dari target yang telah di tentukan.

2. Pariwisata

Pembangunan Pariwisata dan kebudayaan mempunyai potensi cukup tinggi di Kabupaten Aceh Utara, mengingat nilai budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi jika mampu dikelola dengan profesional sehingga mampu menarik wisatawan agar berkunjung pada lokasi-lokasi wisata. Beberapa potensi budaya dan pariwisata yang ada yaitu potensi pariwisata alam dan potensi pariwisata budaya yang dikembangkan melalui berbagai program kegiatan seperti program pengembangan destinasi pariwisata, program pengelolaan keragaman budaya dan lain-lain. Potensi budaya yaitu sejarah, adat istiadat, seni dan pelaku seni perlu dikembangkan potensi yang dimiliki untuk menarik arus wisata baik wisatawan domestik dan manca negara. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 2.103, sedangkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Situs sejarah Kerajaan Samudera Pase yang merupakan objek wisata unggulan di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2021 hanya berjumlah 6.217 wisatawan.

Tabel 2.105
Jumlah Wisatawan Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Wisatawan	90.679	117.786	245.427	448.556	513.429

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Aceh Utara Tahun 2022

3. Pertanian

Pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan lebih difokuskan pada komoditi unggulan pertanian berupa komoditi tanaman padi. Dengan luas baku sawah 38.417 ha merupakan potensi untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan terutama padi, kedelai dan jagung guna mendukung pertumbuhan PDRB daerah di sektor pertanian. Peningkatan kelembagaan kelompok tani merupakan langkah awal peningkatan kesejahteraan petani, hal ini dapat dilakukan dengan adanya pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Tabel 2.106
Data Jumlah dan Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Kelas Kelompok				Jumlah Poktan
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
1	Baktiya	431	26	-	-	457
2	Baktiya Barat	155	3	-	-	158
3	Banda Baro	64	6	-	-	70
4	Cot Girek	100	-	-	-	100
5	Dewantara	101	5	-	-	106
6	Geureudong Pase	55	2	-	-	57
7	Kuta Makmur	250	6	-	-	256
8	Langkahan	152	6	-	-	158
9	Lapang	70	-	-	-	70
10	Lhoksukon	342	15	-	-	357
11	Matangkuli	191	35	-	-	226
12	Meurah Mulia	231	12	-	-	243
13	Muara Batu	118	3	-	-	121
14	Nibong	94	8	-	-	102
15	Nisam	230	14	-	-	244
16	Nisam Antara	94	2	-	-	96
17	Paya Bakong	145	4	-	-	149
18	Pirak Timu	112	12	-	-	124
19	Samudera	163	-	-	-	163
20	Sawang	337	71	-	-	408
21	Seunudon	150	7	1	-	158
22	Simpang Keramat	112	11	-	-	123

No	Nama Kecamatan	Kelas Kelompok				Jumlah Poktan
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
23	Syamtalira Aron	203	6	-	-	209
24	Syamtalira Bayu	154	4	-	-	158
25	Tanah Jambo Aye	267	10	-	-	277
26	Tanah Luas	318	30	-	-	348
27	Tanah Pasir	86	-	-	-	86
	Jumlah	4725	298	1	0	5024

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Selama beberapa tahun terakhir, daerah ini mengembangkan sejumlah tanaman pangan seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, perkembangan produksi komoditi tanaman pangan unggulan tersaji pada Tabel 2.107 berikut:

Tabel 2.107
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

No.	Komoditi	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi	440.738,83	367.519,63	389.076,30	393.477,210	343.726,19
2	Kedelai	358,08	3.804,73	59,75	497,72	105,71
3	Jagung	14.120,56	10.989,22	14.647,67	10.436,60	13.500,95
4	Kacang Tanah	157,14	128,04	110,57	122,01	115,9
5	Ubi Kayu	46,20	45,60	22,77	3.482,31	3.331,48
6	Ubi Jalar	3.625,57	3.613,21	3.115,15	96,40	102,63
7	Kacang Hijau	228,66	187,15	156,96	60,82	48,58

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Tabel 2.108
Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

NO	JENIS TERNAK	TAHUN (EKOR)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi	102.256	104.119	104.841	106.937	117.800
2	Kerbau	5.789	5.589	5.678	5.784	5.828
3	Kambing	78.700	83.334	101.240	103.264	115.415
4	Domba	14.620	14.189	18.243	18.505	18.683
5	Ayam Buras	895.044	762.743	1.036.484	1.057.213	1.097.514
6	Ayam Pedaging	4.055.433	3.450.332	6.350.579	6.477.590	6.599.710
7	Itik	374.749	356.369	685.964	699.683	706.679

Sumber : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Dari Tabel 2.108 terlihat bahwa, secara umum perkembangan populasi ternak besar seperti sapi dan kerbau mengalami peningkatan populasi sejak tahun 2017 hingga 2021. Adapun peningkatan populasi ternak besar tahun 2021 sapi sebesar 15.544 ekor dari tahun 2017. Untuk ternak unggas, berdasarkan Tabel di atas terjadi peningkatan populasi yang cukup tinggi pada ternak ayam buras dan ayam pedaging. Tingkat pertumbuhan populasi ayam buras pada tahun 2021 sebesar 18,45 persen, sedangkan pertumbuhan populasi ayam pedaging pada tahun 2021 adalah 38,55 persen, peningkatan laju pertumbuhan pada ternak unggas terjadi secara signifikan disebabkan karena permintaan terhadap daging unggas mengalami peningkatan. Dalam rangka peningkatan produksi komoditi perlu dilakukan pola-pola pendampingan secara berkelanjutan dan intensif kepada petani kebun agar produksi peternakan dapat ditingkatkan pada tahun yang akan datang.

Tabel 2.109
Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Karet	5.359	5.344	5.344	5.326	4.971
2	Kelapa Sawit	204.113	205.269	209.374	205.145	319.181
3	Kelapa Dalam	9.931	9.917	10.115	9.917	9.960
4	Kopi	917	915	933	920	923
5	Cengkeh	5	4	4	3	3
6	Pala	36	38	39	38	52
7	Pinang	4.275	4.264	4.849	4.264	4.291
8	Kapuk / Randu	200	200	204	197	197
9	Kakao	3.676	3.671	3.744	3.704	3.816
10	Kemiri	509	509	519	506	506
11	Lada	6	6	7	6	6
12	Sagu	155	155	158	152	152
13	Aren	311	311	317	308	308
14	Nilam	3	0,4	1,0	1	1
15	Tebu	38	29	30	29	29
16	Tembakau	49	49	50	49	49
17	Serai wangi	-	-	2,5	n/a	-

Sumber :Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Produksi komoditi perkebunan rakyat terutama komoditi unggulan seperti kelapa sawit mengalami peningkatan tahun 2017 sebesar 204.113 ton meningkat menjadi 319.181 ton pada tahun 2021. Sedangkan komoditi karet mengalami penurunan produksi tahun 2017 sebesar 5.359 ton menjadi 4.971 ton pada tahun 2021. Produksi perkebunan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di atas. Dalam rangka peningkatan produksi komoditi perlu dilakukan pola-pola pendampingan secara kontinyu dan intensif kepada petani kebun agar produksi perkebunan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang. Ditinjau dari kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara, sektor pertanian menyumbang kontribusi terbesar yaitu lebih dari 30 persen. Pada tahun 2020 sektor pertanian menyumbang kontribusi tertinggi yaitu 36,36 persen namun kemudian pada tahun 2021 menurun ke nilai terendah selama 5 tahun terakhir (32,30 persen).

Tabel 2.110
Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB ADHB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Milyar Rupiah)	5.987,64	6.381,92	6.714,77	7.164,35	7.492,14
2	PDRB ADHK Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Milyar Rupiah)	4.522,90	4.702,79	4.894,40	5.046,48	5.054,11
3	Distribusi Persentase PDRB ADHB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen)	34,21	33,92	34,13	36,36	32,30
4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen)	5,24	3,98	4,07	3,11	0,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

4. Perindustrian dan Perdagangan

a. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri merupakan penggerak utama perekonomian, bahkan industri pengolahan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Peran sektor industri pengolahan terhadap pembentukan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara hanya dipengaruhi oleh sub sektor industri pengolahan (manufaktur). Peranan sektor industri pengolahan terhadap total nilai PDRB cenderung menurun disebabkan tidak maksimalnya produksi PT. Pupuk Iskandar Muda.

Perkembangan kontribusi dan pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2017 PDRB ADHK lapangan usaha industri pengolahan menyumbang sebesar 9,73 persen dan cenderung menurun hingga mencapai 8,10 persen pada tahun 2021.

Tabel 2.111
Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Milyar Rupiah)	1.703,13	1.823,60	1.714,52	1.663,78	1.878,07
2	PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Milyar Rupiah)	1.683,88	1.834,47	1.702,24	1.586,65	1.594,82
3	Distribusi Persentase PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Persen)	9,73	9,69	8,71	8,44	8,10
4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Persen)	-22,62	8,94	-7,21	-6,79	0,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

b. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Peran sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap pembentukan ekonomi di Aceh Utara, hanya

dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran. Perkembangan capaian sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap pembentukan ekonomi di Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 2.112 berikut :

Tabel 2.112
Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB ADHB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah)	2.229,64	2.352,04	2.428,47	2.325,64	2.564,11
2	PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah)	1.818,17	1.887,50	1.947,79	1.850,18	1.965,14
3	Distribusi Persentase PDRB ADHB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen)	12,74	12,50	12,34	11,80	11,06
4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen)	6,87	3,81	3,19	-5,01	6,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Pola pertumbuhan sektor ini dalam kurun waktu 2017-2019 memperlihatkan kecenderungan naik untuk tiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga -5,01 persen akibat pandemi Covid-19 dan pada tahun 2021 kembali tumbuh sebesar 6,21 persen. Jika dilihat dari persentase distribusi terhadap PDRB, lapangan usaha ini merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah pertanian dan pertambangan dengan kontribusi di atas 11-12 persen.

c. Ekspor dan Impor

Nilai ekspor dari Tahun 2018 sebesar USD 157.922.174 dan cenderung menurun pada tahun 2019 menjadi USD 7.860.034.

Sedangkan pada tahun 2020 Nilai ekspor kembali meningkat menjadi USD 12.448.217 dan terus terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi USD 53.234.163.

Tabel 2.113
Perkembangan Nilai Ekspor Impor melalui Pelabuhan Krueng
Geukueh Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Ekspor	308.115.425	157.922.174	7.860.034	12.448.217	53.234.163
Nilai Impor	29.376.324	12.079.693	152.237	246.423	149.606
Surplus Perdagangan	278.739.100	145.842.481	7.707.797	12.201.794	53.084.557

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe Tahun 2022

5. Transmigrasi

Secara umum pengembangan Kawasan perdesaan melalui pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Aceh Utara telah dilaksanakan sejak tahun 1975, ditandaidengan terbentuknya Unit Pengelola Transmigrasi (UPT) I Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek dan UPT II Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon. Lebih lanjut pada tahun 1978 dan 1980 terbentuk lagi UPT III Bola Mas dan UPT IV Seureke di Kecamatan Langkahan. Pada tahun 1981 terbentuk lagi UPT V Langkahan di Gampong Babussalam dan UPT VI Buket Hagu di Gampong Cinta Makmur Kecamatan Baktiya. Hingga tahun 2017 UPT yang telah terbentuk sebanyak 20 UPT dengan berbagai kondisi perkembangan dilapangan, baik masih dalam pembinaan maupun sudah berjalan/berkembang. Jumlah UPT di Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 sebagaimana Tabel 2.114 berikut ini :

Tabel 2.114
Jumlah Transmigrasi di Kabupaten Aceh Utara

No	Nama Lokasi Transmigrasi	Desa	Kec.	Tahun Penempatan	Jlh Penempatan		Jlh Sekarang		Ket
					KK	Jiwa	KK	Jiwa	
1	UPT I Alue Leuhob	Alue Leuhob	Cot Girek	1975/1976	300	1231	325	1331	-
2	UPT II Buket Hagu	Buket Hagu	Lhoksukon	1975/1976	500	750	628	3140	-
3	UPT III Bola Mas	Bola Mas	Langkahan	1978/1979	150	657	165	825	-
4	UPT IV Seureuke	Seureuke	Langkahan	1980/1981	700	1010	752	1200	-
5	UPT V Langkahan	Babussalam	Baktiya	1981/1982	400	1600	210	840	-
6	UPT IV Buket Hagu	Cinta Makmur	Baktiya	1984/1985	425	2125	230	920	-
7	Leubok Tilam	Leubok Tilam	Cot Girek	2001	100	515	60	250	-
8	UPT VII Seureuke	Seureuke	Langkahan	2007	700	2800	720	2880	-
9	UPT I Pirsus Kr. Pase	Pase Sentosa	Sp. Keuramat	1985	494	1976	300	1275	-
10	UPT II Pirsus Kr. Pase	Suka Damai	Geureudong Pase	1986	500	2000	200	839	-
11	UPT III Pirsus Kr. Pase	Makarti	Tanah Luas	1989	200	800	99	835	-
12	Jeulikat	Jeulikat	Nisam	2008	120	482	15	60	-
13	PMU Sawang	Riseh Tunong	Sawang	2006	153	638	153	638	-
14	Buket Jrat Manyang	Buket Jrat Manyang	Tanah Jambo Aye	2008	120	516	131	640	-
15	Alue II	Krueng Tuan	Nisam Antara	2013	36	162	36	162	-
16	Alue Dua II	Krueng Tuan	Nisam Antara	2014	92	299	92	299	-
17	UPT VI Buket Hagu	Cinta Makmur	Baktiya	2013	100	453	100	453	Dalam Pembinaan
18	UPT VI Buket Hagu	Cinta Makmur	Baktiya	2014	30	126	30	126	Dalam Pembinaan
19	UPT VI Buket Hagu	Cinta Makmur	Baktiya	2015	50	242	50	242	Dalam Pembinaan
20	UPT V Langkahan	Babussalam	Baktiya	2016	50	153	50	153	Dalam Pembinaan
Jumlah					5220	18535	4346	17108	

Sumber : DPM Transnaker Kabupaten Aceh Utara, 2022

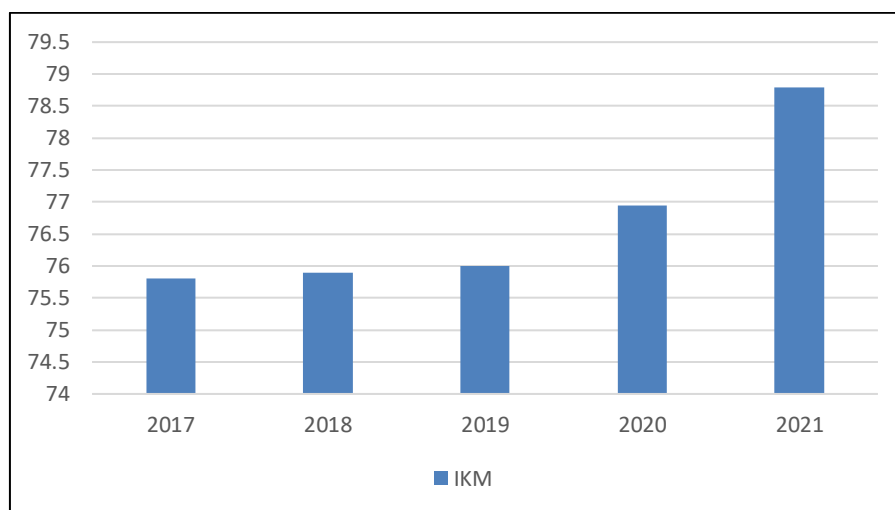
Dilihat dari Tabel 2.114, pengembangan kawasan transmigrasi UPT I Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek dan UPT II Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon merupakan UPT perintis dan saat ini lebih maju dan berkembang dibanding dengan lokasi UPT lainnya. Demikian pula dengan beberapa UPT lainnya yang juga berkembang seperti UPT IV Seureuke kecamatan Langkahan. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menempatkan Kabupaten Aceh Utara menjadi lokus Transmigrasi Prioritas Bidang RPJMN 2020-2024 yaitu Kawasan Transmigrasi Cot Girek sebagaimana Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi (P2RKT). Sampai saat ini beberapa UPT masih memerlukan sarana prasarana pendukung seperti akses jalan, jembatan, fasilitas umum lainnya. Disisi lain masih ditemukannya kasus tumpang tindih kepemilikan lahan di Kawasan transmigrasi.

2.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Salah satu indikator urusan kesekretariatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Aceh Utara memiliki tren capaian yang positif yang secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber :Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Gambar 2.19
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017-2021

2. Sekretariat DPRK

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara; tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pembentukan qanun, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD); dan terintegrasi program-program DPRK untuk melaksanakan fungsi pembentukan qanun, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRK.

2.1.3.5. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Urusan perencanaan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai perencanaan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Secara rinci capaian dari beberapa indikator urusan perencanaan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan merupakan dokumen yang di susun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu. Dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun atau yang selanjutnya disebut RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), dokumen perencanaan 5 tahun yang selanjutnya disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 tahun rencana yang selanjutnya disebut RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014. Visi jangka panjang Kabupaten Aceh Utara adalah *“Terwujudnya Masyarakat Aceh Utara yang Maju, Sejahtera, dan Islami”* yang akan dicapai melalui misi-misi sebagai berikut; mengimplementasikan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan; membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal, khususnya sektor pertanian dengan mengandalkan lapangan usaha tanaman bahan makanan, perikanan, peternakan, dan perkebunan sebagai penopang utama, diikuti dengan pengembangan industri pengolahan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi; memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha di sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan dan kelautan, peternakan, dan perkebunan) dan di sektor industri (industri pengolahan, industri kecil/rumah tangga); menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui revitalisasi sektor pertanian (khususnya sub sektor tanaman bahan makanan, perikanan dan kelautan, dan peternakan), yang disertai dengan penyediaan prasarana dan sarana penunjang yang memadai, dan peningkatan kualitas SDM pelaku usahatani; meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang diikuti dengan peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan keberadaan prasarana

pelabuhan laut dan pelabuhan udara; mengembangkan daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang masih terisolir dan tertinggal serta memberdayakan masyarakat di daerah/kawasan tersebut; membangun dan menyempurnakan prasarana/sarana pendidikan dan prasarana/sarana kesehatan yang berkualitas dan merata serta terjangkau oleh seluruh elemen masyarakat di seluruh kecamatan; melakukan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih melalui budaya kerja aparatur pemerintah yang jujur, amanah, berwibawa, dan professional, serta mengedepankan kepentingan publik; dan menegakkan supremasi hukum secara adil dan konsisten serta tanpa memihak.

Untuk merealisasi Visi dan Misi daerah tersebut secara bertahap akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan Visi dan Misi kepala daerah terpilih. RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022.

b. Kualitas Dokumen Perencanaan

Kualitas dokumen perencanaan berpengaruh pada nilai komponen perencanaan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kabupaten Aceh Utara sebagaimana komponen perencanaan dalam penilaian AKIP mempunyai bobot 30%, untuk nilai komponen perencanaan dalam penilaian AKIP Kabupaten Aceh Utara dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut : Tahun 2018 sebesar 15,73 pada tahun 2019 mengalami peningkatan sedikit menjadi 15,76 dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 17,29.

2. Keuangan

Urusan Keuangan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai keuangan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Aceh Utara telah mendapatkan opini WTP terhadap pengelolaan keuangan sebanyak 6 kali.

Ditinjau dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kontribusi terbesar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Besarnya proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah yang Sah dipengaruhi oleh penerimaan dari BLUD dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan). Sedangkan ditinjau dari kemandirian daerah, proporsi PAD dalam kurun waktu lima tahun terakhir hanya sebesar 9,7 persen terhadap total APBK.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tata kelola pemerintahan masih belum optimal antara lain terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kabupaten Aceh Utara berjumlah 9.141 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 9.066 orang dan PPPK berjumlah 75 orang. Komposisi ASN menurut golongan kepangkatan dapat dilihat pada Tabel 2.115 dan komposisi ASN menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.116.

Tabel 2.115
Jumlah ASN menurut Golongan Kepangkatan

No	Golongan	PNS	PPPK
1	Golongan I	65	-
2	Golongan II	1.759	28
3	Golongan III	5.005	47
4	Golongan IV	2237	-
Jumlah		9.066	75

Sumber : BKPSDM Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Tabel 2.116
Jumlah ASN menurut Golongan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	PNS	PPPK
1	SD	47	-
2	SMP	84	-
3	SMA	1.419	28
4	D.1	24	-
5	D.2	131	-
6	D.3	1.605	-
7	D.4	86	-
8	S.1	5.203	47
9	S.2	462	-
10	S.3	5	-
Jumlah		9.066	75

Sumber : BKPSDM Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerjadan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya dapat dilihat dari Indeks Profesionalisme ASN. Indeks profesionalisme ASN Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2021 bernilai 48,61.

4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Penelitian dan inovasi daerah diharapkan dapat meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Hasil survey indeks daya saing daerah Kabupaten Aceh Utara masih rendah dengan nilai 2,05.

2.1.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawasan internal terhadap kinerja pegawai dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan. Pengawasan memiliki dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi pemerintah. Pengawasan memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat lebih kreatif dalam mencermati, memaknai berbagai tuntutan serta dinamika pembangunan. Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan pemerintahannya masih berada pada posisi nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) masih dalam kategori “CC” dengan nilai 55,76 hal ini tentunya masih sangat jauh dari target yang ditetapkan.

2.1.3.7. Unsur Kewilayahan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten/Kota (*Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah*) Jadi dapat dipahami bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan kabupaten Aceh Utara, Kecamatan mempunyai tugas “Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpah oleh Bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah”.Adapun susunan organisasi pemerintahan kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2017 terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
 - Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan Mukim dan Gampong;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
- e. Seksi Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial;dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3.8. Unsur Kekhususan

1. Pendidikan Dayah

Implementasi Pendidikan Islami dikalangan pendidik dan peserta didik masih belum optimal. Hal ini tergambar dari banyaknya pendidik yang belum dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran. Muatan dinul Islam masih belum terintegrasi di dalam ilmu pengetahuan umum (sains). Dengan kata lain, masih terlihat dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Selain pendidikan umum, juga terdapat pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan, dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Peran lembaga dayah juga dapat dijadikan rujukan masyarakat dan elit sosial karena biasanya kalangan dayah memberikan masukan kepada berbagai pihak termasuk pemerintah dalam isu-isu kehidupan sosial masyarakat.

Dayah adalah sebuah lembaga otonom yang menangani pembelajaran dan pendidikan agama. Dayah didirikan dan dikelola oleh seorang teugku atau biasa dipanggil Abu, Abi atau Walid. Teungku secara otomatis mengatur semua kegiatan baik berupa pengajian maupun pembangunan dayah. Lahan pertapakan pembangunan sebuah dayah adalah pada tanah berstatus wakaf

masyarakat umum maupun milik pribadi teungku pimpinan. Masyarakat sekitar dayah biasanya adalah donatur utama sebuah dayah, pembangunan dayah biasanya dilakukan secara gotong royong. Dalam sebuah dayah, baik salafi maupun modern terdapat sebuah balai mushala tempat salat berjama'ah dilaksanakan setiap waktu salat. Terdapat juga deretan bilik bagi santri yang mondok, beberapa unit balai pengajian yang biasanya berkontruksi kayu. Sarana penunjang sebuah dayah adalah dapur umum, sarana olahraga, tempat wudhu dan sanitasi lainnya. Terkadang ada dayah yang juga mendirikan masjid didalamnya, tetapi ini sangat jarang adanya. Sedangkan khusus untuk dayah modern sarana lainnya adalah berupa unit sekolah yang lengkap meliputi ruang belajar, laboratorium dan perpustakaan, gedungnya pun berkonstruksi permanen.

Penetapan tipe dayah dalam Kabupaten Aceh Utara berpedoman kepada Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 73 Tahun 2017, dalam penetapan tipe dayah dilakukan oleh Tim Akreditasi sesuai hasil laporan Tim Monitoring. Dayah pada umumnya memiliki santri mondok/mukim paling sedikit 20 orang. Setiap tahunnya menjalani perubahan jumlah dayah diakibatkan data santri mondok setiap dayah menjalani naik turun sehingga berpengaruh pada penetapan tipe dayah. Sejak tahun 2019 penetapan dayah seluruh Aceh ditetapkan melalui keputusan Gubernur Aceh sehingga terjadinya sinkronisasi data antara Provinsi dengan Kabupaten, sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 tentang Akreditasi Dayah Aceh.

Tabel 2.117
Perkembangan Dayah dalam Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Dayah Tipe A+	5	5	7	4	4
Dayah Tipe A	20	20	7	12	12
Dayah Tipe B	38	36	15	25	25
Dayah Tipe C	88	73	61	65	65
Dayah Tipe D	53	58	109	90	91
Total	204	192	199	196	197

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

2. Kebudayaan

Masyarakat Aceh terkenal dengan masyarakat yang memiliki adat dan adat istiadat yang bersendikan syara', yang dalam implementasinya sebagai sumber nilai, dalam penegakan harkat dan martabat masyarakat Aceh dalam semua sektor kehidupan. Karena itu, Adat dan Adat Istiadat menjadi salah satu pilar kekhususan/keistimewaan Aceh sebagai identitas jati diri dan martabat Bangsa Aceh. Nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam pengembangannya secara umum di arahkan pada dua bidang, yaitu hukum adat dan adat istiadat. Penguatan hukum adat meliputi aspek peradilan adat, aturan adat dan lembaga adat. Dalam hal ini, adat memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran serta keberlanjutan perdamaian serta dapat menyelesaikan perselisihan secara damai dan aman serta ekonomis (murah). Sedangkan penguatan adatistiadat diarahkan untuk membentuk perilaku dan kreasi-kreasi seni untuk memperindah kehidupan. Hal ini sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi siprit dalam pembangunan Aceh.

Disamping itu, negara juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam, meskipun belum cukup terakomodir dalam kebijakan pembangunan. Adat juga telah diakui sebagai bagian dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan telah diatur dalam hukum internasional, pengabaian terhadap hak-hak adat merupakan tindakan pelanggaran HAM.

Selanjutnya norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti adat perkawinan, adat meulaot (adat laut), adat meulampoh (adat berkebun), adat meugoe (adat bersawah), adat mawah (adat bagi hasil), adat treun u blang (adat turun ke sawah), adat ternak, dan adat uroe peukan (adat hari pekan).

3. Syariat Islam

Ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah seperti mesjid, meunasah, dayah/pesantren, balai pengajian dan TPA/TPQ terus ditingkatkan terutama pembenahan fasilitas infrastruktur

sarana yang telah ada. Peningkatan ini penting dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas ibadah masyarakat guna memenuhi unsur kebersihan, kenyamanan serta penataan lingkungan tempat ibadah. Perkembangan tempat ibadah sebagaimana Tabel 2.118 berikut :

Tabel 2.118
Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan (Masjid dan Meunasah)
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017– 2021

No.	Prasarana	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Masjid	345	345	345	345	345
2.	Meunasah	852	852	852	852	852
3.	Dayah	192	199	196	197	197
4.	Balai Pengajian	3.911	3.911	2.505	3.010	1.549
5.	TPQ	162	262	262	262	262

Sumber :Dinas Syari'at Islam dan Dinas Pendidikan Dayah Kab. Aceh Utara 2022

Verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam memperoleh kondisi terdapat beberapa sarana dan prasarana tempat ibadah belum memenuhi kriteria sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ibadah terutama berkaitan dengan balai pengajian di beberapa lokasi desa/gampong. Namun demikian jumlah meunasah telah merata pada setiap gampong dan dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana aktifitas ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Tabel.2.119
Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

No.	Jenis Pelanggaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Khamar	-	-	-	-	-
2	Maisir	-	1	-	-	-
3	Khalwat	80	29	20	21	22
4	Ikhtilath	-	-	-	1	-
5	Zina	-	-	-	4	-
6	Pelecehan Seksual	-	-	-	6	1
7	Pemerkosaan	-	-	-	1	-
8	Liwath	-	-	-	-	-
Jumlah Kasus		80	30	20	33	23

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan urusan keistimewaan Aceh yang mempunyai tugas untuk membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka melaksanakan amal makruf, nahi mungkar. Kondisi penegakan syariat Islam dapat dilihat dari jumlah kasus pelanggaran syariat Islam yang terjadi selama 5 tahun terakhir sebagaimana tabel di atas. Jumlah kasus pelanggaran syariat Islam dari di Kabupaten Aceh Utara cenderung menurun dari 80 kasus pada tahun 2017 menurun menjadi 23 kasus pada tahun 2021.

Selain pelanggaran syariat, pencegahan penyebaran aliran sesat dan/atau aliran sempalan harus dilakukan secara intensif, masif dan sistematis tanpa harus mendasarkan pada kuantitas aliran yang ada. Kemurnian aqidah ummat sesuai aqidah Ahlul Sunnah Wal Jamaah mutlak harus dijaga dengan mempedomani Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat dan Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kitab-kitab Tauhid yang Muktabarah di Aceh. Data menunjukkan ada beberapa aliran sesat ditemukan di Kabupaten Aceh Utara seperti kelompok jamaah Qur'an Hadist, aliran Laduni dan aliran-aliran sesat lain yang berkembang.

4. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun kedepan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Kabupaten Aceh Utara mendistribusikan zakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang

menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan serta memberi bantuan berupa rumah layak huni kepada kaum dhuafa. Berikut Rekapitulasi Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Kabupaten Aceh Utara sebagaimana disajikan pada Tabel 2.120 sedangkan distribusi ZIS dapat dilihat pada Tabel 2.121.

Tabel 2.120
Rekapitulasi Penerimaan ZIS Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017 - 2021

Tahun	Penerimaan Zakat			
	Zakat Profesi	Zakat Mal	Infaq	Total
2017	Rp. 12.851.939.211	-	-	Rp. 12.851.939.211
2018	Rp. 13.938.517.485	Rp. 27.638.000	-	Rp. 13.966.155.485
2019	Rp. 15.040.978.476	Rp.112.952.000	Rp. 4.346.873.390	Rp. 19.500.803.866
2020	Rp.15.061.096.818	Rp.70.818.000	Rp. 5.961.544.237	Rp.21.093.459.055
2021	Rp.14.796.437.269	Rp.63.815.000	Rp. 4.173.405.085	Rp.19.033.657.354

Sumber : Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Tabel 2.121
Rekapitulasi Penyaluran ZIS Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017 - 2021

Aznaf	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Fakir	4.373.700.000	2.734.800.000	2.731.400.000	13.495.000.000	4.200.000.000
Miskin	4.509.800.000	1.220.000.000	1.523.200.000	12.687.700.000	8.795.000.000
Ibnu Sabil	40.000.000	-	170.000.000	95.000.000	150.000.000
Gharim	183.289.500	50.000.000	300.000.000	740.679.964	300.000.000
Muallaf	120.000.000	15.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000
Fisabilillah	1.300.000.000	193.200.000	695.000.000	1.340.000.000	396.140.000
Amil	1.471.865.500	421.300.000	600.000.000	2.837.337.996	1.385.614.000
Riqab	-	-	-	-	-

Sumber : Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Peningkatan potensi ZIS terus dilaksanakan dengan melakukan pembinaan kepada Lembaga Baitul Mal Gampong. Saat ini jumlah Baitul Mal Gampong yang telah dilantik/dikukuhkan sebanyak 100 lembaga.

2.1.3.9. Unsur Pemerintahan Umum

1. Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya

Semakin banyak angka golput dan kurangnya minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan baik nasional ataupun daerah, menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan akan berimbas pada kualitas demokrasi. Hal ini tidak sebanding dengan hasil pemilihan yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh elemen masyarakat melalui peraturan berikut kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi calon yang sudah terpilih. Sikap acuh terhadap pesta demokrasi ini, juga tak sebanding dengan harapan yang tinggi masyarakat terhadap kemajuan pembangunan dimasa mendatang.

Pemahaman politik masyarakat Kabupaten Aceh Utara menunjukkan tren yang positif terjadi peningkatan partisipasi politik dari Pemilu tahun 2014 di bawah 60 persen meningkat menjadi 76,74 persen di tahun 2019.

2. Potensi Konflik

Potensi konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKHANKAM) serta sosial budaya masih terjadi di tengah-tengah masyarakat baik konflik vertikal maupun horizontal. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama stakeholder terkait untuk mewujudkan stabilitas di Kabupaten Aceh Utara baik dari segi sosial, ekonomi maupun ketertiban masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan para pihak untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah dengansukses mengambil suatu langkah penting menyelesaikan konflik Aceh, denganditandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) damai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

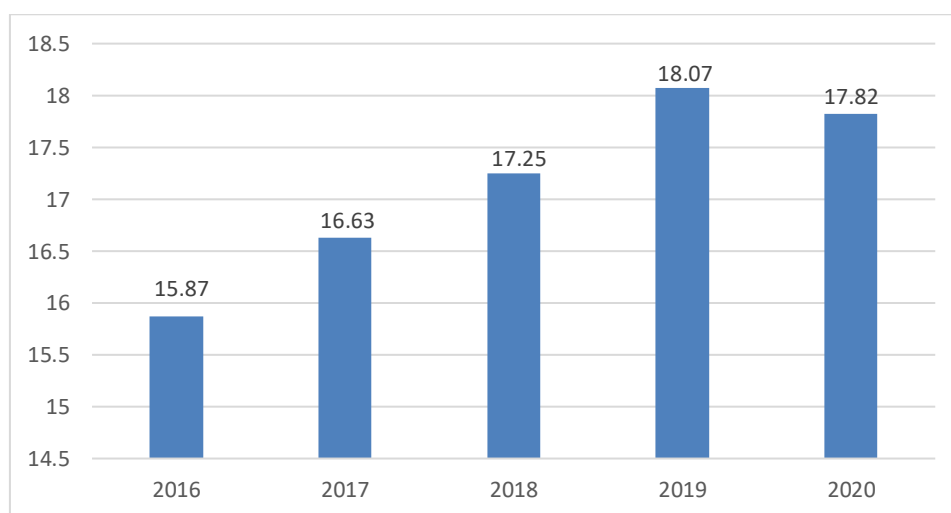
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang. Pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari oleh manusia tidak terlepas dari aktivitas konsumsi. Pengeluaran konsumsi dapat menjadi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi individu atau rumah tangga.



Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2021

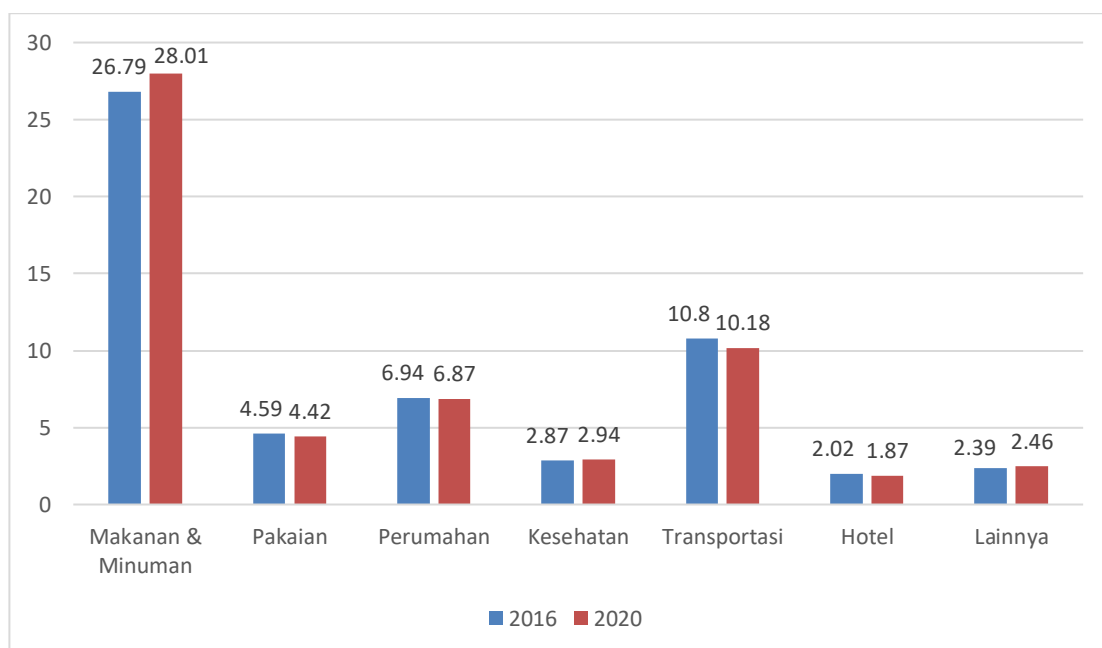
Gambar 2.20
Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB
(Juta Rupiah)

Nilai konsumsi rumah tangga perkapita maupun per-rumah tangga di Aceh Utara dalam kurun waktu 2016-2020 berfluktuasi, ini menunjukkan adanya peningkatan/penurunan rata-rata daya beli penduduk yang juga indikasi adanya peningkatan/penurunan rata-rata pendapatan. Selain pendapatan, peningkatan/penurunan nilai konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, diantaranya adalah tingkat inflasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Nilai konsumsi rumah tangga perkapita Aceh Utara meningkat sebesar 2,08 juta rupiah selama kurun waktu lima

tahun, dari 15,87 juta rupiah di tahun 2016 menjadi 17,95 juta rupiah pada tahun 2020.

2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan

Dari jumlah 56,75 persen konsumsi rumah tangga, sebesar 28,01 persen digunakan untuk pembelian kebutuhan makanan. Sedangkan untuk kesehatan dan pendidikan hanya sebesar 2,94 persen, angka ini memang sedikit lebih besar dari tahun 2016 yaitu 2,87 persen namun masih sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Utara belum banyak menggunakan konsumsi rumah tangganya untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia dan masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan makanan. Penurunan kontribusi yang cukup besar terlihat pada konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya, dari 10,80 persen pada tahun 2016 menjadi 10,18 persen pada tahun 2020. Ini menunjukkan dampak pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan sektor transportasi.



Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2021

Gambar 2.21
Distribusi Persentase Sub Komponen Konsumsi Rumah Tangga
ADHB, 2016 dan 2020

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

1. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas

Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun. Indeks aksesibilitas dan mobilitas dapat dilihat pada Tabel 2.122.

Tabel 2.122
Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas

No	Uraian	Besaran
1	Luas (Km ²)	3.296,86
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	608.106
3	Panjang Jalan (Km)	2.185,75
4	Indeks Aksesibilitas (Km/Km ²)	0,66
5	Indeks Mobilitas (Km/1.000 jiwa)	3,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021, diolah

2. Persentase Penduduk yang Menggunakan Air Bersih

Distribusi persentase rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2021 yaitu dengan perpipaan sebesar 14,33 persen, pompa sebesar 9,32 persen, air dalam kemasan sebesar 18,56 persen, sumur terlindung sebesar 50,52 persen, sumur tak terlindung sebesar 4,30 persen, mata air terlindung sebesar sebesar 18,56 persen dan lainnya sebesar 2,48 persen.

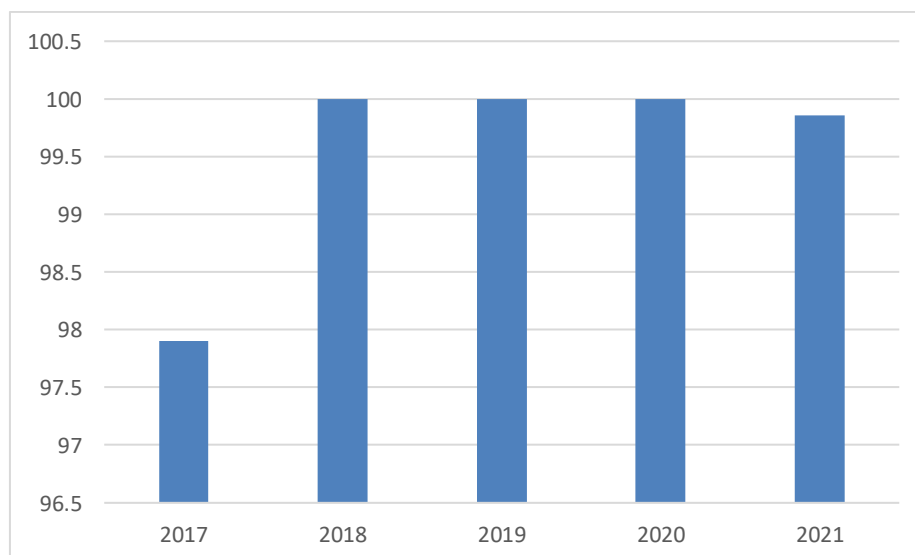
Tabel 2.123
 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang
 Digunakan untuk Minum, Tahun 2021

No	Sumber Air Minum	Persentase
1	Air Kemasan Bermerek/Air Isi Ulang	18,56
2	Leding	14,33
3	Sumur Bor/Pompa	9,32
4	Sumur terlindung	50,52
5	Sumur tak terlindung	4,30
6	Mata air terlindung/mata air tak terlindung	-
7	Air permukaan	0,48
8	Air hujan	-
9	Lainnya	2,48
Total		100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

3. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Aceh Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 jumlah persentase rumah tangga berlistrik di Aceh telah meningkat sebanyak 1,96 %.. Persentase jumlah rumah tanggaberlistrik di Aceh Utara dapat di lihat pada Gambar 2.22.



Gambar 2.22
 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
 di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

2.1.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, industrialisasi yang berkelanjutan, pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati. Sebagai agenda pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang telah diarusutamakan dalam RPJMD 2017-2022.

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2.124
Tanpa Kemiskinan

Program/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Realisasi Target Tahunan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.							
Program : 1. Upaya Kesehatan Masyarakat	%	90	92	94	90	92	94
Program : 2. Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariah	Muzakki	15000 Muzakki	15000 Muzakki	15000 Muzakki	11,302	12,331	14,831
Program : 3. Peningkatan Kesejahteraan Petani	%	0	30	40			
Program : 4. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	%	0	30	40			
Program : 5. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	US \$	500,000	600,000	700,000			
Program : 6. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Ton/Ha	5.367	5.406	5.489			
Program : 7. Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	ton	3,382	3,421	3,440	3,380	3,400	3,420
Program : 8. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	%	25	30	40			
Program : 9. Peningkatan peran serta kepemudaan	peserta	-	-	54			
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.							
Program : 1. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	%	25	30	35			

INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.							
Program : 1. Program Keluarga Harapan (PKH)	%						
Program : 2. Bantuan Sosial, Rastra dan BPNT	%						
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.							
Program : 1. Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Primer Puskesmas dan jaringannya	%	-	-	80	-	-	80
Program : 2. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	%	100	100	100	100	100	100
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.							
Program : 1. Peningkatan Imunisasi dan Pencegahan Penyakit	%	75	80	82	-	-	82
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.							
Program : 1. Keluarga Berencana	%	69.97	71.22	72.47			
Program : 2. Kesehatan Reproduksi Remaja	%	5.56	5.56	5.56	-	-	-
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.							
Program : 1. Pengembangan Lingkungan Sehat	%	70	75	80	100	100	100
PROGRAM : 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	%	100	100	100	99.5	98.8	97.56
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.							
Program : 1. Pengembangan Lingkungan Sehat	%	70	75	80	100	100	100
Program : 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	%	100	100	100			
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.							
Program : 1. Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariat Islam	Muzakki	15000 Muzakki	15000 Muzakki	15000 Muzakki			

INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	85.00	93.17	95.00			
Program : 1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	%	77.50	82.50	88.50			
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	%	70.00	75.00	82.00			
Program : 1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	%	77.50	82.50	88.50			
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.							
Program : 1. Penataan Administrasi Kependudukan	%	100	100	100			
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.							
Program : 1. Pelaksanaan Program Listrik Gratis							
Program : 2. Pelaksanaan Listrik Pedesaan (Lisdes)							
INDIKATOR SDGs* 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. * 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.							
Program : 1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	%		85.00	100.00			
Program : 2. PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	%						
Program : 3. FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA	%						
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.							
Program : 1. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	%						
INDIKATOR 1.5.1.(e) Indeks Risiko Bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.							
Program : 1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	%		85.00	100.00			
INDIKATOR 1.5.2 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global 1.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.							
Program : 1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%	-	-	100.00			
Program : 2. Peningkatan Kegiagaan dan Pencegahan Bahaya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
INDIKATOR: 1.5.3* Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah							
Program : 1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	%		85.00	100.00			

Tabel 2.125
Tanpa Kelaparan

Program/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Realisasi Target Tahunan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2						
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. 2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.							
Program : 1. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	ton	320,095	325,000	336,099			
INDIKATOR SDG : 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita. 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta 2.1.2* Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) pada anak balita, berdasarkan tipe. 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil 2.2.2.(b) Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif							
Program : 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Gizi	5/1000 KH	4/1000 KH	4/1000 KH	3/1000 KH			
INDIKATOR SDG: 2.2.2 (c) . (i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) ; (ii) Tingkat konsumsi ikan per kapita							
Program : 1. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	ton	320,095	325,000	336,099	378.580	475.080	485.180
Program : 2. Pengembangan Budidaya Perikanan							
Program : 3. Pengembangan Perikanan Tangkap							
INDIKATOR SDG: 2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.							
Program : 1. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	ton	442,862	444,726	446,379	372,917	389,075	393,477
INDIKATOR SDG: 2.5.2* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.							
Program : 1. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	ton	442,862	444,726	446,379	372,917	389,075	393,477
Program : 1. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	ekor	110,052	112,075	114,126	108,500	110,075	112,000

Tabel 2.126
Kehidupan Sehat Dan Sejahtera

Program/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Realisasi Target Tahunan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 3.1.2(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup 3.2.2(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 3.2.2(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi							
Program : 1. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	%	86.86	89.57	92.28			
	100.000 KH	110	100	95			
	1.000 KH	1	1	1			
Program : 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	%	87	88	89	100	100	100
INDIKATOR SDGs: 3.3.1(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa 3.3.2(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang 3.3.3(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria 3.3.4(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) 3.3.5(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta 3.3.5(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I)							
Program : 1.1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	%	100	100	100	100	100	100
INDIKATOR SDGs: 3.4.1(a) Persentase merokok pada penduduk umur <18 tahun 3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi 3.4.1 (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur >15 tahun							
Program : 1. Upaya Kesehatan Masyarakat	%	90	92	94	90	92	94
INDIKATOR SDGs: 3.5.1 (a) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis 3.5.1 (b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi. 3.5.1 (c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan 3.5.1. (d) Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibentuk							
Program : 1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	100	100	100		100	100
Program : 2. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	%	2	2	2			
Program : 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	%	25	30	35			
INDIKATOR SDGs: 3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas (indikator global yang akan dikembangkan)							
Program : 1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	100	100	100			
Program : 2. Upaya Kesehatan Masyarakat	%	90	92	94			

INDIKATOR SDGs: 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern; 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin; 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern; 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR); 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).							
Program : 1. Keluarga Berencana	%	69.97	71.22	72.47			
Program : 2. Kesehatan Reproduksi Remaja	%	5.56	5.56	5.56	-	-	-
INDIKATOR SDGs: 3.b.1 (a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas							
Program : 1.1. Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	%	20	30	40	20	30	40

Tabel 2.127
Pendidikan Berkualitas

Program/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Realisasi Target Tahunan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR SDGs: 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika							
Program : 1. Pendidikan Non Formal	%	100	100	100			
INDIKATOR SDGs: 4.1.1(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 4.1.1(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 4.1.1(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B							
Program : 1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	%	80.00	81.00	84.00			
INDIKATOR SDGs: 4.1.1(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat 4.1.1(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat 4.1.1(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur >15 tahun 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat							
Program : 1. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir		80.58	80.58	82.50			
INDIKATOR SDGs: 4.1.1(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur >15 tahun 4.2.2(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
Program : 1. Manajemen Pelayanan Pendidikan	%		55	100			
INDIKATOR SDGs: 4.6.1(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur >15 tahun 4.6.1(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun							
Program : 1. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan							

INDIKATOR SDGs: 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)							
Program : 1. Pengembangan Lingkungan Sehat	Persen	70	75	80	100	100	100
INDIKATOR SDGs: 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik							
Program : 1. Perencanaan dan Pengawasan/ Monitoring dan Evaluasi	%	100	100	100			

Tabel 2.128
Kesetaraan Gender

Program/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Realisasi Target Tahunan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.							
Program : 1. Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	%	78	85	87			
INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir 5.2.1(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir							
Program : : 1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	100	100	100			
INDIKATOR SDGs: 5.2.2(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif							
Program : : 1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	100	100	100			
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah							
Program : 1. Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	%		22	25			

Tabel 2.129
Air Bersih Dan Sanitasi Layak

Program/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Realisasi Target Tahunan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR : 6.1.1.(a). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.							
PROGRAM :1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	%	62.7	64.7	66.7	63.17	66.23	68.54
INDIKATOR : 6.1.1.(c). Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.							
Program : 1. Pengembangan Lingkungan Sehat	Persen	35.5	45	60	100	100	100
INDIKATOR : 6.2.1.(a). Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.							
Program : 1. Pengembangan Lingkungan Sehat	Persen	35.5	45	60	100	100	100
INDIKATOR : 6.2.1.(b). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.							
PROGRAM :1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	%						
INDIKATOR : 6.2.1.(c). Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).							
Program : 1. Pengembangan Lingkungan Sehat	Persen	35.5	45	60	100	100	100
INDIKATOR : 6.2.1.(d). Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).							
Program : 1. Pengembangan Lingkungan Sehat	Persen	35.5	45	60	100	100	100
INDIKATOR : 6.3.2.(b). Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.							
Program : 1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100			
INDIKATOR : 6.4.1.(b). Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.							
Program : 1. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Ton/Ha	5.28	5.35	5.4	5.31	5.49	5.34
INDIKATOR : 6.5.1.(a). Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).							
Program : 1. Pengendalian Banjir	%	3	3	3			
INDIKATOR : 6.5.1.(c). Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.							
Program : 1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	%	39,10	44,30	48,50			

Program : 2. Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya	%	2	2	2			
Program : 3. Pengendalian Banjir	%	3	3	3			
Program : 4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	100%	100%	100%			
INDIKATOR : 6.5.1.(e). Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.							
Program : 1. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya alam dan Lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100
INDIKATOR : 6.5.1.(i). Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.							
Program : 1. Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya	%	2	2	2			

Tabel 2.130
Energi Bersih Dan Terjangkau

Program/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Realisasi Target Tahunan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR SDGs: 7.1.1. Rasio Elektrifikasi							
Program : 1. Pasang Baru / Perubahan Daya	%	97.19	99.19	99.87			
INDIKATOR SDGs: 7.1.1. (a) Konsumsi Listrik per Kapita							
Program : 1. Peningkatan Penjualan dan Penyambungan Pelanggan	kWh/Plg	1,643.0	1,692.3	1,776.9			

Tabel 2.131
Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi

Program/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Realisasi Target Tahunan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR SDGs: 8.1.1. Laju pertumbuhan PDB per kapita.							
	Persen	4.5	4.6	4.7	5.14	3.54	0.97
INDIKATOR SDGs: 8.1.1.(a). PDB per kapita							
	Juta rupiah	28.19	27.29	26.49	31.95	30.68	33.12
INDIKATOR SDGs: 8.3.1 (C): Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.							

Program : 1. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	%	52.76	55.05	57.34	53.81	56.79	55.61
INDIKATOR SDGs: 8.5.1. Upah rata-rata per jam pekerja							
Program : 1. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	%	100	100	100			
INDIKATOR SDGs: 8.5.2. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.							
Program : 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja							
INDIKATOR SDGs: 8.6.1 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)							
Program : 1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja							
INDIKATOR SDGs: 8.9.1 (a). Jumlah wisatawan mancanegara.							
Program : 1. pengembangan pemasaran pariwisata	%	30	45	50			
Program : 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata	objek wisata	30	45	50			
Program : 3. Pengembangan Kemitraan Pariwisata	%	30	45	50			
INDIKATOR SDGs: 8.9.1 (b). Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.							
Program : 1. pengembangan pemasaran pariwisata	%	30	45	50			
Program : 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata	objek wisata	30	45	50			
INDIKATOR SDGs: 8.9.1 (c). Jumlah devisa sektor pariwisata.							
Program : 1. Pengembangan pemasaran pariwisata	%	30	45	50			
Program : 2. Pengembangan Kemitraan Pariwisata	%	30	45	50			
Program : 3. Pengembangan Destinasi Pariwisata	objek wisata	30	45	50			

Tabel 2.132
Industri, Inovasi Dan Infrastruktur

Program/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Realisasi Target Tahunan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR SDGs: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional							
Program : 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan	%	52.30%	57.80%	62.60%			
Program : 2. Pembangunan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	%	52.30%	57.80%	62.60%			
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(a) Jumlah bandara							
Program : 1. Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara	%	100	0	0	100	0	0
INDIKATOR SDGs: 9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	%	0.0042	0.0042	0.0042			
Program : 1. Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	%	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.133
Berkurangnya Kesenjangan

Program/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Realisasi Target Tahunan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur							
Program : 1. Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariat Islam	Muzakki	15000 Muzakki	15000 Muzakki	15000 Muzakki			
Program : 2. Program Pengembangan Perumahan	%	85.46	85.47	85.48			
Program : 3. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	%	25	30	40			
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal							
Program : 1. Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	%	5	5	5			

INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal							
Program : 1. Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	%	5	5	5			
Program : 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	%						
INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil							
Program : 1. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	Persen	30%	40%	50%			
Program : 2. Pendidikan Politik Masyarakat	%	100	100	100			
INDIKATOR 10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.							
Program : 1. Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	%	78	85	87			

Tabel 2.134
Kota Dan Permukiman Yang Berkelanjutan

Program/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Realisasi Target Tahunan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR: 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap human yang layak dan terjangkau.							
Program : 1. Program Pengembangan Perumahan	%	85.46	85.47	85.48	85.46%	85.48%	85.50%
Program : 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	%						
INDIKATOR: 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.							
Program : 1. Peningkatan Pelayanan Angkutan	%	100	100	100	100	100	100
INDIKATOR : 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang							
Program : 1. Kedaruratan, Logistik dan Peralatan Kebencanaan	Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit
Program : 2. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	%	85%	85%	100%	85%	85%	100%

Program : 3. Pencegahahn Dini dan Penganggulangan Korban Bencana Alam	90%	90%	80%	90%	90%	90%	80%
INDIKATOR : 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk							
Program : 1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	%	65	70	75	65	70	75
INDIKATOR : 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana							
Program : 1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%	87	87	87	87	87	87
INDIKATOR : 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani							
Program : 1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan	%	19.24	19.24	19.24	17,09	17,09	17,09
INDIKATOR : 11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.							
Program : 1. Pengelolaan dan Penataan Taman Kawasan Perkotaan	%	100	100	100			
Program : 2. Pengelolaan ruang terbuka hijau	%	100	100	100			
INDIKATOR: 11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.							
Program : 1. Pengelolaan dan Penataan Taman Kawasan Perkotaan	%	100	100	100			
Program : 2. Pengelolaan ruang terbuka hijau	%	100	100	100			
INDIKATOR : 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah							
Program : 1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	%	85%	85%	100%			

Tabel 2.135
Konsumsi Dan Produksi Yang Berkelanjutan

Program/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Realisasi Target Tahunan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR: 12.7.1.(a). Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.							
Program : 1. Perbaikan lingkungan perumahan dan pemukiman	%	100	100	100	100		100
INDIKATOR: 12.8.1.(a). Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregist							
Program : 1. Perbaikan lingkungan perumahan dan pemukiman	%	100	100	100			
Program : 2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		55	60	65			

Tabel 2.136
Penanganan Perubahan Iklim

Program/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Realisasi Target Tahunan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR: 13.1.1* Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah							
Program : 1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	%	65	70	75	0	0	0

Tabel 2.137
Ekosistem Kelautan

Program/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Realisasi Target Tahunan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR : 14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan							
Program : 1. Revitalisasi Penyuluh Perikanan	%	-	-	42			
Program : 2. Pengembangan Budidaya Perikanan	Ton	11.067 Ton	11.389 Ton	11.712 Ton	11.067 Ton	11.389 Ton	11.712 Ton
Program : 3. Pengembangan Perikanan Tangkap	Ton	17.078 Ton	17.280 Ton	17.483 Ton	17.078 Ton	17.280 Ton	17.483 Ton
INDIKATOR : 14.4.1* Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman							
Program : 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	%	5	5	5	5	5	5
Program : 2. Pengembangan Perikanan Tangkap	Ton	17.078 Ton	17.280 Ton	17.483 Ton	17.078 Ton	17.280 Ton	14.300 Ton
INDIKATOR : 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan							
Program : 1. Pelestarian Sumberdaya Perikanan	%	8	16	24			
Program : 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	%	5	5	5			

INDIKATOR : 14.6.1.(a) Jumlah kepatuhan pelaku usaha							
Program : 1. Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan		-	44,02 kg perkapita / thn	45,85 kg perkapita / thn	-	44,02 kg perkapita / thn	45,85 kg perkapita / thn
INDIKATOR : 14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil							
Program : 1. Peningkatan Kelembagaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	%	5	5	5	5	5	5
Program : 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	%	5	5	5	5	5	5
Program : 3. Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan		-	44,02 kg perkapita / thn	45,85 kg perkapita / thn	-	44,02 kg perkapita / thn	45,85 kg perkapita / thn
INDIKATOR : 14.b.1.(a) Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan							
Program : 1. Peningkatan Kelembagaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	%	s	5	5	5	5	5
Program : 2. Pengembangan Perikanan Tangkap	Ton	17.078 Ton	17.280 Ton	17.483 Ton	17.078 Ton	17.280 Ton	14.300 Ton
Program : 3. Revitalisasi Penyuluh Perikanan	%	-	-	-			
Program : 4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	%	5	5	5	5	5	5
INDIKATOR : 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi							
Program : 1. Peningkatan Kelembagaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	%	5	5	5	5	5	5
Program : 2. Pengembangan Perikanan Tangkap	Ton	17.078 Ton	17.280 Ton	17.483 Ton	17.078 Ton	17.280 Ton	14.300 Ton

Tabel 2.138
Ekosistem Daratan

Program/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Realisasi Target Tahunan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR : 15.7.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi							
Program : 1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		55	60	65	65	70	70
INDIKATOR : 15.c.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi							
Program : 1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		55	60	65	65	70	70

Tabel 2.139
Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh

Program/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Realisasi Target Tahunan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR SDGs: 16.1.3. (a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.							
Program : : 1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	100	100	100			
INDIKATOR SDGs: 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.							
Program : : 1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	100	100	100			
INDIKATOR SDGs: 16.3.1. (a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.							
Program : : 1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	100	100	100			
INDIKATOR SDGs: 16.5.1. (a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).							
Program: 1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	%	80	85	100	50	99,90	67

INDIKATOR SDGs: 16.6.1. (b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)							
Program: 1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	%	80	85	88	50	99,90	67
INDIKATOR SDGs: 16.6.2. Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik							
Program : 1. Penguatan Tata Laksana	%			100			
Program : 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	%	100	100	100			
INDIKATOR SDGs: 16.6.2. (a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).							
Program: 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100			
Program: 2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	%	100	100	100			
INDIKATOR SDGs: 16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik							
Program : 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	%		10	10			
Program : 2. Pendidikan Politik Dalam Negeri	Persen		67%	67%			
INDIKATOR SDGs: 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.							
Program : 1. Penataan Administrasi Kependudukan	%	91	91	92			
INDIKATOR SDGs: 16.9.1. (a) Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. 16.9.1. (b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.							
Program : 1. Penataan Administrasi Kependudukan	%	91	91	92			
INDIKATOR SDGs: 16.10.2. (c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.							
Program: 1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	%	100	100	100			
INDIKATOR SDGs: 16.a.1* Tersedianya lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.							
Program : 1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	100			

2.1.6. Capaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, meliputi : SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara telah menerapkan keenam SPM tersebut, Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

1. SPM Pendidikan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Aceh Utara memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- 1) Pendidikan Dasar;
- 2) Pendidikan Kesetaraan; dan
- 3) Pendidikan Anak Usia Dini.

B. Target dan Pencapaian SPM

Pelayanan umum yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2020 di bidang pendidikan ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan. Indikator kinerja pelayanan pendidikan dapat dilihat dari partisipasi sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkat kelulusan, maka Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk capaian SPM Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.140
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Aceh Utara

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Capaian
			%	%
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100	-
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	-
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	-

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara Tahun 2021

Pencapaian SPM di Bidang Pendidikan pada Tahun 2019 tidak dimunculkan sebagai pembandingan capaian SPM Tahun 2020, karena indikator SPM mengalami perubahan yakni Tahun 2019 terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang dijabarkan dalam 27 Indikator SPM, sedangkan untuk Tahun 2020 SPM yang diampu oleh Kabupaten adalah 3 (tiga) pelayanan dasar dengan 3 indikator capaian SPM. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2. SPM Kesehatan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan Nomor 4 Tahun 2019, dimana dalam Pasal 2 Ayat (3) Jenis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 12 (dua belas) jenis pelayanan, yakni:

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;

- 4) Pelayanan Kesehatan Balita;
- 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
- 7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
- 10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
- 11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
- 12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

B. Target dan Pencapaian SPM

Tabel 2.141
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Aceh Utara

NO	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target (%)		Capaian (%)			
			Tahun	Target	Tahun 2019		Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Ibu Hamil (Bumil) mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	2020	100%	11.845	81,5	12.073	84,4
					14.641		14.301	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin (bulin) mendapat layanan persalinan sesuai standard	2020	100%	11.945	85	12.204	89,3
					14.641		13.656	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan bayi baru lahir mendapat layanan Kesehatan sesuai standar	2020	100%	12.072	91	11.304	86,9
					13.178		13.005	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan anak usia 0-59 bulan mendapat layanan Kesehatan sesuai standar	2020	100%	42.650	79,6	42.629	82,1
					53.563		51.909	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan anak usia Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	2020	100%	11.454	87,5	9.702	88,39
					14.079		10.976	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Cakupan penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	2020	100%	172.106	45,4	218.412	56,8
					378.954		384.305	
7	Pelayanan	Cakupan penduduk	2020	100%	57.075	45	42.302	34,19

NO	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target (%)		Capaian (%)			
			Tahun	Target	Tahun 2019		Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kesehatan Pada Usia Lanjut	usia 60 tahun keatas mendapatakan skrining Kesehatan sesuai standar			124.581		123.697	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	2020	100%	19.960	19,8	19.102	18,7
					100.389		102.026	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	2020	100%	4.630	15,8	8.804	29,6
					29.227		29.704	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	2020	100%	1.266	97,3	1.067	81
					1.301		1.317	
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Cakupan Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	2020	100%	3.040	31,1	1.479	14,73
					9.783		10.036	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan orang berisiko terinfeksi mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	2020	100%	8.320	56,8	7.053	40,18
					14.641		17.550	

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

Pencapaian SPM bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Cakupan pelayanan ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal di tahun 2020 belum mencapai 100 % di karena banyak kunjungan pertama ibu hamil tidak di dapat pada trimester pertama dan tidak semua K1 (kunjungan ibu hamil pertama pada trimester pertama) di dapat pada awal tahun sehingga kunjungan ke empat (K4) di dapat pada awal tahun berikutnya.
- 2) Pada pelayanan Kesehatan balita juga tidak mencapai 100 % disebabkan belum semua anak dilakukan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Interfensi Dini Tumbuh Kembang) karena tidak semua anak di bawa ke posyandu dan Puskesmas.

- 3) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif di tahun 2020 kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan adalah banyak para lansia tidak berani datang ke posyandu di karena takut terpapar virus COVID-19, sehingga petugas harus melakukan *home visit* ke rumah lansia.
- 4) Kendala dan permasalahan yang di hadapi dalam Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV adalah :
 - Pelaksanaan posyandu yang belum terintegrasi dengan program HIV-AIDS sehingga penjangkaran dan screening HIV-AIDS menurun dan tidak tercapai target.
 - Selama Pandemi Covid-19 kegiatan posyandu kunjungannya menjadi berkurang disebabkan rasa ketakutan masyarakat sehingga kunjungan bumil ke Puskesmas dan Posyandu ikut menurun (takut dikatakan terinfeksi penyakit COVID-19)
 - Terjadinya mutasi/pengantian petugas HIV-AIDS di beberapa Puskesmas yang menyebabkan penurunan kinerja petugas di beberapa Puskesmas dalam hal pelaksanaan *screening* dan pelaporan sehingga capaian menurun (pelaporan online/SIHA)
 - Kekosongan Rapid 3 bulan disebabkan buffet stok telah dipakai di awal tahun dan stok dari Dinas Kesehatan Provinsi juga tidak ada (kosong) sehingga skrining tidak dapat dilaksanakan.
- 5) Cakupan Orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB di tahun 2020 adalah 14,73% kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di tahun adalah :
 - Masih kurangnya integrasi program dalam pelaksanaan penjangkaran sputum bagi terduga (*suspect*) TBC di Masyarakat.
 - Pemahaman yang masih kurang dalam hal pentingnya pemeriksaan dahak pada masyarakat sehingga petugas kesulitan dalam pengambilan sputum untuk penegakan diagnose TBC, Pot diberikan tetapi dahak tidak di tampung oleh masyarakat sehingga pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan.
- 6) *Screening* tidak mencapai 100 % karena tahun 2020 adanya pandemi COVID-19 anak sekolah tidak secara tatap muka

sehingga petugas puskesmas tidak bisa melakukan skrining ke sekolah.

- 7) Dana APBK yang perolehan dari dana pajak rokok telah di formulakan untuk mengatasi kesenjangan pencapaian SPM kesehatan namun jumlahnya belum memadai. Sebagian besar dana pemenuhan indikator SPM seperti pada cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pada DAK Nonfisik (BOK) dan tidak semua pemegang program di Puskesmas mengajukan kegiatan penjangkaran kesehatan di sekolah dan bila ada dilakukan, tidak semua sekolah dilakukan penjangkaran kesehatan.
- 8) Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di tahun 2020 banyak terkendala karena Pandemi COVID-19, banyak kegiatan dan dana di *refocusing*, dan dialihkan pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular COVID-19.

3. SPM Pekerjaan Umum

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 adalah menyediakan infrastruktur untuk melayani kebutuhan masyarakat dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sasaran:

- 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

B. Target dan Pencapaian SPM

Tabel 2.142
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Aceh Utara

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2020	72,52	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan Pengolahan air limbah domestik	100	2020	67,06	

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

4. SPM Perumahan Rakyat

A. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam peraturan terbaru yakni Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten;
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

B. Target dan Pencapaian SPM

Tabel 2.143
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Utara

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten;	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	86,09	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	67,18	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) butir “t” Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan yang diamanatkan untuk daerah Kabupaten Aceh Utara, dalam Bidang Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

- 1) Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- 3) Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- 4) Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- 5) Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

B. Target dan Pencapaian SPM

Tabel 2.144
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Cakupan Pelayanan	Jumlah warga negara yang	100	100	0,35	0,48

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
	Ketentraman dan Ketertiban Umum;	memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada				
2	Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100
3	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana	100	100	100	100
4	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100
5	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	76.6	76.6

Sumber : Satpol PP dan WH dan BPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

6. SPM Sosial

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti;
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti;
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti;
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khusus Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti;
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paksa Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten.

B. Target dan Pencapaian SPM

Tabel 2.145
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Sosial
Kabupaten Aceh Utara

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Target (%)		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti		40	14.56	60
		Persentasi (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti		50	22.18	0
		Persentasi (%) Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia terlantar diluar panti		50	20.44	36
		Persentasi (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis diluar panti		45	16.18	96
		Persentasi (%) Gelandangan dan Pengemis yang				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Target (%)		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan social daerah kab/ kota		100	100	100
		Persentasi (%) bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kab/kota				

Sumber : Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran, terdapat beberapa kendala sehingga capaian sasaran tidak dapat diraih secara optimal. Adapun kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

- 1) Seringnya terjadinya pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan, sehingga alokasi waktu pelaksanaan kegiatan tidak optimal.
- 2) Kurang pegawai/personil dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Kurangnya dukungan dari masyarakat yang menerima manfaat/bantuan dalam hal penyampaian atau pengiriman kembali proposal.
- 4) Kurangnya alat transportasi/kendaraan dalam melaksanakan suatu kegiatan.
- 5) *Refocusing* Anggaran untuk mengatasi terjadinya Pandemi Covid-19.

2.2. Capaian Kinerja RPJMK Tahun 2017-2022

Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan untuk mengetahui pencapaian target indikator kinerja kegiatan (*output*), program (*outcome*), dan sasaran (*impact*). Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program pembangunan daerah

dalam RPJMK 2017-2022 dapat dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah dicantumkan dalam RPJM Kabupaten Aceh Utara. Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2020 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja sasaran Kabupaten Aceh Utara yang terbagi atas misi dan tujuan.

2.2.1. Evaluasi Kinerja Sasaran RPJMK 2017-2022 Sampai Dengan Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja sasaran mencerminkan capaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Visi Kabupaten Aceh Utara 2017-2022 yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara 2017-2022 adalah “Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)”. Terdapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja sasaran, yang mencerminkan komitmen untuk mencapai 5 (lima) misi pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja sasaran mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.146
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran RPJM
Kabupaten Aceh Utara 2017-2022 Tahun I, II dan Tahun III (2018, 2019 dan 2020)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Evaluasi Capaian
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Misi I : Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam berpedoman pada MoU Helsinki dan UUPA											
1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Indeks	B	B	B	CC	CC	CC	Tidak Tercapai
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP		2	3	3	3	3	3	Tercapai
		Maturitas SPIP	Level maturitas SPIP		3	3	3	3	3	3	Tercapai
		Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
		Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	%	100	100	100	100	86.63	98.95	Tidak Tercapai
2	Meningkatkan pelayanan publik	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Indeks	75.9	76	76.95	81.41	86.80	70.07	Tidak Tercapai
		Meningkatnya kapasitas aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	60	62	64	66.67	65.83	66.69	Tercapai
3	Meningkatkan kapasitas kelembagaan mukim dan pemerintah gampong	Meningkatnya kapasitas aparatur gampong	Persentase aparatur gampong yang mengikuti diklat	%	50	55	60	-	4.69	n/a	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Evaluasi Capaian
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	
4	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menegakkan syariat Islam	Meningkatnya pengamalan syariat Islam	Persentase Majelis Taklim aktif	%	100	100	100	n/a	n/a	n/a	
		Meningkatnya Penegakan Syariat Islam	Angka pelanggaran terhadap syariat Islam	Per 1000 penduduk	0.138	0.129	0.121	0.045	0.053	0.047	Tercapai
II	Misi II : Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam										
1	Meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing	Meningkatnya partisipasi sekolah	APM	%	77.50%	82.50 %	88.50 %	80.70	84.04	92.20	Tercapai
		Meningkatnya kualitas SDM	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9	9.5	10	8.11	8.46	8.63	Tidak Tercapai
		Terlaksananya pendidikan yang berbasis islami dan kearifan lokal	Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi pendidikan	%	-	10	20	-	-	-	Tidak Tercapai
		Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	23	30	40	39	38.37	n/a	
2	Meningkatkan Peran Perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan	%	20	22	15	n/a	n/a	2.33	Tidak Tercapai
3	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	kasus	80	60	55	103	118	30	Tercapai
III	Misi III : Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu										
1	Meningkatkan Layanan Kesehatan yang Bermutu	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	71	71.5	71.6	68.61	68,79	68.80	Tidak Tercapai
		Meningkatnya mutu layanan kesehatan ibu	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	123	105	93	111	207	132	Tidak Tercapai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Evaluasi Capaian
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	
		Meningkatnya mutu layanan kesehatan Bayi	Angka Kematian Bayi	Per 1000 kelahiran hidup	4	4	4	3	3	5	Tidak Tercapai
IV	Misi IV : Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan										
1	Meningkatkan Infrastruktur dasar publik dan pengembangan wilayah	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	52.3	57.8	62.6	75.93	77.73	66.49	Tercapai
		Meningkatnya infrastruktur pendukung pertanian	Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI) baik yang teraliri air irigasi	%	39.1	44.3	48.5	35.59	38.59	32	Tidak Tercapai
		Meningkatnya ketersediaan dan akses air bersih	Persentase akses air bersih	%	65.56	67.61	69.78	53.42	75.57	86.25	Tercapai
		Meningkatnya prasarana lingkungan pemukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses sanitasi	%	60.67	63.82	67.09	61.83	63.66	75.83	Tercapai
		Meningkatnya infrastruktur perumahan	Persentase rumah layak huni	%	86.24	87.81	89.43	85.46	85.47	87.17	Tidak Tercapai
		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara	%	40.62	46.87	53.12	34.37	34.37	45.45	Tidak Tercapai
2	Meningkatkan kesiagaan dan Kewaspadaan dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam	Tingkat Resiko Bencana	rendah/ sedang/ tinggi	tinggi	sedang	sedang	n/a	n/a	n/a	
3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas Lingkungan Hidup (air, udara dan tutupan lahan)	Indeks	55	60	65	n/a	n/a	n/a	
V	Misi V : Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan										

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Evaluasi Capaian
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.5	4.6	4.7	4.77	3.48	0.97	Tidak Tercapai
		Menurunnya ketimpangan pendapatan	Gini Rasio	indeks	0.265	0.262	0.259	0.292	0.301	0.261	Tercapai
2	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase tingkat kemiskinan	%	17.25	18.27	15.55	17.25	17.39	17.02	Tidak Tercapai
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	%	10	8.5	8	10.14	8.65	8.56	Tidak Tercapai
3	Mengendalikan Inflasi Daerah	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	%	4	3.5	3	2.05	1.22	2.87	Tercapai
4	Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	5	5.25	5.4	33.92	34.11	36.38	Tercapai
5	Menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis Agroindustri	Meningkatnya pembangunan berbasis industri, koperasi dan UMKM	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3.25	4	5.2	9.69	8.71	8.45	Tercapai
6	Meningkatkan Kapasitas Fiskal	Meningkatnya kontribusi PAD ke dalam APBD	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	15-20	15-20	15-20	10.62	9.39	10.63	Tidak Tercapai

Tabel 2.147
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2018 s/d 2020

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)		Target RPJMD Kab/Kota pada RKPd Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian Target RPJMD Kab/Kota pada RKPd Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	2018		2019		2020		2018		2019		2020		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6		7		8		8		12		13		13		22		23		
1.		Pendidikan			115,321,761		18,152,800		23,146,830		24,159,623		73,206,393		150,715,491		116,759,603		340,681,487	100.12	208.68		
1	Meningkatnya partisipasi sekolah	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	48%	100 %	8,933,564	50.00	1,750,000	60	1,724,600	75	1,772,046	45	4,724,250	47	7,480,216	72.93	7,810,635	54.90	20,015,101	54.90	224.04	Dinas PK
2	Meningkatnya partisipasi sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rata-rata APM SD dan SMP		95 %	80,762,017	77.50	13,998,800	82.5	16,336,800	88.5	16,500,168	72	66,918,475	74	135,400,578	41.03	103,971,437	62.31	306,290,490	65.59	379.25	Dinas PK
3	Meningkatnya kualitas SDM	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Meleak Huruf	95.39%	100 %	1,996,189	96.00	455,000	97	125,500	98	459,550	95	27,000	96	367,299	85.75	500,000	92.25	894,299	92.71	44.80	Dinas PK
4	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang lulus UKG	19%	60 %	2,694,518	23.00	933,000	30	115,000	40	534,480	39	7,144	38	6,140,210	40.00	4,085,857	39.12	10,233,211	65.21	379.78	Dinas PK
5	Terlaksananya pendidikan yang berbasis islami dan kearifan lokal	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi pendidikan	100%	40 %	20,935,472	100	1,016,000	100	4,844,930	100	4,893,379	100	1,529,524	67	1,327,189	99.60	391,674	88.87	3,248,387	222.17	15.52	Dinas PK
2.		Kesehatan			958,823,150		181,350,268		186,117,593		189,756,637		219,534,517		214,114,691		216,726,655		332,624,713	62.34	596.50		
1	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	87%	98 %	355,565,232	90	85,621,200	92	63,668,200	94	64,578,246	98	68,839,862	98	74,178,912	71.33	57,114,885	89.11	200,133,659	90.93	56.29	Dinkes
2	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas yang direhabilitasi	38%	100 %	4,900,000	56	2,900,000	69	500,000	84	500,000	56	38,616,047	59	14,427,810	57.38	31,333,151	57.67	84,377,008	57.67	1721.98	Dinkes
3	Meningkatnya mutu layanan kesehatan ibu	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84.16%	95 %	2,971,856	86.87	155,000	89.57	692,000	92	698,920	84	235,164	85	558,925	46.00	167,354	71.67	961,443	75.44	32.35	Dinkes
4	Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita dan gizi	Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita dan Gizi	Angka Kematian Bayi	5/1000 KH	5 KH	530,018	4	96,500	4	106,500	4	107,565	3	73,561	3	85,305	5.00	260,656	3.67	419,522	100	79.15	Dinkes
5	Meningkatnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase promosi/penyuluhan kesehatan yang dilakukan	84.24	100 %	1,747,761	86.21	275,000	90	360,000	90.43	363,600	87	1,510,200	89	276,025	22.58	79,819	66.19	1,866,044	66.19	106.77	Dinkes
6	Meningkatnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah sehat	65%	87 %	2,308,687	70	120,000	75	535,000	80	540,350	35	187,330	37	277,504	28.33	72,454	33.63	537,288	38.65	23.27	Dinkes
7		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Jiwa	Persentase KLB yang tertangani	100%	100 %	10,873,979	100	297,500	100	2,598,260	100	2,624,242	100		100	-	10.62	1,101,600	70.21	1,101,600	70.21	10.13	Dinkes
8	Meningkatnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Kasus PIM yang tertangani	100%	100 %	2,658,103	100	-	100	653,000	100	659,530	100	528,344	100	626,916	52.94	55,179	84.31	1,210,439	84.31	45.54	Dinkes
9	Meningkatnya mutu layanan kesehatan Bayi	Program Peningkatan Imunisasi dan pencegahan penyakit	Persentase kegiatan Imunisasi	70%	90 %	1,998,047	75	-	80	528,440	82	533,724	70	341,909	55	445,466	-	53,788	41.73	841,163	46.37	42.10	Dinkes
10	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Program Peningkatan, Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Persentase Alkes yang memadai di faskes	n/a	70 %	1,847,239	30	-	40	453,800	50	458,338	15	-	18	420,831	50.00	206,110	27.69	626,942	39.55	33.94	Dinkes
11	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Program Pembangunan Sarana Prasarana kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam kondisi baik	10%	70 %	460,945	20	100,000	30	80,000	40	91,800	50	1,983,969	61	1,579,357	40.00	3,067,225	50.35	6,630,551	71.93	1438.47	Dinkes
12	Meningkatnya kinerja rumah sakit	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Bed Occupancy Rate (Tingkat Hunian RS) penduduk miskin	83%	85 %	1,241,375	83	270,480	84	214,280	84	247,228	83	166,200	84	178,840	34.30	154,820	67.10	499,860	78.94	40.27	RSU
13	Meningkatnya Fasilitas kesehatan sesuai standar	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah	Cakupan Fasilitas yang terstandar sesuai dengan tipe rumah sakit	75%	80 %	288,513	-	-	77	70,000	78	71,400	90	3,745,412	90	6,736,736	61.09	8,063,483	80.36	18,545,631	100.45	6428.02	RSU
14	Meningkatnya kinerja rumah sakit	Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	85%	90 %	565,624,017	86	91,514,588	87	115,658,113	88	116,414,694	85	103,306,519	86	114,322,064	88.00	114,524,066	86.43	332,152,649	96.03	58.72	RSU
15	Meningkatnya kinerja rumah sakit	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit kondisi baik	80%	85 %	2,653,367	-	-	-	-	83	867,000	-	-	-	83.00	235,879	27.67	235,879	32.55	8.89	RSU	
16	Meningkatnya pengembangan dan kualitas Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Sumber daya kesehatan	Cakupan Tenaga terampil sesuai kompetensi di bidangnya	39%	50 %	1,530,200	-	-	-	45	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	RSU	

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)	Target RPJMD Kab/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian Target RPJMD Kab/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2018		2019		2020		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
17		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Alkes yang memadai di faskes		95 %	1,623,811		-		45	500,000				30.00	236,185	10.00	236,185	10.53	14.55	RSU		
3.		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				115,422,171		27,206,366		22,347,940		21,196,795		5,032,865		142,777,287		130,348,086		20,569,531	80.14	163.54	
1	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase terhubungnya pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas)	100%	100 %	44,192,223	100	13,083,718	100	7,453,960	100	7,528,500	100	4,932,865	100	38,623,733	90.11	70,738,067	96.70	114,294,666	96.70	258.63	DPUPR
2	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang	48%	72.10 %	23,383,479	52.3	7,324,000	57.8	3,877,030	62.6	3,954,571	76	-	78	75,826,383	53.96	29,334,543	69.21	105,160,926	95.98	449.72	DPUPR
3	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebinarmargaan	70%	100 %	1,866,863	100	455,075	100	282,758	100	368,916	100	-	100	534,644	98.33	278,350	99.44	812,994	99.44	43.55	DPUPR
4	Meningkatnya infrastruktur pendukung pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase perkembangan jaringan pengairan	35%	61.1 %	21,408,631	39.1	3,762,255	44.3	5,478,006	48.5	3,950,000	58	-	60	12,182,089	47.92	21,200,390	55.31	33,382,479	90.52	155.93	DPUPR
5	Meningkatnya infrastruktur pendukung pertanian	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase pemanfaatan sumber air alami	100%	100 %	1,101,778	100	195,000	100	198,900	2	202,878	100	-	100	900,649			66.67	900,649	66.67	81.75	DPUPR
6	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam	Program Pengendalian Banjir	Persentase pengurangan area genangan banjir	3%	3 %	13,885,630	3	2,286,318	3	2,814,269	3	2,870,554		-	3	3,036,995			1.00	3,036,995	33.33	21.87	DPUPR
7	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	n/a	100 %	2,075,000		-	100	575,000	100	500,000		-	100	768,355	66.67	1,200,000	55.56	1,968,355	55.56	94.86	DPUPR
8	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Dokumen tata ruang	n/a	100 %	872,161	100	100,000	100	100,000	100	222,000		-	100	97,253	100.00	15,585	66.67	112,838	66.67	12.94	DPUPR dan Setdakab
9	Tersedianya dokumen perencanaan dan data base infrastruktur	Program Survey Investigasi dan Pemutakhiran data base infrastruktur	Persentase jalan, jembatan dan bangunan air yang diinspeksi dan disurvei	100%	100 %	618,241	100	-	100	150,000	100	153,000	50	100,000	100	396,234	105.00	383,900	85.00	880,134	85.00	142.36	DPUPR
10	Tersedianya dokumen perencanaan dan data base infrastruktur	Program Perencanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Persentase Tingkat Ketersediaan Dokumen	100%	100 %	5,590,845	100	-	100	1,356,473	100	1,383,601	100	-	100	9,594,631	100.00	6,984,752	100.00	16,579,383	100.00	296.55	DPUPR
11	Meningkatnya infrastruktur pendukung pertanian	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Tingkat Ketersediaan Air Baku	100%	100 %	427,320	100	-	100	61,545	100	62,776	100	-	100	816,321	75.00	212,500	91.67	1,028,821	91.67	240.76	DPUPR
4		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				237,452,464		64,876,073		45,622,826		40,595,039		102,831,010		108,187,087		82,884,613		293,902,710	59.69	125.96	
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara	34%	65.62 %	125,220,391	40.62	42,321,481	46.87	24,276,910	53.12	18,622,000	34	74,728,831	34	19,107,993	51.89	21,013,016	40.21	114,849,839	61.28	91.72	DPRKP
2	Meningkatnya infrastruktur perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	85%	85.5 %	7,053,020	85.46	850,000	85.47	1,505,000	85.48	1,535,100	85	982,889	85	2,343,340	85.48	8,821,420	85.47	12,147,649	99.96	172.23	DPRKP
3	Meningkatnya ketersediaan dan akses air bersih	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	56%	65.15 %	3,461,683	59.15	1,193,500	62.15	553,080	65.15	564,142	-	58,329	-	2,341,459	65.15	1,878,330	21.72	4,278,118	33.33	123.58	DPRKP
4	Meningkatnya prasarana lingkungan pemukiman	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase gampong dengan infrastruktur baik	n/a		17,977,908		4,191,850		3,361,630		3,428,863	66	4,136,363	67	32,515,820	100.00	22,519,029	77.89	59,171,211		329.13	DPRKP
5	Meningkatnya ketersediaan dan akses air bersih	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum	61%	70.7 %	6,554,889	62.7	2,280,000	64.7	1,037,190	66.7	1,057,934		10,872,210		18,060,785	99.95	16,559,721	33.32	45,492,715	47.13	694.03	DPRKP
6	Tersedianya dokumen perencanaan dan data base infrastruktur	Program Pengembangan Sistem Informasi Keciaptakarya	Persentase Ketersediaan data dan informasi keciaptakarya	61%	67.25 %	264,120	-	50,000	65.25	51,000	67.25	52,020									0.00	0.00	DPRKP
7	Meningkatnya prasarana lingkungan pemukiman	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah tinggal bersanitasi	58%	73.95 %	1,347,930	60.67	233,000	63.92	116,200	67.09	326,524	61	194,120	64	109,200			41.88	303,320	56.63	22.50	DPRKP
8	Meningkatnya prasarana lingkungan pemukiman	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase Luas areal Pemakaman terkelola	-	- %	820,000	-		0.37	200,000		204,000			0.36	506,689	100.00	3,100	33.45	509,789	0.00	62.17	DPRKP
9		Program Perencanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Tingkat Ketersediaan Dokumen	100%	100 %	3,261,644			100	779,547	100	787,342			100.00	1,261,056	100.00	581,620	66.67	1,842,676	66.67	56.50	DPRKP
10	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase tingkat pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi	65%	100 %	782,025	65	205,000	85	140,000	87	142,800	85	-	85	365,896	68.15	45,542	79.38	411,438	79.38	52.61	BPBD
11	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase tingkat pelayanan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan	65%	90 %	2,041,778	65	643,581	70	339,236	75	346,021	65	77,459	70	211,443	56.25	69,203	63.75	358,105	70.83	17.54	BPBD

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)	Target RPJMD Kab/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian Target RPJMD Kab/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2018		2019		2020		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
12	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam	Program Forum Pengurangan Risiko Bencana	Persentase pengurangan resiko bencana	65%	100 %	634,466	65	159,120	68	115,320	70	117,626	65	18,418	60	135,206	70.00	5,245	65.00	158,869	65.00	25.04	BPBD
13	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	75%	90 %	4,670,247	75	778,840	78	941,439	80	960,268	75	482,415	78	2,332,609	71.80	2,700,504	74.93	5,515,528	83.26	118.10	BPBD
14	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam	Program Kedaruratan, Logistik dan Peralatan Kebencanaan	waktu persiapan penanggulangan bencana	60 menit	60 menit	3,865,585	60	723,770.0	60	760,354.0	60	775,561.1	60	460,840	50	730,290	20.00	548,780	43.33	1,739,910	72.22	45.01	BPBD
15	Terpenuhinya operasional lampu jalan	Program Perbaikan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	Persentase lampu jalan dalam kondisi baik	100%	100 %	59,496,778	100	11,245,931.0	100	11,445,920.0	100	11,674,838.4	100	10,819,136	100	28,165,302	100.00	8,139,104	100.00	47,123,541	100.00	79.20	DLHK
5		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				33,943,257		4,937,698		7,647,166		6,510,879		5,699,266		7,353,497		4,740,961		17,793,724	68.87	45.02	
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Program Pemeliharaan Kantinribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat koordinasi dan kerjasama dalam penyelesaian konflik	15%	85 %	3,203,512	30	261,628.0	40	550,000	50	761,000	100.00	143,732	87.50	451,520	50.00	345,115	79.17	940,367	93.14	29.35	Kesbangpol, Satpol PP
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT)	Tingkat penurunan kasus penyalahgunaan narkoba per tahun	1%	10 %	1,018,106	12	250,000.0	14	185,250.8	2	188,955.0	19.40	295,664	8.92	173,430	2.00	52,682	10.11	521,777	101.07	51.25	Kesbangpol
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pembinaan parpol, OKP, Ormas, LSM dan WNA	100%	100 %	3,188,250	100	84,000	100	2,097,250	100	300,000		40,162	83.33	1,004,661	100.00	131,518	61.11	1,176,341	61.11	36.90	Kesbangpol
4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tingkat penurunan kasus demonstrasi/kerusuhan yang berlatarbelakang ideologi per tahun	n/a	40 %	191,900		-	10	20,000	10	20,400	-	-	75	79,411	-	-	25.00	79,411	62.50	41.38	Kesbangpol
5	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri	Persentase yang memilih pada PEMILU	66.40%	72 %	238,700			67	16,700		20,000		-		173,886	-	-	-	173,886	0.00	72.85	Kesbangpol
6	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penegakan Qanun	100%	100 %	9,666,248	100	1,846,600	100	1,869,200	100	1,906,584	100.00	2,822,255	100	1,882,625	100.00	2,202,057	100.00	6,906,936	100.00	71.45	Satpol PP
7	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pengamanan lingkungan	n/a	100 %	2,400,000	0	-	100	150,000	100	500,000	-	-	100	-	-	-	33.33	-	33.33	0.00	Satpol PP
8	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100%	100 %	14,036,541	100	2,495,470	100	2,758,765	100	2,813,940	100.00	2,397,453	100	3,587,964	99.40	2,009,589	99.80	7,995,006	99.80	56.96	BPBD
6		Sosial				14,812,491		2,337,600		2,796,705		2,852,639		1,224,615		3,315,866		2,499,434		7,039,915	64.04	55.26	
1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	20%	55 %	7,335,861	25	1,262,600	30	1,451,746	40	1,480,781	54	144,357	53	1,948,693	40.00	1,024,630	49.00	3,117,680	89.09	42.50	Dinsos P3A
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat bantuan	20%	50 %	933,000	25	125,000	30	150,000	35	153,000	19	-	27	94,269	35.00	123,388	27.00	217,657	54.00	23.33	Dinsos P3A
3	Menurunnya tingkat kemiskinan	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Persentase Pembinaan Kelembagaan Sosial	35%	80 %	2,993,848	47	450,000	50	618,824	68	631,200	49	524,270	50	617,914	68.00	389,545	55.67	1,531,729	69.58	51.16	Dinsos P3A
4	Menurunnya tingkat kemiskinan	Program Keluarga Harapan (PKH)	Meningkatnya Persentase penerima manfaat Program keluarga harapan	20%	71 %	2,034,237	41	500,000	53	373,885	62	381,363	45	528,811	44	332,938	62.00	192,569	50.33	1,054,318	70.89	51.83	Dinsos P3A
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Persentase panti asuhan/pati jompo yang dibina	30%	55 %	404,000	30	-	40	50,000	45	51,000	30	-	40	50,000	45.00	49,980	38.33	99,980	69.70	24.75	Dinsos P3A
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase Gepeng yang mendapat bantuan	30%	55 %	459,045	30	-	40	27,250	45	27,795	11	27,177	15	25,527	45.00	523,066	23.67	575,770	43.03	125.43	Dinsos P3A
7	Menurunnya tingkat kemiskinan	Program Bantuan Sosial, Rastra dan BPNT	Meningkatnya persentase Penerima Manfaat Bantuan Sosial, Rastra dan BPNT	29%	75 %	652,500	-	-	58	125,000	66	127,500	-	-	51	246,525	66.00	196,256	39.00	442,781	52.00	67.86	Dinsos P3A
7		Tenaga Kerja				4,275,401		449,000		581,990		593,630		239,044		2,059,153		129,126		2,427,323	30.82	44.74	

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)			Target RPJMD Kab/Kota pada RKPd Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian Target RPJMD Kab/Kota pada RKPd Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp. (000)	2018		2019		2020		2018		2019		2020		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		Rp. (000)
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan	20%	100 %	2,820,600	20	336,000.0	20	330,000	20	336,600	-	88,347	-	1,812,492	18.00	45,322	6.00	1,946,161	6.00	69.00	DPMTransaker		
2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	100 %	747,801	100	113,000.0	100	151,990	100	155,030	-	136,747	97	148,001	60.53	83,804	52.51	368,552	52.51	49.28	DPMTransaker		
3	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20%	20 %	707,000	-	20	100,000	20	102,000	-	13,950	20.37	98,660	-	-	6.79	112,610	33.95	15.93	DPMTransaker			
8		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4,291,476		1,013,616		731,070		745,691		580,411		914,621		1,108,658		2,603,690		83.72	76.54		
1	Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman dan sosialisasi tentang perlindungan anak dan perempuan	75%	93 %	940,209	78	210,000	85	171,489.5	87	174,919.3	78.00	75,756.0	85	198,938.0	87.00	117,648.0	83.33	392,342	89.61	41.73	Dinsos P3A		
2	Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%	100 %	2,334,796	100	516,120	100	435,335.0	100	444,041.7	100	290,037	100	471,843	100.00	351,292	100.00	1,113,172	100.00	47.68	Dinsos P3A		
3	Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	75%	100 %	510,643	100	287,496	100	23,835.0	100	24,311.7	100	44,512	100	71,809	100.00	77,380	100.00	193,701	100.00	37.93	Dinsos P3A		
4	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan	15%	30 %	505,828	20	-	22	100,410	25	102,418	170,106	22.00	172,031	18.75	562,338	13.58	904,475	45.28	178.81	Dinsos P3A			
9		Pangan				3,039,032		946,090		486,110		495,832		307,760		1,422,254		1,021,337		2,751,351		95.87	90.53		
1	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dan Perikanan	Ketersediaan Pangan Utama	100%	100 %	3,039,032	100	946,090	100	486,110	100	495,832	87.91	307,760	99.71	1,422,254	100.00	1,021,337	95.87	2,751,351	95.87	90.53	Distanpan		
10		Pertanahan				4,620,273		129,500		1,159,271		998,898		54,913		1,567,897		200,892		1,823,703		43.53	42.86		
1	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Persentase terbitnya sertifikat tanah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	90%	100 %	2,039,804	-	129,500	95	782,500	100	370,200	42	54,913	90.67	379,790	113.94	113,975	82.34	548,678	82.34	26.90	Dinas Pertanahan		
2	Meningkatnya pelayanan pertanahan	Program Penataan, Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	Persentase pengadaan tanah	n/a	100 %	733,698	-	-	-	-	72	228,698	-	-	-	72.00	38,556.2	24.00	38,556	24.00	5.26	Dinas Pertanahan			
3	Meningkatnya pelayanan pertanahan	Program Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	Persentase pengadaan tanah	n/a	100 %	224,214	-	-	100	224,214	100	-	-	98	97,985	-	-	32.67	97,985	32.67	43.70	Dinas Pertanahan			
4	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian masalah pertanahan	n/a	100 %	822,558	-	-	80	152,558	100	200,000	-	96	1,090,122	100.00	31,761	65.33	1,121,884	65.33	136.39	Dinas Pertanahan			
5	Meningkatnya pelayanan pertanahan	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase ketersediaan data dan informasi pertanahan	n/a	75 %	800,000	-	-	-	25	200,000	-	-	-	30.00	16,600.2	10.00	16,600	13.33	2.08	Dinas Pertanahan				
11		Lingkungan Hidup				51,006,539		9,084,462		9,188,400		10,472,168		6,458,050		10,397,333		10,245,833		27,101,216		53.13	42.69		
1	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	n/a	75 %	2,419,526	55	571,262	60	442,210	65	451,054	55.00	131,520	50.00	989,452	56.33	201,921	53.78	1,322,893	71.70	54.68	DLHK		
2	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Hidup	100%	100 %	760,689	100	91,200	100	156,430	100	159,559	100	20,188	75.00	77,138	73.33	7,821	82.78	105,147	82.78	13.82	DLHK		
3	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	21.49%	35.05 %	43,088,592	23.99	8,300,000	26.75	8,337,170	29.25	8,503,913	23.99	6,228,481	22.29	9,152,519	29.25	8,727,817	25.18	24,108,817	71.83	55.95	DLHK		

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)	Target RPJMD Kab/Kota pada RKPd Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian Target RPJMD Kab/Kota pada RKPd Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2018		2019		2020		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
4	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengelolaan dan Penataan Taman Kawasan Perkotaan	Persentase taman kota yang tertata	100%	100 %	1,187,732	100	122,000	100	252,590	100	257,642	82.52	77,861	94.97	178,225	100.00	1,308,274	92.50	1,564,359	92.50	131.71	DLHK
5	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya konservasi SDA	35%	75 %	2,300,000	-	-	-	25	725,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	DLHK
6	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Meningkatnya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	35%	75 %	1,250,000	-	-	-	25	375,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	DLHK
12		Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				1,947,132		186,500		421,600		430,032		1,129,813		2,466,854		1,968,978		5,565,645	98.25	285.84	
1	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat Pelayanan Kependudukan	n/a	93 %	1,947,132	91	186,500	91	421,600	92	430,032	79.63	1,129,813	91.00	2,466,854	103.50	1,968,978	91.38	5,565,645	98.25	285.84	Disdukcapil
13		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				10,090,568		1,359,000		2,051,200		2,133,224		585,430		1,653,959		863,702		3,103,091	124.65	28.18	
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Jumlah gampong yang berkembang	n/a	370 gampong	770,606	74	100,000	74	161,983	74	165,223	74	96,983	74	142,329	74.00	96,839	74.00	336,152	20.00	43.62	DPMPPKB
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan gampong	100%	100 %	1,014,000	-	509,000	100	100,000	100	102,000	-	100	69,495	100.00	11,562	66.67	81,057	66.67	7.99	DPMPPKB	
3	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase kelompok binaan PKK	56%	70 %	2,289,678	59.74	750,000	63.14	367,217	66.54	374,561	95.27	312,311	42.86	319,456	66.54	262,769	68.22	894,535	97.46	39.07	DPMPPKB
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong	Program pengembangan lembaga ekonomi desa	Persentase BUMG yang memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Gampong (PAG)	n/a	9 %	4,066,284	-	-	5	972,000	6	991,440	100	176,136	12	891,475	6.00	492,532	39.33	1,560,143	437.04	38.37	DPMPPKB
5	Meningkatnya kapasitas aparatur gampong	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur gampong yang mengikuti diklat	n/a	75 %	1,950,000	-	-	50	450,000	60	500,000	-	5	231,204	-	-	1.56	231,204	2.08	11.86	DPMPPKB	
14		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1,647,404		68,000		182,910		12,216,770		9,617,509		11,198,517		11,158,929		31,974,954	29.29	1,724.59	
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu serta mengutamakan pada promotif dan preventif	Program Keluarga Berencana	Ratio Akseptor KB	69%	75 %	619,278	70	68,000	71.22	132,910	72.47	12,139,115	54	9,617,509	54	11,150,098	72.47	11,132,895	60.35	31,900,502	80.47	5151.24	DPMPPKB
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu serta mengutamakan pada promotif dan preventif	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	n/a	25 %	252,500	-	-	6	50,000	5.56	51,000	-	-	6	48,419	-	-	1.85	48,419	7.41	19.18	DPMPPKB
3	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu serta mengutamakan pada promotif dan preventif	Program Persediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah	Jumlah TK/RA	0%	15 %	775,626	0%	-	0	-	5	26,655	-	-	5.00	26,034	1.67	26,034	-	26,034	-	3.36	DPMPPKB
15		Perhubungan				14,537,433		2,923,370		2,548,277		2,902,748		2,223,069		2,968,534		1,855,873		7,047,477	69.83	77.72	
1	Meningkatnya pelayanan angkutan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Rehabilitasi prasarana	79%	100 %	379,870	100	90,000	100	43,500	100	44,370		42,669	80	435,433	100.00	79,407	60.00	557,509	60.00	146.76	Dishub
2	Meningkatnya pelayanan angkutan	Program peningkatan pelayanan angkutan darat	Persentase layanan angkutan darat	100%	100 %	6,779,936	100	1,382,870	100	1,299,615	100	1,325,608	100	1,255,020	83	1,524,414	100.00	802,304	94.44	3,581,739	94.44	52.83	Dishub
3	Meningkatnya pelayanan angkutan	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah Kasus kecelakaan lalu lintas	n/a	100 %	1,239,504	100	300,500	100	-	100	303,505	74	-	51	889,307	66.67	803,732	64.19	1,693,039	64.19	136.59	Dishub
4	Meningkatnya pelayanan angkutan	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	51.20%	53 %	1,090,261	51	160,000	52	225,525	52	230,036	51	104,360	50	119,380	52.05	170,430	51.12	394,170	97.19	36.15	Dishub
5	Meningkatnya pelayanan angkutan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara	Tingkat Pelayanan Angkutan Udara	n/a	100 %	5,047,862	100	990,000	100	979,637	100	999,229	100	821,020	-	-	-	33.33	821,020	33.33	16.26	Dishub	

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)	Target RPJMD Kab/Kota pada RKPd Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian Target RPJMD Kab/Kota pada RKPd Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2018		2019		2020		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
16		Komunikasi dan Informatika			12,740,479		999,212		2,406,276		1,840,361		2,210,649		2,343,004		1,716,527		6,270,180		48.91		63.27	
1	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Penerima Akses	100%	100 %	3,018,882	100	597,990.0	100	587,366.3	100	599,113.6	99.54	576,105	75	656,104	100.00	552,337	91.51	1,784,546	91.51	59.11	Setdakab	
2	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Tingkat Pelayanan Informasi	100%	100 %	589,875	100	195,000.0	100	95,482.7	100	97,392.3	-	95,477	-	296,131	100.00	122,774	33.33	514,381	33.33	87.20	Setdakab	
3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terciptanya kemitraan yang baik dalam penyebaran informasi	100%	100 %	9,131,722	100	206,221.6	100	1,723,427.0	100	1,143,855.5	-	1,539,067	-	1,390,770	65.67	1,041,416	21.89	3,971,253	21.89	43.49	Setdakab, DPMTransaker, Sekr.DPRK	
17		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			3,376,539		435,180		530,660		744,199		131,577		617,056		95,973		844,606		36.83		16.23	
1	Meningkatnya pembangunan berbasis industri, koperasi dan UMKM	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UKM yang mendapat akses modal	51.78%	61.93 %	889,152	52.76	143,610	55.05	179,080	57.34	182,662	5	49,500	5	143,490.10	38.23	32,571.00	16.10	225,561	26.00	25.37	Disdaginkop & UKM	
2	Meningkatnya pembangunan berbasis industri, koperasi dan UMKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98.83%	99.83 %	649,020	99	144,020	99	100,000	87.05	102,000	95	48,960	95	152,509	46.43	44,810	78.81	246,279	78.94	37.95	Disdaginkop & UKM	
3	Meningkatnya pembangunan berbasis industri, koperasi dan UMKM	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	27.00%	51.25 %	1,100,912	30.16	37,220	33.87	251,580	52.77	256,612	31	33,117	69	321,056	52.77	17,282	50.92	371,455	99.36	33.74	Disdaginkop & UKM	
4	Meningkatnya pembangunan berbasis industri, koperasi dan UMKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentasewirausaha yang memahami wawasan dan etika berbisnis dan manajemen yang profesional	10.00%	30 %	373,536	-	-	-	15	121,036.0	-	-	-	-	15.00	1,310	5.00	1,310	16.67	0.35	Disdaginkop & UKM		
5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri, koperasi dan UMKM	Program Pengembangan Data Koperasi dan UKM	Persentase ketersediaan data koperasi dan UKM	n/a	100 %	110,330	100	110,330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	Disdaginkop & UKM	
6	Meningkatnya pembangunan berbasis industri, koperasi dan UMKM	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembinaan Koperasi dan UKM	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan koperasi dan UKM	n/a	100 %	253,590	100	-	-	100	81,890	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	Disdaginkop & UKM	
18		Penanaman Modal			6,218,975		672,000		1,075,982		1,397,501		146,519		607,082		262,712		1,016,313		43.29		16.99	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	8,2 T	9 T	1,981,646		255,000		149,330		452,316		37,838		147,816.7	-	32,349.5	-	218,004	0.00	11.00	Setdakab, DPMTransaker	
2	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan perizinan tepat waktu	100%	100 %	3,233,947	100	240,000	100	726,152	100	740,675	-	84,673.0	-	386,399.9	53.86	104,793.9	17.95	575,867	17.95	17.81	Setdakab, DPMTransaker	
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	53 perusahaan	75 Perusahaan	1,003,382	62	177,000	65	200,500	68	204,510	78	24,007.8	99	72,865.9	74.80	125,568.6	83.93	222,442	111.91	22.17	Setdakab, DPMTransaker	
19		Kepemudaan dan Olahraga			11,821,774		4,067,980		1,731,466		1,966,095		1,510,183		4,353,040		1,389,799		7,253,022		51.95		67.87	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	60%	85 %	2,867,141	65	217,980	70	641,466	75	654,295	-	1,510,183	70	1,761,734	71.25	782,317	47.08	4,054,234	55.39	141.40	Disporapar	
2	Meningkatnya kemandirian pemuda	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	15%	32 %	1,250,673	20	550,000	23	170,000	55	173,400	-	-	23	631,682	-	566,987	7.67	1,198,669	23.96	95.84	Disporapar	
3	Meningkatnya Prestasi olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	65%	85 %	7,091,879	-	3,300,000	70	920,000	75	938,400	-	-	70	1,959,624	45.00	-	38.33	1,959,624	45.10	27.63	Disporapar	
4	Meningkatnya Prestasi olahraga	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase Atlit Berprestasi	25%	40 %	612,080	25	-	25	-	100	200,000	-	-	-	100.00	40,495	33.33	40,495	83.33	6.62	Disporapar		
20		Kebudayaan			8,483,063		2,939,542		721,050		556,971		1,106,940		1,132,710		1,543,960		3,783,610		45.26		58.27	
1	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kekayaan Budaya yang terkelola	40%	85 %	1,881,550	50	210,000	60	327,500	70	334,050	51	394,481.9	63	803,789	70.00	1,406,766	61.33	2,605,037	72.16	138.45	Dinas PK	
2	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pelestarian pengembangan dan keragaman budaya	40%	85 %	3,726,513	50	2,729,542.4	60	218,550	70	222,921	-	212,458	20	233,120	70.00	137,194	30.00	582,772	35.29	15.64	Dinas PK	

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)	Target RPJMD Kab/Kota pada RKPd Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian Target RPJMD Kab/Kota pada RKPd Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						2018		2019		2020		2018		2019		2020		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)				
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
3	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Pengembangan Nilai Budaya	Keikutsertaan dalam festival budaya	40%	60 %	2,875,000		-	50	175,000		-		500,000	51	95,800	-	13	17,000	595,800	28.33	20.72	Dinas PK		
21		Perpustakaan				2,558,821			320,000		237,040			591,781		591,212			395,771		1,669,688	20.31	61.54		
1	Meningkatnya kualitas SDM	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0.20%	0.23 %	1,808,820.80	0.21	320,000	0.21	237,040	0.21	241,781	0.21	591,211.5	0.21	2,352,395	0.00	395,771	0.14	3,339,377	60.92	184.62	Dinas Pustaka dan arsip		
2	Meningkatnya kualitas SDM	Program Peningkatan Sarana Fasilitas Pelayanan Perpustakaan	Persentase sarana dan prasarana perpustakaan dalam kondisi baik	70%	95 %	450,000	70	-	70	-	70	250,000.0				-	-	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Pustaka dan arsip		
3	Meningkatnya kualitas SDM	Program Pengembangan Sumber daya Aparatur Perpustakaan	Persentase aparatur perpustakaan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	80 %	300,000		-		-		100,000.0									0.00	0.00	Dinas Pustaka dan arsip		
22		Kearsipan				2,258,812			388,000		226,003,412			393,070		346,687			297,463		145,324	789,475	60.00	36.76	
1	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	100 %	607,230	100	110,000	100	96,153,604	100	98,077	100	35,687.0	100	68,551.1	100.00	32,598.9	100.00	136,837	100.00	22.53	Dinas Pustaka dan arsip		
2	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	50%	75 %	783,471	55	168,000	60	129,688,708	65	132,282	55	155,500	60	181,281	65.00	112,726	60.00	449,506	80.00	57.37	Dinas Pustaka dan arsip		
3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	100 %	565,611	100	110,000	100	111,100	100	112,211				-	-	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Pustaka dan arsip		
4	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase pengelola arsip yang mengikuti pelatihan kearsipan	n/a		302,500			50	50,000	50	50,500		155,500	50	47,631.8	-	-	16.67	203,132		67.15	Dinas Pustaka dan arsip		
23		Pariwisata				3,815,994			450,000		524,750			681,244		267,652			545,721		944,534	1,757,907	7.52	51.98	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	n/a	10 %	2,115,994	2	450,000.0	2	324,749.5	2	331,244.5	1.5	267,652	1.6	545,721	0.04	137,155	1.05	950,528	10.47	44.92	Disorapar		
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	n/a	8 %	1,100,000		-	2	200,000.0	2	200,000.0	1.18		1.68		0.04	310,912.0	0.97	310,912	12.08	28.26	Disorapar		
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Program Pengembangan Kemitraan dengan Dunia Usaha	Persentase Kemitraan dengan Dunia Usaha	n/a	19 %	600,000		-		-		150,000.0					-	496,467.0	-	496,467	0.00	82.74	Disorapar		
24		Pertanian				46,463,361			6,128,190		8,836,810			10,036,367		3,042,543			19,080,378		13,011,889	35,134,810	296.72	68.27	
1	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Tingkat Produktivitas Pangan Utama	5,03 ton/ha	5.5 ton/ha	5,300,183	5.28	1,156,870	5.35	1,000,650	5.4	1,020,663	5.28	545,470	-	869,076	5.13	2,352,821	3.47	3,767,367	63.09	71.08	Distanpan		
2	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan kelompok tani yang dibina	25%	30 %	1,556,430		-	15	26,230	40	500,000	-	-	76.92	10,265		25.64	10,265	85.47	0.66	Distanpan			
3	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Nilai ekspor pertanian			1,074,203		98,260		233,140		237,803		103,485	100	230,710	-	30,467	33.33	364,662		33.95	Distanpan		
4	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas padi	n/a	25 %	4,581,820	5	1,153,950	5	673,510	5.4	900,000	5	501,669	5	10,671,438	4.90	2,405,121	5.06	13,578,229	20.25	296.35	Distanpan		
5	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah produksi padi	3,270 ton	3673 ton/ha	10,136,325	3.382	1,267,410	3421	1,951,700	446379	2,146,870	3.360	339,375	3,400	840,216	#####	1,579,461	107,483.08	2,759,051	2926.30	27.22	Distanpan		
6	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan kelompok tani (perkebunan) yang dibina	10%	30 %	843,680	12	57,010	15	136,670	20	150,000	12	11,665	15	51,382	20.00	32,586	15.67	95,633	52.22	11.34	Disbunnakk eswan		
7	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan Produktivitas perkebunan unggulan	5,03 ton/ha	5.5 ton/ha	3,793,720	5.28	166,450	5.35	872,910	5	900,000	5.28	340,001	5.35	1,794,645	4.81	1,435,338	5.15	3,569,984	93.56	94.10	Disbunnakk eswan		

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)		Target RPJMD Kab/Kota pada RKPJMD Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian Target RPJMD Kab/Kota pada RKPJMD Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					K	Rp. (000)	2018		2019		2020		2018		2019		2020		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)													
8	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi perkebunan unggulan (kaka)o	3.270 ton	3673 ton	6	8,479,560	3382	7	710,430	3421	8	1,816,470	3490	8	1,907,293	3,382	12	204,620	3,421	13	1,539,171	3,490.00	13	1,277,389	3,431.00	22	3,021,180	93.41	35.63	Disbunnakk eswan
9	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tingkat kestabilan harga daging di hari-hari besar	90%	100 %	6	734,292	95	7	109,080	100	8	150,850	100	8	155,000	95	12	87,660	100	13	182,480	58.02	13	49,209	84.34	22	319,349	84.34	43.49	Disbunnakk eswan
10	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi ternak besar	108.045 ekor	125,000 ekor	6	4,349,408	110,052	7	391,360	112,075	8	959,430	114,126	8	978,618	111,599	12	409,429	111,537	13	964,198	#####	13	1,277,853	112,420.67	2,651,479	89.94	60.96	Disbunnakk eswan	
11	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Penurunan kasus penyakit ternak	n/a	25 %	6	2,787,600	5	7	756,470	5	8	480,510	5	8	490,120	5	12	123,355	4.38	13	1,597,572	0.62	13	2,309,899	3.33	4,030,826	13.33	144.60	Disbunnakk eswan	
12	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Pengembangan Lingkungan Sosial	Meningkatnya prasarana usaha tani tembakau	n/a	25 %	6	1,383,770	5	7	260,900	5	8	267,370	5	8	275,000	3.75	12	375,814	0	13	-	-	13	-	1.25	375,814	5.00	27.16	Disbunnakk eswan	
13	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Meningkatnya produksi perkebunan tembakau	20 ton	20 ton/ha	6	1,442,370	0	7	-	5	8	267,370	5	8	375,000	0	12	-	20	13	329,227	0.25	13	261,745	6.75	590,972	33.75	40.97	Disbunnakk eswan	
25		Perdagangan				6	9,332,520		7	2,719,610		8	1,445,140		8	1,598,484		12	1,674,632		13	5,507,208		13	1,288,826		8,470,667	86.44	117.78		
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah	Nilai Ekspor	69,61 Rp (M)	76 Rp (M)	6	493,060	72	7	36,210	73	8	53,850	74	8	100,000	62.46	12	31,661	50.39	13	50,161	-	13	-	37.62	81,822	49.50	16.59	Disdaginop & UKM	
2	Terkendalnya tingkat inflasi daerah	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat Inflasi	4%	3 %	6	1,493,350	4	7	200,000	4	8	260,850	4	8	275,000	3.51	12	23,800	3.61	13	784,301	3.47	13	736,776	3.53	1,544,877	117.63	103.45	Disdaginop & UKM	
3	Meningkatnya kontribusi PAD ke dalam APBD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Persentase sarana dan prasarana pasar kondisi baik	62%	92 %	6	6,356,110	72	7	2,293,400	74	8	930,440	80	8	1,023,484	78.00	12	199,671	83.90	13	3,271,219	68.89	13	518,995	76.93	3,989,885	83.62	62.77	Disdaginop & UKM	
4	Terkendalnya tingkat inflasi daerah	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	Tingkat Pelanggaran Terhadap Konsumen	n/a	20 %	6	990,000	40	7	190,000	30%	8	200,000	30	8	200,000	30.00	12	1,419,500	-	13	1,401,528	27.00	13	33,055	19.00	2,854,083	95.00	288.29	Disdaginop & UKM	
26		Perindustrian				6	10,710,791		7	1,219,000		8	2,224,100		8	2,374,752		12	438,838		13	3,189,343		13	1,925,784		5,553,965	56.22	53.12		
1	Meningkatnya pembangunan berbasis industri, koperasi dan UMKM	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	4404 IKM	4628 IKM	6	3,777,859	4448	7	333,000.0	4492	8	788,940.0	4537	8	867,834.0	441	12	143,078.8	472	13	1,840,523.8	4.159	13	150,339	1,690.64	2,133,942	36.53	56.49	Disdaginop & UKM	
2	Meningkatnya pembangunan berbasis industri, koperasi dan UMKM	Program Pengembangan industri pangan	Persentase industri pangan terhadap industri pengolahan	38.83%	39.84 %	6	1,264,026	38.828	7	-	39.05	8	300,000.0	39.54	8	315,000.0	-	12	100	292,332.0	11.86	13	86,000	37.29	378,332	93.59	378,332	93.59	29.93	Disdaginop & UKM	
3	Meningkatnya pembangunan berbasis industri, koperasi dan UMKM	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	4404 IKM	4628 IKM	6	3,946,402	4448	7	786,000.0	4492	8	750,080.0	4537	8	787,584.0	441	12	295,759.6	472	13	959,300.1	#####	13	289,445	682.42	1,544,504	14.75	39.14	Disdaginop & UKM	
4	Meningkatnya pembangunan berbasis industri, koperasi dan UMKM	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri potensial	11 centra	15 centr	6	1,722,504	11	7	100,000.0	12	8	385,080.0	13	8	404,334.0	11	12	12	97,187.0	13.00	13	1,400,000	12.00	1,497,187	80.00	1,497,187	80.00	86.92	Disdaginop & UKM	
27		Transmigrasi				6	3,415,286		7	118,000		8	800,000		8	816,000		12	32,435		13	1,006,362		13	641,845		1,680,642	-	49.21		
1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Peningkatan sarana Pemukiman Transmigrasi			6	3,415,286		7	118,000		8	800,000		8	816,000	96.10	12	32,435	98.00	13	1,006,362.2	-	13	641,844.8	64.70	1,680,642	0.00	49.21	DPMTransn aker	
28		Kelautan dan Perikanan				6	37,569,280		7	7,504,550		8	8,344,970		8	6,200,000		12	2,225,554		13	24,437,142		13	10,392,006		37,054,702	37.73	82.90		
1	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Pelestarian Sumber Daya Perikanan	Persentase tingkat kelestarian sumber daya perikanan	n/a	40 %	6	11,674,970	-	7	-	16	8	4,149,970	24	8	2,500,000	-	12	-	-	13	24.00	13	17,150.0	8.00	17,150	20.00	17,150	20.00	0.15	DKP
2	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Revitalisasi Penyuluh Perikanan	Persentase daya guna penyuluh perikanan	14%	60 %	6	900,000	-	7	-	-	8	-	42.0	8	300,000	-	12	-	-	13	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	DKP

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)		Target RPJMD Kab/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian Target RPJMD Kab/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	2018		2019		2020		2018		2019		2020		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)					
3	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Penurunan Jumlah kasus illegal fishing	5%	25 %	674,080	5	74,730	5	140,290	5	150,000	5	154,158	5	110,285.5	5.00	109,033.7	5.00	373,477	20.00	55.41	DKP
4	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Jumlah produksi perikanan budi daya	5%	12,356 Ton	5,718,290	11067	951,000	11389	1,094,810		1,200,000	11,303.93	1,484,326	12,671.79	4,801,523.4	-	7,244,019.3	7,991.91	13,529,869	64.68	236.61	DKP
5	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Jumlah produksi perikanan tangkap	5%	17888 Ton	7,326,840	17078	5,820,190	17280	359,000	5	375,000	17,557	334,084	19,536	19,379,495.1	5.00	2,997,537.7	12,365.99	22,711,117	69.13	309.97	DKP
6	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	41%	74.80 %	668,470	50.5	272,630	56.89	89,800	63.24	100,000	50.50	201,540	56.89	102,146.1	-	-	35.80	303,686	47.86	45.43	DKP
7	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah produksi perikanan	5%	25 %	671,630	5	386,000	5	56,100	5	75,000	5	51,447	5	43,692.0	5.00	9,000.0	5.00	104,139	20.00	15.51	DKP
8	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Tingkat konsumsi ikan per kapita pertahun	40,36 kg perkapita/thn	50 kg per kapita a/th	9,935,000	0	-	44.02	2,455,000	45.85	1,500,000	-	43.52	45.85	15,265.2	29.79	15,265	60.18	0.15	0.15	DKP	
29	Perencanaan				25,887,775		5,931,075	4,494,266		4,933,996		1,999,251		5,184,900		1,686,002		8,870,153	78.91	33.86			
1	Meningkatnya kualitas SDM	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	100 %	705,060	100	96,000	100	150,000	12	150,000		32,265.0		88,779.8		-	121,045	0.00	17.17	Bappeda	
2	Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan	Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan dokumen data/informasi pembangunan daerah	100%	100 %	1,218,120	100	100,000	100	200,000	100	300,000	100	21,462.0	100	98,893.8	100.00	172,775.9	100.00	293,132	100.00	24.06	Bappeda
3	Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aparatur perencana OPD yang terlatih	n/a	100 %	812,080	100	100,000	100	100,000	100	200,000	100	-	100	45,542.5		66.67	45,543	66.67	5.61	Bappeda	
4	Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100 %	7,079,422	100	1,314,692	100	1,251,530	100	1,376,683	100	523,750.0	100	1,143,424.6	100.00	663,962.9	100.00	2,331,137	100.00	32.93	Bappeda
5	Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian program bidang ekonomi dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100 %	1,084,356	100	115,006	100	204,250	100	250,000	100	44,045.0	100	212,505.8	100.00	92,644.3	100.00	349,195	100.00	32.20	Bappeda
6	Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase kesesuaian program bidang sosial budaya dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100 %	1,058,017	100	190,031	100	210,000	100	215,000	100	100	100	216,767.0	50.00	90,124.7	83.33	306,892	83.33	29.01	Bappeda
7	Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan	Program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian program bidang prasarana wilayah dan SDA dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100 %	708,016	100	89,775	100	150,000	100	153,000	100	100	100	128,856.5	70.51	499,821.3	56.84	628,678	56.84	88.79	Bappeda
8	Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	100 %	5,011,030	100	862,344	100	1,006,570	100	1,006,301	100	434,096.9	100	2,170,570.7	71.77	32,584.3	90.59	2,637,252	90.59	52.63	Semua PD yang
9	Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan	Program Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	100 %	2,951,003	100	510,000	100	579,340	100	608,307	100	353,583	100	618,880.2	89.29	48,759.1	96.43	1,021,222	96.43	34.61	Semua PD yang membidangi
10	Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	100 %	5,260,670	100	2,553,227	100	642,576	100	674,705	100	590,050	100	460,679.1	85.79	85,329.1	95.26	1,136,058	95.26	21.60	Semua PD yang membidangi
30	Keuangan				32,182,459		6,142,041	6,273,160		6,459,044		2,495,172		4,556,174		3,484,304		10,535,650	42.05	25.21			
1	Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya informasi laporan keuangan	99%	100 %	1,217,901	100	265,810	100	231,000.00	100	235,620.00		83,708.2	100	239,722.4	100.00	201,952.0	66.67	525,383	66.67	43.14	BPKD
2	Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan	100%	100 %	30,820,558	100	5,732,231	100	6,042,160.00	100	6,223,424.00		2,411,464.1	93.56	4,316,451.5	84.93	3,282,351.7	59.50	10,010,267	59.50	32.48	BPKD

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)	Target RPJMD Kab/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian Target RPJMD Kab/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2018		2019		2020		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Penataan Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya aplikasi SIMPAT	n/a	100 %	144,000	100	144,000	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	BPKD		
31		Kepegawaian				15,451,061		2,988,680		3,023,670		3,084,143		2,416,447		3,617,036		1,674,251		7,707,734	70.38	47.81	
1	Meningkatnya kapasitas aparatur	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	15%	100 %	6,789,849	100	2,050,000	100	1,150,000	100	1,173,000	100	2,019,789.0	33.33	63,989.0	44.44	2,083,778	44.44	30.69	BKPSDM		
2	Meningkatnya kapasitas aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	81%	100 %	8,661,212	100	938,680	100	1,873,670	100	1,911,143	100	2,416,447	92.02	1,597,247	96.91	1,610,262	96.31	5,623,956	96.31	64.93	BKPSDM
32		Penelitian dan Pengembangan				3,840,579		934,845		705,000		719,100		-		439,381		263,168		702,549	66.67	18.29	
1	Meningkatnya penerapan hasil ketelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan	Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	Persentase tindak lanjut hasil penelitian dan inovasi pembangunan daerah	n/a	100 %	3,840,579	100	934,845	100	705,000	100	719,100	100	439,380.9	100.00	263,167.9	66.67	702,549	66.67	18.29	Bappeda		
33		Pengawasan				15,196,525		3,150,650		2,700,859		2,947,809		1,629,885		2,779,086		1,721,763		1,532,683	60.09	36.32	
1	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan	76%	95 %	9,981,576	80	2,143,000	85	1,804,000	88	1,894,200	80	1,326,652	77.56	1,833,528	195.07	1,338,627	117.54	4,498,806	123.73	45.07	Inspektorat
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	71 %	996,240	50	185,000	57	188,700	7	198,135	50	51,100	57	192,838	18.14	31,300	41.71	275,238	58.75	27.63	Inspektorat
3	Maturitas SPIP	Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur	Tingkat Pemahaman terhadap SOP dan SPIP	0	100 %	3,213,910	20	763,000	20	550,000	20	605,000	20	202,224	18.33	567,659	20.00	223,539	19.44	993,422	19.44	30.91	Inspektorat
4	Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terkendalinya Administrasi Pengendalian dan Program Kegiatan Pembangunan	100%	100 %	385,659	100	59,650	100	73,159	100	80,474	70.70	49,909	98.92	84,502	100.93	63,041	90.18	197,452	90.18	51.20	Setdakab
5	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program Pengembangan Zona Integritas	Persentase SKPK yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WIBK) dan wilayah birokrasi bersih dan	0	12 %	619,140	0	-	3	85,000	3	170,000	0	3	100,558	-	65,257	1.00	165,815	8.33	26.78	Inspektorat	
34		Administrasi Pemerintahan				376,749,579		70,888,796		69,307,054		73,588,575		43,964,540		59,949,787		49,526,991		9,025,960	51.67	43.15	
1	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100 %	207,959,020	100	40,041,445.4	100	39,987,841.7	100	40,680,598.5	93.84	34,521,352	95.84	38,057,147	89.52	36,979,291	93.07	109,557,790	93.07	52.68	Semua OPD
2	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	70%	87 %	64,272,498	75	9,723,030.0	80	11,937,425.0	82	9,820,260.0	73.95	3,727,978	82.48	7,712,635.2	62.57	5,065,300.8	73.00	16,505,914	83.91	25.68	Semua OPD
3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam penggunaan atribut pegawai	100%	100 %	24,511,035	100	7,417,497.0	100	-	100	7,500,000.0	494,945	-	1,030,376.0	12.19	169,929.7	4.06	1,695,251	4.06	6.92	Semua OPD	
4	Meningkatnya kapasitas aparatur	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	n/a		5,417,182		666,000.0		542,500.0		500,000.0	90.00	32,265	67.13	3,217,941.2	-	-	52.38	3,250,206		60.00	Semua OPD
5		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Pengendalian Pengelolaan Keuangan	100%	100 %	148,648	100	25,000.0	100	30,000.0	100	30,600.0	20,600	33,219.4	100.00	12,000.0	33.33	65,819	33.33	44.28	Setdakab		
6	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	100%	100 %	14,933,207	100	2,955,050.0	100	2,906,185.5	100	2,964,309.0	2,606,186	2,646,333.2	87.50	2,187,912.7	29.17	7,440,431	29.17	49.82	Setdakab		
7	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Peringatan Hari-hari Besar	Persentase Pelaksanaan Hari-Hari Besar yang dilaksanakan per hari-hari besar yang wajib dilaksanakan	100%	100 %	14,294,515	100	2,017,150.0	100	2,978,780.4	100	3,038,356.0	188,912	76.67	2,316,361.4	20.00	150,319	32.22	2,655,592	32.22	18.58	Semua PD yang menyelenggarakan peringatan	
8	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Lakip perangkat daerah yang baik dan tepat waktu	23%	75 %	559,175	30	212,730.0	40	2,978,780.4	-	26.67	227,160.0	100.00	246,231.4	-	204,519.2	42.22	677,911	56.30	121.23	Setdakab	
9	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Penguatan Tata Laksana	Persentase peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah	100%	100 %	785,000	0	-	0	-	100	250,000.0	84,555.0	50.00	87,505.2	16.67	172,060	16.67		16.67	21.92	Setdakab	

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)		Target RPJMD Kab/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian Target RPJMD Kab/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp. (000)	2018		2019		2020		2018		2019		2020		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
10	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Penguatan Kelembagaan	Capaian peningkatan kinerja perangkat daerah	100%	100 %	775.000	0	-	0	-	100	250.000.0			-	-	91.36	154,421.3	30.45	154,421	30.45	19.93	Setdakab	
11	Meningkatnya pengalaman syariat islam	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Cakupan Pelayanan Jamaah Haji	100%	100 %	3,697,693	100	640,000.0	100	741,868.9	100	756,706.2	85.00	670,941.9	100	901,425.7	-	-	61.67	1,572,368	61.67	42.52	Setdakab	
12	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang - Undangan	100%	100 %	620,548	100	200,000.0	100	102,035.0	100	104,075.7			125.00	124,103.0	72.15	86,993.0	65.72	211,096	65.72	34.02	Setdakab	
13	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Pendataan Wilayah	100%	100 %	830,065	100	150,000.0	100	165,000.0	101	168,300.0			100.00	221,883.6	80.80	41,579.8	60.27	263,463	60.27	31.74	Setdakab	
14	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kualitas Pelayanan Publik	100%	100 %	1,737,646	100	459,000.0	100	310,230.0	102	316,434.6	100		100	741,014.8	102.00	454,913.2	100.67	1,195,928	100.67	68.82	Setdakab	
15	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Pemerintah Gampong	Persentase Pelayanan Masyarakat	100%	100 %	8,223,250	100	1,429,500.0	100	1,648,325.0	103	1,681,291.5	94.72		100.00	1,874,361.7	103.00	1,502,146.4	99.24	3,376,508	99.24	41.06	Setdakab	
16	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	Persentase kasus yang diselesaikan	100%	100 %	466,008	100	100,000.0	100	88,802.2	104	90,578.2		737,101		104.42	157,895.9	34.81	894,997	34.81	192.06	Setdakab		
17	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)	Persentase Masyarakat yang memahami HAM	100%	100 %	156,121	100	30,000.0	100	30,600.0	105	31,212.0			100.00	29,469.3	103.95	20,709.5	67.98	50,179	67.98	32.14	Setdakab	
18	Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	Program Pengembangan Bukota Kabupaten	Persentase Pemindahan SKPK	34%	65.62 %	1,073,781	40.62	200,000.0	46.87	212,000.0	53.12	216,240.0	34.37		34.37	18,000.0	53.12	41,135.0	40.62	59,135	61.90	5.51	Setdakab	
19	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Lakip perangkat daerah yang baik dan tepat waktu	23%	75 %	615,000		-	-	50	200,000.0					50.00	100,272.7	16.67	100,273	22.22	16.30	Setdakab		
20	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pembinaan Usaha-Usaha Peningkatan Produksi Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian Pengembangan Usaha Produksi Sumber Daya Alam	100%	100 %	900,000		-	-	100	250,000.0					66,125.0	100.00	90,100.0	33.33	156,225	33.33	17.36	Setdakab	
21	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Gampong	Tingkat peran kecamatan dalam pembangunan	n/a	100 %	21,131,791	100	3,856,261.5	100	3,948,830.0	100	4,027,806.6		162,623.0	87.09	66,125.0	72.17	1,808,327.5	53.09	2,037,076	53.09	9.64	Kec	
22	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Tingkat Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	100%	100 %	3,642,397	100	766,132.5	100	697,850.0	100	711,807.0		574,477.7	64.18	562,479.2	71.02	211,719.2	45.07	1,348,676	45.07	37.03	Kec	
35		Sekretariat DPRK				125,311,083		21,359,085		26,610,810		25,235,106		10,935,033		29,677,736		12,986,629		53,599,399		84.06	73.26	
1	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100 %	45,923,161	100	8,684,176.2	100	9,570,000.0	100	9,063,480.0	96.24	7,566,311	114.77	10,762,705	97.47	6,739,025	102.83	25,068,041	102.83	54.59	Sekr. DPRK	
2	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	70%	87 %	9,910,265	75	575,160.0	80	3,180,000	80	2,023,600	81.82	647,566	80	715,158	22.00	286,668	61.27	1,649,392	70.43	16.64	Sekr. DPRK	
3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam penggunaan atribut pegawai	100%	100 %	2,181,816	100	50,003.0	100	495,810	100	505,726	100	494,838	140	953,370	16.67	112,050	85.56	1,560,258	85.56	71.51	Sekr. DPRK	
4	Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan sosial budaya	100%	100 %	88,776	100	6,344.0	100	20,000	100	20,400	100	5,699	80	192,133			60.00	197,832	60.00	222.84	Sekr. DPRK	
5	Meningkatnya kualitas SDM	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	100 %	1,959,622	100	133,750.0	100	443,000	100	451,860	101.67	147,878	100	501,147	60.00	93,876	87.22	742,901	87.22	37.91	Sekr. DPRK	
6	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	100%	100 %	62,434,684	100	11,578,102.0	100	12,300,000	100	12,556,000	99.00	1,624,692	76.77	15,675,838	72.78	5,009,709	82.85	22,310,238	82.85	35.73	Sekr. DPRK	
7	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Ketersedianya media informasi publik	100%	100 %	2,812,758	100	331,549.6	100	602,000.0	100	614,040.0	98.50	448,050	100.00	877,385	100.00	745,302	99.50	2,070,737	99.50	73.62	Sekr. DPRK	
																Rata-rata capaian kinerja (%)				53,599,399	84.06	73.26		
																Predikat kinerja				T	S			
36		Pendidikan				49,360,110		9,712,000		9,589,860		9,823,790		7,993,204		18,585,858		10,563,736		37,142,798		41.96	95.55	
1	Meningkatnya kualitas SDM	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pelayanan MPD	100%	100 %	2,522,304	100	492,000.0	100	492,600.0	100	502,452.0		482,000	37.50	489,000	50.00	120,000	29.17	1,091,000	29.17	43.25	MPD	

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)		Target RPJMD Kab/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian Target RPJMD Kab/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp. (000)	2018		2019		2020		2018		2019		2020		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
2	Terlaksananya pendidikan yang berbasis islami dan kearifan lokal	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi Pendidikan	100%	100 %	1,460,527	100	274,000	100	287,880	100	293,637	46.67	2,250	39.65	109,630	100.00	-	62.11	111,880	62.11	7.66	MPD	
3	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Program Perencanaan Dan Pengawasan/Monitoring Dan Evaluasi	Tingkat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Pendidikan	100%	100 %	377,224	100	9,000	100	89,340	100	91,127	9,284	100	60,655	-	-	33.33	69,939	33.33	18.54	MPD		
4	Terlaksananya pendidikan yang berbasis islami dan kearifan lokal	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase dayah yang mandiri	0%	100 %	1,432,834	30	320,000	50	270,000		275,400			39.65	222,573	-	-	13.22	222,573	13.22	15.53	Dinas Pend. Dayah	
5	Terlaksananya pendidikan yang berbasis islami dan kearifan lokal	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	Persentase Dayah dalam kondisi baik	81%	100 %	4,138,934	100	1,000,000	100	761,580	100	776,812	8.00		46.53	9,784,534	100.00	5,366,290	51.51	15,150,824	51.51	366.06	Dinas Pend. Dayah	
6	Terlaksananya pendidikan yang berbasis islami dan kearifan lokal	Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariah Islam	Persentase dayah yang dibina	40%	80 %	39,128,286	45	7,617,000	50	7,688,460	55	7,784,363		7,499,670	115.56	7,419,466	55.00	5,077,446	56.85	19,996,582	71.06	51.11	Dinas Pend. Dayah	
7	Terlaksananya pendidikan yang berbasis islami dan kearifan lokal	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase mutu pendidik pada Dayah	97%	100 %	300,000		-		-		100,000.0			100.00	500,000			33.33	500,000	33.33	166.67	Dinas Pend. Dayah	
37	Kebudayaan					3,518,539		490,000		694,520		758,410		116,914		588,363		421,108		1,126,385		61.05	38.34	
1	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Pengembangan Hukum Adat	Persentase Gampong yang menerapkan administrasi peradilan adat	0.70%	40.90 %	307,296	1.2	60,000.0	5	60,000.0	10	61,200.0	1.2	116,914.0	4.69	59,618.7	10.00	12,650	5.30	189,183	12.95	61.56	MAA	
2	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Tersedianya pelayanan MAA	100%	100 %	2,014,841	100	430,000.0	100	384,520.0	100	392,210.4	100		100	382,953.0	100.00	407,935	100.00	790,888	100.00	39.25	MAA	
3	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Pengembangan dan Pelestarian Adat	Jumlah Keputusan, Seruan, Hibauan, Naskah hasil kajian adat istiadat yang diadopsi oleh pemerintah daerah dan masyarakat	2 Dokumen	6 Dok	166,000	2	-	2	-		50,000.0						-	-	0.00	0.00	MAA		
4	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Situs Sejarah kekayaan budaya dan adat istiadat yang dipelihara/dilestarikan	40%	85 %	1,030,402	50	-	60	250,000.0	65	255,000.0	51		63.00	145,791.0	65.00	523	59.66	146,314	70.19	14.20	MAA	
38	Keagamaan					101,921,393		20,054,002		16,371,401		17,207,979		10,385,728		16,394,805		37,109,688		63,890,221		56.56	62.06	
1	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Persentase Layanan Kehidupan Beragama	100%	100 %	17,799,388	100	7,499,346	100	2,676,261	100	238,680	100	2,414,214	89.83	6,625,916	100.00	2,146,023	96.61	11,186,153	96.61	62.85	Baitul Mal, MPU dan DSI	
2	Meningkatnya pengamalan syariat islam	Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariah Islam	Meningkatnya jumlah Muzakki			19,839,355		3,706,656		3,914,176		3,992,460	100	1,524,000	100	128,152	100.00	24,293,340	100.00	25,945,492	0.00	130.78	Baitul Mal	
3	Meningkatnya pengamalan syariat islam	Program Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan	Persentase sarana dan prasarana keagamaan kondisi baik		100 %	3,091,206		-	70	750,000		765,000			100	750,000	100.00	1,361,823	66.67	2,111,823	66.67	68.32	DSI	
4	Meningkatnya pengamalan syariat islam	Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Syariah Islam	Angka Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Syariah Islam	0.148%	0.099	18,570,757	0.138	4,220,000	0.129	3,436,653	12.1	3,560,839	0.045	3,334,182	0.053	3,320,594	0.047	4,265,910	0.05	10,920,686	48.82	58.81	DSI, Satpol PP dan WH	
5	Meningkatnya pengamalan syariat islam	Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariah Islam	Persentase lembaga yang dibina	40%	80 %	19,839,355	45	4,628,000	50	3,145,880	60	2,000,000	100	3,113,331.5		3,688,602	100.00	1,988,294	66.67	8,790,228	83.33	44.31	DSI	
6	Meningkatnya pengamalan syariat islam	Pembinaan Kehidupan Beragama	Persentase Pembinaan Kehidupan Beragama	60%	100 %	918,120		-		-	100	300,000.0			-	-	-	-	-	0.00	0.00			
7	Meningkatnya pengamalan syariat islam	Pengembangan, Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an	Persentase Masyarakat yang Memahami Al-Qur'an	0%	80 %	9,181,200		-		-	100	3,000,000.0			-	-	100.00	920,637.7	33.33	920,638	41.67	10.03	DSI	
8	Meningkatnya pengamalan syariat islam	Pembinaan Dakwah dan sy'ar Islam	Persentase Sy'ar	0%	100 %	2,448,320		-		-	100	800,000.0			-	-	-	-	-	0.00	0.00	DSI		

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)		Target RPJMD Kab/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun Ke-						Capaian Target RPJMD Kab/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun Ke-			Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp. (000)	2018		2019		2020		2018		2019		2020		K		Rp. (000)	K	Rp. (000)
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)					
9	Meningkatnya pengamalan syariat islam	Program Peningkatan Peran dan Sumberdaya Ulama dalam Pembangunan	Persentase peran ulama dalam kehidupan bermasyarakat	20%	80 %	9,824,326		-	40	2,363,431	20	2,445,314			41.14	1,802,577	20.00	2,133,660	20.38	3,936,237	25.48	40.07	MPU
10	Meningkatnya pengamalan syariat islam	Program Peningkatan Silaturahmi dan Koordinasi Antara Umara dan Ulama	Persentase peran ulama dalam penetapan kebijakan pemerintah	100%	100 %	409,366		-	100	85,000	100	105,686			100	78,965	-	-	33.33	78,965	33.33	19.29	MPU
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						2,479,415,354		484,632,781		699,682,143		490,015,384		524,386,261		868,355,071		735,705,269					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			64.97	127.02			
PREDIKAT KINERJA																		1,402,423,647	R	ST			

Tabel 2.148
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Uraian	Indikator Sasaran						
	Jumlah	Tercapai		Tidak Tercapai		Tidak Terukur	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
Misi I	10	5	50.00	3	30.00	2	20.00
Misi II	6	2	33.33	3	50.00	1	16.67
Misi III	3	0	-	1	33.33	2	66.67
Misi IV	8	3	37.50	2	25.00	3	37.50
Misi V	8	3	37.50	5	62.50	0	-
Jumlah	35	13	31.67	14	40.17	8	28.17

Tingkat capaian indikator sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Utara merupakan perbandingan antara realisasi dengan target yang direncanakan di RPJMD Kabupaten Aceh Utara 2017-2022. Berdasarkan data evaluasi diatas, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan terdapat 13 indikator yang tercapai, 14 indikator yang tidak tercapai dan 8 (tiga) indikator tidak tersedia data dari OPD penyedia data yang berwenang.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Misi I: Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA

Dalam rangka pencapaian misi 1 yang diukur dengan 10 indikator sasaran, dengan 5 indikator tercapai (50%), 3 indikator tidak tercapai (30%) dan 2 indikator tidak terukur, dapat dijelaskan :

Dalam rangka pencapaian misi 1 yang diukur dengan 10 indikator sasaran, dengan 5 indikator tercapai (50%), 3 indikator tidak tercapai (30%) dan 2 indikator tidak terukur, dapat dijelaskan :

1. Nilai AKIP Pemerintah Daerah

Hasil Penilaian AKIP Kabupaten Aceh Utara tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi memperoleh nilai 52,76 dengan predikat CC. Tahun 2020

perolehan nilai AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi masih CC. Dengan demikian target tahun 2020 tidak tercapai. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil yang sangat baik.

2. Level kapabilitas APIP

Level kapabilitas APIP Kabupaten Aceh Utara tahun 20 adalah 2+ dari target level 3, capaian ini disebabkan penjaminan kualitas 14 KPA (Key Process Area) dari 6 elemen 2 diantaranya tidak terpenuhi yaitu elemen Manajemen SDM dan Praktik profesional. Sedangkan tahun 2020 belum ada nilai level karena masih dalam penilaian oleh BPKP untuk laporan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas level 3. Dengan demikian target 2020 tidak tercapai. Analisis faktor yang mendukung keberhasilan/kegagalan dalam upaya pencapaian target kinerja ini yaitu meningkatnya pengelolaan sumber daya manusia dan praktek profesional, kurangnya tenaga pengawasan/pemeriksa/auditor menjadi faktor penghambat untuk pencapaian peningkatan indikator ini sampai yang lebih tinggi. Solusinya adalah meningkatkan jumlah dan kualitas APIP sesuai dengan kebutuhan untuk mengimbangi jumlah objek pengawasan dalam Kabupaten Aceh Utara.

3. Level maturitas SPIP

Capaian level maturitas SPIP tidak mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2018, dan apabila dibandingkan dengan tingkat capaian tahun sebelumnya tahun 2019 juga tidak mengalami kenaikan akan tetapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sudah mampu mempertahankan pada level berkembang "3" sesuai dengan target tahun 2020 adalah level 3. Analisis faktor yang mendukung keberhasilan/kegagalan dalam upaya pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh 5 (lima) unsur fokus penilaian yaitu lingkungan pengendalian, pengendalian resiko, unsur kegiatan pengendalian, unsur informasi dan komunikasi

dan unsur pemantauan. Solusi yang dilakukan adalah terus melakukan upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP.

4. Opini Audit BPK atas laporan keuangan

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Seluruh rangkaian proses pengelolaan (sosialisasi, rekonsiliasi, asistensi dan lain-lain) keuangan dan *asset* daerah yang dilaksanakan sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Merujuk pada serangkaian proses tersebut, Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah pada Tahun 2020 mendapat WTP (Wajar Tanpa pengecualian).

5. Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD Kesesuaian program RKPD terhadap program dalam RPJMD sebesar 98,95%. Keseluruhan Jumlah program dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara sebanyak 202 program, sementara jumlah program RPJM pada Tahun 2020 berjumlah 196 program dan jumlah program dalam RKPD tahun 2020 sebanyak 190 program dan ada 2 (dua) program dalam RKPD tahun 2020 yang berbeda dengan program RPJMD yaitu Program Pembinaan Lingkungan Sosial dan Program Pengembangan Nilai Budaya.

6. Nilai indeks kepuasan masyarakat

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, maka dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Penilaian kualitas pelayanan publik dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal satu tahun sekali. Adapun unsur yang dinilai meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan. Nilai indeks kepuasan masyarakat

Aceh Utara di tahun 2019 nilai IKM sebesar 86,80 dari 10 OPD yang disurvei, sementara nilai IKM tahun 2020 turun menjadi 70,07 dikarenakan kurangnya anggaran untuk melakukan survei. Dengan demikian target tahun 2020 tidak tercapai.

7. Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
Program pendidikan dan pelatihan dibagi dalam dua kategori yaitu Diklat Prajabatan dan Diklat PIM, terkait dengan diklat prajabatan bagi CPNSD sudah memenuhi dan mencapai target. Pada tahun 2020 tercapai target sebesar 66,69 % dari target 64% aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan.
8. Persentase aparatur gampong yang mengikuti diklat
Untuk tahun 2020, capaian persentase aparatur gampong yang mengikuti diklat tidak tersedia.
9. Persentase Majelis Taklim aktif
Tidak ada data untuk mengetahui sejauhmana capaian indikator kinerja sasaran dari tahun 2018, 2019 dan tahun 2020.
10. Angka pelanggaran terhadap syariat Islam
Angka pelanggaran terhadap pelaksanaan syariat islam dalam masyarakat Kabupaten Aceh Utara menurun dari target 0,121 terealisasi 0,047. Dengan demikian target tahun 2020 tercapai.

Misi II : Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam

Dalam rangka pencapaian misi 2 yang diukur dengan 6 indikator sasaran, dengan 2 indikator tercapai (33.33%), 3 indikator tidak tercapai (50%) dan 1 indikator tidak terukur (16.67%), dapat dijelaskan:

1. Angka Partisipasi Murni (APM)
Terdapat dua program yaitu Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Keduanya telah mencapai target pada tahun 2020 dengan realisasi capaian sebesar 92,20% dari target 88,50%.

2. Angka rata-rata lama sekolah
Realisasi angka rata-rata lama sekolah 9 tahun untuk tahun 2019 sebesar 8.46 dan tahun 2020 sebesar 8.63. Dengan demikian target selama 2 tahun target tidak tercapai.
3. Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi pendidikan
Pada tahun 2020 ditargetkan 10% sekolah telah menerapkan kurikulum terintegrasi, namun hasil target sasaran ini tidak tercapai realisasinya dikarenakan terjadi pandemi Covid-19, sehingga berdampak pada pelaksanaan sekolah dari yang sebelumnya tatap muka menjadi daring dan adanya pembatasan waktu sekolah bagi siswa.
4. Persentase Tenaga Pendidik yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)
Capaian realisasi untuk target indikator tahun 2019 tercapai, tetapi tidak sesuai dengan alat ukur yang ditetapkan dan data realisasinya tidak sesuai dengan data yang di publikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara online. Sementara untuk tahun 2020 tidak tersedia data.
5. Persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan
Capaian persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan sampai dengan tahun 2020 hanya 2,33% dari target 15%. Data keterwakilan perempuan ini hanya data yang dihitung dari keterwakilan perempuan di legislatif, dikarenakan tidak adanya data lengkap yang disampaikan oleh OPD terkait di bidang atau sektor lainnya.
6. Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak
Pada tahun 2020 capaian indikator sasaran jumlah kekerasan terhadap perempuan yaitu berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak telah tercapai dengan turun menjadi 30 kasus dari capaian tahun 2019 sebesar 118 kasus. Hal ini disebabkan oleh tumbuhnya kesadaran dalam masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Misi III : Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu

Dalam rangka pencapaian misi 3 yang diukur dengan 3 indikator sasaran, dengan 1 indikator tidak tercapai (33,33%) dan 2 indikator tidak terukur (66,67%), dapat dijelaskan :

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup yang realisasi pada 2019 mencapai 68,79 tahun dan 2020 68,80 tahun, meningkatnya capaian kinerja angka harapan hidup dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Meskipun ada peningkatan penambahan usia tetapi capaian angka harapan hidup ini tidak tercapai dari target yaitu 71,6 tahun.

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup turun dari tahun 2019 sebesar 209 menjadi 132 pada tahun 2020. Namun realisasi capaian ini belum mencapai target dimana seharusnya capaian target sebesar 93 pada tahun 2020.

3. Angka Kematian Bayi

Realisasi Angka kematian bayi pada tahun 2020 naik menjadi 5 jiwa per 1.000 kelahiran hidup dari target 4 jiwa/1000 kelahiran. Kenaikan ini disebabkan kurangnya kesadaran ibu hamil untuk memenuhi gizi sehingga bayi yang lahir memiliki kecenderungan berat lahir yang rendah. Dengan demikian target tahun 2020 tidak tercapai.

Misi IV : Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan

Dalam rangka pencapaian misi 4 yang diukur dengan 8 indikator sasaran, dengan 3 indikator tercapai (37,50%), 2 indikator tidak tercapai (25,00%) dan 3 indikator tidak terukur (37,50%), dapat dijelaskan :

1. Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Program prioritas yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini antara lain program pembangunan jalan dan jembatan dan program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan. Meskipun

realisasi di tahun 2020 tercapai sebesar 66,49 % dari target sebesar 62,6%, tetapi realisasi ini mengalami penurunan dari realisasi tahun lalu yaitu sebesar 77,73%. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid19 sehingga terjadi refocusing anggaran untuk penanganan covid.

2. Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI) baik yang teraliri air irigasi Realisasi capaian sasaran di tahun 2020 sebesar 32% lebih kecil dari target yaitu 48,5%, Hal ini dikarenakan masih adanya jaringan irigasi yang belum fungsional karena terkendala pembebasan lahan serta irigasi di bawah kewenangan pusat dan provinsi tidak tertangani maksimal. Dengan demikian realisasi luasan Daerah Irigasi baik yang teraliri air irigasi tidak tercapai.
3. Persentase akses air bersih
Persentase akses air bersih pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 69,78% dan terealisasi sebesar 86,25%. Rumah tangga yang telah menggunakan air bersih pada tahun 2020 adalah 103.217 dari 142.821 jumlah seluruh rumah tangga yang terbagi dua yaitu air bersih sistem perpipaan (PDAM) dan air bersih berbasis masyarakat seperti sumur gali dan air permukaan lainnya. Dengan demikian target capaian air bersih tercapai.
4. Persentase Rumah Tangga dengan Akses sanitasi
Realisasi Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi pada tahun 2020 tercapai sebesar 75,83% yaitu 95.657 rumah tangga berakses dengan sanitasi dengan 142.821 jumlah seluruh rumah tangga. Realisasi ini juga mengalami kenaikan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar yaitu sebesar 63,66%.
5. Persentase rumah layak huni
Target indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 89,47 persen dan terealisasi sebesar 87,17 persen yaitu dari 124.497 rumah layak huni dengan 142.821 jumlah rumah tinggal. Permasalahan yang ditemukan dalam penyediaan rumah layak huni ini adalah penerima manfaat tidak tepat sasaran dan juga adanya refocusing anggaran akibat pandemi covid19 sehingga target tidak tercapai.

6. Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara
Indikator sasaran ini adalah persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara, dengan target pada tahun 2019 sebesar 46,87 persen dan tahun 2020 sebesar 46,87 persen. Realisasi sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 45,45 persen dari target 53,12 persen. Dengan demikian target 2019 dan 2020 belum tercapai.
7. Tingkat Resiko Bencana
Indikator sasaran ini adalah Tingkat Resiko Bencana dengan target pada tahun 2019 dan tahun 2020 pada level tinggi dan diharapkan dapat mencapai level sedang pada akhir masa RPJMK. Hasil evaluasi didapatkan kesimpulan bahwa sasaran ini tidak dapat dinilai capaiannya karena belum ada pengukuran indeks resiko bencana pada tahun 2019 dan 2020.
8. Indeks kualitas Lingkungan Hidup (air, udara dan tutupan lahan)
Sasaran ini tidak dapat dinilai capaiannya karena belum ada pengukuran indeks lingkungan hidup pada tahun 2019 dan 2020 karena data tidak lengkap. Permasalahan yang dihadapi pada pencapaian sasaran ini adalah tidak tersedianya data tutupan hutan dan lahan dan neraca sumber daya alam.

Misi V : Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan

Dalam rangka pencapaian misi 5 yang diukur dengan 8 indikator sasaran, dengan 3 indikator tercapai (37,50%), 3 indikator tidak tercapai (62,50%), dapat dijelaskan :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,6%, ternyata realisasi mencapai 3,48%. kontribusi terbesar masih dari sektor pertanian, hanya saja mengalami penurunan kontribusi sekitar 1%. Sementara industri pengolahan masih sangat tergantung pada industri kimia (PT.PIM) yang tidak banyak menyentuh perekonomian rakyat. Sementara tahun 2020 target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7% dan terealisasi sebesar

0,97%. Dengan demikian target tahun 2019 dan 2020 tidak tercapai.

Secara umum Aceh Utara masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai target ekonomi makro, antara lain :

- a. Perekonomian Aceh Utara masih sangat bergantung pada sektor industri pengolahan yang di dominasi oleh industri kimia (PT. PIM), apabila PT. PIM tidak berproduksi maksimal maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan;
- b. Belum tumbuhnya industri agribisnis, sehingga sangat sulit untuk pengembangan industrialisasi hasil pertanian seperti padi, kelapa sawit, kakao dan karet;
- c. Rendahnya Nilai Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe Aceh Utara;
- d. PDRB pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga.

2. Gini Rasio

Tahun 2019 gini rasio tidak tercapai, target yang direncanakan sebesar 0.262 namun realisasi mencapai 0,301. Ketidaktercapaian tersebut berlanjut sampai dengan tahun 2020, hal ini tergambarkan dengan gini rasio yang direncanakan pada tahun 2020 sebesar 0,259 sedangkan realisasi sebesar 0,261. Namun gini rasio untuk Kabupaten Aceh Utara masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah.

3. Persentase tingkat kemiskinan

Tahun 2019 target penurunan kemiskinan ditetapkan sebesar 17,25% namun yang tercapai sebesar 18,27%. Untuk tahun 2020 penurunan tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 16,45% namun yang tercapai sebesar 17,39%. Dengan demikian target tahun 2019 dan 2020 tercapai.

Tingkat penduduk miskin yang masih tinggi dapat menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah daerah. Terlebih jika melihat tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara untuk beberapa tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Tantangan yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara terkait kemiskinan tidak hanya dilihat dari data kuantitatif, tetapi

harus dipandang sebagai permasalahan sosial yang menjerumuskan masyarakat ke dalam kesengsaraan, dan bahkan dapat menyebabkan masyarakat terlibat dalam kasus kriminalitas, karena permasalahan kemiskinan yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang tinggi.

4. Persentase tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 ditargetkan turun menjadi 10%, sedangkan capaian yang terealisasi sebesar 10,18%. Sedangkan untuk tahun 2020 penurunan pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 8,5%, namun realisasi yang tercapai 8,63%. Pengangguran merupakan persoalan serius di Kabupaten Aceh Utara yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sangat tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lain. Tingginya tingkat pengangguran tidak terlepas dari : (1) Masih rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan, sedangkan setiap tahunnya sangat banyak lulusan sekolah, baik dari sekolah menengah maupun dari perguruan tinggi; (2) Masih rendahnya investasi sebagai tempat penyediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan; (3) Belum optimalnya fungsi Balai Latihan Kerja (BLK).

5. Tingkat inflasi

Tahun 2019 ditargetkan tingkat inflasi sebesar 3,5% dan dapat direalisasikan capaiannya turun menjadi 1,22%. Tahun 2020 ditargetkan tingkat inflasi sebesar menjadi 3% dan dapat direalisasikan tingkat inflasi menjadi 2,87%. Hal ini dapat diartikan bahwa kenaikan harga barang pada tahun 2020 dan adanya pandemi covid 19 mempengaruhi inflasi Sehingga target tidak tercapai.

6. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Tahun 2019 pertumbuhan PDRB sektor tersebut ditargetkan 5,00% namun realisasi 3,71%. Dengan demikian target tahun 2019 tercapai dan tahun 2020 tidak ada data.

7. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
Tahun 2019 pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan ditargetkan mencapai 3,25% dan realisasinya mencapai 12,18%. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kegiatan operasi PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh Utara. Sementara untuk UMKM atau usaha lainnya berkontribusi sangat kecil terhadap PDRB. Dengan demikian target tahun 2019 dan 2020 tercapai.
8. Kontribusi PAD terhadap APBD Tahun 2019 dan 2020 ditargetkan sebesar 15-20% sementara realisasinya pada tahun 2019 adalah sebesar 10,62% dan sebesar 9,39% pada tahun 2020, sehingga target pada kedua tahun tersebut tidak tercapai. Hal ini dikarenakan belum optimalnya sumber pendapatan dari objek PAD.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut, dapat diukur dari tingkat kemampuan keuangan daerah melalui kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio PAD terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu mencermati kondisi kinerja keuangan, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan stimulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Oleh karenanya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu merupakan kondisi keuangan selama periode 5 (lima) tahun terakhir, yaitu kondisi keuangan sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 yang merupakan dasar pijakan dalam

penyusunan perencanaan keuangan selama 4 (empat) tahun ke depan sesuai ketentuan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yaitu mulai tahun 2023 hingga tahun 2026.

Kinerja keuangan masa lalu yang akan dibahas dalam bab ini mencakup: (i) Kinerja Pelaksanaan APBK, dan (ii) Neraca Daerah. Penjelasan selengkapnya kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Utara akan dibahas pada bagian berikut.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK

Kinerja Pelaksanaan APBK menjabarkan perkembangan Pendapatan Daerah, Proporsi Komponen Pendapatan, Pencapaian Kinerja Pendapatan, dan gambaran Realisasi Belanja Daerah, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung tahun 2018 hingga tahun 2020, serta perubahannya ke Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer untuk tahun 2021 dan tahun 2022 dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Aceh Utara menunjukkan peningkatan kinerja. Hal ini dapat dilihat dari penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Rincian kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Aceh Utara tahun 2016 hingga tahun 2021, selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.1
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 s/d 2021

Tahun	Target	Realisasi	Persen	Bertambah/Berkurang
PENDAPATAN DAERAH				
2016	2.650.852.808.450	2.414.901.313.533	91,10	(235.951.494.917)
2017	2.708.149.309.296	2.402.604.230.993	88,72	(305.545.078.303)
2018	2.339.452.690.669	2.252.292.515.268	96,27	(87.160.175.401)
2019	2.706.885.878.768	2.606.115.300.596	96,28	(100.770.578.172)
2020	2.600.667.213.721	2.582.874.013.125	99,32	(17.793.200.596)
2021	2.474.248.343.127	2.477.738.099.046	100,14	3.489.755.919,59
BELANJA DAERAH				
2016	2.714.978.060.953	2.434.730.081.880	89,68	(280.247.979.073)
2017	2.752.412.294.520	2.399.443.172.706	87,18	(352.969.121.814)
2018	2.350.178.302.334	2.250.884.305.483	95,78	(99.293.996.851)
2019	2.755.718.132.113	2.636.894.390.445	95,69	(118.823.741.668)
2020	2.629.818.997.178	2.518.460.034.046	95,77	(111.358.963.132)
2021	2.551.015.485.703	2.398.144.967.555,48	94,00	(152.909.950.567,52)
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan				
2016	67.505.172.557	67.471.673.624	99,95	(33.498.933)
2017	44.262.985.224	44.262.985.224	100,00	0
2018	10.725.611.665	47.424.043.561	442,16	36.698.431.896
2019	48.832.253.345	49.032.253.345	100,41	200.000.000
2020	33.151.783.457	18.353.163.497	55,36	(14.798.619.960)
2021	78.767.142.576	78.767.142.575	0,00	0
Pengeluaran Pembiayaan				
2016	3.379.920.054	3.379.920.053	100,00	0
2017	0	0	0,00	0
2018	0	0	0,00	0
2019	0	0	0,00	0
2020	4.000.000.000	4.000.000.000	100,00	0
2021	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	0

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Audited) Tahun 2016-2020, dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2021.

Secara umum komponen APBK Aceh Utara terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; serta (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang dikompokkan menjadi Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kinerja APBK Aceh Utara tahun 2016 hingga tahun 2021 menunjukkan tren realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi pembiayaan yang berfluktuatif. Realisasi komponen pendapatan dan belanja tertinggi pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2018 yang dipengaruhi oleh penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

A. Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, hal utama yang harus diperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program/kegiatan pembangunan daerah. Kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pengelompokan masing-masing jenis pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, zakat dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus (otsus), dana insentif daerah, dan alokasi dana desa. Sedangkan transfer antar daerah terdiri atas dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan pembangunan daerah. Pendapatan Daerah yang diperoleh dari komponen penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi (belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan) sesuai dengan potensi dan permasalahan daerah sebagai perwujudan desentralisasi untuk membangun kemandirian, sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran Dana Transfer Pemerintah Pusat.

Tabel 3.2 menunjukkan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020 sebesar 2.01 persen, dengan pertumbuhan positif dari realisasi pendapatan Dana Perimbangan sebesar 1,58 persen, dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 11,10 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif dan cenderung fluktuatif, sehingga perlu mengoptimalkan peningkatan komponen PAD kedepan.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2016 s/d Tahun 2020

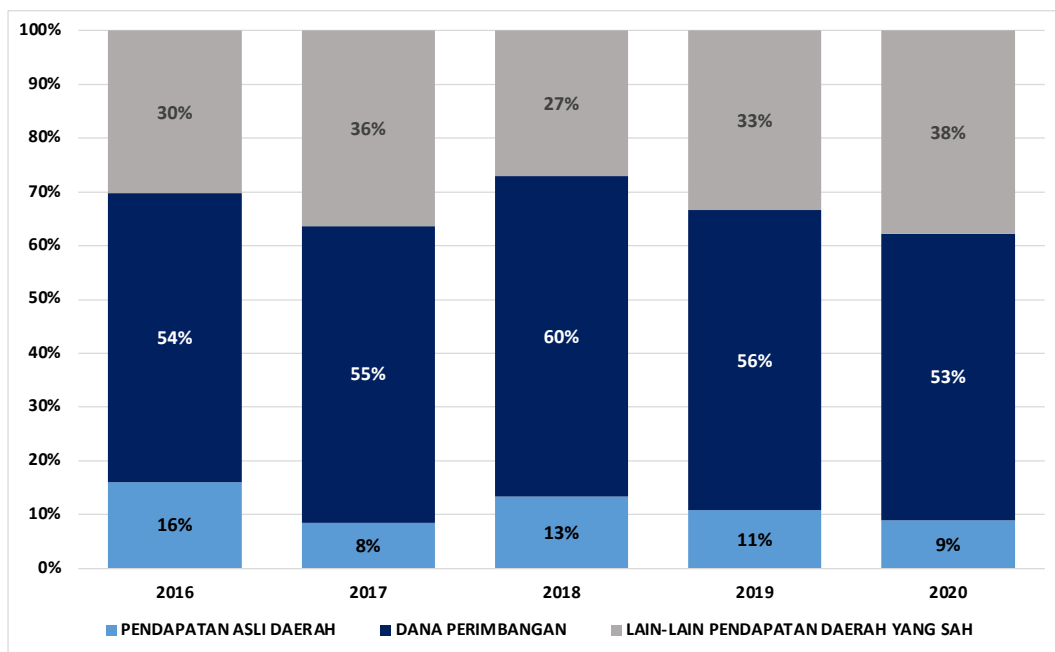
NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN %
		2016	2017	2018	2019	2020	
4.	PENDAPATAN	2.414.901.313.532,63	2.402.604.230.993,04	2.252.292.515.267,59	2.606.115.300.596,06	2.582.874.013.125,36	2,01
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	388.251.800.972,81	202.091.566.054,51	299.541.216.926,46	280.140.416.550,97	231.413.374.799,90	(5,90)
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	21.671.743.611,00	26.143.329.652,06	28.092.871.084,00	68.460.898.223,00	28.250.803.137,00	28,26
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.263.672.340,00	3.036.594.908,00	2.812.264.140,00	3.135.866.893,00	3.359.106.162,00	(7,77)
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.095.166.364,94	19.340.718.610,20	19.374.710.610,00	19.411.334.838,00	19.407.707.182,00	(0,85)
4.1.4.	Zakat	11.582.792.381,00	12.851.939.211,02	13.966.155.485,00	15.153.930.476,50	15.131.914.818,00	7,00
4.1.5.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	329.638.426.275,87	140.718.983.673,23	235.295.215.607,46	173.978.386.120,47	165.263.843.500,90	(5,29)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.296.652.358.755,00	1.328.605.892.782,00	1.342.423.755.687,00	1.454.869.953.193,00	1.373.870.214.618,00	1,58
4.2.1.	Dana Transfer Umum	1.021.636.687.163,00	1.054.773.673.279,00	973.457.457.031,00	1.010.750.160.993,00	998.601.062.806,00	(0,46)
4.2.1.1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	217.403.555.279,00	137.541.887.259,00	117.734.766.919,00	100.620.926.806,00	8,58
4.2.1.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.021.636.687.163,00	837.370.118.000,00	835.915.569.772,00	893.015.394.074,00	897.980.136.000,00	(2,71)
4.2.2.	Dana Transfer Khusus	275.015.671.592,00	273.832.219.503,00	368.966.298.656,00	444.119.792.200,00	375.269.151.812,00	9,79

NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA
		2023	2024	2025	2026	2027	PERTUMBUHAN
4.2.2.1.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	275.015.671.592,00	41.893.324.849,00	129.662.242.087,00	208.589.321.598,00	128.638.731.269,00	36,82
4.2.2.2.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	182.260.005.658,00	217.338.081.569,00	198.115.672.742,00	225.235.203.228,00	31,02
4.2.2.3.	Dana Alokasi Khusus Penugasan	-	49.678.888.996,00	21.965.975.000,00	37.414.797.860,00	21.395.217.315,00	17,93
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	729.997.153.804,82	871.906.772.156,53	610.327.542.654,13	871.104.930.852,09	977.590.423.707,46	11,10
4.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	66.739.760.000,00	104.668.080.000,00	39,21
4.3.1.1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	-	-	-	-	16.525.000.000,00	25,00
4.3.1.2.	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	66.739.760.000,00	88.143.080.000,00	33,02
4.3.2.	Dana Darurat	14.000.000.000,00	-	-	-	-	(25,00)
4.3.2.1.	Dana Darurat	14.000.000.000,00	-	-	-	-	(25,00)
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	53.508.440.421,82	50.399.959.891,53	48.092.959.654,13	53.540.408.747,09	55.720.833.568,00	1,25
4.3.3.1.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	53.508.440.421,82	50.399.959.891,53	48.092.959.654,13	53.540.408.747,09	55.720.833.568,00	1,25
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	532.964.060.000,00	642.814.441.000,00	562.234.583.000,00	750.904.762.105,00	779.724.960.412,00	11,37
4.3.4.1.	Dana Penyesuaian	532.964.060.000,00	642.814.441.000,00	562.234.583.000,00	627.307.230.000,00	654.744.358.736,00	6,01
4.3.4.2.	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	123.597.532.105,00	124.980.601.676,00	25,28

NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA
		2016	2017	2018	2019	2020	PERTUMBUHAN
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	129.524.653.383,00	178.692.371.265,00	-	120.000.000,00	35.000.000.000,00	7.276,16
4.3.5.1.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	129.524.653.383,00	178.692.371.265,00	-	120.000.000,00	35.000.000.000,00	7.276,16
4.3.6.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	(200.000.000,00)	2.476.549.727,46	(359,57)
4.3.6.1.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	(200.000.000,00)	2.476.549.727,46	(359,57)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Audited) Tahun 2016-2020.

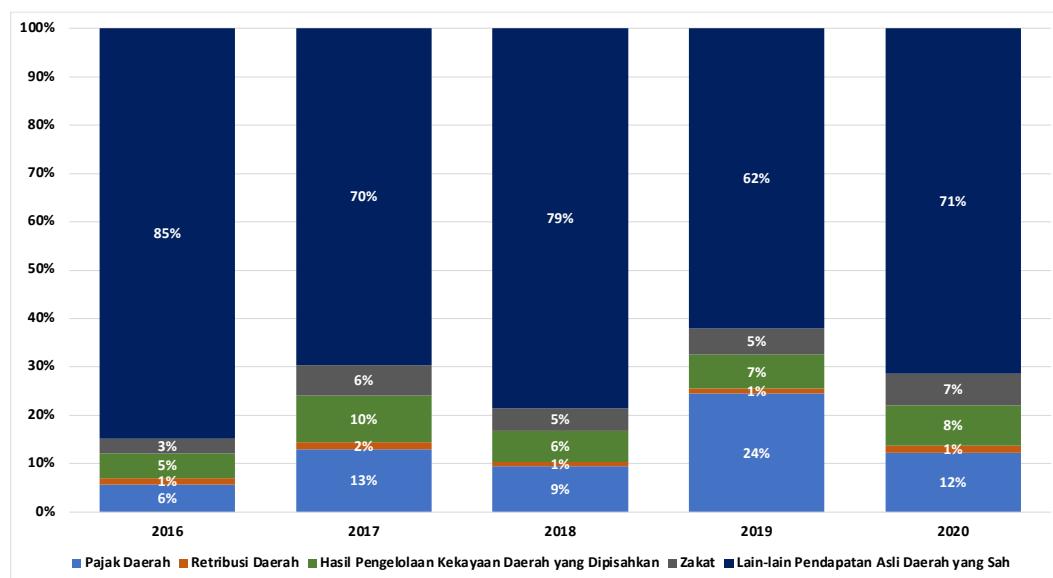
Jika dilihat dari tren persentase masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Gambar 3.1), dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata pertumbuhan negatif, namun Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan rata-rata pertumbuhan positif dengan tren realisasi yang fluktuatif. Hal tersebut menunjukkan ketergantungan dari transfer Pemerintah Pusat masih sangat tinggi, dan Kabupaten Aceh Utara harus meningkatkan kinerja keuangan (PAD) menjadi lebih baik.



Gambar 3.1. Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020.

Dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (Gambar 3.2), terlihat bahwa pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata pertumbuhan -5,29 persen dengan realisasi tahunan yang fluktuatif. Besarnya proporsi realisasi dipengaruhi oleh penerimaan dari BLUD dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) yang dimasukkan ke dalam Lain-lain PAD yang sah. Adapun Pendapatan Retribusi Daerah memberikan kontribusi paling rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah

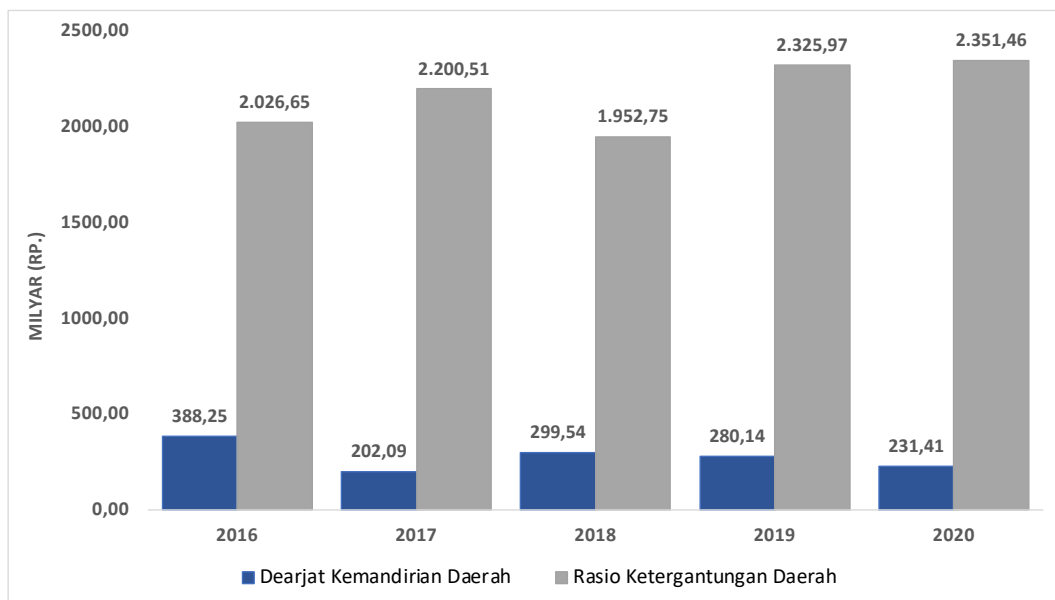
Kabupaten Aceh Utara, dengan rata-rata pertumbuhan terendah sebesar -7,77 persen.



Gambar 3.2. Proporsi Realisasi Komponen Pembentuk PAD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020.

Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Kondisi Kabupaten Aceh Utara berdasarkan (Gambar 3.3) menunjukkan persentase rata-rata derajat kemandirian daerah tahun 2016-2020 masih sangat rendah sebesar 12,13 persen, jika dibandingkan dengan rasio ketergantungan daerah sebesar 87,87 persen. Hal ini bermakna realisasi pendapatan daerah Kabupaten Aceh Utara untuk membiayai belanja daerah masih sangat bergantung kepada pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan transfer Pemerintah Provinsi dengan besaran yang fluktuatif setiap tahunnya.

Untuk itu perlu adanya terobosan-terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui intensifikasi pemungutan Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga sesuai dengan potensinya. Selanjutnya pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) harus mampu memberikan daya ungkit terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan prioritas kepada belanja modal yang lebih produktif. Khusus PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah karena berasal dari jasa giro dan sumbangan pihak ketiga maka tidak dapat diandalkan menjadi potensi PAD yang dapat digali. Hal lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan perekonomian dan pelayanan publik sehingga diharapkan pajak dan retribusi yang didapat akan meningkat.



Gambar 3.3. Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

No	Uraian	Pagu Tahun 2021	Proporsi (%)
		(Rp)	
4	PENDAPATAN	2.477.023.283.889,64	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	179.358.758.417,64	7,24
4.1.1	Pajak daerah	30.596.442.538,00	1,24
4.1.2	Retribusi daerah	3.209.275.553,00	0,13
4.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	16.719.025.056,00	0,67
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	128.834.015.270,64	5,20
4.2	Pendapatan Transfer	2.179.189.257.722,00	87,98
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.001.862.716.092,00	80,82
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.346.876.304.292,00	54,37
4.2.1.1.1	- DBH	120.778.461.271,00	4,88
4.2.1.1.2	- DAU	882.657.786.000,00	35,63
4.2.1.1.3	- DAK FISIK	131.058.615.439,00	5,29
	- DAK NON FISIK	212.381.441.582,00	8,57
4.2.1.2	Dana insentif Daerah (DID)	28.920.030.000,00	1,17
4.2.1.3	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	-	-
4.2.1.4	Dana Desa	626.066.381.800,00	25,27
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	177.326.541.630,00	7,16
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	49.131.517.927,00	1,98
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	128.195.023.703,00	5,18
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	118.475.267.750,00	4,78
4.3.1	Pendapatan Hibah	7.982.922.275,00	0,32
4.3.2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	110.492.345.475,00	4,46

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 (Unaudited)

Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 melampaui target terutama dari pendapatan transfer pusat dari komponen Dana Bagi Hasil (DBH). Dilihat dari sisi kemandirian keuangan daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung menurun hal ini diakibatkan Pandemi Covid-19 sehingga komponen pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah menurun drastis. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah menurun, pada tahun 2020 sebesar 9 persen turun menjadi 7,24 persen tahun 2021.

B. Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengelompokkan belanja daerah menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer yang merupakan perubahan terhadap nomenklatur Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan uraian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk Pemerintah Gampong, yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2016-2020 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan positif sebesar 1,25 persen. Realisasi belanja daerah tahun 2016 sebesar Rp. 2,43 Triliun, namun terjadi penurunan pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 2,39 Triliun dan Rp. 2,25 Triliun. Pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi Rp. 2,64 Triliun seiring meningkatnya transfer Dana Perimbangan, khususnya dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU), dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Namun realisasi belanja kembali turun pada tahun 2020 menjadi 2,52 Triliun, sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2016 s/d Tahun 2020

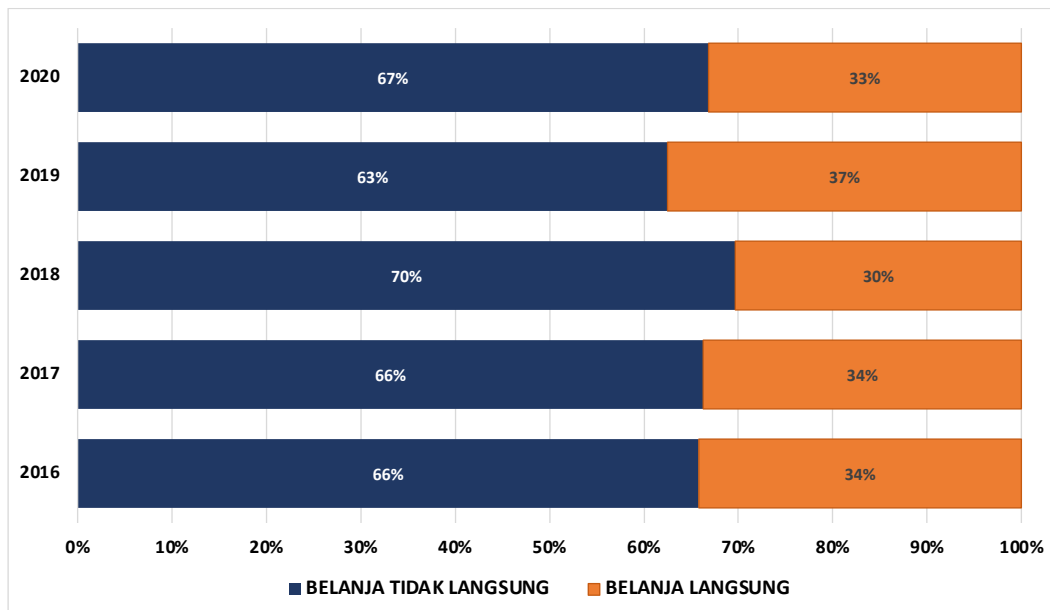
NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN %
		2016	2017	2018	2019	2020	
5.	BELANJA	2.434.730.081.879,63	2.399.443.172.706,14	2.250.884.305.483,06	2.636.894.390.444,98	2.518.460.034.046,00	1,25
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.602.954.268.026,00	1.590.409.782.310,00	1.568.711.338.731,50	1.648.318.805.637,00	1.682.715.309.026,00	1,25
5.1.1.	Belanja Pegawai	875.799.408.636,00	836.917.755.387,00	839.929.226.531,50	860.324.094.198,00	840.217.979.584,00	-1,00
5.1.2.	Belanja Subsidi	4.431.546.840,00	3.499.932.123,00	2.750.000.000,00	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-16,67
5.1.3.	Belanja Hibah	84.952.154.468,00	30.289.558.000,00	11.584.900.000,00	20.497.600.000,00	16.628.700.000,00	-17,01
5.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	17.696.740.000,00	23.172.847.500,00	10.486.083.500,00	11.489.764.000,00	20.530.911.460,00	16,11
5.1.5.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.396.370.182,00	-	-	4.460.696.079,00	3.440.436.170,00	-5,72
5.1.6.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	617.515.405.600,00	694.803.062.400,00	703.550.458.700,00	748.535.851.357,00	793.048.635.121,00	6,53
5.1.7.	Belanja Tidak Terduga	162.642.300,00	1.726.626.900,00	410.670.000,00	10.800.003,00	6.848.646.691,00	16025,35
5.2.	BELANJA LANGSUNG	831.775.813.853,63	809.033.390.396,14	682.172.966.751,56	988.575.584.807,98	835.744.725.020,00	2,76
5.2.1.	Belanja Pegawai	78.325.722.239,00	56.744.061.300,00	91.622.022.500,00	91.462.954.474,00	91.812.045.166,00	8,53
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	378.814.375.736,00	377.543.944.092,00	367.276.021.846,00	476.424.581.918,00	420.675.096.873,00	3,74
5.2.3.	Belanja Modal	374.635.715.878,63	374.745.385.004,14	223.274.922.405,56	420.688.048.415,98	323.257.582.981,00	6,22

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Audited) Tahun 2016-2020.

Proporsi terbesar realisasi Belanja Daerah pada kelompok Belanja Tidak Langsung (Gambar 3.4), dengan rata-rata realisasi sebesar 66 persen. Realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2018 sebesar 70 persen, dan terendah tahun 2019 sebesar 63 persen dengan proporsi tertinggi untuk Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

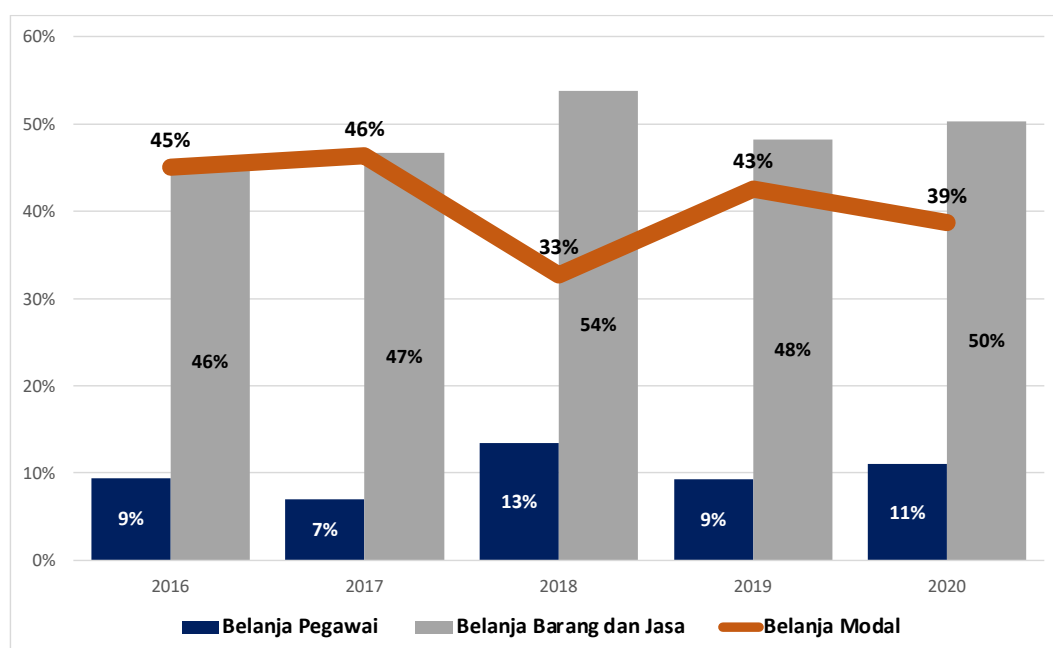
Rata-rata realisasi Belanja Langsung sebesar sebesar 34 persen, dengan realisasi tertinggi tahun 2019 sebesar 37 persen, dan terendah tahun 2018 sebesar 30 persen. Realisasi Belanja Langsung penggunaannya didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa (belanja barang dan jasa BLUD, belanja jasa pelayanan, belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja jasa kantor, dan belanja bahan/material). Realisasi Belanja Modal untuk setiap tahunnya cenderung untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan, Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah, Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah berusaha untuk selalu meningkatkan alokasi Belanja Langsung pada pos Belanja Modal setiap tahunnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun besarnya masih sekitar 13,94 persen, atau kurang dari 15 persen. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara yang mengalami perlambatan, namun masih positif pada tahun 2019-2020, ditambah bencana kesehatan nasional dan global COVID-19 pada awal tahun 2020 hingga saat ini.



Gambar 3.4. Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Total Belanja Tahun 2016-2020.

Proporsi perkembangan realisasi jenis belanja pada kelompok Belanja langsung didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa dengan rasio terhadap total belanja sebesar 16,48 persen atau 48,92 persen dari belanja langsung.



Gambar 3.5. Proporsi Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal terhadap Total Belanja Langsung Tahun 2016-2020.

Realisasi Belanja Modal cenderung menurun pada tahun 2018 hingga tahun 2020 dengan rasio sebesar 13,94 persen terhadap total belanja dan 41,06 persen dari belanja langsung. Proporsi Belanja

Pegawai cenderung berfluktuasi setiap tahunnya dengan realisasi tertinggi tahun 2017.

Pada tahun 2021, realisasi belanja Kabupaten Aceh Utara mengalami perubahan pada keempat kelompok belanja sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta pemutakhirannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp.)	Proporsi (%)
5	Belanja	2.398.114.967.555,48	
5.1	Belanja Operasi	1.374.128.631.037,00	57,30
5.1.1	Belanja Pegawai	849.078.526.689,00	35,41
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	433.046.110.519,00	18,06
5.1.3	Belanja Hibah	64.833.808.029,00	2,70
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	27.170.185.800,00	41,91
5.2	Belanja Modal	293.095.756.805,48	12,22
5.2.1	Belanja Modal Tanah	24.101.151.300,00	1,01
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.556.397.618,00	2,40
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.077.621.159,00	3,38
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	127.814.179.728,48	5,33
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.546.407.000,00	0,11
5.3	Belanja Tidak Terduga	291.000.000,00	0,01
	Belanja Tidak Terduga	291.000.000,00	0,01
5.4	Belanja Transfer	730.599.579.713,00	30,47
	Belanja Bagi Hasil	7.488.990.553,00	0,31
	Belanja Bantuan Keuangan	723.110.589.160,00	30,15

Sumber: Laporan Realisasi Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 (Unaudited).

Proporsi belanja paling tinggi ada pada belanja operasi sebesar 57 persen yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 35,62 persen, belanja barang dan jasa sebesar 17,65 persen, belanja hibah sebesar 2,72 persen dan belanja bantuan sosial sebesar 1,14 persen. Belanja modal cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya dengan proporsi hanya 12,22 Persen sedangkan belanja transfer proporsinya mencapai 30,65 persen.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Lalu, Pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara periode tahun 2016 hingga tahun 2020 disajikan dalam tabel 3.6 berikut:

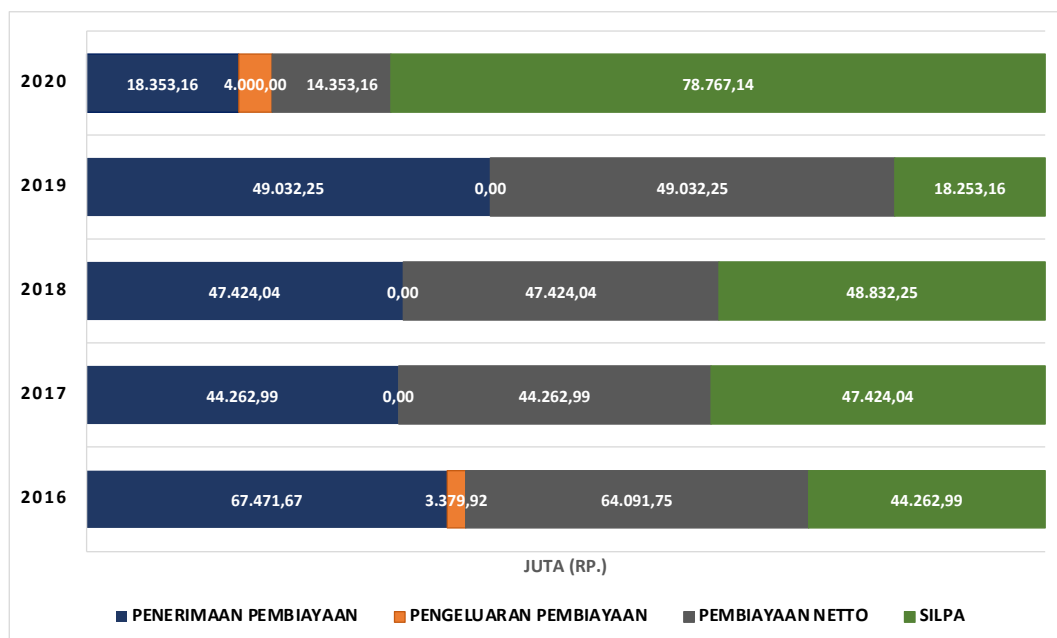
Tabel 3.6
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2016 s/d Tahun 2020

NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN %
		2016	2017	2018	2019	2020	
6.	PEMBIAYAAN	67.471.673.624,05	44.262.985.224,05	47.424.043.560,95	49.032.253.345,48	18.353.163.496,56	-21,61
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.471.673.624,05	44.262.985.224,05	47.424.043.560,95	49.032.253.345,48	18.353.163.496,56	-21,61
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66.872.156.510,05	44.262.985.224,05	47.424.043.510,95	48.832.253.345,48	18.253.163.496,56	-21,58
6.1.2.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	599.517.114,00	-	-	200.000.000,00	100.000.000,00	-12,50
6.1.3.	Koreksi SiLPA	-	-	50,00	-	-	0,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.379.920.053,00	-	-	-	4.000.000.000,00	0,00
6.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	4.000.000.000,00	25,00
6.2.2.	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	3.379.920.053,00	-	-	-	-	-25,00
	PEMBIAYAAN NETTO	64.091.753.571,05	44.262.985.224,05	47.424.043.560,95	49.032.253.345,48	14.353.163.496,56	-22,78
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	44.262.985.224,05	47.424.043.510,95	48.832.253.345,48	18.253.163.496,56	78.767.142.575,92	69,75

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Audited) Tahun 2016-2020.

Tabel diatas menggambarkan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara menunjukkan rata-rata pertumbuhan negative sebesar -21,61 persen dari sumber Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), hal ini bermakna pencapaian realisasi keuangan menjadi lebih baik, khususnya pada tahun 2019. Sedangkan dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara hanya diperuntukkan untuk pembayaran utang pihak ketiga sebesar 3,38 Milyar pada tahun 2016, dan realisasi penyertaan modal pada tahun 2020 sebesar 4 Milyar.

Gambar 3.6 dibawah menunjukkan perbandingan besaran setiap tahunnya realisasi dari komponen pembiayaan daerah. Besaran realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) merupakan selisih dari Pembiayaan Netto terhadap Surplus/Defisit anggaran dengan SILPA tertinggi tahun 2020 sebesar 78,77 Milyar.



Gambar 3.6. Besaran Realisasi Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Netto, dan SILPA Tahun 2016-2020.

Tabel 3.7
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp.)
6	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	81.895.596.403,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	79.895.596.403,00

Sumber: Laporan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 (Unaudited).

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan dalam menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan selama periode tahun 2016-2021 diketahui defisit terjadi pada tahun anggaran 2016 s/d 2020, Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya antara jumlah belanja dengan jumlah pendapatan daerah Kabupaten Aceh Utara. Defisit anggaran pada tahun tersebut menunjukkan adanya peningkatan belanja pembangunan di Daerah namun belum diikuti dengan peningkatan sumber pendapatan, untuk tahun 2021 terjadi surplus hal ini dikarenakan banyak belanja yang tidak dapat direalisasikan akibat terjadinya pandemic Covid-19.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3.1.1.1 Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

3.1.1.2 Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah.

3.1.1.3 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi adalah selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang.

Selama periode tahun 2016-2020 Aset Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menunjukkan pertumbuhan yang positif yakni sebesar 2,56 persen. Rata-rata pertumbuhan Aset Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dari komponen Aset Lancar tumbuh sebesar 11,5 persen, Aset Tetap tumbuh sebesar 2,09 persen, dan pertumbuhan tertinggi dari komponen Aset Lainnya sebesar 103,12 persen. Sementara untuk kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selama periode tahun yang sama menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar -12,93 persen, yang berdampak baik terhadap sumber daya ekonomi daerah. Begitu pula dengan ekuitas dana tumbuh sebesar 3,32 persen.

Sedangkan data kondisi Aset tahun 2021 belum tersedia. Pada tahun 2020 Kabupaten Aceh Utara juga melakukan pengalihan aset kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Lebih rinci mengenai kondisi perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selama periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

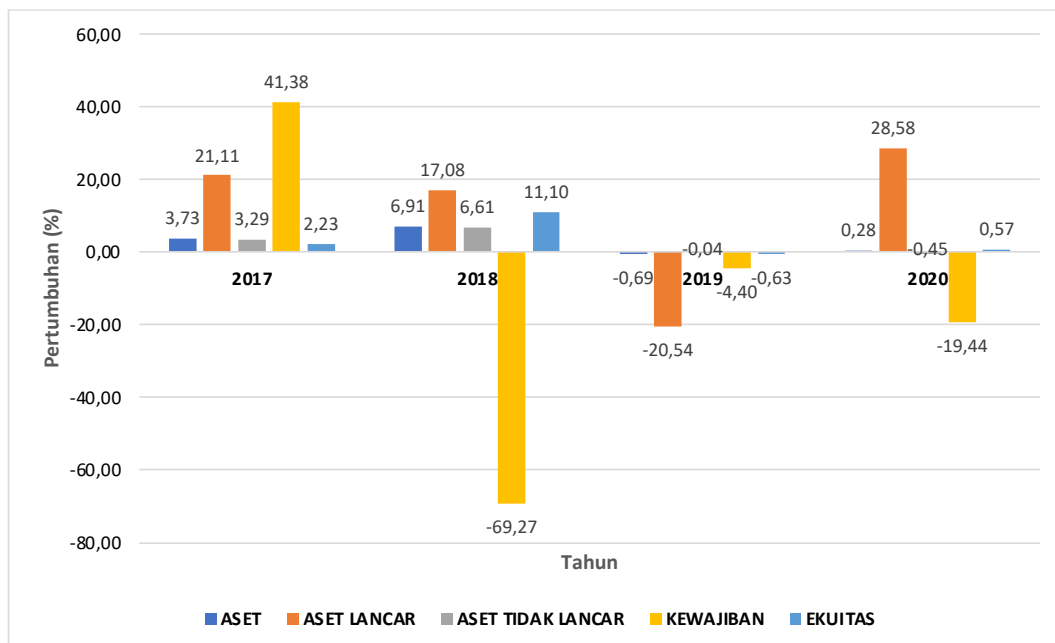
Tabel 3.8
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2016 s/d Tahun 2020

NO	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR	104.645.271.576,42	126.735.373.583,05	148.376.164.368,25	117.895.918.141,12	151.596.329.601,32	11,56
1.1.1	Kas	44.913.329.436,05	47.854.189.315,95	50.103.781.105,00	18.325.356.547,56	78.796.655.603,92	69,45
1.1.2	Piutang	46.328.674.355,54	47.739.529.575,00	62.801.703.322,32	71.643.234.450,86	40.669.977.947,00	1,36
1.1.3	Persediaan	13.403.267.784,83	31.141.654.692,10	35.470.679.940,93	27.927.327.142,70	32.129.696.050,40	35,01
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	190.932.105.436,70	185.753.815.894,63	177.386.689.621,03	176.233.619.595,11	181.256.969.939,59	-1,25
1.2.1	Investasi Non Permanen	12.972.283.883,00	11.243.931.476,90	11.243.931.476,90	10.486.379.719,90	9.868.963.418,90	-6,49
1.2.2	Investasi Permanen	177.959.821.553,70	174.509.884.417,73	166.142.758.144,13	165.747.239.875,21	1.245.248.376,56	-26,56
1.2.3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-	170.142.758.144,13	25,00
1.3	ASET TETAP	3.901.741.852.187,00	3.829.144.073.019,21	4.105.069.601.027,37	4.265.219.368.176,52	4.228.013.071.539,58	2,09
1.3.1	Tanah	1.590.570.255.185,33	1.522.609.260.024,33	1.702.708.333.672,33	1.671.622.725.582,33	1.674.882.734.582,33	1,48
1.3.2	Peralatan dan mesin	496.711.059.295,63	531.104.833.594,10	553.456.358.350,66	628.884.884.617,61	717.904.749.738,61	9,73
1.3.3	Gedung dan bangunan	1.194.723.766.976,15	1.180.884.270.658,00	1.249.598.135.076,00	1.363.408.345.083,00	1.617.315.284.317,46	8,10
1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	2.182.121.111.897,09	2.407.902.229.502,69	2.467.445.065.481,69	2.504.688.541.315,89	2.574.192.482.265,89	4,28
1.3.5	Aset tetap lainnya	30.776.559.590,00	28.557.215.437,00	35.038.738.749,00	37.159.144.549,00	46.467.114.095,00	11,65
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	125.046.305.451,37	153.792.226.602,94	152.711.593.768,94	166.380.907.172,94	19.970.763.766,89	-14,19
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-1.718.207.206.208,57	-1.995.705.962.799,85	-2.055.888.624.071,25	-2.106.925.180.144,25	-2.422.720.057.226,60	9,16
1.4	ASET LAINNYA	47.030.090.621,11	261.016.607.412,73	276.097.111.125,00	115.280.662.753,00	126.746.408.964,00	103,12
1.4.1	Tagihan penjualan angsuran	142.497.093,00	366.740.347,00	281.655.809,00	166.412.681,00	41.418.792,00	4,53
1.4.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	3.342.828.000,00	3.342.828.000,00	3.342.828.000,00	3.343.328.000,00	3.343.328.000,00	0,00
1.4.3	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-	-	0,00

NO	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTIMBRIHAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.4.4	Aset tak berwujud	140.100.000,00	243.637.500,00	97.282.500,00	1.077.893.200,00	1.579.141.100,00	267,08
1.4.5	Aset lain-lain	43.404.665.528,11	257.063.401.565,73	272.375.344.816,00	110.693.028.872,00	121.782.521.072,00	112,22
	JUMLAH ASET DAERAH	4.244.349.319.821,23	4.402.649.869.909,62	4.706.929.566.141,65	4.674.629.568.665,75	4.687.612.780.044,49	2,56
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	162.219.235.252,10	229.346.841.409,79	42.847.459.294,33	62.095.350.391,95	47.415.171.294,00	-4,66
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	-	-	-	-	-	0,00
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	98.450.777,00	5.835.068.008,69	3.711.743.412,33	23.025.442.957,95	1.755.086.873,00	1554,62
2.1.4	Utang bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.5	Utang belanja	140.288.172.952,00	209.186.491.731,10	38.746.826.726,00	32.204.778.323,00	35.259.031.979,00	-9,94
2.1.6	Utang transfer	-	-	-	-	-	0,00
2.1.7	Utang jangka pendek lainnya	21.832.611.523,10	14.325.281.670,00	388.889.156,00	6.865.129.111,00	10.401.052.442,00	396,29
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	27.638.422.322,00	5.287.417.850,00	6.865.695.282,00	12,25
2.2.1	Utang dalam negeri	-	-	-	-	-	0,00
2.2.2	Utang jangka panjang lainnya	-	-	27.638.422.322,00	5.287.417.850,00	6.865.695.282,00	12,25
	JUMLAH KEWAJIBAN	162.219.235.252,10	229.346.841.409,79	70.485.881.616,33	67.382.768.241,95	54.280.866.576,00	-12,93
3	EKUITAS DANA						
3.1	EKUITAS DANA	4.082.130.084.569,44	4.173.303.028.499,83	4.636.443.684.525,32	4.607.246.800.423,80	4.633.331.913.468,49	3,32
	JUMLAH EKUITAS	4.082.130.084.569,44	4.173.303.028.499,83	4.636.443.684.525,32	4.607.246.800.423,80	4.633.331.913.468,49	3,32
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.244.349.319.821,54	4.402.649.869.909,62	4.706.929.566.141,65	4.674.629.568.665,75	4.687.612.780.044,49	2,56

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020, (audited).

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi neraca Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sangat berfluktuasi selama tahun 2016-2020. Realisasi aset, dan ekuitas pada tahun 2017 menggambarkan pertumbuhan yang positif, terutama komponen aset lancar sebesar 21,11 persen, namun seiring dengan tumbuhnya realisasi kewajiban sebesar 41,38 persen. Realisasi kewajiban turun menjadi -69,27 persen pada tahun 2018 dan seterusnya hingga tahun 2020 sebesar -19,44 yang cenderung dipengaruhi oleh menurunnya utang belanja dari pos kewajiban jangka pendek. Kondisi ini berdampak baik bagi daerah karena berkurangnya aliran keluar sumber daya ekonomi daerah. Dari komponen aset dan ekuitas menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2018 dan 2020, meskipun mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019.



Gambar 3.7. Pertumbuhan Realisasi Neraca Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2020.

Berdasarkan Tabel diatas, maka dapat dilakukan analisis kemampuan daerah melalui perhitungan rasio likuidasi dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuidasi yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio).

Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang quick ratio adalah jumlah aset lancar

dikurangi dengan persediaan dibagi dengan jumlah kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Balance Sheet Ratio Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2016 s/d 2020

Balance Sheet Ratio		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Liquidity Ratio	Current Ratio	0,65	0,55	3,46	1,90	3,20
	Quick Ratio	0,56	0,42	2,64	1,45	2,52
Solvability Ratio	Debt to Assets Ratio	0,04	0,05	0,01	0,01	0,01
	Debt to Equity Ratio	0,04	0,05	0,02	0,01	0,01

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020 (audited), diolah.

A. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio Lancar (Current Ratio) menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek (hutang lancar), semakin besar perbandingan antar aktiva lancar dengan hutang lancar, maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Apabila rasio lancar (current ratio) 1 : 1 atau setara 100% berarti semua aktiva dapat menutupi hutang. Rasio lancar berada dibawah 1, maka pemerintah daerah akan mengalami kendala dalam menutupi kewajiban jangka pendek (hutang). Dalam sebuah likuidasi neraca keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2016-2020 dapat dijelaskan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik melunasi kewajiban (hutang). Dalam tahun 2016-2017 Kabupaten Aceh Utara mengalami kesulitan untuk membayar semua kewajiban.

B. Quick Ratio (Quick Ratio)

Rasio ini merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan

karena persediaan memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan dibandingkan dengan aset lain. Quick aset ini terdiri dari piutang dan surat-surat berharga yang dapat direalisasikan menjadi uang dalam relatif pendek. Jadi intinya semakin besar rasio ini semakin cepat pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban hutang jangka pendek. Dalam sebuah neraca keuangan daerah dapat dilihat bahwa keuangan daerah Aceh Utara dalam 3 tahun terakhir sangat baik dan cepat dalam membayar kewajiban yang rata-rata berada di atas angka 1. Sedangkan pada tahun 2016-2017 rasio berada di bawah angka 1, yaitu sebesar 0.56 dan 0.42, yang artinya pada tahun tersebut kondisi keuangan Aceh Utara sangat lemah dalam membayar kewajiban.

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.

1. Rasio Kewajiban Terhadap Aset

Rasio kewajiban terhadap aset merupakan rasio untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh hutang. Rasio ini sangat penting guna melihat solvabilitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka panjang. Semakin tinggi rasio maka jumlah aset yang dibiayai oleh hutang semakin besar dan semakin rendah rasio jumlah aset yang dibiayai oleh hutang semakin kecil. Rasio ini secara langsung membandingkan antara total hutang (kewajiban) dengan total aset dalam melakukan pendanaan pemerintah daerah, sehingga dapat menunjukkan kemampuan modal dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin kecil rasio kewajiban terhadap aset maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi semua hutang (kewajiban) terhadap kreditor, namun demikian jika nilai rasio cukup besar atau berada di atas 1 maka kemampuan pemerintah daerah mulai sulit untuk melunasi hutang kepada kreditor. Berdasarkan Tabel 3.4 tentang rasio kewajiban terhadap aset menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2020 kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara sangat baik

untuk melunasi hutang dengan aset modal yang dimiliki, karena semua berada pada kisaran angka dibawah 1.

2. Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas

Rasio ini secara langsung membandingkan antara total hutang (kewajiban) dengan total ekuitas. Rasio ini menggambarkan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang dan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Berdasarkan tabel tentang rasio kewajiban terhadap ekuitas, menunjukkan bahwa kemampuan ekuitas (modal) atau kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sangat baik untuk melunasi semua hutang terhadap kreditor. Hal tersebut dapat dilihat pada tersebut, bahwa dari tahun 2016-2020 semua berada pada kisaran angka di bawah 1. Jika semakin mendekati pada posisi angka nol, maka rasio tersebut semakin baik.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2016 hingga tahun 2020 diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran dengan tujuan untuk melihat proporsi belanja yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan aparatur, dan Analisis Pembiayaan yang diuraikan ke dalam analisis Sumber Penutup Defisit Riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam APBK adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan

desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten mempunyai fungsi berikut :

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Analisis proporsi anggaran bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang kebijakan pembelanjaan dan pembiayaan pengeluaran yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan di masa mendatang sebagaimana tercantum pada pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	%
2016	954.125.130.875,00	2.438.110.001.932,63	39,13%
2017	893.661.816.687,00	2.399.443.172.706,14	37,24%
2018	931.551.249.031,50	2.250.884.305.483,06	41,39%
2019	951.787.048.672,00	2.636.894.390.444,98	36,10%
2020	932.030.024.750,00	2.522.460.034.046,00	36,95%
Rata-rata Pertumbuhan (%)	-0,50	1,26	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Audited) Tahun 2016-2020(audited),diolah

Proporsi belanja tertinggi untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terdapat pada tahun 2018 mencapai 59.49 persen. Sedangkan proporsi belanja terendah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terjadi pada tahun 2019 mencapai 50.39 persen.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Aceh Utara terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan Penerimaan piutang daerah. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, Pembentukan dana cadangan dan Penyertaan modal/investasi. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Untuk melihat besarnya defisit riil anggaran dan penutup defisit riil anggaran maka dilakukan analisis pembiayaan daerah. Kabupaten Aceh Utara mengalami surplus dari tahun 2016-2020 seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.11 dan tabel 3.12.

Tabel 3.11
Surplus dan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN %
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	PENDAPATAN	2.414.901.313.532,63	2.402.604.230.993,04	2.252.292.515.267,59	2.606.115.300.596,06	2.582.874.013.125,36	2,01
Dikurangi Realisasi:							
B	BELANJA	2.434.730.081.879,63	2.399.443.172.706,14	2.250.884.305.483,06	2.636.894.390.444,98	2.518.460.034.046,00	1,25
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	25,00
2	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	3.379.920.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.379.920.053,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00
D	Surplus/Defisit Riil	-23.208.688.400,00	3.161.058.286,90	1.408.209.784,53	-30.779.089.848,92	60.413.979.079,36	-6,88

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Audited) Tahun 2016-2019, dan 2020 (Unaudited), diolah.

Tabel 3.12
Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2016 s/d 2020

NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN %
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	PENDAPATAN	2.414.901.313.532,63	2.402.604.230.993,04	2.252.292.515.267,59	2.606.115.300.596,06	2.582.874.013.125,36	2,01
Dikurangi Realisasi:							
B	BELANJA	2.434.730.081.879,63	2.399.443.172.706,14	2.250.884.305.483,06	2.636.894.390.444,98	2.518.460.034.046,00	1,25
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	25,00
2	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	3.379.920.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.379.920.053,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00
D	Surplus/Defisit Riil	-23.208.688.400,00	3.161.058.286,90	1.408.209.784,53	-30.779.089.848,92	60.413.979.079,36	-6,88
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:							
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66.872.156.510,05	44.262.985.224,05	47.424.043.510,95	48.832.253.345,48	18.253.163.496,56	-21,58
4	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	599.517.114,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-12,50
5	Koreksi SiLPA	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
E	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.471.673.624,05	44.262.985.224,05	47.424.043.560,95	49.032.253.345,48	18.353.163.496,56	-21,61
D-E	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	44.262.985.224,05	47.424.043.510,95	48.832.253.345,48	18.253.163.496,56	78.767.142.575,92	69,75

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Audited) Tahun 2016-2019, dan 2020 (Unaudited), diolah.

Kemudian tabel 3.9 dari hasil analisis sumber penutup defisit riil menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menutup defisit riil. Kondisi ini menunjukkan keuangan daerah mampu membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung.

B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi yang diberikan, seperti yang diperlihatkan pada tabel 3.13.

Tabel 3.13
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2016 s/d 2020

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	66.872.156.510,05	100,00	44.262.985.224,05	100,00	47.424.043.510,95	100,00	48.832.253.345,48	100,00	18.253.163.496,56	100,00
2	Pelampauan penerimaan PAD										
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan										
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah										
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya										
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan										
7	Kegiatan lanjutan										

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Audited) Tahun 2016-2020.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini akan terwujud apabila pemerintahan daerah memiliki kemampuan yang handal dan profesional dalam menghasilkan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang menjadi sumber ekonomi daerah.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah kepada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar utama yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan pembangunan daerah adalah kondisi ketidaktercapaian antara realisasi dan rencana yang dibuat. Permasalahan pembangunan daerah disebabkan oleh kekuatan yang belum optimal, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak bisa dimanfaatkan dan ancaman yang tidak bisa diantisipasi.

Kabupaten Aceh Utara terus berupaya membangun daerahnya ke arah yang lebih baik, namun demikian tidak terlepas dihadapkan pada permasalahan yang kompleks. Salah satu persoalan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara adalah tingginya ketergantungan terhadap pendanaan pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pembangunan. Rasio antara Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah Pusat (Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) terhadap total pendapatan daerah disparitasnya cukup lebar. Sehingga Pemerintah Daerah berusaha untuk mendayagunakan keuangan daerah secara optimal dan efisien guna menjalankan prioritas pembangunan.

Kondisi ini juga dihadapkan pada upaya pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembangunan kawasan pemerintahan baru di Lhoksukon sebagai pusat ibukota Kabupaten Aceh Utara. Sehingga berbagai upaya difokuskan pada percepatan pembangunan pusat pemerintahan tersebut. Permasalahan dan tantangan baik yang bersifat sektoral, regional maupun global ini terus dikelola dan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menghasilkan berbagai kebijakan dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan yang berkaitan dengan Aspek Geografi dan Demografi dapat ditelaah dari karakteristik lokasi dan wilayah, wilayah rawan bencana dan demografi.

A. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah rawan bencana dengan Indeks Risiko Bencana mencapai 175,20 (Tahun 2020) yang menjadikan Kabupaten Aceh Utara sebagai Daerah Risiko Tinggi. Kabupaten Aceh Utara memiliki potensi bencana; banjir, banjir bandang, puting beliung, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, cuaca ekstrim, dan tanah longsor.

B. Demografi

Masyarakat Kabupaten Aceh Utara memiliki Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio) yang tinggi, yaitu 56,16 persen. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 56 jiwa penduduk tidak produktif. Kondisi ini menyebabkan pendapatan penduduk produktif terserap untuk memenuhi kebutuhan pokok.

4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan yang mencakup pada aspek kesejahteraan masyarakat meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan Aceh, Laju Inflasi, Pendapatan per kapita, Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

A. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2017-2021 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan berada di bawah Aceh dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan pada tahun 2017 tumbuh sebesar 2,3 persen, provinsi sebesar 4,61 persen dan nasional 5,17 persen sedangkan tahun 2021 Kabupaten Aceh Utara mengalami kontraksi sebesar -0,55 persen, provinsi tumbuh sebesar 2,82 persen dan nasional tumbuh sebesar 3,51 persen.

B. Angka Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2017-2020 cenderung menurun dari 19,78 persen pada tahun 2017 turun menjadi 17,02 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 17,43 persen. Persentase kemiskinan Aceh Utara masih berada di atas Aceh dan Nasional. Indeks Kedalaman (*Poverty Gap Index-P1*) dan Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara cenderung menurun. Pada tahun 2017 (P1) Kabupaten Aceh Utara sebesar 3.22, lebih tinggi dari Aceh dan Nasional dan terus menurun pada tahun 2021 menjadi 2.17 lebih rendah dari Aceh dan lebih tinggi dari nasional. Sedangkan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Utara menurun dari 0,83 pada tahun 2017 menjadi 0,43 pada tahun 2021.

C. Inflasi

Tingkat inflasi Kabupaten Aceh Utara disetarakan dengan Lhokseumawe selama 5 tahun terakhir mengalami kondisi fluktuatif, dimana pada tahun 2018 realisasi inflasi sebesar 2,05 persen turun menjadi 1,2 persen pada tahun 2019 dan pada 2020 inflasi tersebut cenderung naik kembali menjadi 3,55 persen dan pada tahun 2021 turun menjadi 1,87 persen. Untuk inflasi Aceh juga fluktuatif,

dimana pada tahun 2018 sebesar 1,84 persen turun menjadi 1,69 persen pada tahun 2019 meningkat kembali sebesar 3,59 persen dan tahun 2021 turun menjadi 2,24. Sedangkan inflasi secara nasional terus mengalami ke arah yang lebih baik dan menurun selama 5 tahun terakhir dari 3,13 persen tahun 2018 menjadi 1,68 persen tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 1,87 persen pada tahun 2021.

D. Indeks Gini

Nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relative tinggi (merata). Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan nol dan satu. Perkembangang ini rasio Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir berfluktuasi diantara 0,20-0,35 atau berada dalam kategori pemerataan relative tinggi (merata). Gini rasio Kabupaten Aceh Utara masih lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Aceh. Perkembangang ini rasio Kabupaten Aceh Utara

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator kesejahteraan sosial masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indexs (HDI). Angka IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesehatan (angka usia harapan hidup), aspek pendidikan (angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah), dan aspek ekonomi (rata-rata pengeluaran ril per kapita dalam paritas daya beli masyarakat). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara merupakan indicator tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran keadaan penduduk menurut usia hidup, pengetahuan, dan hidup layak. Nilai IPM Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2017 IPM

Kabupaten Aceh Utara sebesar 67,67 meningkat mencapai 69,46 pada tahun 2021, namun IPM Aceh Utara masih jauh di bawah IPM Aceh dan Nasional.

F. Pendapatan Regional Perkapita

PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk sesuatu daerah. Untuk membandingkan kesejahteraan antar daerah yang sering dipakai adalah PDRB per kapita ADHB sedangkan untuk membandingkan antar waktu, PDRB perkapita ADHK lebih tepat. Perkembangan PDRB per kapita ADHK Aceh Utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung meningkat, dari Rp 25,60 juta pada tahun 2016 menjadi Rp.27,21 juta pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 turun 1,20 persen menjadi Rp. 27,13 juta.

4.1.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Angka rata-rata lama sekolah baru mencapai 8,64 tahun, lebih rendah dari rata-rata lama sekolah provinsi yang mencapai 9,37 tahun dan harapan lama sekolah 14,71 tahun dan provinsi sebesar 14,36 tahun;
- b. Masih rendahnya angka partisipasi kasar PAUD sebesar 38,79 persen dibandingkan Kabupaten Bireun yang mencapai 62,64 persen;
- c. Rendahnya kualifikasi guru jenjang SMP/MTs sebesar 94,46 persen dibandingkan Provinsi yang hampir mencapai 100 persen;
- d. Masih rendahnya dayah yang bertipe A dengan jumlah 4 dayah dari 197.

2. Kesehatan

- a. Angka harapan hidup 69,81 tahun masih di bawah provinsi sebesar 69,96 tahun dan nasional 71,57 tahun;
- b. Pandemi Covid-19 masih belum berakhir, pada tahun 2021 jumlah kasus sebanyak 776;
- c. Tingginya angka stunting sebesar 38,80 persen sementara provinsi 33,20;
- d. Masih adanya kasus kematian bayi sebanyak 5/1000 kelahiran;
- e. Masih adanya Angka kematian ibu sebanyak 228/100.000 kelahiran sementara target RPJMK tahun 2021 sebanyak 120/100.000;
- f. Rasio dokter dibawah standar nasional, saat ini 1:5700 idealnya 1:2500.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik masih sebesar 42 persen sedangkan target RPJMK tahun 2021 sebesar 67,1%;
- b. Kondisi irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik hanya sebesar 40 persen sedangkan target RPJMK tahun 2021 sebesar 53,8%;
- c. Kabupaten Aceh Utara memiliki 118 Daerah Irigasi kewenangan kabupaten sebanyak 70 persen merupakan irigasi semi teknis dan 30 persen irigasi sederhana. Kondisi irigasi semi teknis dan sederhana sebanyak 40 persen dalam kondisi baik dan 60 persen dalam kondisi kurang baik;
- d. Belum selesainya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Utara (RTRW) 2012 -2032;
- e. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung dan SDM untuk pengendalian implementasi RTRW;
- f. Belum tersedianya RDTR yang terintegrasi dengan system *Online single submission* (OSS) *Risk Base analysis* (RBA).

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Masih adanya rumah tidak layak huni sebesar 11,63 persen;
 - b. Rumah tangga berakses sanitasi layak masih sebesar 67,09 persen, masih jauh dari target SPM nasional sebesar 100 persen;
 - c. Rumah tangga menggunakan air bersih sebesar 73,04 persen, masih jauh dari target SPM nasional sebesar 100 persen.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - a. Belum optimalnya penanggulangan bencana kebakaran mengingat sarana dan prasarana yang dimiliki hanya 7 unit damkar dan 3 pos pemadam, sulit untuk mencapai tingkat waktu tanggap (*respon time*) dengan luas wilayah 3296,86 km²;
 - b. Kurangnya kesiapsiagaan dan Pendidikan mitigasi bencana (bencanaalam, non-alam dan wabah).

6. Sosial
 - a. Masih tingginya angka kemiskinan sebesar 17,43 persen, kemiskinan Aceh sebesar 15,33 dan Nasional sebesar 9,71 persen;
 - b. Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih rendah 0,75 persen.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
 - a. Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi sebesar 8,31 persen, Aceh sebesar 6,30 persen dan nasional sebesar 6,49 persen;
 - b. Rendahnya persentase pencari kerja dengan penempatan tenaga kerja;

- c. Terbatasnya jumlah pelatih atau instruktur bidang keahlian pada Balai Latihan Kerja (BLK) hanya 3 orang dengan jumlah bidang keahlian sebanyak 12 orang.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Tingginya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 91 kasus;
 - b. Belum adanya rumah aman untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. Indeks pemberdayaan gender 52 lebih rendah dari Aceh 63,47 dan Nasional 75,57;
 - d. Keterwakilan perempuan dalam parlemen hanya 1 orang dari 45 anggota DPRK.
 3. Pangan
 - a. Masih terdapat 50 gampong dengan kategori daerah rawan pangan untuk prioritas 1 dan 2 dari 160 gampong rawan pangan sampai prioritas 3;
 - b. Masih kurangnya lumbung pangan di gampong hanya ada 6 gampong dari 160 gampong rawan pangan sampai prioritas 3.
 4. Pertanian
Belum tersedia tenaga ahli pengukuran dan pemetaan berbasis GIS.
 5. Lingkungan Hidup
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Aceh Utara sebesar 74,32 (kategori baik) masih dibawah capaian provinsi sebesar 75,54. Indeks Kualitas Air sebesar 52,5 masih di bawah capaian provinsi sebesar 57,14, Indeks Kualitas Udara 87,34 masih di bawah capaian provinsi sebesar 89,63 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 87,754 yang sudah melebihi capaian provinsi;
 - b. Masih banyaknya gampong yang terkena dampak banjir dengan jumlah yang berfluktuasi sebagai berikut: tahun 2017 sebanyak 397 gampong, tahun 2018 sebanyak 238

gampong, tahun 2019 sebanyak 50 gampong, tahun 2020 sebanyak 396 gampong dan tahun 2021 sebanyak 74 gampong;

- c. Belum tersedianya perencanaan terpadu untuk pengendalian banjir;
- d. Rendahnya kinerja pengelolaan persampahan pada tahun 2017 sebesar 16,68 persen, meningkat tidak signifikan menjadi 17,09 persen pada tahun 2021.

6. Administrasi Kependudukan

- a. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki akte kelahiran tahun 2021 sebesar 115.540 penduduk (19,00%) atau yang setara dengan 50 persen dari jumlah penduduk provinsi yang belum memiliki akte kelahiran 328.553 penduduk(6,17%);
- b. Masih rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 22,61 persen tahun 2021.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Masih kurangnya gampong dengankategoriberkembang, maju dan mandiriyaitusebanyak 196 gampong (23,12%)Acehsebesar 63,85 persen;
- b. Penyertaan modal usaha pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum mempedomani rencana bisnis, dapat dilihat dari penyertaan modal sebesar 133 milyar hanya menghasikan laba sebesar 2,66 Milyar dan hanya 89 BUMG menyumbang kontribusi terhadap pendapatan hasil gampong.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. *Total Fertility Rate* (TFR) Aceh Utara masih tinggi yaitu 2,61 poin dibandingkan dengan Nasional sebesar 2,24 poin;
- b. Kesadaran masyarakat terkait kualitas dan ketahanan keluarga masih kurang.

9. Perhubungan
Minimnya ketersediaan transportasi umum untuk mendukung mobilitas siswa dan ASN dengan cakupan layanan sebesar 77,27 persen dengan bus layanan 17 unit dari kebutuhan sebanyak 22 unit.
10. Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum seluruhnya OPD yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menunjang tupoksi, sebanyak 19 OPD masih memerlukan SPBE;
 - b. Belum fungsionalnya Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Berbasis Elektronik (SP4N LAPOR!) karena belum tersedianya SDM pengelola secara definitif.
11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a. Masih banyak Lembaga koperasi tidak aktif sebesar 66,46 persen atau 673 koperasi di banding koperasi yang aktif sebesar 447 unit atau 33,54 persen;
 - b. Rendahnya daya saing produk UKM dari 2.324 unit kerja, hanya 46 IKM yang sudah terfasilitasi sertifikasi.
12. Penanaman Modal
 - a. Masih rendahnya realisasi investasi PMDN yaitu sebesar Rp.474.609.756.808,- dibandingkan Kabupaten Aceh Timur yang mencapai sebesar Rp. 962.613.905.764,-;
 - b. Belum tersedianya data *based* potensi investasi yang tersinergi dengan Tata Ruang kabupaten Aceh Utara dengan system *Online single submission* (OSS) *Risk Base analysis* (RBA).
13. Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan yang berjumlah 34 organisasi;
 - b. Rendahnya jumlah atlet dan pemuda berprestasi, sebanyak 26 atlet yang berprestasi dari 107 atlet yang dibina, dan 30 pemuda yang berprestasi dari total 15.612 pemuda.

14. Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pemeliharaan cagar budaya dan pengelolaan keragaman budaya yang menjadi objek wisata religi dan budaya sebanyak 102 unit;
- b. Belum adanya kontribusi hasil pengelolaan museum Malikussaleh untuk PAD.

15. Perpustakaan

- a. Minat baca masyarakat masih rendah dengan indikasi jumlah pengunjung perpustakaan hanya 3.796 orang dari 11.870 orang (5%) dari jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani sebanyak 593.511 orang;
- b. Jumlah koleksi buku masih kurang hanya 66.342 buku dari kebutuhan sebanyak 75.000 buku.

16. Kearsipan

- a. Masih kurangnya arsiparis untuk pengelolaan kearsipan, yang sudah tersedia 2 orang dari kebutuhan sejumlah 4 orang;
- b. Belum tersedianya depo arsip untuk 60 SKPK.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Produksi ikan perikanan tangkap dan budidaya sebesar 27.878,95ton dibandingkan dengan target daerah sebesar 29.718 ton pada tahun 2021;
- b. PPI Kuala Cangkoy dan Blang Me yang menjadi Kewenangan Provinsi belum diserahkan;
- c. Masih rendahnya konsumsi ikan oleh masyarakat 47,05 per Kg/Kapita/Tahun dibandingkan dengan konsumsi nasional sebesar 50,49 Kg/Kapita/Tahun.

2. Pariwisata

- a. Rendahnya kunjungan wisatawan ke objek wisata situs sejarah Kerajaan Samudera Pasee sebagai destinasi wisata unggulan tahun 2021 hanya sejumlah 6217;
- b. Pertumbuhan pelaku usaha dan kemitraan di sektor pariwisata masih rendah.

3. Pertanian

- a. Kontribusi sektor pertanian hanya sebesar 32,3 persendibandingkan target daerah sebesar 36,78 persen dan pertumbuhannya 0,15 persendari target 4,5 persen;
- b. Masih rendahnya produktifitas komoditi pangan utama (padi 5,77 ton/ha, jagung 5,15 ton/ha dan kedelai 1,53 ton/ha);
- c. Masih rendahnya produksi dan produktifitas komoditi hasil perkebunan, (komoditi sawit 319.181 ton dengan areal sebesar 18.185 ha , kakao 3.816 Ton dengan areal 9.403 ha dan pinang 4.291 ton dengan areal sebesar 12.358);
- d. Masih rendahnya tingkat konsumsi daging masyarakat akibat tingginya harga di pasaran;
- e. Banyaknya kelompok tani yang harus dibina mencapai 5.024 Poktan dan belum ada kelompok tani kategori Mandiri.

4. Perdagangan

- a. Nilai Ekspor melalui pelabuhan Krueng Geukuh fluktuatif pada tahun 2021 sebesar USD 53.234.163 lebih rendah dari nilai ekspor tahun 2017 sebesar USD 308.115.425;
- b. Rendahnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk mengakses modal usaha.

5. Perindustrian

- a. Pertumbuhan sektor industry pengolahan masih sangat rendah sebesar 0,51 persen dibandingkan dengan Provinsi Aceh sebesar 2,53 persen dan Nasional sebesar 19,25 persen;
- b. Minimnya pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah hanya terdapat 4 (empat) kecamatan dari 27 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.

6. Transmigrasi

- a. Jumlah Unit Pengelola Transmigrasi (UPT) sebanyak 20 UPT namun sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi masih sangat kurang, seperti akses jalan, jembatan, fasilitas umum lainnya;
- b. Masih ditemukannya kasus tumpang tindih kepemilikan lahan di Kawasan transmigrasi.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Indeks kepuasan masyarakat 70,07 lebih rendah dibandingkan dengan target daerah sebesar 77,05.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Belum semua tahapan perencanaan dan penganggaran tepat waktu;
- b. Belum berfungsinya Forum satu data Indonesia Kabupaten Aceh Utara untuk mendukung penyediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan update;
- c. Kurangnya SDM perencana secara kuantitas dan kualitas di perangkat daerah;
- d. Indeks Daya Saing Daerah masih rendah sebesar 2,05 point;
- e. Belum diterapkannya aplikasi e-kinerja bagi pegawai;
- f. Belum semua OPD menerapkan absensi elektronik;
- g. Kontribusi pendapatan asli daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 9,7 persen masih dibawah 10 persen terhadap total APBK. Rendahnya PAD disebabkan oleh 1). Rendahnya Pendapatan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB); 2). Rendahnya Retribusi Daerah berupa sewa kios pelataran di pasar, retribusi parkir di pasar;
- h. Indeks profesionalitas ASN nilai 48,6 (kategori sangat rendah).

F. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih dalam kategori “CC” dengan nilai 55,76 dibandingkan target daerah dengan kategori B;
- b. SDM auditor secara kuantitas masih terbatas, sampai tahun 2021 jumlah auditor 24 orang dari kebutuhan 53 auditor.

G. Urusan Pemerintahan Umum

- a. Masih terjadi konflik sosial terhadap batas wilayah antar gampong, kecamatan, dan antar kabupaten;
- b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik pada pemilu dan pilkada sebesar 76,74 persen.

H. Unsur Kekhususan

- a. Masih adanya potensi aliran-aliran yang tidak sesuai dengan syariat;
- b. Masih terdapatnya kasus pelanggaran pelaksanaan syariat islam sebanyak 23 Kasus;
- c. Potensi zakat yang terkumpul pada Baitul Mal masih rendah sebesar 14 Milyar dari potensi 35 Milyar;
- d. Persentase Penyaluran ZIS belum mencapai 100 persen;
- e. Belum semua Baitul Mal Gampong memiliki legalitas dari 852 baitul mal gampong, hanya sebanyak 100 baitul mal gampong yang memiliki legalitas.

4.2. ISU STRATEGIS

Berdasarkan uraian permasalahan dan merujuk pada isu dan kebijakan pembangunan nasional dan Pemerintah Aceh, dan kondisi Kabupaten Aceh Utara yang memerlukan penanganan segera. Isu strategis merupakan perbedaan (gap) antara kondisi saat ini (existing) dengan harapan yang tergambar tujuan pembangunan dalam masa transisi selama 4 tahun.

Isu Strategis Internasional meliputi:

1. Globalisasi ekonomi dan bisnis digital;
2. Transformasi Teknologi berbasis Artificial Intelligence;
3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
4. Sumber energi alternatif;

5. Perubahan iklim global; dan
6. Munculnya pusat dan kekuatan ekonomi baru di Samudera Hindia.

Isu Strategis Nasional meliputi:

1. Peningkatan produktivitas dan skala ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung kedaulatan pangan;
2. Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan per kapita;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan (jalan tol dan pembangkit listrik);
4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera; dan
5. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Isu strategis Provinsi Aceh sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Demokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur;
3. Penguatan adat istiadat dan peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
4. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia;
5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. Optimalisasi Kemandirian Pangan;
11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;

13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana;
14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan dan memperhatikan isu strategis nasional dan Pemerintah Aceh, maka rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi; Tata Kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi difokuskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, peningkatkan profesionalisme ASN, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing; Peningkatan kualitas Pendidikan melalui peningkatan kualitas guru dan distribusi guru secara merata, meningkatkan pendidikan non formal, Pendidikan dayah, kepemudaan dan olah raga. Peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan difokuskan untuk peningkatan ketahanan Kesehatan dalam menghadapi pandemi, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan stunting. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi dan pencegahan penyakit, meningkatkan kampanye budaya hidup bersih.
3. Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam dan Keistimewaan Aceh; Penguatan pelaksanaan syariat islam dan keistimewaan Aceh difokuskan pada peningkatan nilai Keislaman dalam Pembangunan Akhlak Masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan mengoptimalkan potensi zakat. Demikian pula untuk upaya menurunkan angka pelanggaran syariat islam perlu menjadi perhatian.

4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Kawasan;
Peningkatan infrastruktur dasar difokuskan untuk meningkatkan ketersediaan air bersih, air minum, dan perbaikan sanitasi dan drainase pemukiman. Demikian juga dengan ketersediaan air irigasi untuk mencapai IP 200. Selanjutnya peningkatan penyelenggaraan jalan untuk mendukung peningkatan kondisi jalan dalam keadaan mantap dan kelancaran transportasi.
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
Peningkatan kualitas sumber daya alam, lingkungan hidup dan tata ruang difokuskan untuk pengendalian banjir, penyediaan dokumen perencanaan lingkungan dan tata ruang (RPPLH dan revisi RTRW), pengendalian dan pemantauan kualitas lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana serta pengelolaan persampahan yang dapat mendukung peningkatan dana insentif daerah. Pengelolaan DAS di Kabupaten Aceh Utara difokuskan untuk mendukung pengelolaan terpadu DAS Krueng Jambo Aye, DAS Krueng Keureuto dan DAS Krueng Peusangan yang melintasi Kabupaten Aceh Utara berdasarkan pola ruang Kabupaten Aceh Utara serta prinsip pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam mengatasi banjir di Kabupaten Aceh Utara yang berdampak pada Sosial Ekonomi Masyarakat.
6. Penanggulangan Kemiskinan;
Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi beban hidup masyarakat. Pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan melalui peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Beban hidup masyarakat dapat dikurangi dengan melakukan operasi pasar, pembangunan rumah layak huni untuk kaum dhuafa, beasiswa anak kurang mampu serta penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS). Selanjutnya penanggulangan kemiskinan difokuskan untuk

meningkatkan sinergitas dalam menggunakan Basis Data Terpadu (BDT), akses air minum dan sanitasi, peningkatan kesempatan dan ketrampilan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi untuk mengurangi tingkat pengangguran termasuk kemitraan dengan perusahaan.

7. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
Pencegahan dan penanggulangan bencana seperti bencana banjir, puting beliung, kebakaran, longsor dan pandemic difokuskan pada upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Upaya mitigasi bencana dapat dilakukan dengan cara struktural dan non struktural. Upaya adaptasi bencana difokuskan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Pangan;
Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan difokuskan pada pembinaan dan pendampingan kelompok tani/nelayan secara berkesinambungan, peningkatan produktivitas hasil pertanian dan perikanan, serta pengembangan industri, koperasi dan UMKM berbasis pertanian dan perikanan. Untuk meningkatkan kemandirian pangan melalui peningkatan ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan terutama pada daerah yang termasuk gampong rawan pangan. Peningkatan ketersediaan pangan dapat dilakukan melalui perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi dan pemanfaatan lahan sawah tadah hujan serta pengendalian pemanfaatan lahan yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Demikian juga dengan kontribusi sektor pertambangan dan penggalan serta industry pengolahan perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
9. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah;
Kapabilitas fiskal daerah dapat ditingkatkan melalui penyediaan regulasi pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan kontribusi PAD dalam APBD dan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah.

10. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak;
Penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak difokuskan untuk pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang rentan mengalami tindak kekerasan, penanganan kasus dan pendampingan korban tindak kekerasan, mendorong peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan pemenuhan hak anak.
11. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Kualitas Demokrasi;
Penanganan terhadap pelanggaran Qanun dan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) perlu ditingkatkan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban umum yang aman dan kondusif. Selanjutnya Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024 perlu persiapan pendanaan yang mencukupi dan fasilitas yang memadai. Di samping itu perlu mendorong pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang adil, transparan dan bebas politik uang dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan Pembangunan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Sesuai dengan arahan presiden dan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Kabupaten Aceh Utara menetapkan tujuan, sasaran, indikator serta target tahun 2023-2026

5.2. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah memiliki indikator yang dapat diukur untuk pencapaian tujuan pembangunan

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi akhir
					2023	2024	2025	2026	
1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,53	55	55	60,2	60,4	60,4
	1.1.	Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	1.2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Huruf	CC	B	B	B	BB	BB
	1.3.	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	70,07	80	85	90	95
	1.4.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Persen	72,89	75	80	85	90	90
	1.5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi	Persen	76,74	-	81,5	-	-	81,5
		Persentase keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif	Persen	2,2	-	6,6	-	-	6,6
	1.6.	Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks	48,61	61	65	71	75	75
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan syariat dan budaya islami		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,46	70	71	71,5	72	72

Tujuan	Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi akhir
						2023	2024	2025	2026	
	2.1.	Meningkatnya akses Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,63	8,93	9,30	9,65	10,05	10,05
			Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,70	14,75	14,78	14,81	14,90	14,90
	2.2.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	Persen	34,50	50	65	100	100	100
	2.3.	Meningkatnya kualitas Pendidikan dayah	Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah	Persen	53,81	56,35	58,83	61,42	63,96	63,96
	2.4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68,80	68,85	68,90	68,95	69	69
			Prevalensi stunting	Persen	38,8	32	28	24	20	20
	2.5.	Meningkatnya Pemahaman Syariat Islam	Penurunan kasus pelanggaran Syari'at Islam per tahun	Persen	20	20	20	20	20	20
	2.6.	Meningkatnya prestasi pemuda dan atlet	Persentase pemuda dan atlet yang berprestasi	Persen	5	10	15	20	25	25
	2.7.	Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	50,65	55,70	58,10	59,20	60	60
	2.8.	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per tahun	Persen	9	5	5	5	5	5
	2.9.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Cakupan pelestarian adat dan budaya (jumlah adat dan budaya yang dilestarikan/total adat dan budaya per tahun)	Persen	15	15	15	15	15	15
	2.10.	Meningkatnya literasi masyarakat	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per	Persen	-24	5	5	5	5	5

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi akhir		
					2023	2024	2025	2026			
				tahun							
				Peningkatan jumlah keanggotaan perpustakaan per tahun	Persen	1	5	5	5	5	5
3.	Menurunkan tingkat kemiskinan			Persentase tingkat kemiskinan	Persen	17,43	17	16	15	14	14
		3.1.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	Persen	8,56	7,5	7,1	6,4	6,1	6,1
		3.2.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan perkapita	Rupiah (Juta)	27,83	28,53	29,25	30,00	30,75	30,75
				Gini rasio	Indeks	0,283	0,255	0,251	0,248	0,245	0,245
		3.3.	Meningkatnya kemandirian gampong	Persentase Gampong Berkembang, maju dan mandiri	Persen	26,17	32,51	38,85	45,19	51,53	51,53
		3.4.	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Gampong rawan pangan	Persen	18,78	11	8,45	7,16	6,1	6,1
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan			Pertumbuhan PDRB	Persen	-0,55	3,5	3,62	3,75	3,8	3,8
		4.1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persen	0,15	4,10	4,15	4,24	4,35	4,35
		4.2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Industri	Pertumbuhan PDRB sektor Industri	Persen	0,51	2,5	2,72	2,8	3	3

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi akhir	
					2023	2024	2025	2026		
		4.3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan besar dan eceran	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran	Persen	6,21	5,02	5,2	5,23	5,3	5,3
		4.4. Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	Persen	1,97	3	3	3	3	3
		4.5. Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan tata ruang	Persentase kepatuhan implementasi peraturan tata ruang	Persen	50	55	60	65	70	70
5.	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik		Persentase Infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Persen	71,69	72,04	74,02	76,30	79,06	79,06
		5.1. Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Persentase jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap)	Persen	42,09	46	51	56	62	62
		5.2. Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	Persen	51	53	56	60	65	65
		5.3. Meningkatnya kualitas dan akses air bersih	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	Persen	69,78	72,03	74,43	75	78	78
		5.4. Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi atau air limbah	Persen	67,09	70,43	73,95	77	80	80
		5.5. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persentase rumah layak huni	Persen	87,17	89,92	90,72	91,52	92,32	92,32
6.	Meningkatkan kualitas lingkungan		Indeks Kualitas lingkungan hidup	Indeks	68,39	70,09	70,59	71,09	71,58	71,58

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi akhir	
					2023	2024	2025	2026		
hidup										
	6.1.	Meningkatnya kualitas air dan Udara	Indeks kualitas air	Indeks	65,00	63,36	63,46	63,50	63,56	63,56
			Indeks kualitas udara	Indeks	88,51	90,95	91,05	91,15	91,25	91,25
	6.2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan, pengelolaan DAS dan sempadan untuk pengendalian banjir	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	37,02	43,07	44,99	46,90	48,81	48,81
			Status DAS	Status	Dipulihkan	Dipulihkan	Dipulihkan	Dipulihkan	Dipertahankan	Dipertahankan
			Persentase alih fungsi sempadan menjadi pemukiman	Persen	4,53	4,00	3,5	2,5	0	0
			Persentase Vegetasi pada sempadan sungai	Persen	90,26	90,79	91,29	92,29	94,79	94,79
7.	Meningkatkan tatakelola kebencanaan		Indeks Resiko Bencana	Indeks	175,2	173,8	172,3	171	170	170
	7.1.	Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase gampong tanggap bencana	Persen	6	8	10	12	14	14

5.3. Penyelarasan RPD, RPA dan RPJMN

Penyelarasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJP Kabupaten Aceh Utara pada Tahapan ke-4 untuk menjaga konsistensi, sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJP Kabupaten Aceh Utara menjadi prioritas dalam RPD Tahun 2023-2026, terutama penyesuaian target indikator makro pembangunan RPD dengan target prioritas nasional dan RPJP Kabupaten Aceh Utara. Sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selaras dengan sasaran pembangunan RPJMN tersebut, secara garis besar sasaran pembangunan dalam RPD diarahkan kepada percepatan pembangunan untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM. Capaian indikator makro pembangunan untuk kemiskinan, angka kemiskinan Aceh Utara sebesar 17,43 persen masih lebih tinggi dari Provinsi Aceh sebesar 15,53 persen dan nasional yaitu sebesar 9,71 persen pada tahun 2021. Selanjutnya target angka kemiskinan yang ingin dicapai dalam waktu 4 tahun sebesar 14,00 persen pada tahun 2026. Capaian ini masih berbeda jauh dibandingkan dengan target provinsi dan nasional,. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang belum berakhir, penurunan penerimaan Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari Otsus dan kebijakan keuangan nasional lainnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara tahun 2021 yaitu sebesar -0,55 persen, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Aceh masing sebesar 3,51 dan 2,82 persen. Diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2023-2026 dapat terus meningkat sampai 3,80 persen di

akhir tahun 2026. Angka prediksi ini lebih rendah daripada target nasional karena dari sisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTD) relatif mengalami penurunan seiring dengan menurunnya pendapatan Kabupaten Aceh Utara.

Tingkat pengangguran terbuka juga juga masih tinggi dibanding dengan capaian nasional dan provinsi Aceh di tahun 2021. Capaian TPT Kabupaten Aceh Utara sebesar 8,31 persen lebih tinggi dari capaian TPT Nasional sebesar 6,49 persen dan 6,30 persen dari Provinsi Aceh. Selanjutnya target tingkat pengangguran terbuka yang ingin dicapai dalam waktu 4 tahun sebesar 6,1 persen pada tahun 2026.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Utara sebesar 69,46 poin lebih rendah dibanding dengan provinsi Aceh sebesar 72,18 dan nasional sebesar 72,29 poin, berikut tabel penyesuaian Indikator Makro RPJMN, Capaian dan Target RPA serta Capaian dan Target RPJP Aceh pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Penyelarasan RPD, RPA dan RPJMN

No	Indikator Pembangunan	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMA 2017-2022 dan RPA 2023-2026								RPJMD 2017-2022 dan RPD 2023-2026					
		Target					Realisasi dan Target								Realisasi dan Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,07	3,69	5,9	6,1	6,2	-0,37	2,79	6	3,6	3,75	3,85	4,25	0,97	-0,55	5,00	3,5	3,63	3,75	3,8
2	Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,71	9	8,55	8,15	15,43	15,53	11,43	15,03	14,53	14,03	13,53	17,02	17,43	14,90	17	16	15	14
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	6,49	3,8	3,4	3,1	6,59	6,3	6	5,48	5,36	5,24	5,12	8,56	8,31	6,9	7,5	7,1	6,4	6,1
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,94	72,29	74,60 - 84,23	74,60 - 84,23	74,60 - 84,23	71,99	72,18	73	72,58	72,78	72,98	73,18	69,33	69,46	71,79	70	71	71,5	72
5	Rasio Gini	0,385	0,381	0,370 - 0,374	0,370 - 0,374	0,370 - 0,374	0,319	0,323	0,31	0,307	0,304	0,301	0,298	0,261	0,283	0,251	0,255	0,251	0,248	0,245
6	Penurunan Emisi Rumah Kaca (%)	-	-	27,3	27,3	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1. Strategi Pembangunan

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah ke dalam rencana kerja yang dapat diimplementasikan. Segala sesuatu yang secara langsung bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPD dianggap sebagai strategi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Beberapa tujuan, sasaran dan strategi pembangunan dapat dilihat pada Tabel 6.1:

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien	1.1. Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.1. Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pengelolaan aset daerah 1.1.2. Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.1.3. Peningkatan pengelolaan aset daerah
	1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1.2.1. Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel 1.2.2. Peningkatan kapabilitas APIP 1.2.3. Peningkatan maturitas SPIP 1.2.4. Peningkatan pengelolaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja 1.2.5. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan
	1.5. Meningkatnya pelayanan publik	1.3.1. Peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah 1.3.2. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik 1.3.3. Penguatan pelayanan terpadu
	1.4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	1.4.1. Penegakan Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya

Tujuan	Sasaran	Strategi
	1.5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi	1.5.1. Mendukung penyelenggaraan Pemilu, pilpres dan pilkada serentak tahun 2024
	1.6. Meningkatnya profesionalisme ASN	1.6.1. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan syariat dan budaya islami	2.1. Meningkatnya akses pendidikan	2.1.1. Revitalisasi gerakan kembali ke sekolah untuk anak putus sekolah 2.1.2. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan dasar
	2.2. Meningkatnya kualitas pendidikan	2.2.1. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2.2.2. Pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata 2.2.3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang mutu pendidikan 2.2.4. Memaksimalkan penerapan kurikulum nasional yang berciri khas islami
	2.3. Meningkatnya kualitas Pendidikan dayah	2.3.1 Peningkatan sarana dan prasarana dayah 2.3.2 Peningkatan pemberdayaan ekonomi dayah 2.3.3 Peningkatan kapasitas guru dayah
	2.4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.4.1. Peningkatan upaya promotif-preventif, dan upaya kesehatan berbasis masyarakat 2.4.2. Peningkatan ketahanan kesehatan menghadapi pandemi dan endemi 2.4.3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		2.4.4. Pemantapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2.4.5. Pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting 2.4.6. Peningkatan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di fasilitas pemerintah dan swasta
	2.5. Meningkatnya Pemahaman Syariat Islam	2.5.1. Menghidupkan majelis taklim di Kecamatan dan gampong 2.5.2. Peningkatan pengawasan pelaksanaan syariat Islam 2.5.3. Sosialisasi pola hidup sesuai syariat 2.5.4. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan 2.5.5. Pembinaan generasi penghafal Al-Quran, Qari dan Qari'ah 2.5.6. Peningkatan peran serta ulama dalam pembangunan
	2.6. Meningkatnya prestasi pemuda dan atlit	2.6.1. Peningkatan kapasitas kepemudaan 2.6.2. Peningkatan sarana prasarana keolahragaan, kualitas atlit dan pelatih 2.6.3. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga
	2.7. Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan	2.7.1. Peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan
	2.8. Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	2.8.1. Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 2.8.2. Perlindungan perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		2.8.3. Penanganan kasus dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan 2.8.4. Perwujudan Kabupaten Layak Anak
	2.9. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2.9.1. Peningkatan sosialisasi adat dan budaya
	2.10. Meningkatnya literasi masyarakat	2.10.1. Peningkatan budaya gemar membaca
3. Menurunkan tingkat kemiskinan	3.1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	3.1.1. Perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha 3.1.2. Pengembangan potensi wisata 3.1.3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja 3.1.4. Peningkatan peran TJSLP 3.1.5. Peningkatan peran BLK
	3.2. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	3.2.1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat 3.2.2. Peningkatan sinergitas dalam penanggulangan kemiskinan 3.2.3. Penggunaan data BDT sebagai upaya penyaluran bantuan tepat sasaran 3.2.4. Optimalisasi potensi ZIS untuk peningkatan pendapatan masyarakat 3.2.5. Peningkatan peran TJSLP dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat
	3.3. Meningkatnya kemandirian gampong	3.3.1. Peningkatan kapasitas aparat gampong 3.3.2. Pembinaan BUMG dalam pengembangan rencana bisnis dan pemasaran produk masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi
	3.4. Meningkatnya ketahanan pangan	3.4.1. Peningkatan ketersediaan dan akses pangan
4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	4.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	4.1.1. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan yang berkelanjutan 4.1.2. Peningkatan nilai tambah produk pertanian 4.1.3. dan perikanan serta pengembangan industry ramah lingkungan 4.1.4. Sertifikasi indeks geografis komoditi spesifik Aceh Utara 4.1.5. Penyusunan regulasi pengembangan komoditas yang berbasis lahan berkelanjutan
	4.2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Industri	4.2.1. Perbaiki iklim investasi 4.2.2. Pengembangan UMKM dan koperasi berbasis pertanian dan perikanan 4.2.3. Peningkatan koordinasi dengan industri skala besar 4.2.4. Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten yang ramah lingkungan
	4.3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan besar dan eceran	4.3.1. Peningkatan ekspor melalui Pelabuhan 4.3.2. Krueng Geukueh 4.3.3. Peningkatan sarana dan prasarana pasar 4.3.4. tradisonal dan pasar rakyat
	4.4 Terkendalinya tingkat inflasi daerah	4.4.1. Peningkatan peran pemerintah daerah 4.4.2. dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 4.4.3. Peningkatan operasi pasar

Tujuan	Sasaran	Strategi
	4.5. Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan tata ruang	4.5.1. Penyusunan regulasi tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang 4.5.2. Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang
5 Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik	5.1. Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	5.1.1. Peningkatan penyelenggaraan jalan
	5.2. Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani	5.2.1. Peningkatan infrastruktur pendukung pertanian 5.2.2. Peningkatan kinerja koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pengelolaan Sumber Daya Air 5.2.3. Peningkatan kelembagaan pengelola irigasi, komisi irigasi, Keujruen Blang dalam program pengembangan sistem irigasi 5.2.4. Peningkatan kinerja daerah irigasi tambak
	5.3 Meningkatnya kualitas dan akses air bersih	5.3.1. Pemenuhan infrastruktur penyediaan air bersih 5.3.2. Penyediaan air minum berbasis masyarakat
	5.4 Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi	5.4.1. Peningkatan infrastruktur penyediaan sanitasi dan pengolahan air limbah 5.4.2. Peningkatan sosialisasi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi berkualitas
	5.5 Meningkatnya dan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	5.5.1. Pembangunan dan rehab rumah 5.5.2. Pemanfaatan dana desa dan ZIS untuk pembangunan dan rehab rumah layak huni

Tujuan	Sasaran	Strategi
6 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	6.1. Meningkatnya kualitas air	6.1.1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 6.1.2. Pengujian kualitas air secara berkala 6.1.3. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan 6.1.4. Peningkatan edukasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
	6.2. Meningkatnya kualitas udara	6.2.1. Pengendalian polusi udara kawasan industri 6.2.2. Pengujian kualitas udara secara berkala
	6.3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan	6.3.1. Peningkatan reboisasi dan penghijauan lahan
	6.4. Meningkatnya pengelolaan DAS dan sempadan untuk pengendalian banjir	6.4.1. Peningkatan status daerah aliran sungai 6.4.2. Pengendalian pemanfaatan lahan sempadan sungai 6.4.3. Peningkatan kualitas penutupan lahan sempadan sungai
7 Meningkatkan tatakelola kebencanaan	7.1. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	7.1.1. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana 7.1.2. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan 7.1.3. Penyusunan dokumen kebencanaan

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Selain strategi, hal lainnya yang penting adalah menentukan arah kebijakan pembangunan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan pembangunan adalah merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya sesuai dengan Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2023-2026

TAHUN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
2023	Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang didukung oleh SDM yang berkualitas untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan.
2024	Meningkatkan infrastruktur dasar, kemandirian pangan dan tata kelola pemerintahan untuk percepatan pengembangan ekonomi serta pemenuhan hak politik masyarakat dalam menyukseskan agenda pemilihan umum serentak.
2025	Pengembangan kawasan strategis dan nilai tambah komoditi unggulan serta mengoptimalkan penerapan syariat Islam dengan meningkatkan kualitas SDM dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal.
2026	Peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan mengoptimalkan kontribusi PAD untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

6.3. Program Prioritas

Program Prioritas merupakan program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program yang mendukung capaian Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang disertai dengan pagu indikatif selama periode pelaksanaan Tahun 2023- 2026. Selanjutnya program tersebut juga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi tanggungjawab dari suatu Perangkat Daerah. Program Pembangunan Daerah yang disertai pagu indikatif Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tujuan :											
1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	50.53	55		55		60.2		60.4		
	Sasaran :											
1.1	Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP		WTP				WTP		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	16,790,910,235	100%	12,872,191,293	100%	12,984,104,693	100%	12,984,104,693	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	100%	713,526,764,193	100%	712,541,944,579	100%	718,666,365,234	100%	718,856,498,214	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Solvabilitas jangka panjang	713,04 kali	713,04 kali	1,098,909,092	748,69 Kali	1,132,150,094	786,12 Kali	1,245,365,103	825,43 Kali	1,287,927,017	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	8,96%	10,26%	1,851,735,801	10,33%	1,907,287,875	10,34%	2,098,016,663	10,46%	2,165,321,769	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	CC	B		B				B		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	8,735,000,000	100%	8,540,000,000	100%	8,720,000,000	100%	8,913,913,000	Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	23%	35 %	2,610,000,000	36%	2,965,000,000	37%	3,400,000,000	38%	3,750,000,000	Inspektorat
		Persentase Tindaklanjut Temuan	60%	61%		62%		63%		64%		
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	765,000,000	Level 3	810,000,000	Level 3	900,000,000	Level 3	1,150,000,000	Inspektorat
		Level Maturitas SPIP	Level 2 (2.207)	Level 2 (2.250)		Level 2 (2.300)		Level 2 (2.350)		Level 2 (2.400)		
		Persentase hasil evaluasi SAKIP yang minimal bernilai B	54%	60%		67%		71%		75%		
		Persentase hasil evaluasi PMPRB yang minimal bernilai CC	80%	80%		80%		80%		80%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	5,948,489,680	100%	5,950,489,680	100%	6,453,489,680	100%	6,656,489,680	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	1,337,647,954	100%	1,514,515,400	100%	2,004,011,900	100%	2,026,011,900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program dalam RKPd terhadap program RPJMD	100%	100%	736,784,600	100%	776,784,600	100%	816,784,600	100%	841,784,600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil penelitian dan inovasi pembangunan daerah	100%	100%	400,000,000	100%	450,000,000	100%	600,000,000	100%	650,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	15,183,415,097	100%	15,644,215,097.00	100%	15,238,715,097	100%	15,155,745,097.00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.3	Meningkatkan pelayanan publik	Nilai indeks kepuasan masyarakat	70,07	80		85		90		95		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	3,220,572,081	100%	3,254,602,211	100%	3,202,853,213	100%	3,491,534,405	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	97%	100%	867,530,000	100%	867,530,000	100%	1,333,000,000	100%	1,388,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	23%	40%		42%		43%		45%		
	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	81%	98%	95,500,000	100%	106,000,000	100%	136,735,000	100%	185,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kerjasama pemanfaatan data dan informasi kependudukan	30%	36%	224,352,800	37%	224,352,800	38%	290,269,038	39%	383,322,846	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan	100%	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara	45.45%	45.45%	703,676,504	48.48%	751,449,635	51.52%	820,277,207	54.55%	953,819,551	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	141,296,974,348	100%	144,612,974,348	100%	147,927,370,224	100%	151,227,370,224	Rumah Sakit Umum Cut Meutia
		Nilai Indeks Kepuasan Pasien	76,63	77.00		77,5		77,5		77,5		
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik yang di selenggarakan secara Online dan terintegrasi	78%	78%	310,000,000	83%	310,000,000	83%	322,000,000	83%	326,000,000	Sekretariat Daerah
	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD Terhubung dengan Akses Internet yang di sediakan oleh Kominfo	100%	100%	76,096,300	100%	77,096,300	100%	84,096,300	100%	90,096,300	Sekretariat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	31,116,683,299	100%	36,806,990,777	100%	33,562,029,777	100%	34,101,744,752	Sekretariat Daerah
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	1,794,648,900	100%	1,810,548,900	100%	2,028,748,900	100%	2,091,148,900	Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	849,696,600	100%	862,396,600	100%	897,600,976	100%	932,799,176	Sekretariat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	33,920,179,486	100%	34,460,425,590	100%	35,478,293,156	100%	35,480,481,834	Sekretariat DPRK

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana	100%	100%	8,993,144,594	100%	8,990,697,926	100%	8,565,031,328	100%	9,062,842,649	Sekretariat DPRK
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,797,976,816	100%	1,807,484,516	100%	1,900,074,016	100%	1,859,935,152	Kecamatan Langkahan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	64	3,275,200	69	3,275,200	75	13,240,000	80	20,100,000	Kecamatan Langkahan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80.00	73	37,000,000	76	37,000,000	80	45,000,000	85	50,000,000	Kecamatan Langkahan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,609,697,760	100%	2,618,599,060	100%	2,727,101,840	100%	2,726,601,840	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	0.75	65	6,500,000	70	6,700,000	75	8,000,000	80	15,500,000	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	0.8	73	37,000,000	76	37,500,000	80	39,500,000	85	40,000,000	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,077,834,431	100%	2,077,834,431	100%	2,116,834,431	100%	2,116,834,431	Kecamatan Seunuddon
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	7,550,000	70	7,850,000	75	35,000,000	80	45,000,000	Kecamatan Seunuddon
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73	37,000,000	76	40,000,000	80	50,000,000	85	50,000,000	Kecamatan Seunuddon
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	3,588,316,352	100%	3,597,310,518	100%	3,675,679,965	100%	3,674,722,137	Kecamatan Baktiya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	70	7,063,500	74	7,346,040	78	9,566,421	83	12,000,000	Kecamatan Baktiya
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80%	70	40,700,000	75	39,000,000	80	42,000,000	85	45,000,000	Kecamatan Baktiya
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,127,774,551	100%	2,135,746,251	100%	2,189,109,258	100%	2,203,109,258	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	3,700,000	70	3,900,000	75	4,200,000	75	4,200,000	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	0.7	73	30,000,000	76	30,000,000	78	35,000,000	78	35,000,000	Kecamatan Baktiya Barat

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,986,416,848	100%	2,986,416,848	100%	3,005,452,098	100%	3,005,452,098	Kecamatan Lhoksukon
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	20,725,786	70	30,418,236	75	54,963,690	80	65,000,054	Kecamatan Lhoksukon
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73	41,000,000	76	47,000,000	80	59,473,546	85	75,200,000	Kecamatan Lhoksukon
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,698,016,656	100%	1,725,542,766	100%	1,831,544,500	100%	1,851,071,219	Kecamatan Cot Girek
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75	73	40,700,000	76	46,770,000	80	51,447,000	85	52,345,000	Kecamatan Cot Girek
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,165,181,104	100%	2,176,074,929	100%	2,266,786,217	100%	2,279,358,917	Kecamatan Paya Bakong
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	5,796,000	70	5,080,800	75	5,232,500	80	5,600,000	Kecamatan Paya Bakong
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	69.79	73	37,000,000	76	40,000,000	80	45,000,000	85	50,000,000	Kecamatan Paya Bakong
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,429,002,033	100%	1,442,386,151	100%	1,575,726,651	100%	1,591,765,351	Kecamatan Pirak Timu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	65%	5,196,000	70%	5,480,800	75%	8,398,500	80%	9,200,000	Kecamatan Pirak Timu
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80%	73%	37,000,000	76%	38,000,000	80%	45,000,000	85%	46,000,000	Kecamatan Pirak Timu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,078,415,055	100%	2,083,978,855	100%	2,159,841,530	100%	2,184,380,030	Kecamatan Matangkuli
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	5,400,000	70	6,100,000	75	7,400,000	80	7,400,000	Kecamatan Matangkuli
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73	37,000,000	76	37,000,000	80	50,000,000	85	50,000,000	Kecamatan Matangkuli
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,740,083,447	100%	2,758,589,047	100%	2,803,654,674	100%	2,813,395,267	Kecamatan Tanah Luas
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	72	83	10,000,000	83	14,800,000	83	42,400,798	83	42,885,478	Kecamatan Tanah Luas
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	65%	86%	10,000,000	86%	10,000,000	86	20,000,000	86	17,018,251	Kecamatan Tanah Luas
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,445,853,850	100%	1,445,853,850	100%	1,464,889,100	100%	1,464,889,100	Kecamatan Nibong

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	20,725,786	70	26,897,220	75	45,963,690	80	60,000,054	Kecamatan Nibong
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	70	63	41,000,000	76	41,000,000	80	55,200,000	85	57,200,000	Kecamatan Nibong
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,669,509,281	100%	1,674,982,673	100%	1,645,616,357	100%	1,658,007,169	Kecamatan Lapang
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	12,000,000	70	12,240,000	75	12,484,800	80	12,734,496	Kecamatan Lapang
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73	51,000,000	76	52,500,000	80	54,000,000	85	55,500,000	Kecamatan Lapang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,911,207,542	100%	1,911,207,542	100%	1,961,621,462	100%	1,961,621,462	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	66	4,200,000	69	12,600,000	70	21,600,000	71	30,000,000	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	65	63	10,000,000	68	10,000,000	68	30,000,000	70	30,000,000	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73	37,000,000	76	37,000,000	80	50,000,000	85	50,000,000	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,050,534,294	100%	2,050,534,294	100%	2,068,882,094	100%	2,068,882,094	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	24,000,000	70	27,000,000	75	36,000,000	80	59,000,000	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,200,179,224	100%	2,234,614,924	100%	2,397,139,424	100%	2,422,139,424	Kecamatan Samudera
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	4,696,000	70	4,696,000	75	4,696,000	80	4,696,000	Kecamatan Samudera
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80.00%	73%	37,000,000	76.00%	37,000,000	80.00%	37,000,000	85.00%	37,000,000	Kecamatan Samudera
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,978,320,400	100%	1,984,405,400	100%	2,060,769,086	100%	2,090,619,086	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	88	9,899,100	89	9,900,000	90	12,700,000	95	13,400,000	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	75	37,000,000	77	38,000,000	80	47,300,000	85	37,000,000	Kecamatan Meurah Mulia

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,603,589,377	100%	2,603,589,377	100%	2,658,609,346	100%	2,658,609,346	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	28,811,500	70	37,140,000	75	57,000,000	80	57,000,000	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	69.79	73	40,000,000	76	48,000,000	80	56,000,000	85	56,000,000	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,746,465,071	100%	1,738,668,008	100%	1,887,907,443	100%	1,897,539,943	Kecamatan Geurudong Pase
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	4,696,000	70	5,080,800	75	5,232,500	80	5,600,000	Kecamatan Geurudong Pase
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73	37,000,000	76	40,000,000	80	45,000,000	85	50,000,000	Kecamatan Geurudong Pase
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,750,512,716	100%	1,750,073,416	100%	1,812,447,144	100%	1,812,447,144	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	17,007,000	70	17,007,000	75	17,007,000	80	17,007,000	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73	40,000,000	76	43,000,000	80	80,000,000	85	90,000,000	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,118,860,125	100%	2,133,916,085	100%	2,278,046,536	100%	2,268,576,165	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	65%	30,001,900	65%	31,562,090	65%	33,925,754	65%	35,166,129	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80%	73%	40,000,000	73%	40,000,000	73%	60,500,000	73%	86,550,000	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,771,486,526	100%	2,788,578,015	100%	2,854,687,725	100%	2,807,048,055	Kecamatan Dewantara
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	88	13,000,000	88	26,130,000	88	60,391,300	88	73,865,213	Kecamatan Dewantara
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73	37,000,000	76	40,370,000	80	45,773,700	85	56,201,437	Kecamatan Dewantara
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,369,847,256	100%	1,369,847,256	100%	1,406,963,956	100%	1,406,963,956	Kecamatan Nisam Antara
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	10,502,030	70	17,339,850	75	14,705,741	80	14,705,741	Kecamatan Nisam Antara
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	69.79	73	37,000,000	76	37,000,000	80	50,000,000	85	50,000,000	Kecamatan Nisam Antara

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase gampong status berkembang	75	30%	5,000,000	35%	5,000,000	40%	5,000,000	45%	5,000,000	Kecamatan Nisam
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,559,285,669	100%	1,559,285,669	100%	1,613,644,593	100%	1,613,644,593	Kecamatan Banda Baro
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	67%	5,199,100	72%	9,000,000	75%	25,000,000	80%	30,000,000	Kecamatan Banda Baro
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	60%	65%	37,000,000	68%	45,000,000	70%	55,000,000	75%	55,000,000	Kecamatan Banda Baro
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,327,806,002	100%	2,304,529,302	100%	2,426,774,820	100%	2,414,907,320	Kecamatan Muara Batu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	4,696,000	70	5,080,800	75	5,232,500	80	5,600,000	Kecamatan Muara Batu
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	8%	73%	37,000,000	76%	40,000,000	80%	45,000,000	85%	50,000,000	Kecamatan Muara Batu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,323,161,790	100%	2,326,935,307	100%	2,439,812,399	100%	2,457,540,682	Kecamatan Sawang
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	70	3,124,000	74	3,124,000	78	3,789,040	83	3,789,040	Kecamatan Sawang
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	70	35,000,000	75	35,000,000	80	43,350,000	85	46,585,000	Kecamatan Sawang
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	6.83%	6.90%	160,000,000	6.70%	160,000,000	6.70%	160,000,000	6.70%	160,000,000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	100.00%	100.00%	300,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%	300,000,000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	53 investor	100%	462,118,800	100%	462,118,800	100%	462,118,800	100%	462,118,800	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Data dan Informasi	100%	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	3,115,882,694	100%	3,115,882,694	100%	3,116,997,672	100%	3,116,997,672	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Pengadaan Tanah Yang Di Fasilitas Untuk Kepentingan Umum di Kab.Aceh Utara	0.35%	0.044%	65,000,000	0.044%	70,000,000	0.044%	80,000,000	0.176%	150,000,000	Dinas Pertanahan Kabupaten

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah di Kab.Aceh Utara	N/A	100%	160,000,000	100%	190,000,000	100%	220,000,000	100%	370,000,000	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	Persentase Data Aset Yang di Fasilitasi, terinventarisasi serta Pengurusan Hak Milik Pemda Kab.Aceh Utara	11.17%	4.74%	275,000,000	5.75%	290,000,000	7.01%	300,000,000	7.90%	350,000,000	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) Kab.Aceh Utara	100%	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	75,000,000	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Persentase Penyelesaian sengketa tanah yang ditangani pertahun di Kab.Aceh Utara	50%	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	55,000,000	Dinas Pertanahan Kabupaten
1.4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	72.89%	75%		80%		85		90%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	12,291,672,667	100%	11,553,737,917	100%	11,579,859,901	100%	11,606,672,276	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Qanun dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	717,704,141	100%	1,246,025,532	100%	1,292,778,882	100%	1,366,121,255	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	2,783,685,801	100%	2,783,685,801	100%	2,783,685,801	100%	2,783,685,801	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi gangguan/konflik berlatar ideologi yang terjadi	0%	0%	350,523,135	0%	360,523,135	0%	516,523,135	0%	611,523,135	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase potensi gangguan/konflik ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi	0%	0%	103,589,960	0%	213,769,458	0%	224,457,931	0%	360,680,827	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi gangguan/konflik sosial yang terjadi	0%	0%	277,152,313	0%	390,236,893	0%	400,316,422	0%	452,941,812	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	35%	45,000,000	25%	45,000,000	30%	47,000,000	35%	69,000,000	Kecamatan Langkahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	20%	25%	45,000,000	30%	45,000,000	35%	55,000,000	35%	65,000,000	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	45,000,000	25%	48,000,000	30%	70,010,800	35%	75,010,800	Kecamatan Seunuddon

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20.00%	36,000,000	25.00%	37,440,000	30.00%	47,563,200	35.00%	53,000,000	Kecamatan Baktiya
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	6%	8%	40,000,000	12%	40,000,000	15%	59,000,000	15%	60,000,000	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	60,000,000	25%	60,000,000	30%	76,000,000	35%	76,000,000	Kecamatan Lhoksukon
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	82%	100%	54,000,000	100%	61,809,810	100%	84,679,440	100%	86,147,250	Kecamatan Cot Girek
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	50,000,000	25%	50,000,000	30%	50,000,000	35%	50,000,000	Kecamatan Paya Bakong
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	35,000,000	25%	36,500,000	30%	47,500,000	35%	48,000,000	Kecamatan Pirak Timu
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	60,000,000	25%	60,000,000	30%	70,000,000	35%	70,000,000	Kecamatan Matangkuli
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	60%	45%	72,000,000	45%	72,000,000	45%	63,100,000	45%	68,100,000	Kecamatan Tanah Luas
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	4%	20%	60,000,000	25%	60,000,000	30%	76,000,000	35%	76,000,000	Kecamatan Nibong
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	45,000,000	25%	50,000,000	30%	50,000,000	35%	55,000,000	Kecamatan Lapang
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	68%	47%	72,000,000	49%	72,000,000	53%	81,300,000	55%	81,300,000	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	45,000,000	25%	45,000,000	30%	75,000,000	35%	75,000,000	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	40,000,000	25%	30,000,000	30%	30,000,000	35%	30,000,000	Kecamatan Samudera
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	5%	15%	40,000,000	20%	40,000,000	25%	52,500,000	30%	52,200,000	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	35,000,000	25%	45,000,000	30%	67,000,000	35%	67,000,000	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	35,000,000	25%	45,000,000	30%	45,000,000	35%	50,000,000	Kecamatan Geurdong Pase
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	35,000,000	25%	35,000,000	30%	55,000,000	35%	55,000,000	Kecamatan Simpang Keuramat

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20.00%	40,000,000	20.00%	44,000,000	20.00%	48,400,000	20.00%	54,240,000	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	4%	6%	40,000,000	28%	40,400,000	35%	55,652,500	40%	71,209,025	Kecamatan Dewantara
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	46,938,430	25%	50,000,000	30%	100,000,000	35%	105,000,000	Kecamatan Nisam Antara
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	35,000,000	25%	45,000,000	30%	45,000,000	35%	50,000,000	Kecamatan Nisam
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	n/A	5%	55,000,000	4%	55,000,000	2.5%	75,000,000	1%	85,000,000	Kecamatan Banda Baro
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	25,000,000	25%	45,000,000	30%	45,000,000	35%	50,000,000	Kecamatan Muara Batu
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	38,500,000	25%	38,500,000	30%	45,079,583	35%	48,581,500	Kecamatan Sawang
1.5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pemilu	77%			81.50%						
		Persentase keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif	2,2%	-		6,6%		-		-		
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	2,432,921,183	100%	3,822,103,449	100%	1,860,153,400	100%	1,833,926,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	43%	45%	1,285,890,200	47%	25,428,890,200	48%	1,038,165,429	50%	1,030,544,143	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.6	Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks profesionalitas ASN	48.61	61		65		71		75		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	7,968,234,979	100%	7,927,249,579	100%	8,425,468,579	100%	8,175,968,579	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penerbitan SK secara tepat waktu	100%	100%	1,940,457,100	100%	2,254,985,400	100%	2,837,080,000	100%	3,335,596,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	70 : 30	75 : 25		80 : 20		85 : 15		90:10		
		Penurunan jumlah ASN yang dijatuhi sanksi disiplin	202 Kasus	100 Kasus		75 Kasus		50 Kasus		30 Kasus		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	66%	100%	580,000,000	100%	590,000,000	100%	804,920,000	100%	955,904,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan syariat dan budaya islami	Indeks Pembangunan Manusia	69.46	70		71.00		71.50		72		
	Sasaran :											
2.1	Meningkatnya akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	8.63 tahun	8.93 tahun		9.3 tahun		9.65 tahun		10.05 tahun		
		Angka harapan lama sekolah	14.7 tahun	14.75 tahun		14.78 tahun		14.81 tahun		14.9 tahun		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	375,401,826,521	100%	375,459,174,190.60	100%	375,497,468,814	100%	375,580,065,889	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar PAUD	38,79%	38,80%	333,172,402,699	39,89%	333,245,373,295	42,45%	334,478,421,909	58,00%	335,322,395,623.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni SD	89,26%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
		Angka Partisipasi Kasar SD	101,64%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
		Angka Partisipasi Murni SMP	70,04%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
		Angka Partisipasi Kasar SMP	99,40%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Pertimbangan MPD yang menjadi kebijakan Daerah	100%	100%	1,205,000,000	100%	979,517,815.00	100%	1,234,192,864	100%	1,264,539,420.40	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,385,821,848	100%	1,322,304,033	100%	1,526,534,436	100%	1,596,187,880	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
2.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	34.50%	50%		65%		100%		100%		
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan	40%	43.00%	431,250,000	45.00%	439,875,000.00	48.00%	448,672,500	50.00%	457,645,950.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.3	Meningkatnya kualitas Pendidikan dayah	Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah	53.81%	56.35%		58.83%		61.42%		63.96%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	82%	100%	2,736,278,165	100%	2,753,528,165	100%	2,763,686,795	100%	2,763,686,795	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Pendidikan Dayah	Persentase dayah memenuhi Standarisasi dayah	53.81%	56.35%	16,882,800,000	58.83%	16,885,550,000.00	61.42%	17,882,782,000	63.96%	18,382,800,000.00	Dinas Pendidikan Dayah

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2.4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	68.8 tahun	68.85 thn		68.9 thn		68.95 thn		69 thn			
		Prevalensi stunting	38.80%	32%		28%		24%		20%			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	140,110,421,243	100%	140,110,421,243.00	100%	140,354,691,011	100%	140,708,241,011.00		Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	59,04%	70.00%	110,295,482,387	80.00%	110,305,482,500.00	90.00%	109,761,342,200	100.00%	111,258,187,200.00		Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	71.88%	75.00%	744,325,764	78.13%	747,227,527.00	81.25%	800,187,326	84.38%	902,811,320.00		Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dan Sertifikat izin produksi makanan dan minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga	79.00%	79.00%	253,542,000	80.00%	253,542,000.00	80.00%	253,542,000	80.00%	253,542,000.00		Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang sudah menerapkan PHBS	12,8%	15.00%	739,535,100	18%	739,535,100.00	20%	739,535,100	23%	839,535,100.00		Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Rujukan Ke Faskes Lainnya Turun	1889 rujukan	1850 rujukan	758,995,490	1800 rujukan	758,995,490.00	1770 rujukan	1,258,995,490	1750 rujukan	1,258,995,490.00		Rumah Sakit Umum Cut Meutia
	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,60%	1,55%	203,814,000	1,50%	203,814,000	1,45%	203,814,000	1,40%	203,814,000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prevalensi stunting	38,8%	32,00%	8,227,323,090	28,00%	8,227,323,090	24,00%	8,227,323,090	20,00%	8,227,323,090		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)		67.27%	69,28%	71,28%		73,28%		75,48%					
TFR (Angka Kelahiran Total)		2,77	2,54	2,35		2,03		1,85					
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	14.78%	12,32%	4,523,640,000	11,30%	4,523,640,000	10,35%	4,523,640,000	9,65%	4,523,640,000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.5	Meningkatnya Pemahaman Syariat Islam	Penurunan kasus pelanggaran Syari'at Islam per tahun	20%	20%		20%		20%		20%			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	5,622,688,100	100%	5,627,990,817	100%	5,707,849,120	100%	5,885,288,100		Dinas Syariat Islam
	Program Syari'at Islam	Angka pelanggaran syariat islam		Kasus	11,526,038,000	Kasus	11,118,141,800	Kasus	12,414,455,980	Kasus	12,737,017,000		Dinas Syariat Islam

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	1,393,816,722	100%	1,393,816,722	100%	1,393,816,722	100%	1,393,816,722	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase peran ulama dalam kehidupan bermasyarakat	100%	100%	3,125,130,150	100%	3,138,930,150	100%	3,188,930,150	100%	3,338,930,150	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
2.6	Meningkatnya prestasi pemuda dan atlit	Persentase pemuda dan atlit yang berprestasi	5%	10%		15%		20%		25%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	2,096,726,855	100%	2,098,845,118	100%	2,164,803,170	100%	2,264,803,170	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	6,64%	6,65%	1,500,000,000	6,66%	1,500,000,000	6,70%	1,750,000,000	6,75%	1,750,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	16,52%	16,53%		16,55%		16,66%		16,70%		
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaaan	Peningkatan prestasi olahraga	... medali	9 medali	3,800,000,000	12 medali	3,400,000,000	14 medali	4,300,000,000	23 medali	4,550,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.7	Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	50.65	55.7		58.10		59.20		60		
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase ketersediaan data gender dan anak	100%	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.8	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per tahun	9.0%	5%		5%		5%		5%		
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada APBD	n/a	30%	250,000,000	45%	250,000,000	76%	350,000,000	100%	470,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	n/a	2%	250,000,000	1,5%	250,000,000	1,5%	350,000,000	1%	430,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak	Pratama (nilai 615)	Madya	200,000,000	Madya	200,000,000	Nindya	350,000,000	Nindya	500,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani di instansi terkait kabupaten	7.48%	7%	80,000,000	7%	80,000,000	7%	180,000,000	6%	230,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.9	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Cakupan pelestarian adat dan budaya per tahun	15%	15%		15%		15%		15%		
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pelaku seni yang dibina per tahun	40%	25%	387,502,990	25%	395,253,050	25%	403,158,111	25%	411,221,273	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar budaya yang terkelola dan dilestarikan per tahun	40%	20%	1,055,140,266	20%	1,076,243,071	30%	1,097,767,933	30%	1,119,723,291	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman	Peningkatan jumlah kunjungan ke museum per tahun	30%	18%	1,700,000,000	18%	1,734,000,000	18%	1,721,862,000	18%	1,756,299,240	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Persentase adat yang dilestarikan	50%	70%	1,074,800,500	70%	1,075,000,000	70%	1,170,000,000	70%	1,270,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	998,757,844	100%	998,757,844	100%	1,086,257,844	100%	1,086,257,844	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.10	Meningkatnya literasi masyarakat	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	-24%	5%		5%		5%		5%		
		Peningkatan jumlah keanggotaan perpustakaan per tahun	1%	5%		5%		5%		5%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	3,324,387,936	100%	3,347,387,936	100%	3,347,387,936	100%	3,347,387,936	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung pustaka per tahun	3.796 Orang	3.986 Orang	2,094,160,000	4.185 Orang	1,990,705,714	4.394 Orang	2,184,971,531	4.614 Orang	2,505,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	66.382 koleksi	66.701 koleksi		73.020 koleksi		76.339 koleksi		79.658 koleksi		
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	20%	20%	370,000,000	20%	370,000,000	20%	395,000,000	20%	470,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip	70%	70%	223,000,000	70%	305,500,000	70%	310,800,000	70%	419,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	70%	70%	90,000,000	70%	90,000,000	70%	290,000,000	70%	286,271,531	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	70%	70%	2,000,000	70%	2,000,000	70%	2,000,000	70%	2,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase tingkat kemiskinan	17.43%	17%		16%		15%		14%		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	8.31%	7.50%		7.10%		6.40%		6.10%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	6,376,237,995	100%	5,776,237,995	100%	5,776,237,995	100%	5,776,237,995.00	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100%	100%	745,000,000	100%	195,000,000	100%	195,000,000	100%	195,000,000.00	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	20%	100%	69,000,000	100%	69,000,000	100%	69,000,000	100%	69,000,000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial	20%	100%	81,000,000	100%	81,000,000	100%	81,000,000	100%	81,000,000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.2	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan perkapita	27,83 jt	28,53 jt		29,25 jt		30,00 jt		30,75 jt		
		Gini rasio	0.283	0.255		0.251		0.248		0.245		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	5,704,659,837	100%	5,705,101,237	100%	5,718,375,609	100%	6,038,375,609.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	20.00%	20.00%	111,200,000	20.00%	111,200,000	20.00%	161,200,000	20.00%	161,200,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat bantuan pertahun	4%	5%	445,000,000	5%	545,000,000	5%	795,000,000	5%	995,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial	90%	90%	3,513,960,000	95%	3,513,960,000	95%	3,613,960,000	95%	3,663,960,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
		Persentase PMKS yang memperoleh pemberdayaan sosial per tahun	1.40%	1.50%		1.60%		1.70%		1.80%		
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	427,000,000	100%	427,000,000	100%	527,000,000	100%	607,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	6,237,136,907	100%	6,362,136,907	100%	6,729,997,795	100%	6,824,997,795	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Peningkatan Perizinan Usaha Koperasi Simpan Pinjam	46.05%	-	-	47.77%	40,000,000	49.38%	40,000,000	50.58%	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	24.69%	24.69%	80,000,000	30.54%	90,000,000	40.19%	100,000,000	55.31%	150,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Sehat	42.76%	42.76%	110,000,000	46.11%	110,000,000	44.74%	150,000,000	48.42%	180,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	12.35%	12.35%	80,000,000	13.97%	80,000,000	14.53%	80,000,000	16.48%	100,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang terfasilitasi pengembangan usaha.	17.49%	17.49%	500,000,000	19.96%	500,000,000	19.77%	500,000,000	23.81%	500,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Terfasilitasi Izin Usaha Produk	21.47%	21.47%	30,000,000	28.05%	55,000,000	35.06%	55,000,000	45.35%	120,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan pelaku Usaha Mikro Produktif, Pengolahan dan Pemasaran	10.96%	10.96%	100,000,000	17.53%	100,000,000	19.28%	150,000,000	21.91%	200,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi wisata	n/a	5%	900,000,000	5%	900,000,000	5%	900,000,000	5%	1,050,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemamfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan zona kreatif	n/a	5%	350,000,000	5%	300,000,000	5%	350,000,000	5%	450,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	n/a	10%	200,000,000	10%	200,000,000	10%	300,000,000	10%	300,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peran masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	n/a	5%	100,000,000	5%	100,000,000	5%	200,000,000	5%	200,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Peningkatan Sarana Pemukiman Transmigrasi	100%	100%	5,000,000	100%	5,250,000	100%	5,512,500	100%	5,788,125	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pembinaan kawasan transmigrasi	100%	100%	290,737,330	100%	1,464,514,300	100%	2,147,933,810	100%	2,897,933,810	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	1,341,975,016	100%	1,341,975,016	100%	1,440,026,740	100%	1,463,026,740	Sekretariat Baitul Mal
	Program Baitul Mal	Persentase peningkatan ZIS	11,67%	0,79%	25,515,087,481	4,97%	26,783,362,120	5,81%	28,340,030,226	0,62%	28,517,030,226	Sekretariat Baitul Mal
3.4	Meningkatnya kemandirian gampong	Persentase Gampong Berkembang, maju dan mandiri	26,17%	32,51%		38,85%		45,19%		51,53%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	5,409,411,439	100%	5,409,411,319	100%	5,468,654,661	100%	5,473,004,661.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kerja sama Desa	Persentase Gampong yang melaksanakan kerjasama	59%	60%	85,000,000	70%	85,000,000	80%	88,000,000	80%	95,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa Tertinggal dan sangat tertinggal	75,94%	46,24%	1,172,738,743	42,84%	1,172,971,714	39,56%	1,547,301,557	36,27%	1,958,250,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	80%	81%	1,121,999,600	82%	1,121,999,600	85%	1,153,500,000	87%	1,281,201,557.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	1,123,950,700	100%	1,128,950,700	50%	1,153,950,700	50%	1,178,950,700.00	Sekretariat Daerah
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	5,916,800	35%	5,916,800	40%	10,000,000	45%	25,000,000	Kecamatan Langkahan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	18,960,900	25%	18,960,900	30%	31,797,136	35%	43,076,000	Kecamatan Langkahan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	67%	30%	6,500,000	35%	6,500,000	40%	10,000,000	45%	15,000,000	Kecamatan Tanah Jambo Aye

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	17%	20%	21,750,000	25%	21,950,000	30%	30,000,000	35%	32,500,000	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	6,000,000	35%	6,550,000	40%	15,000,000	45%	20,000,000	Kecamatan Seunuddon
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	21,597,600	25%	24,000,000	30%	40,400,000	35%	40,400,000	Kecamatan Seunuddon
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42.00%	30.00%	5,217,060	35.00%	5,425,742	40.00%	9,588,514	45.00%	15,000,000	Kecamatan Baktiya
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	14%	30%	32,333,357	30%	37,716,369	40%	54,864,032	50%	64,539,995	Kecamatan Baktiya
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	8,000,000	35%	8,000,000	40%	10,000,000	40%	10,000,000	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	19,000,000	25%	20,000,000	30%	23,000,000	30%	28,000,000	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	20,000,000	35%	20,000,000	40%	26,181,000	45%	26,181,000	Kecamatan Lhoksukon
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	61,748,964	25%	67,581,764	30%	98,381,764	35%	107,618,946	Kecamatan Lhoksukon
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	78%	30%	4,947,800	35%	5,442,580	40%	7,456,335	45%	8,101,350	Kecamatan Cot Girek
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	80%	100%	17,749,600	100%	20,214,900	100%	26,628,282	100%	29,090,737	Kecamatan Cot Girek
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	30%	3,987,500	35%	3,531,875	40%	3,600,000	45%	5,659,800	Kecamatan Paya Bakong
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67%	20.00%	18,120,000	25.00%	18,651,000	30.00%	19,200,000	35.00%	19,200,000	Kecamatan Paya Bakong
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	3,887,500	35%	3,998,600	40%	4,000,000	45%	5,659,800	Kecamatan Pirak Timu
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	15,969,453	25%	18,859,435	30%	19,200,000	35%	19,200,000	Kecamatan Pirak Timu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	6,500,000	35%	6,500,000	40%	6,500,000	45%	6,500,000	Kecamatan Matangkuli
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	18,650,000	25%	19,035,000	30%	19,438,500	35%	19,900,000	Kecamatan Matangkuli
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	68%	76	4,000,000	76%	4,000,000	76%	10,000,000	76%	15,000,000	Kecamatan Tanah Luas

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	54%	58%	52,632,700	58%	41,000,000	58%	68,249,175	58%	76,005,651	Kecamatan Tanah Luas
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	20,000,000	35%	20,000,000	40%	26,181,000	45%	26,181,000	Kecamatan Nibong
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20.00%	58,241,934	25.00%	58,281,000	30.00%	79,716,410	35.00%	83,680,046	Kecamatan Nibong
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	10,500,000	35%	10,710,000	75	10,924,200	45%	11,142,684	Kecamatan Lapang
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	53,000,000	25%	53,620,000	30%	54,250,400	35%	54,891,408	Kecamatan Lapang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	65%	50%	4,900,000	61%	7,100,000	62%	7,100,000	72%	8,700,000	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	60%	61%	29,480,200	66%	38,300,000	72%	90,000,000	77%	100,000,000	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	12,000,000	35%	12,000,000	40%	20,000,000	45%	20,000,000	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	60,989,000	25%	64,000,000	30%	94,000,000	35%	96,000,000	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	30%	5,000,000	35%	5,000,000	40%	5,000,000	45%	5,000,000	Kecamatan Samudera
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20.00%	18,120,000	25.00%	18,120,000	30.00%	18,120,000	35.00%	18,120,000	Kecamatan Samudera
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	30%	25%	6,800,000	30%	6,800,000	40%	7,500,000	45%	7,900,000	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	70%	80%	18,881,300	85%	21,015,000	85%	30,500,000	86%	30,150,000	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	30%	10,431,000	35%	11,474,000	40%	15,000,000	45%	20,000,000	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67%	20.00%	19,940,000	25.00%	33,386,000	30.00%	80,000,000	35.00%	100,000,000	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	30%	5,000,000	35%	5,000,000	40%	5,000,000	45%	5,000,000	Kecamatan Geurudong Pase
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67%	20.00%	18,120,000	25.00%	18,651,000	30.00%	19,200,000	35.00%	19,200,000	Kecamatan Geurudong Pase
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	9,714,030	35%	9,714,030	40%	9,714,030	45%	9,714,030	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	30,552,000	25%	30,552,000	30%	47,552,000	35%	47,552,000	Kecamatan Simpang Keuramat

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30.00%	5,079,200	30.00%	5,587,120	30.00%	6,145,832	30.00%	6,760,415	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	11,695,300	20%	20,544,830	20%	21,204,331	20%	21,929,744	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	63%	5,000,000	70%	10,050,000	70%	23,485,815	75%	30,335,358	Kecamatan Dewantara
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	33,33%	40%	22,200,000	45%	30,958,510	50%	41,731,586	50%	68,063,536	Kecamatan Dewantara
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	30%	4,423,100	83%	4,423,100	83%	4,423,100	83%	4,423,100	Kecamatan Nisam Antara
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67%	20.00%	27,381,070	25.00%	31,237,050	30.00%	60,871,159	35.00%	75,871,159	Kecamatan Nisam Antara
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,916,874,202	100%	1,942,382,802	100%	2,085,987,145	100%	2,100,619,645	Kecamatan Nisam
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	65%	4,696,000	70%	5,080,800	75%	5,232,500	80%	5,600,000	Kecamatan Nisam
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73%	37,000,000	76%	40,000,000	80%	45,000,000	85%	50,000,000	Kecamatan Nisam
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67%	20.00%	18,120,000	25.00%	18,651,000	30.00%	19,200,000	35.00%	19,200,000	Kecamatan Nisam
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	67%	68%	5,000,000	70%	5,700,000	72%	7,000,000	75%	7,000,000	Kecamatan Banda Baro
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	20,000,000	25%	25,000,000	30%	68,000,000	35%	73,000,000	Kecamatan Banda Baro
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	5,000,000	35%	27,000,000	40%	28,500,000	45%	30,000,000	Kecamatan Muara Batu
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20.00%	18,120,000	25.00%	18,651,000	30.00%	19,200,000	35.00%	19,200,000	Kecamatan Muara Batu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	5,087,500	35%	3,031,875	40%	4,300,000	45%	5,659,800	Kecamatan Sawang
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	14.30%	30%	42,536,000	30%	42,536,108	40%	51,901,728	50%	51,076,728	Kecamatan Sawang
3.5	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Gampong rawan pangan										
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penguatan Cadangan Pangan Utama	10 Ton	10 Ton	1,118,775,000	30 Ton	1,118,886,878	30 Ton	1,120,005,764.00	30 Ton	1,121,125,770.00	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	421,02 Kg/kapita/tahun	438,78 kg/jiwa/tahun	405,000,000	448,78 Kg/kapita/tahun	405,382,500.00	458,78K g/kapita/tahun	405,787,883.00	468,78 Kg/kapita/tahun	406,193,670.00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan Gampong Rawan Pangan	18.78%	18.43%	10,000,000	18.08%	10,010,000.00	17.72%	10,020,010.00	17.37%	10,030,030.00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Tujuan :											
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	0.97	3.5		3.62		3.75		3.8		
	Sasaran :											
4.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	8,119,763,864	100%	8,129,763,864	100%	8,133,385,064	100%	8,154,112,584	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Perkebunan Andalan	13,55 Ton/ha	14,58 Ton/ha	2,721,745,005	15,31 Ton/ha	2,725,372,209	16,07 Ton/ha	2,949,071,958	16,88 Ton/ha	3,121,464,181	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Produksi Daging Ternak Sapi	8758 ton	9071 ton		9071 ton		10477 ton		11000 ton		
		Produksi Ayam Pedaging	13611 ton	14519 ton		14519 ton		15971 ton		16770 ton		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Prasarana Perkebunan/Peternakan/ Kesehatan Hewan	11.28 ton/ha	50%	2,520,000,000	50%	2,520,000,000	50%	2,940,000,000	50%	3,780,000,000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penurunan Kasus Penyakit Ternak	5.00%	5.00%	918,540,000	5.00%	928,540,000	5.00%	1,018,540,000	5.00%	1,326,394,000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Tersedianya Luas Areal OPT/HPT	300 Ha	100 Ha	290,000,000	100 Ha	300,000,000	100 Ha	450,000,000	100 Ha	600,000,000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pengetahuan Petani/Peternak	100 Orang	105 orang	90,000,000	105 orang	110,000,000	105 orang	128,000,000	105 orang	140,800,000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	20,428,686,491.00	100%	20,378,686,491.00	100%	20,378,686,491.00	100%	20,428,686,491.00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	-12.8%	-5%	2,003,250,000	-5%	2,005,253,250.00	5%	2,007,258,503.00	5%	2,009,265,762.00	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas Padi	5,34 ton/ha	5,45	5,863,239,700	5.51	6,022,606,626.00	5,55	6,896,875,038	5,60	8,841,638,218	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	2.60%	2.60%	240,000,000	2.60%	240,240,000.00	2.60%	240,480,240.00	2.60%	240,720,720.00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas pada kelompok tani/gapoktan	6.31%	10%	1,450,365,400	15%	1,451,815,765.00	20.00%	1,453,267,581.00	25.00%	1,454,720,849.00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	4,927,849,837	100%	4,883,549,837	100%	5,112,089,837	100%	4,868,313,061	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	5.00%	2.00%	1,581,397,176	2.00%	1,599,658,561	2.00%	1,911,959,060	2.00%	2,693,858,855	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5.00%	2.00%	5,281,397,175	2.00%	5,299,658,561	2.00%	5,611,959,060	2.00%	6,393,858,854	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tingkat Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Perikanan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku	0.00%	1.00%	151,110,000	1.00%	163,110,000	1.50%	229,000,330	2.00%	263,350,380	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	49,51 kg/kapita	25.23%	230,000,000	3.23%	254,900,000	3.23%	355,871,550	3.23%	501,498,686	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Industri	Pertumbuhan ekonomi sektor Industri										
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase tingkat pembangunan dan pembinaan Industri	100%	100%	770,000,000	100%	820,000,000	100%	980,000,000	100%	1,265,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase tingkat pembangunan dan pembinaan Industri	100%	0%	-	30%	50,000,000	0%	-	30%	50,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Kepatuhan Industri yang Diawasi Terhadap Regulasi	0%	20%	70,000,000	22%	70,000,000	22%	100,000,000	22%	150,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4.3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan besar dan eceran	Pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan besar dan eceran										

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan retribusi pasar	8%	100%	620,000,000	100%	680,000,000	100%	730,000,000	100%	950,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor	50.00%	10%	100,000,000	10%	100,000,000	10%	150,000,000	10%	180,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran	10%	10%	50,000,000	15%	50,000,000	15%	70,000,000	15%	100,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4.4	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	2.87	3		3		3		3		
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilisasi ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terjangkau oleh masyarakat	55.00%	30%	630,000,000	35%	630,000,000	35%	630,000,000	35%	685,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4.5	Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan tata ruang	Persentase kepatuhan implementasi peraturan tata ruang										
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase terselenggaranya penataan ruang	50%	55%	1,400,000,000	60%	1,400,000,000.00	65%	1,400,000,000	70%	1,400,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Tujuan :											
5	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik	Persentase Infrastruktur dasar dalam kondisi baik	42%	74%		76%		78%		80%		
	Sasaran :											
5.1	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Persentase jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap)	42.09%	46.00%		51.00%		56.00%		62.00%		
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang (mantap)	42.90%	46.00%	53,738,716,479	51.00%	53,307,922,805.33	56.00%	54,971,850,804	62.00%	56,554,820,804.33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU	24.88%	29.34%	877,926,488	35.21%	1,006,662,018.00	37.42%	1,147,382,208	39.19%	1,315,929,153.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Tingkat Ketersediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Yang Baik di Kab.Aceh Utara	100%	95%	15,620,000,000	95%	15,710,000,000	95%	16,210,000,000	95%	16,770,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	4,003,358,093	100%	3,958,227,086	100%	3,999,657,095	100%	4,240,798,283	Dinas Perhubungan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Cakupan Wilayah Pelayanan Angkutan Umum	52%	59%	2,030,790,500	63%	2,129,361,834	63%	2,295,268,668	74%	2,554,136,672	Dinas Perhubungan
		Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	71%	72%		72%		73%		74%		
		Pesentase fasilitas keselamatan jalan terpasang	49%	49%		53%		53%		54%		
5.2	Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	51.00%	53.00%		56.00%		60.00%		65.00%		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	51.00%	53.00%	11,500,000,000	56.00%	11,500,000,000.00	60.00%	11,500,000,000	65.00%	11,500,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase tingkat kondisi jalan lingkungan baik dan sedang	42.09%	50.00%	15,795,587,077	50.00%	16,005,498,819.00	50.00%	16,206,908,795	50.00%	16,389,946,971.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.3	Meningkatnya kualitas dan akses air bersih	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	69.78%	72.03%		74.43%		75.00%		78%		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	69.78%	72.03%	9,919,561,800	74.43%	10,117,953,036.00	75.00%	10,320,312,097	78.00%	10,526,718,339.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.4	Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi atau air limbah	67.09%	70.43%		73.95%		77%		80%		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	67.09%	70.43%	2,689,838,400	73.95%	2,661,935,168.00	77.00%	2,970,173,871	80.00%	3,029,577,349.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Jaringan Drainase Kondisi Baik	56.15%	68.15%	1,509,186,606	71.15%	1,859,370,958.00	71.15%	1,910,558,376	71.15%	2,228,269,544.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.5	Meningkatnya dan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persentase rumah layak huni	87.17%	89.92%		90.72%		91.52%		92.32%		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	16,004,450,808	100%	11,307,674,654.00	100%	10,796,680,512	100%	10,615,591,214.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	87.17%	89.92%	5,403,736,336	90.72%	5,511,811,062.00	91.52%	5,622,047,284	93.32%	5,734,488,229.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Tujuan :											
6	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup	65	70.09		70.59		70.89		80.10		
	Sasaran :											
6.1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	63.16	63.36		63.46		63.56		63.66		
		Indeks kualitas udara	90.75	90.95		91.05		91.25		91.35		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	4,339,500,000	100%	4,680,000,000	100%	4,832,000,000	100%	5,027,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kab.Aceh Utara	100%	100%	500,000,000	100%	800,000,000	100%	750,000,000	100%	800,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	65	63.36	1,210,000,000	63.46	1,365,000,000	63.5	1,515,000,000	91.15	1,660,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Indeks Kualitas Udara	88.51	90.95		91.05		91.15		91.25		
6.2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan, pengelolaan DAS dan sempadan untuk pengendalian banjir	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	63.16	63.36		63.46		63.56		63.66		
		Status DAS										
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37.02	43.07	1,850,000,000	44.99	1,920,000,000	46.9	2,130,000,000	48.81	2,350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase Pengelolaan Limbah B3	63%	64%	85,000,000	65%	71,000,000	66%	79,000,000	67%	87,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Yang Baik Terhadap Pelaku Usaha Dalam Menerapkan Izin PPLH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	100%	100%	75,000,000	100%	97,000,000	100%	119,000,000	100%	141,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (mha), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Tingkat Terwujudnya Pengakuan Terhadap MHA, Kearifan Lokal Dan Hak MHA Terkait PPLH di Kab.Aceh Utara	N/A	100%	15,000,000	100%	18,000,000	100%	21,000,000	100%	24,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Tingkat Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi Yang Peduli Lingkungan Terkait PPLH Di Kab.Aceh Utara	60%	100%	160,000,000	100%	180,000,000	100%	205,000,000	100%	230,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Tingkat Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Yang Peduli Terhadap Lingkungan Hidup Terkait PPLH di Kab.Aceh Utara	N/A	100%	100,000,000	100%	120,000,000	100%	140,000,000	100%	160,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat terhadap lingkungan Hidup	100%	100%	140,000,000	100%	152,000,000	100%	164,000,000	100%	176,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengelolaan Persampahan	Tingkat Pengelolaan Sampah Yang Baik Pertahun Di Kab.Aceh Utara	16,75%	18.26%	11,838,700,000	18.26%	12,568,000,000	18.26%	13,320,000,000	18.26%	13,962,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Tujuan :											
7	Meningkatkan tatakelola kebencanaan	Indeks Resiko Bencana										
	Sasaran :											
7.1	Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase gampong tanggap bencana	6%	8%		10%		12.00%		14%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	99%	100%	3,691,480,405	100%	3,691,480,405	100%	3,691,480,405	100%	3,691,480,405.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	NA	22	2,984,000,000	22	2,984,000,000	26	2,984,000,000	30	2,984,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu Tanggap Pencegahan Kebakaran Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	20 menit 78.00%	20 menit 85%	2,541,599,674	20 menit 85%	2,641,599,674	20 menit 90%	2,932,019,497	20 menit 90%	3,632,019,497	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan

Indikasi rencana program prioritas memuat program-program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPD telah dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya program prioritas sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan setiap tahunnya dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara.

7.1.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan memberikan gambaran mengenai perkiraan pendapatan daerah yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2023 hingga 2026 dengan memperhatikan pada kondisi ekonomi dan kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta belanja yang akan dikeluarkan dengan memperhatikan pada perkiraan pendapatan yang akan diterima serta kebijakan-kebijakan terkait dengan belanja daerah, maupun pembiayaan daerah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja daerah dan kondisi peningkatan pendapatan daerah, serta pertimbangan/kebijakan lainnya.

7.1.1.1. Pendapatan

Hasil proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Aceh Utara menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2023-2026 mencapai 0,95 persen. Bila ditinjau lebih rinci pada masing-masing jenis pendapatan, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 1,70 persen dengan rata-rata pertumbuhan pajak daerah sebesar 1,11 persen, dan retribusi daerah sebesar 1,64 persen. Obyek Lain-lain PAD yang sah merupakan pos pendapatan yang bersumber dari BLUD dan JKN, sehingga tidak

dapat diproyeksikan sebagai sumber pembiayaan untuk belanja APBK yang bersifat bebas (tidak terikat). Rata-rata pertumbuhan dari Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan sebesar 1,98 persen.

Pendapatan transfer diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,87 persen kondisi saat ini sudah membaik pasca pandemi Covid-19. Obyek pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan Transfer pemerintah pusat antara lain dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan Dana Insentif Daerah (DID) yang terdiri dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer antar daerah terjadi penurunan yang signifikan mulai tahun 2023, hal ini merupakan pengaruh dari berkurangnya Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar 1 persen dari DAU Nasional yang berdampak pada berkurangnya perolehan pendapatan DOKA sebesar 70 persen dari tahun sebelumnya. Berikut proyeksi pendapatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana Tabel 7.1 :

Tabel 7.1
 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026

No	Uraian	Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024	Pagu Tahun 2025	Pagu Tahun 2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	2.390.348.502.357,55	2.412.917.441.676,55	2.435.972.213.604,55	2.459.273.237.775,55
1.1	Pendapatan Asli Daerah	242.888.792.907,00	247.004.450.627,00	249.815.300.733,00	255.467.504.644,00
1.1.1	Pajak daerah	30.745.000.000,00	30.289.200.000,00	30.943.020.000,00	31.767.022.400,00
1.1.2	Retribusi daerah	4.211.735.900,00	4.266.985.900,00	4.310.347.900,00	4.422.297.900,00
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	20.922.892.607,00	20.922.892.607,00	20.922.892.607,00	20.922.892.607,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	187.009.164.400,00	191.525.372.120,00	193.639.040.226,00	198.355.291.737,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.147.459.709.450,55	2.165.912.991.049,55	2.186.156.912.871,55	2.203.805.733.131,55
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.064.228.994.484,00	2.083.366.921.594,00	2.102.887.607.246,00	2.122.798.706.612,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	83.230.714.966,55	82.546.069.455,55	83.269.305.625,55	81.007.026.519,55

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara Tahun 2022

7.1.1.2 Belanja

Dalam upaya mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efektif dan efisien, maka pengalokasian belanja daerah kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023-2026 sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pengalokasian anggaran mandatory lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
5. Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan: beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;
6. Belanja hibah dialokasikan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

7. Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk memberikan jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat, serta untuk penanggulangan kemiskinan dan bencana;
8. Belanja Modal dialokasikan untuk Belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan belanja modal fisik lainnya
9. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
10. Belanja Transfer dialokasikan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan yang dialokasikan untuk Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk pemerintah gampong paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK dan dana desa;
11. Melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah (efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja).

Berikut Proyeksi Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana disajikan pada tabel 7.2 :

Tabel 7.2
Proyeksi Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026

No	Uraian	Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024	Pagu Tahun 2025	Pagu Tahun 2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	Belanja	2.419.689.088.147,00	2.450.640.646.531,00	2.457.125.356.288,00	2.484.836.332.762,00
2.1	Belanja Operasi	1.402.042.259.582,00	1.422.256.469.474,00	1.425.116.329.511,00	1.448.609.758.499,00
2.1.1	Belanja Pegawai	915.000.000.000,00	917.000.000.000,00	920.000.000.000,00	923.000.000.000,00
2.1.2	Belanja Hibah	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00	37.000.000.000,00	39.000.000.000,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00	32.000.000.000,00	35.000.000.000,00
2.1.8	Belanja Barang dan Jasa	432.042.259.582,00	440.256.469.474,00	436.116.329.511,00	451.609.758.499,00
2.2	Belanja Modal	307.976.435.689,00	316.771.001.798,00	318.443.782.953,00	320.670.220.802,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	706.170.392.876,00	708.113.175.259,00	710.065.243.824,00	712.056.353.461,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara Tahun 2022

7.1.1.3 Pembiayaan

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana, untuk lebih akurat perhitungan maka dilakukan penyesuaian dengan kondisi tahun rencana. Komponen penerimaan pembiayaan daerah mencakup:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - b. Pembayaran Pokok Utang.

Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya berfluktuatif dari tahun 2023 hingga tahun 2026 yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah. Untuk melihat Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.3.

Tabel 7.3
 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026

No	Uraian	Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024	Pagu Tahun 2025	Pagu Tahun 2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	Pembiayaan	29.340.585.789,45	37.723.204.854,45	21.153.142.683,45	25.563.094.986,45
3.1	Penerimaan Pembiayaan	29.340.585.789,45	37.723.204.854,45	21.153.142.683,45	25.563.094.986,45
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara Tahun 2022

7.1.1.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi kapasitas riil keuangan Kabupaten Aceh Utara yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun dari tahun 2023 hingga tahun 2026. Perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang disajikan dibawah ini merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan informasi terkini pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Dari perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Utara diketahui pada tahun 2023 berjumlah sebesar Rp. 731.287.259.934 dan meningkat hingga tahun 2026 diprediksi sebesar Rp.759.670.220.802. Lebih rinci mengenai kapasitas riil kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan daerah dapat lihat pada Tabel 7.4 :

Tabel 7.4
 Proyeksi Kapasitas Riil Kabupaten Aceh Utara
 Tahun 2023-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)			
		2023	2024	2025	2026
1.	Pendapatan	2.390.348.502.357,55	2.412.917.441.676,55	2.435.972.213.604,55	2.459.273.237.775,55
2.	Pembiayaan	29.340.585.789	37.723.204.854	21.153.142.683	25.563.094.986
	Total Penerimaan	2.419.689.088.147	2.450.640.646.531	2.457.125.356.288	2.484.836.332.762
	Dikurangi :				
3.	Belanja Wajib Mengikat	1.676.170.392.876	1.690.113.175.259	1.699.065.243.824	1.709.056.353.461
	Belanja Pegawai	915.000.000.000	917.000.000.000	920.000.000.000	923.000.000.000
	Belanja Hibah	30.000.000.000	35.000.000.000	37.000.000.000	39.000.000.000
	Belanja Bantuan Sosial	25.000.000.000	30.000.000.000	32.000.000.000	35.000.000.000
	Belanja Transfer	706.170.392.876	708.113.175.259	710.065.243.824	712.056.353.461
4.	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	740.018.695.271	757.027.471.272	754.560.112.464	772.279.979.301

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara Tahun 2022

Tabel 7.5
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan											
	Program Pendidikan Dayah	Persentase dayah memenuhi Standarisasi dayah	53.81%	56.35%	16,882,800,000	58.83%	16,885,550,000.00	61.42%	17,882,782,000	63.96%	18,382,800,000.00	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Tersedianya pelayanan MPD	100%	100%	1,205,000,000	100%	979,517,815.00	100%	1,234,192,864	100%	1,264,539,420.40	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	375,401,826,521	100%	375,459,174,190.60	100%	375,497,468,814	100%	375,580,065,889.04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar PAUD	38,79%	38,80%	333,172,402,699	39,89%	333,245,373,295	42,45%	334,478,421,909	58,00%	335,322,395,623.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni SD	89,26%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
		Angka Partisipasi Kasar SD	101,64%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
		Angka Partisipasi Murni SMP	70,04%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
		Angka Partisipasi Kasar SMP	99,40%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan	40%	43.00%	431,250,000	45.00%	439,875,000.00	48.00%	448,672,500	50.00%	457,645,950.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	140,110,421,243	100%	140,110,421,243.00	100%	140,354,691,011	100%	140,708,241,011.00	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	59,04%	70.00%	110,295,482,387	80.00%	110,305,482,500.00	90.00%	109,761,342,200	100.00%	111,258,187,200.00	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	71.88%	75.00%	744,325,764	78.13%	747,227,527.00	81.25%	800,187,326	84.38%	902,811,320.00	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dan Sertifikat izin produksi makanan dan minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga	79.00%	79.00%	253,542,000	80.00%	253,542,000.00	80.00%	253,542,000	80.00%	253,542,000.00	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang sudah menerapkan PHBS	12,8%	15.00%	739,535,100	18%	739,535,100.00	20%	739,535,100	23%	839,535,100.00	Dinas Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	141,296,974,348	100%	144,612,974,348.00	100%	147,927,370,224	100%	151,227,370,224.00	Rumah Sakit Umum Cut Meutia
		Nilai Indeks Kepuasan Pasien	76,63	77.00		77,5		77,5		77,5		Rumah Sakit Umum Cut Meutia
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Rujukan Ke Faskes Lainnya Turun	1889 rujukan	1850 rujukan	758,995,490	1800 rujukan	758,995,490.00	1770 rujukan	1,258,995,490	1750 rujukan	1,258,995,490.00	Rumah Sakit Umum Cut Meutia
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	15,183,415,097	100%	15,644,215,097.00	100%	15,238,715,097	100%	15,155,745,097.00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	51.00%	53.00%	11,500,000,000	56.00%	11,500,000,000.00	60.00%	11,500,000,000	65.00%	11,500,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang (mantap)	42.90%	46.00%	53,738,716,479	51.00%	53,307,922,805.33	56.00%	54,971,850,804	62.00%	56,554,820,804.33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase tingkat kondisi jalan Lingkungan baik dan sedang	42.09%	50.00%	15,795,587,077	50.00%	16,005,498,819.00	50.00%	16,206,908,795	50.00%	16,389,946,971.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase terselenggaranya penataan ruang	50%	55%	1,400,000,000	60%	1,400,000,000.00	65%	1,400,000,000	70%	1,400,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	69.78%	72.03%	9,919,561,800	74.43%	10,117,953,036.00	75.00%	10,320,312,097	78.00%	10,526,718,339.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	67.09%	70.43%	2,689,838,400	73.95%	2,661,935,168.00	77.00%	2,970,173,871	80.00%	3,029,577,349.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Jaringan Drainase Kondisi Baik	56.15%	68.15%	1,509,186,606	71.15%	1,859,370,958.00	71.15%	1,910,558,376	71.15%	2,228,269,544.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara	45.45%	45.45%	703,676,504	48.48%	751,449,635.00	51.52%	820,277,207	54.55%	953,819,551.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	16,004,450,808	100%	11,307,674,654.00	100%	10,796,680,512	100%	10,615,591,214.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	87.17%	88.25%	5,403,736,336	89.12%	5,511,811,062.00	89.12%	5,622,047,284	89.12%	5,734,488,229.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU	24.88%	29.34%	877,926,488	35.21%	1,006,662,018.00	37.42%	1,147,382,208	39.19%	1,315,929,153.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Tingkat Ketersediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Yang Baik di Kab.Aceh Utara	100%	95%	15,620,000,000	95%	15,710,000,000	95%	16,210,000,000	95%	16,770,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	99%	100%	3,691,480,405	100%	3,691,480,405	100%	3,691,480,405	100%	3,691,480,405.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	NA	22	2,984,000,000	22	2,984,000,000	26	2,984,000,000	30	2,984,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu Tanggap Pencegahan Kebakaran Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	20 menit 78.00%	20 menit 85%	2,541,599,674	20 menit 85%	2,641,599,674	20 menit 90%	2,932,019,497	20 menit 90%	3,632,019,497	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	12,291,672,667	100%	11,553,737,917	100%	11,579,859,901	100%	11,606,672,276.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Qanun dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	717,704,141	100%	1,246,025,532	100%	1,292,778,882	100%	1,366,121,255.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	5,704,659,837	100%	5,705,101,237	100%	5,718,375,609	100%	6,038,375,609.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Kapasitas PSKS	1.40%	1.50%	111,200,000	1.60%	111,200,000	1.70%	161,200,000	1.80%	161,200,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat bantuan pertahun	4%	5%	445,000,000	5%	545,000,000	5%	795,000,000	5%	995,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial	90%	90%	3,513,960,000	95%	3,513,960,000	95%	3,613,960,000	95%	3,663,960,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase PMKS yang memperoleh pemberdayaan sosial per tahun	1.40%	1.50%		1.60%		1.70%		1.80%		
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	427,000,000	100%	427,000,000	100%	527,000,000	100%	607,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.01	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	6,376,237,995	100%	5,776,237,995	100%	5,776,237,995	100%	5,776,237,995.00	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100%	100%	745,000,000	100%	195,000,000	100%	195,000,000	100%	195,000,000.00	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	20%	100%	69,000,000	100%	69,000,000	100%	69,000,000	100%	69,000,000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial	20%	100%	81,000,000	100%	81,000,000	100%	81,000,000	100%	81,000,000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada APBD	n/a	30%	250,000,000	45%	250,000,000	76%	350,000,000	100%	470,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	n/a	2%	250,000,000	1,5%	250,000,000	1,5%	350,000,000	1%	430,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase ketersediaan data gender dan anak	100%	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak	Pratama (nilai 615)	Madya	200,000,000	Madya	200,000,000	Nindya	350,000,000	Nindya	500,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani di instansi terkait kabupaten	7.48%	7%	80,000,000	7%	80,000,000	7%	180,000,000	6%	230,000,000.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan											
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penguatan Cadangan Pangan Utama	10 Ton	10 Ton	1,118,775,000	30 Ton	1,118,886,878	30 Ton	1,120,005,764.00	30 Ton	1,121,125,770.00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	421,02 Kg/kapita/tahun	438,78 kg/jiwa/tahun	405,000,000	448,78 Kg/kapita/tahun	405,382,500.00	458,78Kg/kapita/tahun	405,787,883.00	468,78 Kg/kapita/tahun	406,193,670.00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan Gampong Rawan Pangan	18.78%	18.43%	10,000,000	18.08%	10,010,000.00	17.72%	10,020,010.00	17.37%	10,030,030.00	Dinas Pertanian dan Pangan
2.04	Pertanahan											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	3,115,882,694	100%	3,115,882,694	100%	3,116,997,672	100%	3,116,997,672	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Pengadaan Tanah Yang Di Fasilitas Untuk Kepentingan Umum di Kab.Aceh Utara	0.35%	0.044%	65,000,000	0.044%	70,000,000	0.044%	80,000,000	0.176%	150,000,000	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah di Kab.Aceh Utara	N/A	100%	160,000,000	100%	190,000,000	100%	220,000,000	100%	370,000,000	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	Persentase Data Aset Yang di Fasilitas, terinventarisasi serta Pengurusan Hak Milik Pemda Kab.Aceh Utara	11.17%	4.74%	275,000,000	5.75%	290,000,000	7.01%	300,000,000	7.90%	350,000,000	Dinas Pertanahan Kabupaten

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) Kab.Aceh Utara	100%	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	75,000,000	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Persentase Penyelesaian sengketa tanah yang ditangani pertahun di Kab.Aceh Utara	50%	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	55,000,000	Dinas Pertanahan Kabupaten
2.05	Lingkungan Hidup											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	4,339,500,000	100%	4,680,000,000	100%	4,832,000,000	100%	5,027,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kab.Aceh Utara	100%	100%	500,000,000	100%	800,000,000	100%	750,000,000	100%	800,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	63.26%	63.36	1,210,000,000	63.46	1,365,000,000	63.5	1,515,000,000	91.15	1,660,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Indeks Kualitas Udara	90.85%	90.95		91.05		91.15		91.25		
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37.02	43.07	1,850,000,000	44.99	1,920,000,000	46.9	2,130,000,000	48.81	2,350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase Pengelolaan Limbah B3	63%	64%	85,000,000	65%	71,000,000	66%	79,000,000	67%	87,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Yang Baik Terhadap Pelaku Usaha Dalam Menerapkan Izin PPLH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	100%	100%	75,000,000	100%	97,000,000	100%	119,000,000	100%	141,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (mha), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Tingkat Terwujudnya Pengakuan Terhadap MHA, Kearifan Lokal Dan Hak MHA Terkait PPLH di Kab.Aceh Utara	N/A	100%	15,000,000	100%	18,000,000	100%	21,000,000	100%	24,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Tingkat Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi Yang Peduli Lingkungan Terkait PPLH Di Kab.Aceh Utara	60%	100%	160,000,000	100%	180,000,000	100%	205,000,000	100%	230,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Tingkat Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Yang Peduli Terhadap Lingkungan Hidup Terkait PPLH di Kab.Aceh Utara	N/A	100%	100,000,000	100%	120,000,000	100%	140,000,000	100%	160,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat terhadap lingkungan Hidup	100%	100%	140,000,000	100%	152,000,000	100%	164,000,000	100%	176,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengelolaan Persampahan	Tingkat Pengelolaan Sampah Yang Baik Pertahun Di Kab.Aceh Utara	16,75%	18.26%	11,838,700,000	18.26%	12,568,000,000	18.26%	13,320,000,000	18.26%	13,962,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.06	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	3,220,572,081	100%	3,254,602,211	100%	3,202,853,213	100%	3,491,534,405.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	97%	100%	867,530,000	100%	867,530,000	100%	1,333,000,000	100%	1,388,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	22,61%	40%		42%		43%		45%		
	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	81%	98%	95,500,000	100%	106,000,000	100%	136,735,000	100%	185,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kerjasama pemanfaatan data dan informasi kependudukan	30%	36%	224,352,800	37%	224,352,800	38%	290,269,038	39%	383,322,846.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan	100%	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	50,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	5,409,411,439	100%	5,409,411,319	100%	5,468,654,661	100%	5,473,004,661.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kerja sama Desa	Persentase Gampong yang melaksanakan kerjasama	59%	60%	85,000,000	70%	85,000,000	80%	88,000,000	80%	95,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa Tertinggal dan sangat tertinggal	75,94%	46,24%	1,172,738,743	42,84%	1,172,971,714	39,56%	1,547,301,557	36,27%	1,958,250,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	80%	81%	1,121,999,600	82%	1,121,999,600	85%	1,153,500,000	87%	1,281,201,557.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	1,123,950,700	100%	1,128,950,700	50%	1,153,950,700	50%	1,178,950,700.00	Sekretariat Daerah
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana											
	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,60%	1,55%	203,814,000	1,50%	203,814,000	1,45%	203,814,000	1,40%	203,814,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prevalensi stunting	38,8%	32,00%	8,227,323,090	28,00%	8,227,323,090	24,00%	8,227,323,090	20,00%	8,227,323,090	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	67,27%	69,28%		71,28%		73,28%		75,48%		
		TFR (Angka Kelahiran Total)	2,77	2,54		2,35		2,03		1,85		
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	14,78%	12,32%	4,523,640,000	11,30%	4,523,640,000	10,35%	4,523,640,000	9,65%	4,523,640,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09	Perhubungan											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4,003,358,093	100%	3,958,227,086	100%	3,999,657,095	100%	4,240,798,283	Dinas Perhubungan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Cakupan Wilayah Pelayanan Angkutan Umum	52%	59%	2,030,790,500	63%	2,129,361,834	63%	2,295,268,668	74%	2,554,136,672	Dinas Perhubungan
		Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	71%	72%		72%		73%		74%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
		Pesentase fasilitas keselamatan jalan terpasang	49%	49%		53%		53%		54%		
2.10	Usuran Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika											
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik yang di selenggarakan secara Online dan terintegrasi	78%	78%	310,000,000	83%	310,000,000	83%	322,000,000	83%	326,000,000	Sekretariat Daerah
	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD Terhubung dengan Akses Internet yang di sediakan oleh Kominfo	100%	100%	76,096,300	100%	77,096,300	100%	84,096,300	100%	90,096,300	Sekretariat Daerah
2.11	Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	6,237,136,907	100%	6,362,136,907	100%	6,729,997,795	100%	6,824,997,795	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Peningkatan Perizinan Usaha Koperasi Simpan Pinjam	46.05%	-	-	47.77%	40,000,000	49.38%	40,000,000	50.58%	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	24.69%	24.69%	80,000,000	30.54%	90,000,000	40.19%	100,000,000	55.31%	150,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Sehat	42.76%	42.76%	110,000,000	46.11%	110,000,000	44.74%	150,000,000	48.42%	180,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	12.35%	12.35%	80,000,000	13.97%	80,000,000	14.53%	80,000,000	16.48%	100,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang terfasilitasi pengembangan usaha.	17.49%	17.49%	500,000,000	19.96%	500,000,000	19.77%	500,000,000	23.81%	500,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Terfasilitasi Izin Usaha Produk Mikro (UMKM)	21.47%	21.47%	30,000,000	28.05%	55,000,000	35.06%	55,000,000	45.35%	120,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan pelaku Usaha Mikro Produktif, Pengolahan dan Pemasaran	10.96%	10.96%	100,000,000	17.53%	100,000,000	19.28%	150,000,000	21.91%	200,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal											
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	6.83%	6.90%	160,000,000	6.70%	160,000,000	6.70%	160,000,000	6.70%	160,000,000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	100.00%	100.00%	300,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%	300,000,000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	53 investor	100%	462,118,800	100%	462,118,800	100%	462,118,800	100%	462,118,800	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Data dan Informasi	100%	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,096,726,855	100%	2,098,845,118	100%	2,164,803,170	100%	2,264,803,170	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	6,64%	6,65%	1,500,000,000	6,66%	1,500,000,000	6,70%	1,750,000,000	6,75%	1,750,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	16,52%	16,53%		16,55%		16,66%		16,70%		
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaaan	Peningkatan prestasi olahraga	21 medali	9 medali	3,800,000,000	12 medali	3,400,000,000	14 medali	4,300,000,000	23 medali	4,550,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan											
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pelaku seni yang dibina per tahun	40%	25%	387,502,990	25%	395,253,050	25%	403,158,111	25%	411,221,273	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar budaya yang terkelola dan dilestarikan per tahun	40%	20%	1,055,140,266	20%	1,076,243,071	30%	1,097,767,933	30%	1,119,723,291	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseum	Peningkatan jumlah kunjungan ke museum per tahun	30%	18%	1,700,000,000	18%	1,734,000,000	18%	1,721,862,000	18%	1,756,299,240	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Persentase adat yang dilestarikan	50%	70%	1,074,800,500	70%	1,075,000,000	70%	1,170,000,000	70%	1,270,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan											
	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip	70%	70%	223,000,000	70%	305,500,000	70%	310,800,000	70%	419,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	70%	70%	90,000,000	70%	90,000,000	70%	290,000,000	70%	286,271,531	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	70%	70%	2,000,000	70%	2,000,000	70%	2,000,000	70%	2,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3,324,387,936	100%	3,347,387,936	100%	3,347,387,936	100%	3,347,387,936	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung pustaka per tahun	3.796 Orang	3.986 Orang	2,094,160,000	4.185 Orang	1,990,705,714	4.394 Orang	2,184,971,531	4.614 Orang	2,505,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	66.382 koleksi	66.701 koleksi		73.020 koleksi		76.339 koleksi		79.658 koleksi		
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	20%	20%	370,000,000	20%	370,000,000	20%	395,000,000	20%	470,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	4,927,849,837	100%	4,883,549,837	100%	5,112,089,837	100%	4,868,313,061	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	5.00%	2.00%	1,581,397,176	2.00%	1,599,658,561	2.00%	1,911,959,060	2.00%	2,693,858,855	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5.00%	2.00%	5,281,397,175	2.00%	5,299,658,561	2.00%	5,611,959,060	2.00%	6,393,858,854	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tingkat Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Perikanan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku	0.00%	1.00%	151,110,000	1.00%	163,110,000	1.50%	229,000,330	2.00%	263,350,380	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	49,51 kg/kapita	25.23%	230,000,000	3.23%	254,900,000	3.23%	355,871,550	3.23%	501,498,686	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata											
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi wisata	7.69%	5%	900,000,000	5%	900,000,000	5%	900,000,000	5%	1,050,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemamfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan zona kreatif	n/a	5%	350,000,000	5%	300,000,000	5%	350,000,000	5%	450,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	10%	10%	200,000,000	10%	200,000,000	10%	300,000,000	10%	300,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peran masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	n/a	5%	100,000,000	5%	100,000,000	5%	200,000,000	5%	200,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	8,119,763,864	100%	8,129,763,864	100%	8,133,385,064	100%	8,154,112,584	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Perkebunan Andalan	13,55 Ton/ha	14,58 Ton/ha	2,721,745,005	15,31 Ton/ha	2,725,372,209	16,07 Ton/ha	2,949,071,958	16,88 Ton/ha	3,121,464,181	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Produksi Daging Ternak Sapi	8758 ton	9071 ton		9071 ton		10477 ton		11000 ton		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)	
		Produksi Ayam Pedaging	13611 ton	14519 ton		14519 ton		15971 ton		16770 ton			
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Prasarana Perkebunan/Peternakan/Kesehatan Hewan	11.28 ton/ha	50%	2,520,000,000	50%	2,520,000,000	50%	2,940,000,000	50%	3,780,000,000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penurunan Kasus Penyakit Ternak	5.00%	5.00%	918,540,000	5.00%	928,540,000	5.00%	1,018,540,000	5.00%	1,326,394,000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Tersedianya Luas Areal OPT/HPT	300 Ha	100 Ha	290,000,000	200 Ha	300,000,000	100 Ha	450,000,000	100 Ha	600,000,000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pengetahuan Petani/Peternak	108.045 ekor	105 orang	90,000,000	105 orang	110,000,000	105 orang	128,000,000	105 orang	140,800,000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	20,428,686,491.00	100%	20,378,686,491.00	100%	20,378,686,491.00	100%	20,428,686,491.00	Dinas Pertanian dan Pangan	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	-12.8%	-5%	2,003,250,000	-5%	2,005,253,250.00	5%	2,007,258,503.00	5%	2,009,265,762.00	Dinas Pertanian dan Pangan	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas Padi	5,34 ton/ha	5,45	5,863,239,700	5,51	6,022,606,626.00	5,55	6,896,875,038	5,60	8,841,638,218	Dinas Pertanian dan Pangan	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	2.60%	2.60%	240,000,000	2.60%	240,240,000.00	2.60%	240,480,240.00	2.60%	240,720,720.00	Dinas Pertanian dan Pangan	
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas pada kelompok tani/gapoktan	6.31%	10%	1,450,365,400	15%	1,451,815,765.00	20.00%	1,453,267,581.00	25.00%	1,454,720,849.00	Dinas Pertanian dan Pangan	
3.04	Usuran Pemerintahan Bidang Perdagangan												
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan retribusi pasar	8%	100%	620,000,000	100%	680,000,000	100%	730,000,000	100%	950,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil	
	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor	50.00%	10%	100,000,000	10%	100,000,000	10%	150,000,000	10%	180,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran	10%	10%	50,000,000	15%	50,000,000	15%	70,000,000	15%	100,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilisasi ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terjangkau oleh masyarakat	55.00%	30%	630,000,000	35%	630,000,000	35%	630,000,000	35%	685,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.05	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian											
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase tingkat pembangunan dan pembinaan Industri	100%	100%	770,000,000	100%	820,000,000	100%	980,000,000	100%	1,265,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten Kota	Persentase tingkat pembangunan dan pembinaan Industri	100%	0%	-	30%	50,000,000	0%	-	30%	50,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Kepatuhan Industri yang Diawasi Terhadap Regulasi	0%	20%	70,000,000	22%	70,000,000	22%	100,000,000	22%	150,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
3.06	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi											
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Peningkatan Sarana Pemukiman Transmigrasi	100%	100%	5,000,000	100%	5,250,000	100%	5,512,500	100%	5,788,125	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pembinaan kawasan transmigrasi	100%	100%	290,737,330	100%	1,464,514,300	100%	2,147,933,810	100%	2,897,933,810	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	Sekretariat Daerah											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	31,116,683,299	100%	36,806,990,777	100%	33,562,029,777	100%	34,101,744,752	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	1,794,648,900	100%	1,810,548,900	100%	2,028,748,900	100%	2,091,148,900	Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	849,696,600	100%	862,396,600	100%	897,600,976	100%	932,799,176	Sekretariat Daerah
4.02	Sekretariat DPRD											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	33,920,179,486	100%	34,460,425,590	100%	35,478,293,156	100%	35,480,481,834	Sekretariat DPRK
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana	100%	100%	8,993,144,594	100%	8,990,697,926	100%	8,565,031,328	100%	9,062,842,649	Sekretariat DPRK
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.01	Perencanaan											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	5,948,489,680	100%	5,950,489,680	100%	6,453,489,680	100%	6,656,489,680	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	1,337,647,954	100%	1,514,515,400	100%	2,004,011,900	100%	2,026,011,900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap program RPJMD	100%	100%	736,784,600	100%	776,784,600	100%	816,784,600	100%	841,784,600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02	Keuangan											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	16,790,910,235	100%	12,872,191,293	100%	12,984,104,693	100%	12,984,104,693	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	100%	713,526,764,193	100%	712,541,944,579	100%	718,666,365,234	100%	718,856,498,214	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Solvabilitas jangka panjang	713,04 kali	713,04 kali	1,098,909,092	748,69 Kali	1,132,150,094	786,12 Kali	1,245,365,103	825,43 Kali	1,287,927,017	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	8,96%	10,26%	1,851,735,801	10,33%	1,907,287,875	10,34%	2,098,016,663	10,46%	2,165,321,769	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.03	Kepegawaian											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	7,968,234,979	100%	7,927,249,579	100%	8,425,468,579	100%	8,175,968,579	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penerbitan SK secara tepat waktu	100%	100%	1,940,457,100	100%	2,254,985,400	100%	2,837,080,000	100%	3,335,596,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	70 : 30	75 : 25		80 : 20		85 : 15		90:10		
		Penurunan jumlah ASN yang dijatuhi sanksi disiplin	202 Kasus	100 Kasus		75 Kasus		50 Kasus		30 Kasus		
5.04	Pendidikan dan Pelatihan											
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	66%	100%	580,000,000	100%	590,000,000	100%	804,920,000	100%	955,904,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	Penelitian dan Pengembangan											
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil penelitian dan inovasi pembangunan daerah	100%	100%	400,000,000	100%	450,000,000	100%	600,000,000	100%	650,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6.01	Inspektorat Daerah											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	8,735,000,000	100%	8,540,000,000	100%	8,720,000,000	100%	8,913,913,000	Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	23%	35 %	2,610,000,000	36%	2,965,000,000	37%	3,400,000,000	38%	3,750,000,000	Inspektorat
		Persentase Tindaklanjut Temuan	60%	61%		62%		63%		64%		Inspektorat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	765,000,000	Level 3	810,000,000	Level 3	900,000,000	Level 3	1,150,000,000	Inspektorat
		Level Maturitas SPIP	Level 2 (2,207)	Level 2 (2,250)		Level 2 (2,300)		Level 2 (2,350)		Level 2 (2,400)		
		Persentase hasil evaluasi SAKIP yang minimal bernilai B	54%	60%		67%		71%		75%		
		Persentase hasil evaluasi PMPRB yang minimal bernilai CC	80%	80%		80%		80%		80%		
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.1	KECAMATAN											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,797,976,816	100%	1,807,484,516	100%	1,900,074,016	100%	1,859,935,152	Kecamatan Langkahan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	64	3,275,200	69	3,275,200	75	13,240,000	80	20,100,000	Kecamatan Langkahan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	5,916,800	35%	5,916,800	40%	10,000,000	45%	25,000,000	Kecamatan Langkahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	35%	45,000,000	25%	45,000,000	30%	47,000,000	35%	69,000,000	Kecamatan Langkahan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80.00	73	37,000,000	76	37,000,000	80	45,000,000	85	50,000,000	Kecamatan Langkahan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	18,960,900	25%	18,960,900	30%	31,797,136	35%	43,076,000	Kecamatan Langkahan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,609,697,760	100%	2,618,599,060	100%	2,727,101,840	100%	2,726,601,840	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	0.75	65	6,500,000	70	6,700,000	75	8,000,000	80	15,500,000	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	67%	30%	6,500,000	35%	6,500,000	40%	10,000,000	45%	15,000,000	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	20%	25%	45,000,000	30%	45,000,000	35%	55,000,000	35%	65,000,000	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	0.8	73	37,000,000	76	37,500,000	80	39,500,000	85	40,000,000	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	17%	20%	21,750,000	25%	21,950,000	30%	30,000,000	35%	32,500,000	Kecamatan Tanah Jambo Aye

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,077,834,431	100%	2,077,834,431	100%	2,116,834,431	100%	2,116,834,431	Kecamatan Seunuddon
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	7,550,000	70	7,850,000	75	35,000,000	80	45,000,000	Kecamatan Seunuddon
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	6,000,000	35%	6,550,000	40%	15,000,000	45%	20,000,000	Kecamatan Seunuddon
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	45,000,000	25%	48,000,000	30%	70,010,800	35%	75,010,800	Kecamatan Seunuddon
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73	37,000,000	76	40,000,000	80	50,000,000	85	50,000,000	Kecamatan Seunuddon
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	21,597,600	25%	24,000,000	30%	40,400,000	35%	40,400,000	Kecamatan Seunuddon
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	3,588,316,352	100%	3,597,310,518	100%	3,675,679,965	100%	3,674,722,137	Kecamatan Baktiya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	70	7,063,500	74	7,346,040	78	9,566,421	83	12,000,000	Kecamatan Baktiya
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42.00%	30.00%	5,217,060	35.00%	5,425,742	40.00%	9,588,514	45.00%	15,000,000	Kecamatan Baktiya
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20.00%	36,000,000	25.00%	37,440,000	30.00%	47,563,200	35.00%	53,000,000	Kecamatan Baktiya
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80%	70	40,700,000	75	39,000,000	80	42,000,000	85	45,000,000	Kecamatan Baktiya
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	14%	30%	32,333,357	30%	37,716,369	40%	54,864,032	50%	64,539,995	Kecamatan Baktiya
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,127,774,551	100%	2,135,746,251	100%	2,189,109,258	100%	2,203,109,258	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	3,700,000	70	3,900,000	75	4,200,000	75	4,200,000	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	8,000,000	35%	8,000,000	40%	10,000,000	40%	10,000,000	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	6%	8%	40,000,000	12%	40,000,000	15%	59,000,000	15%	60,000,000	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	0.7	73	30,000,000	76	30,000,000	78	35,000,000	78	35,000,000	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	19,000,000	25%	20,000,000	30%	23,000,000	30%	28,000,000	Kecamatan Baktiya Barat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,986,416,848	100%	2,986,416,848	100%	3,005,452,098	100%	3,005,452,098	Kecamatan Lhoksukon
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	20,725,786	70	30,418,236	75	54,963,690	80	65,000,054	Kecamatan Lhoksukon
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	20,000,000	35%	20,000,000	40%	26,181,000	45%	26,181,000	Kecamatan Lhoksukon
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	60,000,000	25%	60,000,000	30%	76,000,000	35%	76,000,000	Kecamatan Lhoksukon
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73	41,000,000	76	47,000,000	80	59,473,546	85	75,200,000	Kecamatan Lhoksukon
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	61,748,964	25%	67,581,764	30%	98,381,764	35%	107,618,946	Kecamatan Lhoksukon
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,698,016,656	100%	1,725,542,766	100%	1,831,544,500	100%	1,851,071,219	Kecamatan Cot Girek
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	78%	30%	4,947,800	35%	5,442,580	40%	7,456,335	45%	8,101,350	Kecamatan Cot Girek
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	82%	100%	54,000,000	100%	61,809,810	100%	84,679,440	100%	86,147,250	Kecamatan Cot Girek
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75	73	40,700,000	76	46,770,000	80	51,447,000	85	52,345,000	Kecamatan Cot Girek
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	80%	100%	17,749,600	100%	20,214,900	100%	26,628,282	100%	29,090,737	Kecamatan Cot Girek
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,165,181,104	100%	2,176,074,929	100%	2,266,786,217	100%	2,279,358,917	Kecamatan Paya Bakong
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	5,796,000	70	5,080,800	75	5,232,500	80	5,600,000	Kecamatan Paya Bakong
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	30%	3,987,500	35%	3,531,875	40%	3,600,000	45%	5,659,800	Kecamatan Paya Bakong
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	50,000,000	25%	50,000,000	30%	50,000,000	35%	50,000,000	Kecamatan Paya Bakong
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	69.79	73	37,000,000	76	40,000,000	80	45,000,000	85	50,000,000	Kecamatan Paya Bakong
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67%	20.00%	18,120,000	25.00%	18,651,000	30.00%	19,200,000	35.00%	19,200,000	Kecamatan Paya Bakong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,429,002,033	100%	1,442,386,151	100%	1,575,726,651	100%	1,591,765,351	Kecamatan Pirak Timu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	65%	5,196,000	70%	5,480,800	75%	8,398,500	80%	9,200,000	Kecamatan Pirak Timu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	3,887,500	35%	3,998,600	40%	4,000,000	45%	5,659,800	Kecamatan Pirak Timu
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	35,000,000	25%	36,500,000	30%	47,500,000	35%	48,000,000	Kecamatan Pirak Timu
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80%	73%	37,000,000	76%	38,000,000	80%	45,000,000	85%	46,000,000	Kecamatan Pirak Timu
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	15,969,453	25%	18,859,435	30%	19,200,000	35%	19,200,000	Kecamatan Pirak Timu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,078,415,055	100%	2,083,978,855	100%	2,159,841,530	100%	2,184,380,030	Kecamatan Matangkuli
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	5,400,000	70	6,100,000	75	7,400,000	80	7,400,000	Kecamatan Matangkuli
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	6,500,000	35%	6,500,000	40%	6,500,000	45%	6,500,000	Kecamatan Matangkuli
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	60,000,000	25%	60,000,000	30%	70,000,000	35%	70,000,000	Kecamatan Matangkuli
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73	37,000,000	76	37,000,000	80	50,000,000	85	50,000,000	Kecamatan Matangkuli
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	18,650,000	25%	19,035,000	30%	19,438,500	35%	19,900,000	Kecamatan Matangkuli
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,740,083,447	100%	2,758,589,047	100%	2,803,654,674	100%	2,813,395,267	Kecamatan Tanah Luas
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	72	83	10,000,000	83	14,800,000	83	42,400,798	83	42,885,478	Kecamatan Tanah Luas
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	68%	76	4,000,000	76%	4,000,000	76%	10,000,000	76%	15,000,000	Kecamatan Tanah Luas
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	60%	45%	72,000,000	45%	72,000,000	45%	63,100,000	45%	68,100,000	Kecamatan Tanah Luas
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	65%	86%	10,000,000	86%	10,000,000	86	20,000,000	86	17,018,251	Kecamatan Tanah Luas
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	54%	58%	52,632,700	58%	41,000,000	58%	68,249,175	58%	76,005,651	Kecamatan Tanah Luas
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,445,853,850	100%	1,445,853,850	100%	1,464,889,100	100%	1,464,889,100	Kecamatan Nibong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	20,725,786	70	26,897,220	75	45,963,690	80	60,000,054	Kecamatan Nibong
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	20,000,000	35%	20,000,000	40%	26,181,000	45%	26,181,000	Kecamatan Nibong
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	4%	20%	60,000,000	25%	60,000,000	30%	76,000,000	35%	76,000,000	Kecamatan Nibong
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	70	63	41,000,000	76	41,000,000	80	55,200,000	85	57,200,000	Kecamatan Nibong
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20.00%	58,241,934	25.00%	58,281,000	30.00%	79,716,410	35.00%	83,680,046	Kecamatan Nibong
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,669,509,281	100%	1,674,982,673	100%	1,645,616,357	100%	1,658,007,169	Kecamatan Lapang
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	12,000,000	70	12,240,000	75	12,484,800	80	12,734,496	Kecamatan Lapang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	10,500,000	35%	10,710,000	75	10,924,200	45%	11,142,684	Kecamatan Lapang
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	45,000,000	25%	50,000,000	30%	50,000,000	35%	55,000,000	Kecamatan Lapang
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73	51,000,000	76	52,500,000	80	54,000,000	85	55,500,000	Kecamatan Lapang
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	53,000,000	25%	53,620,000	30%	54,250,400	35%	54,891,408	Kecamatan Lapang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,911,207,542	100%	1,911,207,542	100%	1,961,621,462	100%	1,961,621,462	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	66	4,200,000	69	12,600,000	70	21,600,000	71	30,000,000	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	65%	50%	4,900,000	61%	7,100,000	62%	7,100,000	72%	8,700,000	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	68%	47%	72,000,000	49%	72,000,000	53%	81,300,000	55%	81,300,000	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	65	63	10,000,000	68	10,000,000	68	30,000,000	70	30,000,000	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	60%	61%	29,480,200	66%	38,300,000	72%	90,000,000	77%	100,000,000	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,050,534,294	100%	2,050,534,294	100%	2,068,882,094	100%	2,068,882,094	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	24,000,000	70	27,000,000	75	36,000,000	80	59,000,000	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	12,000,000	35%	12,000,000	40%	20,000,000	45%	20,000,000	Kecamatan Syamtalira Aron

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	45,000,000	25%	45,000,000	30%	75,000,000	35%	75,000,000	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73	37,000,000	76	37,000,000	80	50,000,000	85	50,000,000	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	60,989,000	25%	64,000,000	30%	94,000,000	35%	96,000,000	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,200,179,224	100%	2,234,614,924	100%	2,397,139,424	100%	2,422,139,424	Kecamatan Samudera
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	4,696,000	70	4,696,000	75	4,696,000	80	4,696,000	Kecamatan Samudera
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	30%	5,000,000	35%	5,000,000	40%	5,000,000	45%	5,000,000	Kecamatan Samudera
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	40,000,000	25%	30,000,000	30%	30,000,000	35%	30,000,000	Kecamatan Samudera
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80.00%	73%	37,000,000	76.00%	37,000,000	80.00%	37,000,000	85.00%	37,000,000	Kecamatan Samudera
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20.00%	18,120,000	25.00%	18,120,000	30.00%	18,120,000	35.00%	18,120,000	Kecamatan Samudera
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,978,320,400	100%	1,984,405,400	100%	2,060,769,086	100%	2,090,619,086	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	88	9,899,100	89	9,900,000	90	12,700,000	95	13,400,000	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	30%	25%	6,800,000	30%	6,800,000	40%	7,500,000	45%	7,900,000	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	5%	15%	40,000,000	20%	40,000,000	25%	52,500,000	30%	52,200,000	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	75	37,000,000	77	38,000,000	80	47,300,000	85	37,000,000	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	70%	80%	18,881,300	85%	21,015,000	85%	30,500,000	86%	30,150,000	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,603,589,377	100%	2,603,589,377	100%	2,658,609,346	100%	2,658,609,346	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	28,811,500	70	37,140,000	75	57,000,000	80	57,000,000	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	30%	10,431,000	35%	11,474,000	40%	15,000,000	45%	20,000,000	Kecamatan Syamtalira Bayu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	35,000,000	25%	45,000,000	30%	67,000,000	35%	67,000,000	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	69.79	73	40,000,000	76	48,000,000	80	56,000,000	85	56,000,000	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67%	20.00%	19,940,000	25.00%	33,386,000	30.00%	80,000,000	35.00%	100,000,000	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,746,465,071	100%	1,738,668,008	100%	1,887,907,443	100%	1,897,539,943	Kecamatan Geurudong Pase
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	4,696,000	70	5,080,800	75	5,232,500	80	5,600,000	Kecamatan Geurudong Pase
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	30%	5,000,000	35%	5,000,000	40%	5,000,000	45%	5,000,000	Kecamatan Geurudong Pase
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	35,000,000	25%	45,000,000	30%	45,000,000	35%	50,000,000	Kecamatan Geurudong Pase
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73	37,000,000	76	40,000,000	80	45,000,000	85	50,000,000	Kecamatan Geurudong Pase
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67%	20.00%	18,120,000	25.00%	18,651,000	30.00%	19,200,000	35.00%	19,200,000	Kecamatan Geurudong Pase
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,750,512,716	100%	1,750,073,416	100%	1,812,447,144	100%	1,812,447,144	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	17,007,000	70	17,007,000	75	17,007,000	80	17,007,000	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	9,714,030	35%	9,714,030	40%	9,714,030	45%	9,714,030	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	35,000,000	25%	35,000,000	30%	55,000,000	35%	55,000,000	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73	40,000,000	76	43,000,000	80	80,000,000	85	90,000,000	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	30,552,000	25%	30,552,000	30%	47,552,000	35%	47,552,000	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,118,860,125	100%	2,133,916,085	100%	2,278,046,536	100%	2,268,576,165	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	65%	30,001,900	65%	31,562,090	65%	33,925,754	65%	35,166,129	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30.00%	5,079,200	30.00%	5,587,120	30.00%	6,145,832	30.00%	6,760,415	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20.00%	40,000,000	20.00%	44,000,000	20.00%	48,400,000	20.00%	54,240,000	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80%	73%	40,000,000	73%	40,000,000	73%	60,500,000	73%	86,550,000	Kecamatan Kuta Makmur

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	11,695,300	20%	20,544,830	20%	21,204,331	20%	21,929,744	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,771,486,526	100%	2,788,578,015	100%	2,854,687,725	100%	2,807,048,055	Kecamatan Dewantara
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	88	13,000,000	88	26,130,000	88	60,391,300	88	73,865,213	Kecamatan Dewantara
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	63%	5,000,000	70%	10,050,000	70%	23,485,815	75%	30,335,358	Kecamatan Dewantara
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	4%	6%	40,000,000	28%	40,400,000	35%	55,652,500	40%	71,209,025	Kecamatan Dewantara
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73	37,000,000	76	40,370,000	80	45,773,700	85	56,201,437	Kecamatan Dewantara
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	33,33%	40%	22,200,000	45%	30,958,510	50%	41,731,586	50%	68,063,536	Kecamatan Dewantara
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,369,847,256	100%	1,369,847,256	100%	1,406,963,956	100%	1,406,963,956	Kecamatan Nisam Antara
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	10,502,030	70	17,339,850	75	14,705,741	80	14,705,741	Kecamatan Nisam Antara
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	30%	4,423,100	83%	4,423,100	83%	4,423,100	83%	4,423,100	Kecamatan Nisam Antara
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	46,938,430	25%	50,000,000	30%	100,000,000	35%	105,000,000	Kecamatan Nisam Antara
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	69.79	73	37,000,000	76	37,000,000	80	50,000,000	85	50,000,000	Kecamatan Nisam Antara
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67%	20.00%	27,381,070	25.00%	31,237,050	30.00%	60,871,159	35.00%	75,871,159	Kecamatan Nisam Antara
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,916,874,202	100%	1,942,382,802	100%	2,085,987,145	100%	2,100,619,645	Kecamatan Nisam
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	30%	5,000,000	35%	5,000,000	40%	5,000,000	45%	5,000,000	Kecamatan Nisam
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	65%	4,696,000	70%	5,080,800	75%	5,232,500	80%	5,600,000	Kecamatan Nisam
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	35,000,000	25%	45,000,000	30%	45,000,000	35%	50,000,000	Kecamatan Nisam
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	73%	37,000,000	76%	40,000,000	80%	45,000,000	85%	50,000,000	Kecamatan Nisam
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67%	20.00%	18,120,000	25.00%	18,651,000	30.00%	19,200,000	35.00%	19,200,000	Kecamatan Nisam

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1,559,285,669	100%	1,559,285,669	100%	1,613,644,593	100%	1,613,644,593	Kecamatan Banda Baru
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	67%	5,199,100	72%	9,000,000	75%	25,000,000	80%	30,000,000	Kecamatan Banda Baru
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	67%	68%	5,000,000	70%	5,700,000	72%	7,000,000	75%	7,000,000	Kecamatan Banda Baru
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	n/A	5%	55,000,000	4%	55,000,000	2.5%	75,000,000	1%	85,000,000	Kecamatan Banda Baru
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	60%	65%	37,000,000	68%	45,000,000	70%	55,000,000	75%	55,000,000	Kecamatan Banda Baru
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20%	20,000,000	25%	25,000,000	30%	68,000,000	35%	73,000,000	Kecamatan Banda Baru
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,327,806,002	100%	2,304,529,302	100%	2,426,774,820	100%	2,414,907,320	Kecamatan Muara Batu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	65	4,696,000	70	5,080,800	75	5,232,500	80	5,600,000	Kecamatan Muara Batu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	5,000,000	35%	27,000,000	40%	28,500,000	45%	30,000,000	Kecamatan Muara Batu
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	25,000,000	25%	45,000,000	30%	45,000,000	35%	50,000,000	Kecamatan Muara Batu
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	8%	73%	37,000,000	76%	40,000,000	80%	45,000,000	85%	50,000,000	Kecamatan Muara Batu
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16.67 %	20.00%	18,120,000	25.00%	18,651,000	30.00%	19,200,000	35.00%	19,200,000	Kecamatan Muara Batu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2,323,161,790	100%	2,326,935,307	100%	2,439,812,399	100%	2,457,540,682	Kecamatan Sawang
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	70	3,124,000	74	3,124,000	78	3,789,040	83	3,789,040	Kecamatan Sawang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42 %	30%	5,087,500	35%	3,031,875	40%	4,300,000	45%	5,659,800	Kecamatan Sawang
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	20%	38,500,000	25%	38,500,000	30%	45,079,583	35%	48,581,500	Kecamatan Sawang
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	70	35,000,000	75	35,000,000	80	43,350,000	85	46,585,000	Kecamatan Sawang
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	14.30%	30%	42,536,000	30%	42,536,108	40%	51,901,728	50%	51,076,728	Kecamatan Sawang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,783,685,801	100%	2,783,685,801	100%	2,783,685,801	100%	2,783,685,801	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi gangguan/konflik berlatar ideologi yang terjadi	0%	0%	350,523,135	0%	360,523,135	0%	516,523,135	0%	611,523,135	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	2,432,921,183	100%	3,822,103,449	100%	1,860,153,400	100%	1,833,926,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	43%	45%	1,285,890,200	47%	25,428,890,200	48%	1,038,165,429	50%	1,030,544,143	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase potensi gangguan/konflik ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi	0%	0%	103,589,960	0%	213,769,458	0%	224,457,931	0%	360,680,827	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi gangguan/konflik sosial yang terjadi	0%	0%	277,152,313	0%	390,236,893	0%	400,316,422	0%	452,941,812	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	UNSUR KEKHUSUSAN											
9.01	Kekhususan Aceh*****)											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	82%	100%	2,736,278,165	100%	2,753,528,165	100%	2,763,686,795	100%	2,763,686,795	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1,385,821,848	100%	1,322,304,033	100%	1,526,534,436	100%	1,596,187,880	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	998,757,844	100%	998,757,844	100%	1,086,257,844	100%	1,086,257,844	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	5,622,688,100	100%	5,627,990,817	100%	5,707,849,120	100%	5,885,288,100	Dinas Syariat Islam
	Program Syari'at Islam	Angka pelanggaran syariat islam		Kasus	11,526,038,000	Kasus	11,118,141,800	Kasus	12,414,455,980	Kasus	12,737,017,000	Dinas Syariat Islam
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,393,816,722	100%	*	100%	1,393,816,722	100%	1,393,816,722	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	Program Permusyawaratan Ulama	Persentase peran ulama dalam kehidupan bermasyarakat	100%	100%	3,125,130,150	100%	3,138,930,150	100%	3,188,930,150	100%	3,338,930,150	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	1,341,975,016	100%	1,341,975,016	100%	1,440,026,740	100%	1,463,026,740	Sekretariat Baitul Mal
	Program Baitul Mal	Persentase peningkatan ZIS	11,67%	0,79%	25,515,087,481	4,97%	26,783,362,120	5,81%	28,340,030,226	0,62%	28,517,030,226	Sekretariat Baitul Mal

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Kabupaten Aceh Utara menetapkan rencana capaian terhadap indikator makro pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 dengan tren meningkat sebagaimana diuraikan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1
Penetapan dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Aceh Utara 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	-0,55	3,50	3,62	3,75	3,80
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,46	70	71	71,5	72
3	Persentase tingkat kemiskinan	Persen	17,43	17	16	15	14
4	Persentase tingkat pengangguran terbuka	Persen	8,56	7,5	7,1	6,4	6,1
5	Pendapatan Perkapita	Rupiah (Juta)	27,83	28,53	29,25	30,00	30,75
6	Gini Rasio	indeks	0,283	0,255	0,251	0,248	0,245

8.2 Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk Tahun 2023 – 2026. Secara rinci dijelaskan pada Tabel 8.2 dan Tabel 8.3

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Aceh Utara 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2023	2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50.53	55	55	60.2	60.4
2	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Huruf	CC	B	B	B	BB
3	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	70.07	80	85	90	95
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69.46	70	71	72	72
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	50.65	55.70	58.10	59.20	60
7	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	48.61	61	65	71	75
8	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pemilu	Persen	76.74	-	81.5	-	-
9	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.70	14.75	14.78	14.81	14.90
10	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.80	68.85	68.90	68.95	69.00
11	Prevalensi Stunting	Persen	38.8	32	28	24	20
12	Persentase penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per tahun	Persen	9	5	5	5	5
13	Persentase Infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Persen	71.69	72.04	74.02	76.30	79.06
14	Persentase jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap)	Persen	42.09	46	51	56	62
15	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	Persen	51	53	56	60	65
16	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	Persen	69.78	72.03	74.43	75	78
17	Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi atau air limbah	Persen	67.09	70.43	73.95	77	80
18	Persentase rumah layak huni	Persen	87.17	89.92	90.72	91.52	92.32
19	Pertumbuhan PDRB	Persen	-0.55	3.50	3.62	3.75	3.80
20	Pendapatan Perkapita	Rupiah (Juta)	27.83	28.53	29.25	30.00	30.75
21	Gini Rasio	indeks	0.283	0.255	0.251	0.248	0.245
22	Persentase tingkat kemiskinan	Persen	17.43	17	16	15	14
23	Persentase tingkat pengangguran terbuka	Persen	8.56	7.5	7.1	6.4	6.1
24	Tingkat inflasi	Persen	1.97	3	3	3	3
25	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persen	0.15	4.1	4.15	4.24	4.35
26	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	0.51	2.5	2.72	2.8	3
27	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	6.21	5.02	5.2	5.23	5.3
28	Indeks Kualitas lingkungan hidup	Indeks	68.39	70,09	70,59	71,09	71,58
29	Indeks Resiko Bencana	Indeks	175.2	173.8	172.3	171	170

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun			
				2023	2024	2025	2026
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB	-0.55	Persen	3.50	3.62	3.75	3.80
2	Tingkat Inflasi	1.97	Persen	3	3	3	3
3	Pendapatan Perkapita	27.83	Rupiah (Juta)	28.53	29.25	30.00	30.75
4	Gini Rasio	0.283	Indeks	0.255	0.251	0.248	0.245
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	82.57	Persen	83	84	85	86
6	Indeks Pembangunan Manusia	69.46	Indeks	70	71	72	72
7	Angka melek huruf	98.39	Persen	100	100	100	100
8	Angka rata-rata lama sekolah	8.63	Tahun	8.93	9.30	9.65	10.05
9	Angka usia harapan hidup	68.8	Tahun	68.85	68.90	68.95	69.00
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	61.39	Persen	65	68	70	73
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	70.07	Indeks	80	85	90	95
12	Persentase PAD terhadap pendapatan	8.95	Persen	10	10	10	10
13	Opini BPK	WTP	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	36.38	Persen	37.4	37.6	37.8	37.9
15	Produktivitas padi	5.34	Ton/ha	5.43	5.51	5.62	5.75
16	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	8.33	Persen	11	11	11.50	11.80
17	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	11.81	Persen	12.60	13.18	13.38	13.68
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Layanan Urusan Wajib Dasar							
1	Pendidikan						
1.1	Angka partisipasi Kasar						
1.1.1	Angka partisipasi Kasar (APK) SD/MI	107.88	Persen	100	100	100	100
1.1.2	Angka partisipasi Kasar (APK)	102.45	Persen	100	100	100	100
1.2	Angka pendidikan yang ditamatkan						
1.2.1	Angka pendidikan yang ditamatkan SD	86.31	Persen	95	95	95	95
1.2.2	Angka pendidikan yang ditamatkan	57.3	Persen	70	75	80	80
1.3	Angka Partisipasi Murni						
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98.05	Persen	100	100	100	100
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	86.34	Persen	90	90	90	90
1.4	Angka partisipasi sekolah :						
1.4.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99.99	Persen	100	100	100	100
1.4.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	98.38	Persen	100	100	100	100
1.5	Angka Putus Sekolah:						
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.01	Persen	0	0	0	0
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1.62	Persen	0.5	0.5	0.5	0.5
1.6	Angka Kelulusan:						
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	Persen	100	100	100	100
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	Persen	100	100	100	100
1.7	Angka Melanjutkan (AM):						
1.7.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96.97	Persen	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.7.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	84.44	Persen	100	100	100	100
1.8	Fasilitas Pendidikan:						
1.9	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	51.33	Persen	55	55	55	55
1.10	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	0.0871	Persen	0.127	0.127	0.127	0.127
1.11	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0.138	Persen	0.138	0.138	0.138	0.138
1.12	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	5.58	Persen	5.58	5.58	5.58	5.58
2 Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5	Per 1000 KH	3	2	2	2
2.2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	138	Per 100.000	90	80	75	70
2.3	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0.227	1:30.000 Penduduk	0.232	0.232	0.232	0.232
2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	0.159	40/100.000 Penduduk	0.161	0.161	0.161	0.161
2.5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	95	Persen	100	100	100	100
2.6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	Persen	100	100	100	100
2.7	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	35.3	Persen	60	60	60	60
2.8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	Persen	100	100	100	100
2.9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	39.84	Persen	48	48	48	48
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	Persen	100	100	100	100
2.11	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0.0038	Persen	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037
2.12	Cakupan kunjungan bayi	88	Persen	100	100	100	100
2.13	Cakupan puskesmas	118.52	Persen	118.52	118.52	118.52	118.52
2.14	Cakupan puskesmas pembantu	10.09	Persen	10.45	10.45	10.45	10.45
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Pekerjaan Umum:						
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	42.90	Persen	46	51	56	62
3.1.2	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	12.45	Persen	12.97	13.23	13.5	13.77
3.1.3	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	22.19	Persen	21.61	21.42	21.23	21.04
3.1.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	66.98	Persen	74	75.4	78.13	80.86
3.1.5	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	18.68	Persen	18.99	17.76	17.53	17.30

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun			
				2023	2024	2025	2026
3.1.6	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	4.57	Persen	4.33	4.37	4.41	4.45
3.1.7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	51	Persen	53	56	60	65
3.1.8	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	69.78	Persen	72.03	74.43	75	78
3.1.9	Persentase areal kawasan kumuh	0.09	Persen	0.06	0.04	0.02	0
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
4.1	Persentase rumah layak huni	87.17	Persen	89.92	90.72	91.52	92.32
4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0.09	Persen	0.06	0.04	0.02	0
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
5.1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	70	Persen	100	100	100	100
5.2	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	60	Persen	100	100	100	100
5.3	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	72.89	Persen	75	80	85	90
6	Sosial						
6.1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	Persen	100	100	100	100
6.2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100	Persen	100	100	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1	Tenaga Kerja						
1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	61.39	Persen	65	68	70	73
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	Persen	100	100	100	100
2.2	Persentase keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif	2.2	Persen	2.2	6.6	6.6	6.6
3	Pangan						
3.1	Ketersediaan pangan utama	469.70	Rata-rata kg/thn	493.47	493.47	493.47	493.47
4	Pertanahan						
4.1	Persentase tanah PEMDA yang bersertifikat	n/a	Persen	75	78	80	80

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun			
				2023	2024	2025	2026
5	Lingkungan Hidup						
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
5.2	Indeks Kualitas Air	60.00	Indeks	63.36	63.46	63.50	63.56
5.3	Indeks Kualitas Udara	88.51	Indeks	90.95	91.05	91.25	91.25
5.4	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100	Persen	100	100	100	100
5.5	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100	Persen	100	100	100	100
5.6	Persentase jumlah sampah yang tertangani	17.09	Persen	25	28	30	30
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
6.1	Persentase penduduk ber-KTP elektronik	96	Persen	100	100	100	100
6.2	Persentase anak usia 0-17 kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	13.28	Persen	21	22	25	30
6.3	Persentase kepemilikan akte kelahiran	85	Persen	98	100	100	100
6.4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	12.12	Persen	37	38	40	40
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
7.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	2.34	Persen	2.46	2.5	4	4
7.2	Persentase peningkatan desa mandiri	0	Persen	37	38	40	40
7.3	Persentase PKK aktif	100	Persen	100	100	100	100
7.4	Persentase Posyandu aktif	100	Persen	100	100	100	100
7.5	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	42.72	Persen	100	100	100	100
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.04	Persen	1.6	1.4	1.3	1.3
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2.465		2.4	2.4	2.4	2.4
8.3	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	51	Persen	55	60	65	70
8.4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	0	Persen	0	0	0	0
9	Perhubungan						

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun			
				2023	2024	2025	2026
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	879,720	orang	887,120	897,120	899,345	900,560
9.2	Jumlah uji kir angkutan umum	4401	Buku	4900	4900	4900	4900
9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	5	Unit	5	5	5	5
9.4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	51.2	Persen	52.6	55	56	58
9.5	Pemasangan Rambu-rambu	80	Persen	85	90	90	95
10	Komunikasi dan Informatika						
10.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	Persen	100	100	100	100
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
11.1	Persentase koperasi aktif	32.48	Persen	40.35	40.6	40.71	40.98
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	96.40	Persen	97.05	98	98	98
12	Penanaman Modal						
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	53	investor	65	70	72	75
12.2	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	6.83	Persen	7	7	7	7
12.3	Persentase Peningkatan Retribusi Perizinan	-2.71	Persen	0.83	0.83	0.83	0.83
13	Kepemudaan dan Olahraga						
13.1	Jumlah organisasi kepemudaan	36	organisasi	36	36	36	36
13.2	Jumlah wirausaha pemuda	600	orang	600	600	600	600
13.3	Jumlah atlet olahraga berprestasi	50	orang	50	50	50	50
14	Statistik						
14.1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku "PDRB"	Ada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Kebudayaan						
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	festival	3	3	3	3
16	Perpustakaan						
16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0.20					
16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0.30					
16.3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	10314	org	11387	13421	13489	14000
16.4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	15128	buku	16730	16730	16730	16730
	Layanan Urusan Pilihan						
1	Pertanian						

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.1	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	3.11	Persen	5.27	5.37	5.47	5.57
1.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5.34	Ton/ha	5.43	5.51	5.62	5.75
1.3	Produktivitas sektor perkebunan komoditi Kelapa Sawit	11.28	ton/ha	14.38	15.82	17.4	19.15
1.4	Produktivitas sektor perkebunan komoditi Kakao	0.40	ton/ha	0.53	0.58	0.64	0.7
1.5	Produktivitas sektor perkebunan komoditi Kelapa Dalam	0.70	ton/ha	0.9	0.99	1.09	1.2
1.6	Produktivitas sektor perkebunan komoditi Pinang	0.40	ton/ha	0.59	0.65	0.72	0.8
1.7	Produksi Daging Ternak Sapi	8020	Ton	9,071	9,978	10,477	11,000
1.8	Produksi Ayam Pedaging	12,955	Ton	14,519	15,971	16,769	17,608
2 Perdagangan							
2.1	Ekspor Bersih Perdagangan	19,015,754.99	USD				
2.3	Persentase Peningkatan Retribusi Pasar	8.04	Persen	12	12	12	12
3 Perindustrian							
3.1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	100	Persen	100	100	100	100
3 Kelautan dan Perikanan							
3.1	Produksi perikanan	27,597	ton	28,715.31	29,500.81	30,446	313,102
3.2	Konsumsi ikan	43.82	kg/kapita/tahun	47.65	47.91	48.01	48.2
Penunjang Urusan							
1 Perencanaan Pembangunan							
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	Persen	100	100	100	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	Persen	100	100	100	100
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	Persen	100	100	100	100
2 Keuangan							
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
3.1	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	68	Persen	70	80	80	85

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun			
				2023	2024	2025	2026
4 Penelitian dan pengembangan							
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100	Persen	100	100	100	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100	Persen	100	100	100	100
4.3	Penerapan SIDA:						
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	100	Persen	100	100	100	100
5 Pengawasan							
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	76	Persen	100	100	100	100
6 Sekretariat Dewan							
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
7 Kewilayahan							
1 Kecamatan							
1.1	Rata-rata Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	70.07	indeks	90	95	95	95
1.2	Persentase gampong tertinggal	73.36	Persen	41.08	35	32	30
Keistimewaan dan Kekhususan							
1 Pendidikan							
1.1	Jumlah dayah yang memenuhi standarisasi pendidikan dayah (dayah tipe A plus, A, B, C, D)	197	Unit	111	116	121	126
2 Keagamaan							
2.1	Terbentuknya badan kesejahteraan mesjid	n/a	unit	8	8	8	8
2.2	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	100	rasio	100	100	100	100

BAB IX PENUTUP

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023–2026 memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, gambaran umum kondisi daerah, Kinerja keuangan masa lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka pendanaan, permasalahan dan isu strategis, tujuan sasaran , strategi, arah kebijakan dan program prioritas landasan penyusunan, kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 dilaksanakan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

9.2 Pedoman Transisi

RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 merupakan pedoman yang ditujukan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah sampai tersedianya Qanun RPJM Kabupaten Aceh Utara hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 dan juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sebelum ditetapkan Qanun RPJMK hasil Pilkada serentak maka Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Tahun 2026 masih mempedomani RPD Tahun 2023-2026.

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 050.12/ 50 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti point b diktum kesatu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025;
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

Memperhatikan : - Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun RPD" dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun RPD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah

1. memberikan bimbingan, masukan serta arahan pada setiap pelaksanaan kegiatan kepada seluruh anggota tim; dan
2. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

b. Penanggung Jawab

1. bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh anggota tim; dan

2. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

c. Ketua

1. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
2. mengoordinasikan antar instansi/Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

d. Wakil Ketua

1. membantu ketua dalam mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
2. membantu ketua dalam mengoordinasikan antar instansi/Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

e. Sekretaris

1. Mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
2. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. menyusun agenda kerja tim Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
4. melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

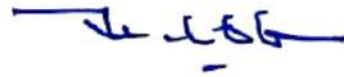
f. Kelompok Kerja

1. mengumpulkan dan mengolah serta menganalisis gambaran data informasi kondisi daerah;
2. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
4. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
5. menyusun dan menganalisis indikator makro; dan
6. menyusun indikator kinerja daerah.

- KETIGA : Tim Penyusun RPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 3 Januari 2022 M
29 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 050.12/ 50 /2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

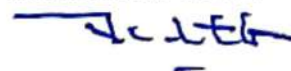
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Aceh Utara Wakil Bupati Aceh Utara Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara
3	Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara
5	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara
Kelompok Kerja		
A. Kelompok Kerja (POKJA I) Infrastruktur dan Wilayah		
	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Aceh Utara
	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Aceh Utara
	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Perencana Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Perencana Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Staf Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Aceh Utara
B. Kelompok Kerja (POKJA II) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
	Ketua	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Aceh Utara
	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Aceh Utara
	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Perencana Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Perencana Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Perencana Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Staf Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Aceh Utara

1	2	3
C. Kelompok Kerja (POKJA III) Perekonomian dan Sumber Daya Alam		
	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Aceh Utara
	Anggota	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Kabid. Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Aceh Utara
	Anggota	Perencana Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Perencana Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Staf Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Aceh Utara
D. Kelompok Kerja (POKJA IV) Data dan Informasi		
	Ketua	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Perencana Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Perencana Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Perencana Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Kasubbag. Penyusunan Program Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Staf Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kabupaten Aceh Utara
	Anggota	Staf Subbag. Penyusunan Program Bappeda Kabupaten Aceh Utara

BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB